



**SUMEDANG
12 FEBRUARI 2026**

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

**“MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH
BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI ERA
TRANSFORMASI DIGITAL”**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS APRIL
TAHUN 2026**



**PROSIDING SEMINAR NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS APRIL
TAHUN 2026**

Organizing Committee

Ketua : Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si
Sekretaris : Lalas Sulastri, S.Sos., M.Si
Bendahara : Dr. Shofwan Hendryawan, M.Pd
Anggota : Dhesti Widya Nurhasanah Ningrum, S.Sos., M.Si
Teddy Marlidy Nurwan, S.Sos., M.Si
Sayyid Rhafiq Rijaludin, S.Sos.
Editor : Eka Listiani, S.Pd
Suci Rahmania Arifien, S.Sos., M.A.P
Tantri Lestari, S.A.P
Reviewer : Dr. Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si
Dadan Setia Nugraha, S.Sos., M.Si
Irma Hermayanty, S.Pd., M.Si

Steering Committee : Muhammad Agreindra Helmiawan, S.Kom., M.T

Layout : Hj. Fepi Febianti, M.I.Kom
Desain Sampul : Slamet Riyadi, S.Sos

Penerbit : Universitas Sebelas April

Alamat Penerbit :
Jalan Angkrek Situ No. 19
Telepon (0261) 202911
Website: www.unsap.ac.id



**PROSIDING SEMINAR NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS APRIL
TAHUN 2026**

**SAMBUTAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS APRIL**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dalam era transformasi digital yang berkembang sangat cepat, tata kelola pemerintahan dituntut untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial, teknologi, dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Perubahan tersebut tidak hanya menghadirkan peluang dalam peningkatan pelayanan publik, tetapi juga memunculkan tantangan baru terkait efektivitas kebijakan, keamanan data, kesenjangan akses digital, hingga dinamika partisipasi masyarakat.

Oleh karena itu, pemerintahan perlu membangun tata kelola yang tidak hanya modern dan berbasis teknologi, tetapi juga tetap berakar pada nilai-nilai lokal yang telah menjadi identitas dan kekuatan sosial masyarakat.

Tata kelola pemerintahan berbasis kearifan lokal menjadi penting karena nilai budaya, norma sosial, dan tradisi masyarakat dapat berperan sebagai landasan moral sekaligus pedoman dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih adil, inklusif, dan diterima oleh masyarakat.

Kearifan lokal juga menjadi modal sosial yang mampu memperkuat legitimasi pemerintah, membangun kepercayaan publik, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pembangunan.

Di sisi lain, transformasi digital harus dimaknai bukan sekadar penggunaan teknologi, melainkan sebagai proses perubahan sistem pemerintahan menuju pelayanan yang lebih transparan, cepat, efisien, dan akuntabel.

Dengan demikian, sinergi antara inovasi digital dan kearifan lokal merupakan strategi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, serta mampu menjawab tantangan global tanpa kehilangan jati diri daerah.

Harapan kami, melalui Seminar Nasional FISIP UNSAP Tahun 2026 ini, dapat menjadi wadah bagi akademisi, peneliti, mahasiswa, dan praktisi pemerintahan untuk bertukar gagasan, hasil riset, serta rekomendasi strategis tentang bagaimana membangun tata kelola pemerintahan yang berbasis nilai lokal namun tetap relevan dengan perkembangan digital saat ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dr. Rika Kusdinar, S.Sos., M.Si
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas April



**PROSIDING SEMINAR NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS APRIL
TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Allhamdulillahirrabil'alamin. Puji syukur di panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas April Tahun 2026 dapat berjalan dengan lancar. Tema seminar nasional ini yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Berbasis Kearifan Lokal di Era Transformasi Digital".

Pada seminar nasional dipersentasikan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berasal dari berbagai instansi yang beragam. Hasil penelitian yang dipersentasikan tersebut kemudian didokumentasikan dalam prosiding ini.

Seminar nasional ini dapat berjalan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Kami ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu terselenggarakannya seminar nasional ini.

Masih banyak kekurangan dalam penyusunan prosiding seminar nasional ini sehingga saran dan kritik yang membangun sangat kami perlukan. Semoga prosiding ini bermanfaat bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

**Sumedang, 13 Februari 2026
Tim Penyuting**



DAFTAR ISI

Falakhunnisa

Transformasi Digital Administrasi Melalui Kepemimpinan Adaptif Untuk Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di KUA Salaman Magelang 1-11

Adhis Tessa, Muhammad Alie Humaedi, Arie Setiabudi

Soesilo, Iwan Gardono Sujatmiko

Deliberative Pattern of the Mataram Granary Groups on the Utilization of Sultane Land to Develop Sustainable Agriculture 12-24

Hawa Rani Sukma, Elly Malihah Setiadi, Wilodati

Modal Sosial sebagai Basis Ketahanan Ekonomi Lokal Pelaku Usaha Industri Batu Bata Merah di Tengah Keterbatasan Dukungan Kelembagaan Desa: Studi Kasus Desa Pengadangan, Lombok Timur 25-30

Ulfah Aristia Tresna Gunawan

Praktik Governance yang Termediatisasi: Analisis Multimodal pada Channel Youtube @BIDANGKEBUDAYAAN milik DISPARBUDPORA Kabupaten Sumedang 31-42

Keisha Shafira Azzahra

Strategi Resiliensi Pariwisata Pesisir Selatan Tulungagung Terhadap Multi-Hazard: Analisis Kerentanan dan Peran Stakeholder 43-53

Rika Kusdinar, Garry Putra Pamungkas, Harlan Fadillah, Lie Diana Putri, Novi Sulastri, Silvi Yulianti, Siti Komariah

Evaluasi Program Tahu Sumedang Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang 54-61

Rifatul Mahfuzah

Implementasi Program Zakat Community Development Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Desa Beting Kabupaten Kepulauan Meranti 62-68

Neng Rahma Nurpadilah Abdurahman

Digitalisasi dan Inovasi Dalam Pelayanan Publik Daerah 69-74

Siti Lutfiah Fauziah, Dinda Dwi Mayrani Irawan, Hani Miftahul Janah, Ikhsan Muhammad Hanif, Radja Rippana Fauzi

Strategi DISPARBUDPORA Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Desentralisasi dan Kolaborasi di Kawasan Jatigede Kabupaten Sumedang 75-80



**PROSIDING SEMINAR NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS APRIL
TAHUN 2026**

Arip Rahman Sudrajat, Nasywa Khairunnisa, Khalisa Afifah Permadya Devi, Vina Feniawati, Nanda Rizki Juanda, Dani Sopian Implementasi Kebijakan Sistem SKP Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Aparatur di BKSDM Kabupaten Sumedang	81-85
Teddy Marliady Nurwan, Aurel Angelia Syifa, Zahra Amalia Putri, Alya Izzati Putri Marsid, Ramlan Fadilah, Imam Nurfiaji Pengaruh Efektivitas Program Aplikasi Si-Pelangi Terhadap Pelaksanaan Program Pada Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang	86-97
M. Hifdzo Dzikrulah, Barokatul Wasliyyah, Dhestya Sabrina G, Hanum Aisyka B, Aldi Maulana Dampak Sosialisasi Kebijakan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Terhadap Pemahaman Pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Sumedang (Studi Kasus di Kecamatan Sumedang Utara)	98-102
Elfira Nuraeni, M Sandi Mulyadi, Khairiyah Artika, Enang Suryana, Widya Kosasih, Iran Abdilah Permana Strategi Komunikasi Publik Kantor Kecamatan Sumedang Selatan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Sampah Berbasis Lingkungan di Kecamatan Sumedang Selatan	103-109
Citra Nur Farida, Ghina Kamelia Passa, Restu Dewangga, Sri Rahayu Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Sumedang Utara Kabupaten Sumedang	110-117
Ahmad Hamdan Fatahudin, Fanisyia Dwi Erianti, Ima Yusup Hidayat, Nida Nindias, Ruruh Rizky Hendianto Tata Kelola Data Kelembagaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang	118-125
Dadan Setia Nugraha, Difla Salsabila, Elena Nurdiana Rahmat, Ikhsan Laksamana, M Syahrindra Oktaviandhi, Nabila Pauziah, Riska Putri Cahyani Implementasi Program Manajemen Agribisnis Tembakau Dalam Meningkatkan Kualitas Bahan Baku di UPT Agribisnis Tembakau Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang	126-132
Ratu Vidyadari Syawaliah Azzahra, Redsyaprillia Digita Putri, Salsabila Khoerunnisa, M Rizki, Ricky Firmansyah Efektivitas Program Magang ke Jepang Sebagai Inovasi Pengembangan Human Capital Local di Kabupaten Sumedang	133-138



**PROSIDING SEMINAR NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS APRIL
TAHUN 2026**

Irma Hermayanty, Ainul Mardiah, Aleyda Humaira, Salsa Nabila, M Bentar Royyas Fadhalah, Taufik Efektivitas Layanan Publik Jaminan Pelayanan Anak Baru Lahir Dengan Empat Dokumen (Jampe Harupat): Upaya Pemenuhan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang	139-143
Keryn Elika Christine, Reza Purnama, Daffa Juni Vayanda, Muhammad Ramdan Firmansyah Manajemen Logistik Kedaruratan Bencana Banjir di BPBD Kabupaten Sumedang	144-149
Nur Hasan, Dini Nadila, Heru Kleitanto, Shinta Dzauharoh, Arini Permatasari, Fitra Nurhakim Inovasi Digitalisasi Dalam Reformasi Birokrasi Daerah: Analisis Implementasi Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi dan Website Sebagai Penguatan Good Governance	150-156
Soni Sultana, Wahyu, Agnia Nurul Huda, Sahrul Gunawan, Nina Fitriana Sutadi Transformasi Pelayanan Publik Berbasis Digitalisasi Melalui E-Government: Strategi Peningkatan Efektivitas, Transparansi, dan Kepuasan Masyarakat di Era Sociert 5.0	157-162

TRANSFORMASI DIGITALISASI ADMINISTRASI MELALUI KEPEMIMPINAN ADAPTIF UNTUK MEWUJUDKAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KUA SALAMAN MAGELANG

Falakhunnisa

Universitas Muhammadiyah Magelang
Email: falakhunnisa131099@gmail.com

ABSTRAK

Transformasi digital di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Salaman telah menunjukkan perubahan signifikan dalam tata kelola administratif dan kualitas layanan publik. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran kepemimpinan adaptif dalam mengarahkan proses digitalisasi, mengatasi resistensi karyawan, dan memastikan integrasi yang lancar dari berbagai aplikasi berbasis sistem informasi. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen untuk memperoleh gambaran komprehensif tentang dinamika perubahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin KUA memainkan peran strategis melalui komunikasi persuasif, bantuan teknis, kebijakan kecil, dan pemberdayaan karyawan. Pendekatan ini mampu mengurangi kesenjangan literasi digital, meminimalkan kecemasan di kalangan karyawan senior, dan mendorong terbentuknya budaya kerja kolaboratif. Selain itu, dukungan kepemimpinan berkontribusi pada munculnya berbagai inovasi lokal, seperti digitalisasi arsip, penggunaan media sosial untuk layanan informasi, dan optimasi aplikasi Brave untuk administrasi pernikahan dan urusan agama. Temuan ini menegaskan bahwa kesuksesan digitalisasi tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga pada kemampuan pemimpin untuk mengelola perubahan organisasi. Oleh karena itu, kepemimpinan adaptif menjadi faktor penentu dalam upaya transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Salaman.

Kata Kunci: Kepemimpinan Adaptif, Transformasi Digital, Layanan Publik

1. PENDAHULUAN

Dalam ranah administrasi publik, E-government telah muncul sebagai komponen vital dari transformasi digital, untuk menghadapi beberapa masalah. Perkembangan E-government bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan transformasi digital lainnya yakni untuk organisasi publik agar memenuhi semua persyaratan dengan mengembangkan layanan digital yang efektif dan dapat diakses oleh khalayak luas. Integrasi teknologi digital ke dalam sektor pemerintahan akan menghasilkan keuntungan yang substansial. (Putri & Anggun, 2024). Dalam lingkungan Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) menempati peran yang sangat vital sebagai ujung tombak berbagai layanan keagamaan. KUA adalah sebuah lembaga atau institusi pemerintah yang lahir pada tanggal 21 Nopember 1946 memiliki tugas, fungsi, dan peran strategis dalam mensosialisasikan dan melaksanakan program-program pemerintah dalam pembangunan di bidang urusan agama Islam. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang berada dibawah naungan Departemen Agama yang mempunyai peran yang sangat penting dalam menjalankan tugas-tugas dari departemen Agama yang berada di daerah. (Mutia Handayani, 2021).

KUA Kecamatan Salaman merupakan salah satu unit layanan publik yang sedang bergerak menuju penerapan administrasi digital secara menyeluruh. Pada tahap sekarang, tata kelola administrasinya dapat dikategorikan sebagai semi-digital, sebab meskipun berbagai layanan telah dijalankan melalui aplikasi berbasis sistem informasi, sejumlah prosedur manual masih dipertahankan untuk memastikan ketelitian serta keabsahan data. Aplikasi nasional seperti SIMKAH Web, PUSAKA, SIMAS, SIHALAL, dan SIWAK telah digunakan dalam proses pelayanan, mulai dari administrasi pernikahan, pendataan masjid, pengurusan sertifikasi halal, hingga pengelolaan aset wakaf. Pemanfaatan sistem tersebut menunjukkan bahwa KUA Salaman telah mengikuti arah kebijakan digitalisasi yang dicanangkan oleh Kementerian Agama.

Meski demikian, pelaksanaan digitalisasi di lapangan tidak terlepas dari berbagai kendala teknis maupun non-teknis. Tantangan paling dominan berasal dari kesiapan dan kapasitas sumber daya manusia, mengingat kemampuan literasi digital pegawai masih beragam. Dari sembilan ASN yang bertugas, sebagian besar merupakan pegawai senior sehingga membutuhkan pendampingan tambahan untuk menyesuaikan diri dengan pola kerja berbasis teknologi. Walaupun belum tersedia pelatihan formal yang difokuskan pada digitalisasi layanan, para pegawai menunjukkan upaya belajar mandiri melalui tutorial daring maupun diskusi internal. Hal ini menggambarkan bahwa proses adaptasi terhadap teknologi baru berjalan secara bertahap dan membutuhkan dukungan berkesinambungan.

Di samping faktor SDM, keterbatasan infrastruktur teknologi turut menghambat optimalisasi layanan digital. Beberapa perangkat komputer yang digunakan masih memiliki spesifikasi rendah sehingga kurang mampu menjalankan aplikasi yang membutuhkan performa tinggi. Selain itu, akses ke server nasional kerap mengalami kelambatan akibat tingginya beban pengguna dari berbagai KUA di seluruh Indonesia. Kondisi ini

mengakibatkan beberapa proses layanan digital berlangsung lebih lambat dari yang diharapkan sehingga pegawai tetap harus mengombinasikan sistem digital dengan langkah manual, misalnya pada tahap verifikasi dokumen fisik dan pengecekan berulang.

Keberhasilan upaya digitalisasi di KUA Salaman juga sangat dipengaruhi oleh peran kepemimpinan yang diterapkan oleh Kepala KUA. Dengan gaya kepemimpinan yang adaptif, terbuka terhadap pembaruan, dan memiliki komitmen untuk mempercepat transformasi digital. Menurut Kepala KUA memberikan bimbingan langsung, melakukan pemantauan rutin terhadap penerapan aplikasi, serta berusaha mengatasi resistensi internal, khususnya dari pegawai senior. Aspek kepemimpinan dan budaya kerja menjadi faktor yang sangat menentukan dalam mendorong proses digitalisasi (Susarianto, 2024). Pendekatan yang adaptif ini berkontribusi pada terbentuknya budaya kerja yang lebih inovatif, proaktif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan, sehingga memperkuat kesiapan organisasi dalam memasuki era kerja digital.

Proses digitalisasi turut memberikan dampak besar terhadap mutu pelayanan publik di KUA. Penggunaan SIMKAH dan aplikasi PUSAKA dalam layanan pernikahan memungkinkan calon pengantin melakukan pendaftaran secara daring, mempercepat proses verifikasi data karena sistem telah terhubung langsung dengan database Dukcapil, serta mempermudah penerbitan kartu nikah digital. Selain itu, penerapan pembayaran PNPB secara nontunai meningkatkan transparansi dan meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan. Peningkatan kualitas layanan juga terlihat pada sektor lainnya, seperti pengelolaan data masjid melalui SIMAS, pendataan wakaf dengan SIWAK, serta proses sertifikasi halal melalui SIHALAL. Pemanfaatan seluruh aplikasi tersebut berkontribusi pada peningkatan kecepatan layanan, ketepatan data, keterbukaan prosedur, dan akuntabilitas aparatur melalui jejak digital. Meski demikian, sejumlah kendala seperti kesulitan penggunaan aplikasi oleh masyarakat dan gangguan server menunjukkan bahwa proses digitalisasi masih memerlukan pengembangan lebih lanjut.

Menariknya, KUA Salaman tidak hanya mengandalkan kebijakan digitalisasi yang ditetapkan pemerintah pusat, tetapi juga berinisiatif menciptakan inovasi lokal demi meningkatkan kualitas layanan. Beberapa terobosan yang dikembangkan antara lain digitalisasi arsip buku nikah lama, publikasi pengumuman kehendak nikah melalui media sosial, pemanfaatan Google Form untuk layanan “Duta Kita” hasil kerja sama dengan Disdukcapil, optimalisasi kanal media sosial sebagai sarana informasi publik, serta penerapan kartu nikah digital dan sertifikat Bimwin. Inovasi-inovasi tersebut memperlihatkan kapasitas adaptasi yang tinggi dan komitmen KUA Salaman dalam menghadirkan layanan yang lebih modern, praktis, dan mudah dijangkau masyarakat.

Mempertimbangkan berbagai dinamika yang telah diuraikan, penelitian ini dipandang penting untuk dilakukan guna memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai proses digitalisasi yang berlangsung di KUA Kecamatan Salaman. Kajian yang menyeluruh terhadap aspek administrasi, kompetensi sumber daya manusia, gaya kepemimpinan, serta inovasi yang tumbuh di tingkat unit layanan diharapkan dapat memberikan ilustrasi nyata tentang sejauh mana KUA siap menjalankan transformasi digital.

2. METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan rancangan studi kasus guna memperoleh gambaran yang mendalam mengenai bagaimana administrasi dan proses digitalisasi layanan publik dijalankan di KUA Kecamatan Salaman. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada fokus penelitian yang menekankan pemahaman terhadap proses kerja, dinamika organisasi, serta pengalaman para pegawai yang terlibat dalam penerapan layanan digital pada konteks kelembagaan tertentu.

Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan penelusuran dokumen. Wawancara dilakukan dengan Kepala KUA serta sejumlah ASN yang berperan langsung dalam penyelenggaraan administrasi dan pengoperasian berbagai aplikasi digital, dengan tujuan menggali pandangan, pengalaman, serta bentuk penyesuaian mereka terhadap penggunaan sistem berbasis teknologi informasi. Observasi dilakukan untuk menelaah alur pelayanan, terutama pada layanan pernikahan dan layanan keagamaan yang terintegrasi dengan aplikasi digital, sehingga peneliti dapat melihat praktik kerja aktual serta hubungan antara mekanisme digital dan prosedur manual. Sementara itu, studi dokumentasi mencakup peninjauan dokumen internal, laporan pelayanan, dan data yang dihasilkan melalui aplikasi layanan KUA.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kondisi Digitalisasi Administrasi di KUA Kecamatan Salaman

Proses administrasi di KUA Kecamatan Salaman telah mengalami perubahan besar dengan beralih dari sistem manual ke model yang memanfaatkan teknologi digital secara bertahap. Seiring perkembangan teknologi kontemporer, administrasi perkawinan yang sebelumnya bersifat konvensional kini telah mengalami digitalisasi melalui implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH (Nasrullah et al., 2025)). Selain SIMKAH, KUA juga memakai aplikasi PUSAKA untuk layanan nikah, serta SIHALAL, SIMAS, dan SIWAK untuk layanan keagamaan lain. Adopsi sistem tersebut memfasilitasi pendekatan data yang lebih terintegrasi, mempercepat verifikasi dokumen, dan menyederhanakan pengiriman laporan secara elektronik ke pusat. Contohnya, pasangan calon pengantin kini dapat mendaftarkan pernikahan secara online melalui portal SIMKAH Web atau PUSAKA mulai dari pembuatan akun, pengisian formulir hingga unggah berkas persyaratan. Setelah itu, data yang dimasukkan akan tersambung langsung dengan basis data Dukcapil, sehingga proses pengecekan identitas berlangsung lebih cepat dan akurat tanpa perlu membawa dokumen fisik berkali-kali.

Secara umum, proses digitalisasi di KUA Salaman menunjukkan adanya periode adaptasi di mana prosedur berbasis teknologi dan praktik manual tetap berjalan secara bersamaan. Mengintegrasikan teknologi digital ke dalam layanan publik dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan dan mempercepat proses penyampaian layanan (Maryanah et al., 2024), namun sejumlah tahapan masih membutuhkan keterlibatan staf secara langsung pada langkah-langkah penting tertentu. Kondisi ini menuntut pegawai untuk mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, meningkatkan keterampilan digital, serta membutuhkan kepemimpinan yang adaptif dan mendukung agar transformasi dapat berlangsung secara efektif dan berkesinambungan. Dengan demikian, pengalaman di KUA Salaman menggambarkan bahwa perubahan menuju layanan publik digital tidak hanya terkait penerapan perangkat teknologi, tetapi juga merupakan perubahan budaya kerja dan kepemimpinan yang adaptif untuk pembaruan praktik administrasi yang berjalan setiap hari.

Selain layanan pernikahan, KUA Salaman juga mengimplementasikan aplikasi seperti SIHALAL, SIMAS, dan SIWAK dalam rangka menyelenggarakan layanan keagamaan lain secara digital. Aplikasi SIHALAL dimanfaatkan untuk mendaftarkan dan memantau proses sertifikasi halal, sehingga mempercepat dan memperjelas akses masyarakat serta pelaku usaha dalam memperoleh sertifikat halal, sedangkan SIWAK dipakai untuk mencatat dan mengelola sertifikasi tanah wakaf agar data aset keagamaan lebih terjamin akurasi. Menurut (Herliansyah et al., 2025) SIMAS bertujuan untuk mempermudah pendataan, pengelolaan masjid, serta analisis kebijakan di bidang kemasjidan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, SIMAS memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif antara pemerintah dan pengurus masjid dalam pengelolaan kegiatan, keuangan, dan asset masjid.

Desain alur kerja berbasis digital di KUA Salaman memastikan bahwa kelima aplikasi ini terhubung ke sistem pusat, sehingga data yang dikumpulkan tidak hanya tersimpan di level kecamatan tetapi juga dapat diakses serta dicek oleh institusi pusat. Contohnya, setiap pendaftaran melalui SIMKAH langsung tercatat dalam basis data nasional, sehingga memudahkan integrasi laporan bulanan dan evaluasi kinerja secara sistematis. Meski demikian, masih terdapat beberapa langkah yang memerlukan keterlibatan manual, seperti pengecekan dokumen fisik dan pencatatan arsip lama. Secara garis besar, menurut (Nasrullah et al., 2025) digitalisasi layanan ini telah memberikan kontribusi positif signifikan terhadap aspek kecepatan, akurasi, dan efisiensi penyelenggaraan administrasi.

Kesiapan infrastruktur teknologi di KUA Kecamatan Salaman merupakan aspek krusial untuk menunjang proses digitalisasi administrasi. Dari segi perangkat keras, banyak komputer dan peralatan pendukung yang masih menggunakan spesifikasi lama, sehingga performa sistem kadang kurang maksimal ketika menjalankan aplikasi berat atau memproses volume data yang besar. Sementara itu, koneksi internet di kantor relatif cukup untuk aktivitas harian, tetapi sering mengalami keterbatasan saat banyak pegawai atau masyarakat mencoba mengakses sistem secara bersamaan terutama pada periode sibuk seperti saat layanan pernikahan atau bimbingan nikah. Kondisi ini menjadi hambatan dalam penggunaan aplikasi yang memerlukan koneksi *real time* ke server pusat.

b. Kepemimpinan Adaptif dalam Mendorong Transformasi Digital

Kepemimpinan adaptif dan fleksibel adalah pendekatan kepemimpinan yang menekankan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan organisasi (Efrita Norman & Enah Pahlawati, 2024). Kepala KUA Kecamatan Salaman menunjukkan karakter kepemimpinan yang sangat adaptif dalam menghadapi tantangan digitalisasi di lingkungan kerjanya. Sikapnya yang terbuka terhadap inovasi teknologi terlihat dari kesiapannya mengadopsi dan mengimplementasikan berbagai aplikasi layanan

yang berbasis sistem informasi dari Kementerian Agama, seperti SIMKAH Web, PUSAKA, SIMAS, SIHALAL, dan SIWAK, meskipun dihadapkan pada keterbatasan kompetensi SDM dan perangkat teknologi. Beliau tidak melihat digitalisasi semata sebagai tugas administratif, tetapi sebagai suatu kebutuhan strategis organisasi untuk meningkatkan mutu layanan publik. Kepemimpinan yang adaptif ini juga mendorong staf untuk berani mencoba teknologi baru dan mengembangkan kebiasaan kerja yang mendukung transformasi digital, meskipun proses itu berjalan secara bertahap

Selain itu, Kepala KUA juga cepat dan solutif dalam menanggapi berbagai kendala teknis yang muncul selama proses digitalisasi. Saat terjadi gangguan sistem, akses server pusat tertunda, atau pegawai mengalami kesulitan mengoperasikan aplikasi, beliau aktif turun tangan melalui pembinaan teknis, pendampingan, serta pengaturan sementara alur kerja. Upaya ini dilakukan untuk memastikan layanan terhadap masyarakat tetap berjalan tanpa terputus walau menghadapi hambatan teknologi. Dalam praktiknya, Kepala KUA juga mendorong penggunaan alternatif sementara, seperti komunikasi lewat grup WhatsApp, pemanfaatan Google Form untuk input data, serta pencatatan manual yang kemudian disinkronisasikan kembali ke sistem digital saat jaringan sudah stabil.

Ciri kepemimpinan adaptif Kepala KUA Kecamatan Salaman juga tampak dari kemampuannya berpikir dan bertindak secara fleksibel dalam proses pengambilan keputusan, selaras dengan pendapat (Bahdin Nur Tanjung, 2025) salah satu karakter utama pemimpin adaptif ialah kemampuannya menghadapi resistensi terhadap perubahan. Beliau tidak terpaku pada aturan yang kaku, tetapi mampu menyesuaikan kebijakan internal dengan kondisi realitas di lapangan mempertimbangkan kemampuan pegawai, ketersediaan fasilitas teknologi, serta kesiapan masyarakat dalam menghadapi layanan digital. Pendekatan yang fleksibel ini membuat pelaksanaan digitalisasi dapat dilakukan secara realistis tanpa mengorbankan kualitas pelayanan. Dengan kemampuan menyeimbangkan tuntutan kebijakan dari pusat dengan kebutuhan lokal, Kepala KUA berhasil menciptakan lingkungan kerja yang lebih responsif, adaptif, dan berfokus pada solusi dalam menghadapi tantangan perubahan digital.

Strategi kepemimpinan yang diterapkan oleh Kepala KUA Kecamatan Salaman dalam mengawal proses digitalisasi ditandai oleh pendekatan yang berfokus pada pendampingan, pengawasan, dan pemberdayaan pegawai. Pendampingan langsung serta pembinaan staf menjadi langkah utama agar proses digitalisasi dapat dipahami dan dijalankan dengan baik oleh seluruh aparatur, terutama bagi pegawai yang masih memiliki keterbatasan dalam literasi digital. Kepala KUA secara aktif memberikan arahan teknis, bimbingan praktik penggunaan aplikasi, serta pembinaan secara informal dalam aktivitas kerja harian, sehingga pegawai tidak hanya memahami fungsi aplikasi seperti SIMKAH Web, PUSAKA, SIMAS, SIHALAL, dan SIWAK secara teori saja, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks pelayanan publik. Pendekatan ini disusun secara bertahap dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan usia, kemampuan, serta kesiapan masing-masing pegawai, sehingga proses adaptasi berjalan lebih inklusif dan mengurangi resistensi terhadap perubahan.

Selanjutnya, Kepala KUA Kecamatan Salaman juga membuka peluang bagi pegawai untuk berinovasi sebagai bagian dari strategi kepemimpinan dalam menangani perubahan digital. Staf didorong mengembangkan ide-ide kreatif yang tetap sesuai dengan regulasi, seperti mengubah arsip buku nikah lama menjadi bentuk digital, memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi kehendak nikah, membuat grup WhatsApp untuk calon pengantin, menggunakan Google Form untuk layanan “Duta Kita” yang terhubung dengan Disdukcapil, serta mengoptimalkan penggunaan kartu nikah digital dan sertifikat Bimwin. Pemberian ruang bagi inovasi ini tidak hanya memperlancar proses layanan, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama di kalangan pegawai terhadap keberhasilan transformasi digital. Dengan menerapkan gaya kepemimpinan yang kolaboratif dan adaptif, Kepala KUA Kecamatan Salaman mampu mengelola perubahan digital secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Kepemimpinan Kepala KUA Kecamatan Salaman memiliki peranan penting dalam mengelola dan meredakan penolakan dari pegawai terhadap penerapan sistem digital dalam administrasi layanan. Hambatan tersebut terutama berasal dari pegawai senior yang kurang terbiasa dengan teknologi digital serta merasa cemas terhadap perubahan cara kerja yang sebelumnya berbasis manual. Selain itu, Kepala KUA juga secara konsisten menanamkan pemahaman tentang manfaat digitalisasi kepada seluruh staf. Penekanan terhadap manfaat sistem

tidak hanya disampaikan melalui arahan formal, tetapi juga melalui praktik penggunaan aplikasi secara langsung dalam kegiatan rutin misalnya melalui SIMKAH Web, PUSAKA, SIMAS, SIHALAL, dan SIWAK. Dengan cara ini, pegawai dapat merasakan secara langsung bahwa sistem digital mampu mempercepat pelayanan, mengurangi kesalahan administratif, meningkatkan keterbukaan proses, dan memperkuat akuntabilitas kerja. Pemahaman ini secara bertahap membantu mengurangi kekhawatiran tentang teknologi dan mendorong perubahan sikap dari awalnya menolak menjadi lebih menerima.

c. Sumber Daya Manusia dan Budaya Kerja Digital di KUA Salaman

Sumber daya manusia di KUA Kecamatan Salaman menunjukkan beragam tingkat kemampuan literasi digital, yang dipengaruhi oleh faktor seperti usia, pengalaman kerja, dan frekuensi interaksi dengan teknologi informasi. Keterlibatan ASN dalam meningkatkan literasi digital merupakan upaya untuk menerapkan digitalisasi pelayanan publik dengan tujuan agar mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. (Astrialita & Azizaton Nafi'ah, 2025). Dari sembilan orang ASN yang bertugas di KUA Salaman, terdapat perbedaan kemampuan digital yang cukup jelas, beberapa staf sudah terbiasa menggunakan aplikasi sistem informasi dalam tugas administratif, sementara yang lain masih berada pada tingkat literasi menengah dan membutuhkan dukungan pendampingan. Perbedaan tersebut menciptakan dinamika tersendiri dalam proses digitalisasi layanan, terutama saat seluruh aktivitas administrasi harus terintegrasi dengan aplikasi nasional seperti SIMKAH Web, PUSAKA, SIMAS, SIHALAL, dan SIWAK

Usia dan pengalaman kerja menjadi faktor yang cukup berpengaruh terhadap kemampuan pegawai di KUA Kecamatan Salaman dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan digitalisasi. Mayoritas staf, yaitu sekitar 60 %, berasal dari kelompok usia yang lebih senior, sehingga banyak di antara mereka memiliki kebiasaan bekerja secara manual yang sudah berlangsung lama dan memerlukan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri dengan sistem digital. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan digital yang masih cukup lebar. Tidak semua ASN memiliki akses yang sama terhadap teknologi informasi dan komunikasi (Rahim, 2024). Di satu sisi, pengalaman kerja yang panjang memberikan keunggulan dalam memahami aspek substantif pelayanan keagamaan, tetapi di sisi lain berpotensi memunculkan kecenderungan resistensi terhadap perubahan teknologi. Situasi ini membutuhkan strategi adaptif agar pengalaman kerja para pegawai senior dapat dimanfaatkan secara optimal selaras dengan kebutuhan digitalisasi.

Dalam konteks tersebut, pegawai yang lebih muda mengambil peran sebagai agen perubahan dalam mendorong terbentuknya budaya kerja digital di KUA Kecamatan Salaman. Staf muda yang cenderung memiliki literasi digital lebih tinggi secara informal menjadi sumber dukungan bagi rekan kerja lain melalui pendampingan langsung, berbagi pengetahuan teknis, atau membantu menyelesaikan kendala dalam penggunaan aplikasi. Peran ini bukan hanya membantu mempercepat proses adaptasi terhadap teknologi, tetapi juga membangun budaya kerja yang kolaboratif dan saling mendukung di antara pegawai. Kehadiran pegawai muda sebagai pendorong perubahan, ditopang oleh kepemimpinan yang mendukung dari Kepala KUA, menjadi elemen penting dalam menciptakan budaya digital yang inklusif dan berkelanjutan di KUA tersebut.

Proses adaptasi terhadap digitalisasi tidak terlepas dari tantangan psikologis yang dialami oleh sejumlah pegawai, khususnya mereka yang berasal dari kelompok usia yang lebih senior. Tantangan ini mencakup perasaan cemas akan kemungkinan membuat kesalahan, kekhawatiran tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi, serta rasa tidak nyaman akibat pergeseran dari pola kerja manual ke digital. Kondisi semacam ini kerap berdampak pada menurunnya kepercayaan diri pegawai ketika dihadapkan pada penggunaan aplikasi digital secara mandiri. Selaras dengan pendapat (Marantika et al., 2024) perubahan mendadak dalam cara kerja dan tuntutan untuk menguasai teknologi baru dapat menyebabkan stres dan kecemasan di kalangan PNS. Meskipun demikian, dengan dukungan yang bersifat suportif dari pimpinan, bantuan dari rekan kerja, dan latihan yang terus-menerus, hambatan psikologis ini secara bertahap dapat diatasi, sehingga proses pembelajaran teknologi di KUA Kecamatan Salaman tetap berlangsung dan terus meningkat seiring waktu.

Pegawai merasakan bahwa organisasi bergerak ke arah modernisasi, dengan fokus pada efisiensi dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi (Malviyola El Barqa et al., 2025). Perubahan budaya kerja administratif di KUA Kecamatan Salaman tampak dari pergeseran bertahap dari metode manual menuju model kerja yang berbasis aplikasi digital. Dahulu, mayoritas kegiatan administrasi dilakukan secara tradisional melalui pencatatan fisik dan pengarsipan dokumen kertas. Namun, seiring penerapan aplikasi nasional seperti SIMKAH Web, PUSAKA, SIMAS, SIHALAL, dan SIWAK, cara kerja pegawai kini semakin berfokus pada

penginputan data, verifikasi digital, dan pengelolaan arsip elektronik. Walaupun dalam praktiknya masih ada beberapa tahap yang memerlukan verifikasi fisik, sistem digital telah menjadi fondasi utama dalam pengelolaan administrasi, sehingga menuntut perubahan kebiasaan kerja dan peningkatan ketelitian dalam setiap proses layanan.

Selaras dengan budaya adaptif organisasi, di mana karyawan fokus pada perubahan kebutuhan pelanggan atau pemangku kepentingan lainnya, dan mendukung inisiatif untuk mengikuti perubahan tersebut (Mahmud et al., 2022). Dengan perubahan tersebut, muncul pula peningkatan disiplin administrasi digital di lingkungan KUA Kecamatan Salaman. Setiap layanan kini menuntut ketepatan input data, kelengkapan dokumen digital, serta konsistensi pelaporan yang terintegrasi dengan sistem pusat. Pegawai menjadi lebih menyadari pentingnya akurasi dan keteraturan administrasi karena setiap aktivitas tercatat dalam sistem dan dapat dipantau melalui jejak digital serta evaluasi berbasis e-kinerja, yang pada gilirannya mendorong tanggung jawab individu dan meminimalkan kesalahan dalam pencatatan

Selain itu, budaya kerja yang baru juga ditandai dengan meningkatnya kerja sama antarpegawai. Kompleksitas sistem digital dan saling keterkaitan antar layanan mendorong pegawai untuk saling berkoordinasi dan berbagi tugas. Mereka yang memiliki kemampuan digital lebih baik sering membantu rekan lainnya, sedangkan pegawai senior memberikan kontribusi melalui pengalaman dan pemahaman substansi pelayanan. Pola kerja kolaboratif ini diperkuat melalui penggunaan media komunikasi seperti grup WhatsApp internal, diskusi antarpegawai, dan kerja tim dalam menangani kendala teknis maupun layanan kepada masyarakat. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya menghadirkan perubahan alat kerja, tetapi juga membentuk budaya administrasi yang lebih disiplin, terintegrasi, dan berbasis kolaborasi di KUA Kecamatan Salaman.

d. Dampak Transformasi Digital terhadap Kualitas Pelayanan Publik

Transformasi digital yang berlangsung di KUA Kecamatan Salaman telah memberikan dampak nyata dalam mempercepat dan meningkatkan efisiensi layanan publik. Salah satu perubahan paling jelas terlihat pada berkurangnya waktu tunggu masyarakat, terutama calon pengguna layanan seperti calon pengantin, yang kini dapat mendaftarkan pernikahan secara mandiri melalui SIMKAH Web atau aplikasi PUSAKA. Sebelumnya, calon pengantin harus datang langsung sejak awal untuk mengurus pendaftaran, namun kini mereka bisa melakukan pendaftaran online termasuk pembuatan akun, pengisian formulir, unggah dokumen, dan penentuan jadwal akad sehingga kunjungan fisik menjadi lebih sedikit dan waktu kunjungan menjadi jauh lebih efisien. Perubahan ini bukan hanya meningkatkan kenyamanan masyarakat, tetapi juga mengurangi beban kerja staf yang sebelumnya harus menangani antrean panjang dan dokumen secara manual.

Selain memangkas waktu layanan, digitalisasi juga memperkenalkan otomatisasi pada proses input dan verifikasi data, yang langsung berdampak pada efisiensi internal KUA. Integrasi sistem digital dengan basis data nasional seperti Dukcapil memungkinkan identifikasi calon pengantin diverifikasi dengan cepat dan akurat, meminimalkan kesalahan input, duplikasi data, serta kebutuhan verifikasi manual yang memakan waktu. Pengarsipan dan pelaporan pun menjadi lebih sederhana karena seluruh data tersimpan dalam bentuk elektronik dan mudah diakses untuk kebutuhan monitoring, evaluasi, maupun penyusunan laporan rutin. Proses pembayaran PNPB juga semakin efisien melalui metode non-tunai seperti kode billing, QRIS, atau transfer, yang mempercepat prosedur administratif sekaligus menekan risiko kesalahan atau keterlambatan transaksi.

Dengan gabungan pengurangan waktu layanan dan otomatisasi verifikasi data, transformasi digital di KUA Kecamatan Salaman telah secara signifikan mengangkat produktivitas pegawai dan kualitas layanan publik. Layanan menjadi lebih responsif, akurat, dan mudah dipertanggungjawabkan, sementara masyarakat merasakan kemudahan, keterbukaan, dan kepastian dalam setiap langkah administratif. Walaupun masih terdapat tantangan teknis seperti gangguan server atau keterbatasan literasi digital sebagian pegawai, secara umum implementasi sistem digital telah membawa perubahan mendalam dalam percepatan dan efisiensi layanan publik di KUA tersebut.

Transformasi digital yang diterapkan di KUA Kecamatan Salaman turut membawa pengaruh besar terhadap peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam pelayanan publik. Salah satu perubahan yang mudah diamati adalah semakin jelasnya informasi terkait biaya layanan karena seluruh transaksi kini tercatat

secara otomatis dalam sistem. Mekanisme pembayaran, khususnya untuk PNBP seperti layanan nikah di luar kantor, dilakukan melalui kode billing atau metode pembayaran digital seperti QRIS, transfer bank, dan sarana nontunai lainnya. Dengan adanya sistem ini, masyarakat dapat mengetahui besaran biaya secara pasti dan terdokumentasi, sehingga peluang terjadinya pungutan tidak resmi dapat diminimalkan. Kondisi tersebut berperan penting dalam membangun rasa percaya masyarakat terhadap profesionalisme KUA sebagai lembaga pelayanan publik.

Selain itu, pemanfaatan aplikasi digital menghasilkan rekam jejak elektronik (digital trace) yang mencatat seluruh aktivitas pegawai dalam menjalankan tugas administrasi. Setiap proses mulai dari entri data, pemeriksaan dokumen, hingga pengarsipan tercatat secara terstruktur sehingga memudahkan pengawasan internal dan memungkinkan identifikasi kesalahan secara cepat. Jejak digital tersebut bukan hanya alat kontrol, tetapi juga menjadi sarana akuntabilitas karena menegaskan tanggung jawab individu atas pekerjaan yang dilakukan, yang pada akhirnya memperkuat budaya kerja yang lebih disiplin dan berintegritas.

Lebih jauh lagi, penerapan evaluasi kinerja berbasis sistem (e-Kinerja) memainkan peran strategis dalam meningkatkan akuntabilitas pegawai KUA Kecamatan Salaman. Melalui platform ini, pencapaian kerja setiap pegawai dapat dipantau secara rutin baik dari sisi jumlah layanan yang ditangani maupun kualitas pelaksanaannya. Data kinerja tersebut memungkinkan pimpinan memberikan umpan balik yang lebih tepat sasaran, merancang langkah pembinaan, serta mendorong peningkatan mutu pelayanan secara berkelanjutan. Dengan berjalannya sistem pembayaran yang transparan, dokumentasi aktivitas melalui jejak digital, dan evaluasi kinerja terukur, transformasi digital tidak hanya mempercepat alur layanan tetapi juga memperkuat budaya transparansi dan akuntabilitas dalam lingkungan kerja KUA Kecamatan Salaman.

Penerapan layanan digital di KUA Kecamatan Salaman memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan ketepatan dan keamanan data administrasi. Melalui pemanfaatan berbagai aplikasi seperti SIMKAH Web, PUSAKA, SIMAS, SIHALAL, dan SIWAK, potensi kesalahan pencatatan yang biasanya muncul dalam proses manual dapat ditekan. Pengisian data secara elektronik memungkinkan proses pengecekan yang lebih teliti dan cepat, sehingga kekeliruan seperti duplikasi informasi, salah tulis identitas, atau ketidaksesuaian dokumen dapat diminimalisasi. Dengan cara ini, seluruh informasi layanan terutama yang berhubungan dengan pencatatan nikah, layanan sertifikasi halal, maupun pendataan aset wakaf tersimpan dengan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tidak hanya itu, keterhubungan sistem digital dengan database nasional seperti Dukcapil turut memperkuat aspek keamanan dan konsistensi data. Penyimpanan berbasis server terpusat melindungi dokumen dari risiko kehilangan, kerusakan fisik, maupun perubahan yang tidak sah. Pegawai juga dapat melakukan validasi data secara *real time*, sehingga informasi yang diberikan kepada masyarakat benar-benar sesuai dengan data kependudukan resmi. Pencatatan aktivitas dalam sistem membantu memastikan proses administrasi lebih transparan dan mudah dilacak apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Digitalisasi arsip juga menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan catatan administrasi di KUA Salaman. Berbagai dokumen lama, termasuk buku nikah, secara bertahap dipindai atau dimasukkan ke dalam spreadsheet serta sistem digital lainnya. Upaya ini mempermudah proses pencarian, pengorganisasian, dan pelaporan dokumen tanpa harus bergantung pada arsip fisik. Selain meningkatkan efisiensi kerja, digitalisasi ini juga membantu menjaga dokumen penting agar tetap aman dan dapat diakses ketika diperlukan. Dengan keseluruhan proses tersebut, transformasi digital di KUA Salaman terbukti mampu meningkatkan mutu, perlindungan, dan keandalan layanan publik.

Penerapan layanan digital di KUA Kecamatan Salaman terbukti berpengaruh cukup besar terhadap peningkatan respons masyarakat serta kepuasan mereka dalam mengakses layanan publik. Banyak warga memberikan tanggapan positif mengenai kemudahan yang mereka rasakan, khususnya saat menggunakan layanan pendaftaran nikah melalui SIMKAH Web atau PUSAKA, maupun pengajuan sertifikasi halal lewat SIHALAL. Proses pengisian formulir, pengunggahan berkas, hingga pemilihan jadwal dapat dilakukan secara mandiri tanpa harus mendatangi kantor dan menunggu panjang, sehingga lebih efisien dari segi waktu maupun tenaga. Kemudahan tersebut juga membuat alur administrasi terasa lebih pasti dan transparan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap KUA semakin meningkat dan lembaga ini dinilai semakin adaptif dan profesional dalam memberikan pelayanan.

e. Inovasi Lokal Digitalisasi Pelayanan di KUA Salaman

KUA Kecamatan Salaman telah mengembangkan beragam inovasi lokal dalam proses digitalisasi administrasi dan pelayanan, yang menjadi pelengkap dari penggunaan aplikasi nasional. Salah satu inovasi yang menonjol adalah digitalisasi arsip buku nikah lama yang sebelumnya hanya tersimpan dalam bentuk fisik. Melalui proses ini, data penting dipindahkan ke dalam format spreadsheet atau media digital lainnya sehingga pengelolaan arsip menjadi lebih terstruktur, pencarian dokumen berlangsung lebih cepat, dan risiko kerusakan maupun kehilangan arsip fisik dapat ditekan secara optimal. Upaya digitalisasi ini tidak hanya mempermudah alur kerja internal pegawai, tetapi juga memudahkan masyarakat ketika membutuhkan informasi atau dokumen legal, sehingga memperkuat aspek ketepatan data, keamanan informasi, dan keterbukaan administrasi pernikahan.

Di samping itu, KUA Salaman juga memanfaatkan media sosial sebagai sarana publikasi pengumuman kehendak nikah, menggantikan metode tradisional seperti menempelkan pengumuman di kantor atau tempat ibadah. Pendekatan digital ini membuat informasi dapat disebarluaskan lebih cepat dan menjangkau audiens yang lebih luas. Calon pengantin maupun masyarakat umum dapat mengakses pengumuman secara online serta berinteraksi apabila membutuhkan konfirmasi atau informasi tambahan. Pemanfaatan media sosial ini menunjukkan bahwa KUA Salaman tidak hanya menjalankan arahan dari pusat, tetapi juga menyesuaikan inovasi berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat, agar administrasi lebih transparan, efisien, dan mudah dijangkau.

KUA Kecamatan Salaman juga menerapkan inovasi berbasis kolaborasi digital untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat, terutama calon pengantin. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah pembentukan grup WhatsApp khusus calon pengantin. Grup ini berfungsi sebagai sarana komunikasi langsung antara pegawai dan masyarakat, di mana informasi terkait jadwal bimbingan pernikahan (Bimwin), kelengkapan dokumen, serta tahapan administrasi dapat disampaikan secara cepat dan real-time. Keberadaan grup WhatsApp ini tidak hanya mempermudah penyebaran informasi, tetapi juga memungkinkan masyarakat berpartisipasi lebih aktif mereka dapat bertanya, meminta penjelasan, atau berkonsultasi tanpa perlu datang langsung ke kantor.

Selain itu, KUA Salaman menggunakan Google Form untuk layanan “Duta Kita”, yaitu fasilitas pengurusan administrasi pascapernikahan seperti penerbitan KK dan KTP yang terhubung dengan Disdukcapil. Melalui formulir daring ini, pengisian data dapat dilakukan secara mudah dan akurat, sehingga mempersingkat proses input, mengurangi kesalahan administrasi, dan mempercepat koordinasi dengan instansi terkait. Kedua inovasi ini memperlihatkan kemampuan KUA Salaman menggabungkan teknologi digital dengan pendekatan kolaboratif, sehingga menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, responsif, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam hal publikasi dan evaluasi internal, KUA Kecamatan Salaman juga melakukan penguatan inovasi untuk mendukung transformasi digital layanan publik. Optimalisasi media sosial menjadi strategi utama untuk menyampaikan berbagai informasi, seperti pelaksanaan bimbingan pernikahan, prosedur pendaftaran nikah, layanan sertifikasi halal, hingga agenda keagamaan. Dengan penyebaran informasi melalui platform digital, masyarakat dapat mengakses informasi dengan lebih cepat, mudah, dan tanpa harus mendatangi kantor. Media sosial juga berperan sebagai kanal komunikasi interaktif, memungkinkan masyarakat memberikan masukan, bertanya, atau mencari klarifikasi secara langsung kepada petugas KUA.

Di sisi internal, KUA Salaman menerapkan sistem evaluasi kinerja berbasis e-Kinerja untuk memastikan kualitas pelayanan terus meningkat. Sistem ini memungkinkan pemantauan capaian kerja ASN secara objektif, baik dari sisi ketepatan penggunaan aplikasi digital, validitas input data, maupun penyelesaian layanan kepada masyarakat. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam pembinaan pegawai, penyusunan rekomendasi pengembangan kompetensi, serta perencanaan peningkatan kualitas layanan. Integrasi publikasi digital dan evaluasi kinerja berbasis sistem menunjukkan bahwa transformasi digital di KUA Salaman tidak hanya fokus pada pengelolaan administrasi, tetapi juga pada penguatan transparansi, akuntabilitas, dan budaya kerja profesional yang berkelanjutan.

f. Tantangan dan Peluang Keberlanjutan Transformasi Digital

Keberlanjutan proses digitalisasi di KUA Kecamatan Salaman masih harus berhadapan dengan sejumlah hambatan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Tantangan internal terutama muncul dari perbedaan tingkat kemampuan digital antarpegawai. Sebagian pegawai muda telah memiliki keterampilan teknologi yang baik dan mampu menjadi penggerak utama perubahan, namun pegawai yang lebih senior masih berada pada tingkat literasi digital menengah dan membutuhkan pendampingan berkelanjutan untuk memahami prosedur kerja berbasis aplikasi. Kesenjangan kompetensi ini dapat memperlambat proses adaptasi sistem digital, terlebih ketika terjadi pembaruan fitur atau kendala teknis yang membutuhkan respons cepat.

Di sisi eksternal, ketergantungan terhadap aplikasi pusat menjadi faktor penting yang turut memengaruhi kelancaran layanan. Berbagai platform nasional seperti SIMKAH, PUSAKA, SIMAS, SIHALAL, dan SIWAK bergantung pada server pusat, sehingga ketika terjadi gangguan jaringan, trafik tinggi, atau server overload, proses pelayanan dapat terhambat. Kondisi tersebut dapat memunculkan antrean manual, mengurangi efektivitas pelayanan, dan berpotensi menurunkan kepuasan masyarakat. Ketergantungan ini memerlukan upaya mitigasi seperti penjadwalan penggunaan aplikasi, penyesuaian layanan ketika server bermasalah, serta penyusunan SOP cadangan untuk menjaga kontinuitas operasional.

Tantangan lainnya berkaitan dengan kesiapan masyarakat sebagai pengguna layanan digital. Tidak semua warga mampu mengoperasikan aplikasi, mengunggah dokumen, atau memahami langkah-langkah registrasi daring, sehingga membutuhkan bantuan langsung dari pegawai. Variasi tingkat literasi digital masyarakat ini menuntut KUA untuk menerapkan pendekatan yang lebih fleksibel, misalnya menyediakan panduan penggunaan aplikasi, memberikan edukasi digital sederhana, atau membuka layanan konsultasi melalui WhatsApp dan media sosial. Dengan pengelolaan tantangan internal maupun eksternal secara tepat, transformasi digital dapat terus berjalan secara konsisten dan tetap mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di KUA Salaman.

Transformasi digital yang tengah berlangsung tidak hanya menghadirkan hambatan, tetapi juga membuka berbagai peluang penguatan yang dapat mendorong peningkatan mutu layanan. Salah satu peluang strategis berada pada aspek pengembangan sumber daya manusia. Dengan kepemimpinan Kepala KUA yang mendukung budaya belajar dan adaptasi digital, pegawai memiliki kesempatan untuk terus meningkatkan kemampuannya melalui pelatihan, pendampingan, dan pembelajaran mandiri. Pegawai muda yang telah menguasai teknologi informasi dapat berfungsi sebagai mentor bagi rekan yang membutuhkan bantuan, sehingga tercipta proses transfer pengetahuan yang berkelanjutan dan efektif. Penguatan kapasitas SDM ini tidak hanya meningkatkan kompetensi personal, tetapi juga menumbuhkan budaya kerja digital yang solid dan kolaboratif.

Peluang berikutnya terletak pada penyederhanaan proses digital. Berbagai alur pelayanan yang sebelumnya panjang dan melibatkan banyak tahapan manual kini dapat dipersingkat melalui integrasi sistem aplikasi digital seperti SIMKAH Web, PUSAKA, SIMAS, SIHALAL, dan SIWAK. Layanan pendaftaran nikah, sertifikasi halal, dan pendataan wakaf, misalnya, dapat dilakukan secara daring dalam tahapan yang lebih sederhana, mengurangi tingkat kesalahan, dan mempercepat penyelesaian layanan. Penyederhanaan ini memberikan keuntungan ganda: pegawai tidak lagi terbebani proses administratif yang repetitif, dan masyarakat memperoleh pengalaman layanan yang lebih cepat dan nyaman.

Selain itu, peningkatan infrastruktur teknologi juga menjadi peluang penting dalam mendukung transformasi digital. Penyediaan perangkat komputer yang memadai, jaringan internet yang stabil, serta peningkatan akses terhadap server nasional merupakan elemen kunci agar layanan digital berjalan optimal. Dengan infrastruktur yang baik, potensi gangguan teknis dapat dikurangi, proses verifikasi dan input data dapat berjalan lebih cepat, dan pegawai dapat memberikan layanan yang lebih efisien. Sinergi antara penguatan SDM, penyederhanaan proses, dan peningkatan infrastruktur membentuk dasar yang kuat bagi keberlanjutan transformasi digital di KUA Kecamatan Salaman, sekaligus memastikan pelayanan publik yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

4. KESIMPULAN

Transformasi digital di KUA Kecamatan Salaman menunjukkan bahwa kepemimpinan adaptif menjadi faktor utama yang mampu menjawab permasalahan kinerja administrasi, efektivitas layanan, serta kesiapan organisasi dalam menghadapi perubahan teknologi. Kepala KUA berperan penting dalam mengarahkan,

menuntun, dan mendorong pegawai untuk beradaptasi secara bertahap dengan sistem digital seperti SIMKAH Web, PUSAKA, SIHALAL, SIMAS, dan SIWAK. Pendekatan kepemimpinan yang terbuka, komunikatif, dan solutif terbukti efektif mengatasi hambatan awal digitalisasi, khususnya yang berkaitan dengan sistem manual yang tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan pencatatan.

Hasil pembahasan juga menegaskan bahwa kepemimpinan adaptif berperan besar dalam mengurangi resistensi pegawai, terutama di kalangan pegawai senior yang memiliki keterbatasan literasi digital. Kepala KUA secara konsisten menerapkan strategi persuasif, pendampingan langsung, dan pemberian ruang inovasi, sehingga kesenjangan kemampuan digital dapat dijumpai. Langkah-langkah tersebut tidak hanya meningkatkan kompetensi pegawai, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang lebih kolaboratif, transparan, dan disiplin. Hal ini mengonfirmasi bahwa persoalan internal berupa ketimpangan keterampilan digital, kecemasan psikologis, dan kebiasaan kerja manual dapat diatasi melalui kepemimpinan yang responsif terhadap kebutuhan individu dan dinamika organisasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan transformasi digital di KUA Salaman bukan semata-mata hasil dari implementasi teknologi, melainkan buah dari kepemimpinan adaptif yang mampu menyelaraskan tuntutan sistem digital dengan kapasitas pegawai dan kondisi masyarakat. Kepemimpinan adaptif terbukti berperan dalam menjaga kelancaran layanan ketika terjadi gangguan server, mendukung inovasi lokal seperti digitalisasi arsip dan penggunaan media sosial, serta memastikan akuntabilitas pelayanan melalui e-Kinerja. Dengan demikian, kepemimpinan adaptif menjadi fondasi utama yang mengonfirmasi penyelesaian masalah pada bagian hasil dan pembahasan, sekaligus menjadi kunci keberlanjutan transformasi digital yang efektif, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan publik.

REFERENCES

- astrialita, P., & Azizaton Nafi'ah, B. (2025). Tingkat Literasi Digital ASN terhadap Aplikasi Kepegawaian di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Administrasi Publik Dan Pemerintahan*, 4(1 Se-Artikel), 6–11. <https://doi.org/10.55850/Simbol.V4i1.175>
- Bahdin Nur Tanjung. (2025). Kepemimpinan Adaptif dalam Menghadapi Transformasi Digital: Kajian Konseptual Terhadap Kinerja Organisasi Modern. *Jurnal Manajemen*, 1(1), 18–25.
- Efrita Norman, & Enah Pahlawati. (2024). Pengembangan Kepemimpinan yang Adaptif dan Fleksibel: Meningkatkan Ketahanan Organisasi di Era Transformasi Digital. *Mes Management Journal*, 3(1 Se-Articles), 298 – 305. <https://doi.org/10.56709/Mesman.V3i1.314>
- Herliansyah, M. R., Rita Rahmawati, & Muhammad Luthfie. (2025). Implementasi Sistem Informasi Masjid (Simas) Kemenag sebagai Instrumen Penguatan Good Governance dalam Pelayanan Masyarakat di Kabupaten Bogor. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 10(1 Se-Articles), 182–198. <https://doi.org/10.25077/Jakp.10.1.182-198.2025>
- Mahmud, M. F., Soekirman, A., & Tesniwati, R. (2022). Penguatan Kinerja Melalui Transformasi Digital, Budaya Adaptif, Transfer Pengetahuan dan Pola Kerja pada Bea Cukai Indonesia. *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 6(2 Se-Articles), 323–342. <https://doi.org/10.31092/Jpbc.V6i2.1776>
- Malviyola El Barqa, Agnes Sandrawati, & Ari Anggarani Winadi Prasetyoning Tyas. (2025). Transformasi Budaya Organisasi dalam Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi di Instansi Pemerintah. *Management Studies And Entrepreneurship Journal (Msej)*, 6(4 Se-Articles), 6553–6559. <https://doi.org/10.37385/Msej.V6i4.8137>
- Marantika, J., Adnan, M. F., & Khaidir, A. (2024). Tantangan Psikologis PNS Terhadap Transformasi Birokrasi Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3 Se-Articles), 13283–13294. <https://doi.org/10.31004/Innovative.V4i3.12011>
- Maryanah, S., Zahra, M., & Rahmawati, A. (2024). Transformasi Administrasi Publik di Era Digital. *Karimah Tauhid*, 3(7 Se-Articles), 8206–8212. <https://doi.org/10.30997/Karimahtauhid.V3i7.14213>
- Mutia Handayani. (2021). Peran Kantor Urusan Agama dalam Pencatatan Perkawinan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam El-Qist*, 4(2), 6.
- Nasrullah, N., Lisdiana, L., & Novaria, E. (2025). Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah

- (Simkah) dalam Administrasi Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu Dua Kota Palembang. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(2 SE-), 729–736. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i2.5100>
- Putri, S., & Anggun. (2024). Transformasi Birokrasi Digital dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Penerapan E-Government. *Jurnal Sosial, Ekonomi, Dan Humaniora (Sosiera)*, 292(2), 82–94. <http://dx.doi.org/10.21776/jki.2024.03.1.23>.
- Rahim, R. (2024). Strategi Pengembangan Kompetensi ASN di Era Transformasi Digital. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 14(02 SE-Editorial). <https://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/438>
- Susariato, B. (2024). Analisis Peran Kepemimpinan Digital Dalam Transformasi Digital Di Sektor Publik. *Jutisi: Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 13(2), 1530. <https://doi.org/10.35889/jutisi.v13i2.2227>

DELIBERATIVE PATTERN OF THE MATARAMAN GRANARY GROUPS ON THE UTILIZATION OF SULTANATE LAND TO DEVELOP SUSTAINABLE AGRICULTURE

Adhis Tessa^{*1}, Muhammad Alie Humaedi², Arie Setiabudi Soesilo³, Iwan Gardono Sujatmiko⁴

¹ Program Studi Doktorat bidang Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, Mahasiswa Degree

By Research (DBR) Badan Riset dan Inovasi Nasional

² Pusat Riset Arkeologi Lingkungan, Maritim dan Budaya Berkelanjutan, Badan Riset dan Inovasi Nasional

^{3 4} Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia

Email*: adhis.tessa31@ui.ac.id

ABSTRACT

Salah satu ancaman nyata bagi kehidupan manusia adalah kelaparan atau kekurangan pangan. Peningkatan signifikan dalam populasi manusia, reorganisasi cepat ruang pertanian, perubahan etos dan sistem mata pencaharian, serta kurangnya penguasaan teknologi pertanian merupakan penyebab ancaman ini. Sebagai destinasi wisata dan kota pendidikan, Yogyakarta juga menghadapi ancaman ini. Faktanya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutnya sebagai salah satu provinsi dengan kerentanan pangan tinggi. Pembangunan pertanian terpadu dan berkelanjutan, serta ketersediaan lahan pertanian, merupakan solusi jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk tujuan ini, program Lumbung Mataraman dirumuskan. Program ini mencakup langkah-langkah transformatif dan progresif oleh Kesultanan Yogyakarta untuk mendukung Lumbung Mataraman. Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan kekuasaan deliberatif yang dibentuk oleh sistem monarki tradisional dalam memberikan akses ke lahan kesultanan untuk mendukung program Lumbung Mataraman dalam pertanian berkelanjutan. Dengan menggunakan metode kualitatif dari perspektif etnografi pasca-kritis di beberapa daerah pedesaan di Bantul, studi ini menjelaskan munculnya hubungan kekuasaan deliberatif. Istana Yogyakarta, sebagai pemilik tanah-tanah kesultanan, telah memberikan akses seluas-luasnya kepada lembaga sosial Lumbung Mataraman untuk memanfaatkan tanah-tanah tersebut dalam pengembangan jenis-jenis pertanian dan unit-unit usaha pendukung. Inisiatif-inisiatif anggota, yang disempurnakan menjadi inisiatif kelompok musyawarah, telah memberikan perspektif baru mengenai hubungan kekuasaan di dalam sistem monarki yang ada.

Kata Kunci: Tanah Kesultanan, hubungan kekuasaan yang deliberatif, sistem monarki, Lumbung Mataraman, Pertanian Berkelanjutan, dan Etnografi Pasca-Kritik.

1. PENDAHULUAN

Dua isu global yang berkaitan dengan kesejahteraan penduduk dunia adalah ancaman kelaparan dan kemiskinan yang meluas (Harttgen & Seiler, 2023). Kedua isu tersebut saling terkait. Kemiskinan yang merajalela menimbulkan ancaman kelaparan bagi penduduk. Sebaliknya, kelaparan yang parah menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas rendah, terbatas, dan rentan (Rukundo & Oniang'o, 2024). Pertumbuhan manusia terhambat (stunting) merupakan gejala awal ancaman kelaparan (Abusaada & Elshater, 2024). Demikian pula, fenomena kebiasaan makan yang tidak teratur dan tidak sehat di kalangan keluarga pedesaan menyoroti isu penting terkait ketahanan pangan. Untuk mencegah kedua kejadian tersebut, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengimplementasikan program Lumbung Mataraman (Danugroho et al., 2025b).

Kata Lumbung merujuk ke sebuah istilah lama, yang berarti "gudang, sebuah tempat persediaan, sebuah wadah besar sejumlah makanan" (Rachmat et al., 2016; Rinardi et al., 2017; Saraswati & Pratiwi, 2024). Makanan-makanan yang disimpan pada umumnya adalah makanan pokok, seperti beras, jagung, kelapa, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Sementara kata "Mataraman" merujuk pada suatu entitas kerajaan yang pernah berkuasa di masa sebelumnya, dan berubah menjadi Kasultanan Ngayogyakarta (MacRae & Reuter, 2020). Kata "Mataraman" berarti merujuk pada semua wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram di masa lalu (Riawanti, 2017) Jadi, Lumbung Mataraman secara bahasa berarti "Gudang makanan dari Kerajaan Mataram". Secara terminologi, Lumbung Mataraman diartikan sebagai program keamanan dan ketahanan pangan yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang didasarkan pada sistem pertanian berkelanjutan dan pertanian terpadu yang didukung oleh jenis-jenis usaha pertanian pelengkapannya. Selain menjaga penduduk dari kelaparan, program ini mampu meningkatkan kesejahteraan komunitas, khususnya para anggota dari lembaga-lembaga tersebut (Y. S. Susilo, 2010a; Widiyanto, 2019). Terminologi ini memiliki kemiripan dengan "Lumbung Desa", sebuah istilah yang diperkenalkan selama era Orde Baru untuk mendukung swasembada beras pada tahun 1980-an dan 1990-an (Anisya & Waluyati, 2019; Hartatik et al., 2023).

Kehadiran program Lumbung Mataraman di Yogyakarta adalah signifikan. Pada tahun 2025, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mencatat setidaknya ada 53 Lumbung Mataraman yang dikembangkan di wilayah pedesaan (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2025). Dari jumlah tersebut, Kabupaten Bantul teridentifikasi sebagai wilayah yang memiliki kelompok dan aktivitas Lumbung Mataraman relatif besar dibandingkan kabupaten lainnya (23 unit). Salah satunya adalah Lumbung Matarama Timbul Asih. Di sisi

lain, wilayah Bantul memiliki tanah kesultanan yang relatif besar dibandingkan wilayah lain. Keberadaannya memiliki korelasi yang kuat dengan proses pemanfaatan tanah-tanah kesultanan untuk tujuan pertanian berkelanjutan sebagaimana yang dikembangkan program Lumbung Mataraman ini.

Dalam beberapa dekade terakhir, penurunan lahan pertanian berbanding lurus dengan penurunan etos kerja di sektor pertanian, yang juga terjadi di daerah pedesaan Yogyakarta (Harini et al., 2012; Ritohardoyo, 2016). Banyak anak muda, sebagai pewaris tradisi pertanian keluarga, lebih memilih bekerja di sektor non-pertanian. Hal ini menunjukkan adanya ancaman ketahanan pangan berkelanjutan terletak pada dua aspek utama, yaitu: (i) pengurangan lahan pertanian; dan (ii) rendahnya minat penduduk, khususnya kaum muda, dalam mengembangkan mata pencaharian pertanian (Pandangwati et al., 2024; White & Wijaya, 2024). Tentu ada banyak alasan atau faktor lain yang terkait dengan ancaman terhadap ketahanan pangan ini, tetapi dua aspek utama ini adalah faktor penentu yang paling jelas di masyarakat pedesaan.

Kekurangan lahan pertanian disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses dan mengendalikan kepemilikan lahan (Farooq et al., 2022; Ngadi et al., 2023). Kemiskinan adalah alasan utama mengapa masyarakat tidak mampu membeli dan menyediakan lahan tersebut. Terutama di daerah-daerah di mana harga tanah sangat tinggi karena modernisasi yang didorong oleh pendidikan, pariwisata, keterjangkauan perumahan, dan industri. Mereka biasanya berakhir bekerja sebagai buruh atau pekerja di lahan milik penduduk desa yang kaya. Sementara itu, penduduk desa sering memilih untuk menjual tanah mereka kepada pengembang perumahan atau pabrik industri, dan mengubah lahan pertanian menjadi kos-kosan atau rumah sewa (Tohir et al., 2022; Zhang et al., 2023b). Tingkat kehilangan lahan pertanian di Yogyakarta terus meningkat dari tahun ke tahun (B. Susilo, 2021).

Di wilayah Bantul, kekurangan akses lahan pertanian setidaknya dapat terkurangi dengan keberadaan tanah-tanah kesultanan. Wilayah ini menjadi tempat keberadaan tanah kesultanan dalam jumlah cukup besar. Kesultanan Yogyakarta, sebagai entitas kekuasaan memiliki kewenangan atas tanah kesultanan (*sultan ground*) dan tanah kesultanan dalam bentuk tanah-tanah kas desa. Akses terhadap tanah ini pada umumnya digunakan untuk tujuan pertanian (Prasada & Rosa, 2018; Rika et al., 2016). Tanah milik sultan dan tanah kesultanan itu sendiri mencakup area seluas 57.000 hektar (Antara, 2024) Jumlah ini tentu sangat besar, sehingga dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengamankan lahan pertanian dan menciptakan ketahanan pangan di Yogyakarta. Dalam proses pemanfaatan tanah kesultanan, masyarakat dapat mengajukan secara individual dan kolektif untuk jenis-jenis pertanian yang akan dikembangkan kepada Paniterokismo. Perangkat kesultanan ini bertugas mengakomodasi kepentingan masyarakat yang meminta penggunaan lahan di tanah milik kesultanan.

Di dalamnya ada pola dan mekanisme deliberatif, di mana warga diberikan hak berpendapat dan mengusulkan inisiatif-inisiatif terkait jenis-jenis pertanian beserta unit usaha yang akan dikembangkan dalam proses pemanfaatan itu. Mekanisme deliberatif komunitas ditengah relasi kuasa sistem monarki tradisional kesultanan Yogyakarta ini tentu menjadi unik. Di satu sisi, ia menciptakan keterbukaan dengan membuka ruang-ruang negosiasi dalam ranah demokrasi deliberatif yang memungkinkan setiap orang memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Namun, di sisi lain, mekanisme ini dapat menyebabkan terjadinya penurunan eksistensi kraton Yogyakarta di hadapan warganya. Dilema permasalahan ini dapat saja terjadi saat pemberian akses pemanfaatan tanah-tanah kesultanan bagi kelompok Lumbung Mataraman dilakukan untuk pengembangan pertanian berkelanjutan.

Tulisan ini berupaya menjelaskan paradoks ini, dan membawanya pada suatu proses dan mekanisme dalam membangun ruang-ruang negosiasi dan sistem demokrasi deliberatif pada pengambilan keputusan terkait pembangunan pertanian berkelanjutan di wilayah Yogyakarta.

2. METODE

Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi postkritis (Conder, 2024; Humaedi, 2015, 2016, 2020; Noblit & Anders, 2024). Pendekatan ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari metode etnografi yang kaya akan deskripsi (Spradley, 2016). Etnografi digunakan dengan alasan bahwa penelitian ini berfokus pada aspek kehidupan sehari-hari masyarakat. Pendekatan ini kaya akan perspektif, nilai, dan makna perilaku, baik secara individu maupun kolektif. Etnografi deskriptif hanya merupakan upaya untuk menggambarkan pemahaman dengan makna yang ada dari sudut pandang tertentu, tanpa dihadapkan dengan perspektif lain (dari aktor eksternal, pemerintah, dan lain-lain). Inilah kelemahan etnografi deskriptif (Faro et al., 2024). Oleh karena itu, untuk mengatasi kelemahan tersebut, saya berusaha mengadaptasi teori etnografi pasca-kritis yang dikembangkan oleh M. Alie Humaedi dalam penelitian budaya dan antropologinya (Humaedi, 2015, 2016, 2020). Dalam bidang sosiologi, pendekatan etnografi post-kritis adalah pendekatan etnografi yang berupaya menyatukan dan menegosiasikan aspek sosial-budaya masyarakat dengan aspek formal pembangunan yang dibawa oleh pihak lain (pemerintah, kesultanan). Singkatnya, pendekatan etnografi post-kritis berupaya mengungkap makna setiap sudut pandang

dan perilaku kelompok sosial masyarakat yang diteliti, dan mengangkatnya sebagai bagian integral dari kebijakan dan program pembangunan (Humaedi et.all, 2025).

Fokus perhatian dalam pengumpulan data terkait pemanfaatan tanah-tanah kesultanan oleh kelompok Lumbung Mataraman di Bantul. Penggalan data dilakukan dengan wawancara mendalam, pengamatan langsung dan diskusi focus terbatas (FGD) terhadap masalah-masalah utama terkait kelompok Lumbung Mataraman dan pemanfaatan tanah-tanah Kesultanan. Adapun informan di komunitas pedesaan terdiri dari 20 orang, dan obyek amatan sebanyak satu kelembagaan Lumbung Mataraman di wilayah Bantul. Kabupaten Bantul dipilih berdasarkan: (i) luas tanah kesultanan yang besar; (ii) keberhasilan program Lumbung Mataraman yang dikembangkan berdasarkan pemanfaatan tanah kesultanan; (iii) tingkat keberhasilan dalam pemberdayaan kelompok perempuan dan pemuda di bidang pertanian; dan (iv) penurunan ancaman kelaparan dan krisis pangan setelah pelaksanaan program Lumbung Mataraman.

Pendekatan etnografi post-kritis dapat dilakukan secara teknis melalui langkah-langkah penelitian terperinci seperti yang diuraikan oleh Humaedi (2020), dimulai dari upaya untuk mengumpulkan berbagai informasi, mempelajari berbagai fenomena sumber daya, mengekstrak data, memahami melalui analisis dan interpretasi, dan diakhiri dengan implementasi bantuan tindakan inovatif berupa model, peraturan (kebijakan) dan penegasan penguatan program lumbung Mataraman secara nasional dan global yang mampu mendorong proses kolaborasi emansipatoris antar pihak. Proses ini memungkinkan adanya kedampakan hasil penelitian bagi kebijakan, program dan strategi Pembangunan pertanian berkelanjutan yang didasarkan pada pemanfaatan tanah-tanah kesultanan oleh kelompok Lumbung Mataraman.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mengenal Mekanisme Deliberatif dalam Praktik Lumbung Mataraman

Akses pemanfaatan tanah kesultanan di Yogyakarta, khususnya oleh kelembagaan sosial Lumbung Mataraman cukup unik. Di dalam proses itu bukan didasarkan pada instruksi atau ketetapan yang diatur oleh pihak kesultanan, tetapi pilihan terhadap pengembangan pertanian terpadunya didasarkan pada inisiatif kelompok Lumbung Mataraman masing-masing. Mereka pun kemudian mengajukan inisiatif itu kepada pihak kesultanan, dengan cara menyampaikan pilihannya kepada Kalurahan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan Paniterakismo. Semua inisiatif tersebut sepenuhnya akan disetujui, tanpa ada penolakan dari pihak pemegang atau pemilik aset kesultanan tersebut. Proses ini menunjukkan adanya mekanisme deliberatif ditengah relasi kuasa yang didasarkan pada sistem monarki yang bersifat tradisional dan kharismatik. Mekanisme deliberatif sepertinya seharusnya tidak terjadi pada kekuasaan yang bersifat monarki. Namun, mekanisme deliberatif pada pilihan pemanfaatan tanah-tanah kesultanan benar-benar terjadi dalam lingkaran kekuasaan kraton Yogyakarta.

Penggunaan landasan kekuasaan sultan yang mendukung Lumbung Mataraman menunjukkan pola baru dalam teori hubungan kekuasaan. Pola ini merupakan potret hubungan kekuasaan deliberatif. Dalam menginterpretasikan diksi ini tidak hanya berarti satu kosakata yang berkaitan dengan deliberatif, tetapi juga tiga kata yang membentuk satu frasa yang berkaitan dengan hubungan kekuasaan deliberatif. Ini berarti bahwa kata deliberatif menjadi "pola baru" dari eksistensi hubungan kekuasaan yang terdiri dari berbagai pola yang telah berkembang sebelumnya. Pola patron-klien adalah pola utama yang berkembang dalam hubungan kekuasaan, terutama dalam masyarakat tradisional dan konvensional yang berpegang teguh pada nilai-nilai sosial lama (Guerrero-Sierra et al., 2024; Rajab et al., 2025; Setiawan, 2024a). Pola patron-klien adalah hubungan kekuasaan yang terbentuk berdasarkan kepatuhan absolut tanpa negosiasi apa pun. Pola ini terbentuk atas dasar bahwa pihak-pihak tertentu memiliki salah satu dari empat legitimasi yang dikemukakan oleh Weber (Akdeniz, 2020; Du, 2022; Kökerer, 2024; Lottholz & Lemay-Hébert, 2016; Setiawan, 2024b), misalnya: legitimasi tradisional (adat istiadat), legitimasi spiritual (agama); legitimasi politik; dan legitimasi ekonomi.

Deliberasi didefinisikan oleh Habermas sebagai hubungan antara aktor yang berkuasa, yang disebut sebagai aktor pemilik kekuasaan, dan penantang, yang disebut sebagai aktor penerima kekuasaan, dalam kerangka interpretatif untuk tujuan menegosiasikan kepentingan para aktor. Ruang negosiasi ini disebut ruang relasi kekuasaan deliberatif (Habermas, 1982; Ingram, 2011; Kellner, 2000). Dalam ruang ini, kepentingan pemilik kekuasaan dan penerima kekuasaan saling memainkan keterampilan sosial mereka dalam menegosiasikan kepentingan masing-masing, sehingga menghasilkan pemahaman bersama. Tujuan utama ruang relasi kekuasaan deliberatif adalah sebagai arena untuk menarik akses ke sumber daya yang dimiliki oleh aktor pemilik kekuasaan. Deliberasi dalam komunikasi dan interaksi sosial antara aktor yang berkuasa dan klien merupakan pola baru yang telah berkembang dalam konteks Lumbung Mataraman di daerah pedesaan yang memiliki tanah kesultanan. Kenyataan ini tentu merupakan contoh menarik dari "titik tengah antara kepentingan dan pertimbangan tradisional dan rasional dalam relasi kekuasaan yang dibangun dalam masyarakat". Hubungan kekuasaan deliberatif akan sangat terlihat dalam hubungan kekuasaan yang dibangun

antara rakyat Yogyakarta dan kerajaan, terutama dalam hal tata kelola dan pemanfaatan tanah kesultanan untuk pertanian. Dengan demikian, tanah kesultanan tidak hanya dilihat sebagai "milik sultan", tetapi juga sebagai arena negosiasi, diskusi, dan pertarungan antara aktor-aktor yang ingin mendapatkan akses pemanfaatan tanah untuk sistem mata pencaharian mereka, khususnya di bidang pertanian.

Kebaruan yang berkaitan dengan teori relasi kekuasaan deliberatif dapat dikembangkan secara komprehensif, terutama ketika ruang negosiasi untuk relasi kekuasaan terlihat jelas dalam institusi dan organisasi sosial Lumbung Mataraman. Ruang ini mampu menempatkan saluran komunikasi antara kedua pihak, di mana masyarakat dapat menyuarakan keinginan mereka dalam pemanfaatan lahan kesultanan di satu sisi, dan di sisi lain kesultanan dapat menentukan atau merumuskan hal-hal baru sesuai keinginan warganya.

2. Lumbung Mataraman dalam Membangun Pertanian Berkelanjutan

Keberadaan lumbung Mataraman di Yogyakarta sangat signifikan. Pada tahun 2025, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dinas Pertanian mencatat setidaknya 450 Lumbung Mataraman dan kelompok tani yang dibangun di seluruh wilayah pedesaan Yogyakarta (Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta, 2025). Dari jumlah tersebut, Kabupaten Bantul diidentifikasi sebagai daerah dengan jumlah lumbung Mataraman yang relatif besar (15 unit) dan ditambah dengan kelompok-kelompok tani dan kelompok wanita tani. Tingkat aktivitas produksi dan distribusi pertaniannya pun cukup tinggi. Jumlah Lumbung Mataraman di Bantul relatif lebih besar dibandingkan kabupaten lain. Di sisi lain, wilayah ini juga merupakan daerah dengan sebaran dan luas lahan kesultanan yang lebih besar, terutama lahan kesultanan, dibandingkan kabupaten lain. Keberadaannya memiliki korelasi yang kuat dalam pemanfaatan lahan kesultanan untuk tujuan pengembangan pertanian berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah Lumbung Mataraman Timbul Asih. Kelompok Lumbung Mataraman ini merupakan salah satu dari banyak lumbung Mataraman model di Kabupaten Bantul.

Tabel 1. Data Percontohan Lumbung Mataraman di Kabupaten Bantul Tahun 2020–2025

No	Nama KWT	Alamat	Ketua	Produk olahan
1	KWT Rahayu	Jurug, Bangunharjo, Sewon, Bantul	Sumarni	Tempe olahan, lumpia, bakpia, berbagai macam keripik, berbagai macam jajanan pasar.
2	KWT Wigati	Muneng, Tirtohargo, Kretek, Bantul	Susi Dwi Lestari	Bawang Merah Goreng, Piring Lombok, Piring Brambang Bawang Merah Goreng, Piring Lombok, Piring Brambang
3	KWT Musim Panas rejeki	Muntuk, Muntuk, Dlingo, Bantul	Rubinem	Thiwul aneka rasa, wedhang uwuh, aneka keripik
4	KWT Karya Boga	Dukuh, Sabdodadi, Bantul, Bantul	Tustiati	Camilan instan jahe dan singkong
5	KWT Saka Lestari	Kalangan, Bangunjiwo, Kasihan, Bantul	Masinem	Telur asin, kacang tanah, bawang bombai, madu, kacang hijau
6	KWT Srikandi	Mangiran, Trimurti, Srandakan, Bantul	Rudiyantini	Madu mongso, berbagai macam keripik
7	KWT Mugi Rahayu	Ngunan-unan, Srigading, Sanden, Bantul	Mardinem	Adrem, berbagai macam keripik, bawang merah goreng
8	KWT Suka Maju	Palihan, Sidomulyo, Bambanglipuro	Tasminah	Berbagai olahan pisang, dodol pisang, tepung pisang, keripik pisang, dan potongan pisang.
9	KWT Sido Makmur	Somokaton, Sitimulyo, Piyungan, Bantul	Erna Ristanti	Lidah buaya dawet, berbagai camilan
10	KWT Nusa Indah	Bongsren, Gilangharjo, Pandak, Bantul	Wiwik Kurniati	Pita ketan, lempur, berbagai macam keripik
11	KWT Shafa Marwa	Wonokromo I, Wonokromo, Pleret, Bantul	Wiwik Rahmani	Berbagai macam keripik
12	KWT Kenanga 08	Tegal Kenongo, Tirtonegoro, Kasihan, Bantul	L. Genduk Priyani	Emping melinjo aneka rasa, aneka peyek, minuman monja, permen kayu putih
13	KWT Srikandi	Tangkil, Srihardono, Pundong	Rokhawati	Peyek gembus, peyek kedelai, madu mongso

14	KWT Melati	Bodon, Jagalan, Banguntapan, Bantul	Rini Suprapti	Belimbing manis dan sirup, keripik bayam, keripik jagung
13	KWT Mekar Jannah	Bakal, Argodadi, Sedayu, Bantul	Wadiyah	Sambal instan, ikan lele beku, keripik pare.
14	KWT Puspitasari	Kwasen, Srimartani, Piyungan, Bantul	Ana Marfu'atin	Permen pepaya, keripik pepaya, acar berbagai buah-buahan.

Sumber: Data Primer, 2025

Berdasarkan table di atas, partisipasi aktif masyarakat dapat mengambil berbagai bentuk, seperti Kelompok Perempuan Petani (KWT) (Wati et al., 2021). Bagi petani, seperti halnya masyarakat umum, partisipasi mereka tentu saja sebagai anggota aktif. Partisipasi mereka berada di sektor hulu, yaitu mengaktifkan lahan pertanian mereka sendiri, mengolah lahan, atau memberikan akses ke tanah kesultanan, untuk menghasilkan panen yang besar (Wati et al., 2021). Dengan hasil panen tersebut, mereka dapat menyediakan pasokan pangan yang dapat dikelola oleh Lumbung Mataraman.

Program Lumbung Mataraman membutuhkan partisipasi aktif penuh dari kelompok masyarakat. Hal ini terutama berlaku ketika Lumbung Mataraman diproyeksikan untuk diimplementasikan sebagai koperasi desa. Artinya, dari segi peraturan program, program ini seperti koperasi (Suryaningrum et., 2024). Namun, dalam praktiknya, program ini melampaui kegiatan koperasi pada umumnya. Kegiatan yang dikembangkan mencakup seluruh rantai pasokan, dari hulu hingga hilir, sehingga ketersediaan dan distribusi pangan telah direncanakan sejak awal oleh masyarakat itu sendiri.

Dalam konteks partisipasi, seorang petani di Bantul, ia dapat menjadi anggota aktif yang memberikan pendapat, saran, dan investasi untuk membantu anggota lain di kelembagaan sosial Lumbung Mataraman. Setiap Lumbung Mataraman biasanya terdiri dari sekitar 20 hingga 75 anggota, yang mewakili rumah tangga di dalam desa administratif atau daerah pedesaan tertentu. Inisiatif atau pendapat terkait jenis usaha pertanian beserta unit-unit usahanya dapat dibagikan secara deliberatif selama rapat umum, rapat tengah tahun, rapat akhir tahun, atau diskusi informal dengan pengurus mengenai hal-hal yang dianggap penting dan strategis untuk pengembangan dan kemajuan Lumbung Mataraman.

Sebagai pengelola, mereka berupaya untuk secara aktif mengelola Lumbung Mataraman dengan baik, transparan, adil, dan dengan cara yang menguntungkan semua anggota. Pengelolaan mereka tentu saja berupaya untuk mengaktifkan sektor hulu sebagai sumber produksi, dengan memberikan bantuan, mengajukan permohonan dukungan dari pemerintah terkait fasilitas dan infrastruktur pertanian yang dibutuhkan oleh anggota, atau proses budidaya yang dianggap terbaik dan paling unggul. Di sektor produksi pertanian hilir, tim pengelola berupaya untuk mengelola simpanan atau tabungan anggota dalam bentuk hasil panen, menyimpan dan mendistribusikan hasil panen ke pasar dengan jaminan harga yang menguntungkan petani.

Anggota Lumbung Mataraman juga dapat mengembangkan unit-unit usaha yang mendukung jenis pertanian terpadu yang diajukannya, atau sebaliknya mencari jenis usaha yang mengembakan produksi lanjutan dari sektor hulunya. Tim pengelola Lumbung Mataraman yang ditunjuk secara aklamasi berupaya untuk bertindak sebagai mediator terbaik antara kepentingan petani anggota dan pasar. Masyarakat umum di luar keanggotaan Lumbung Mataraman dapat berpartisipasi dalam memajukan program ini dengan mengakses pasar produksi Lumbung Mataraman, yang umumnya unik. Sebagai mata rantai terakhir dalam rantai produksi, kesediaan masyarakat untuk menerima produksi dan produk olahan dari Lumbung Mataraman merupakan nilai strategis dalam memajukan dan mendorong keberlanjutan program ketahanan pangan ini.

Partisipasi aktif dari pengurus, anggota, dan masyarakat tercermin dengan baik dalam Lumbung Mataraman yang bernama Timbul Asih. Kelembagaan sosial ini mengajukan akses pemanfaatan tanah kesultanan sebesar 5 hektar, dan dikembangkan untuk pertanian sawah padi dan unit usaha penggilingan dan pupuk. Lumbung Mataraman ini didirikan di Bantul pada tanggal 27 Maret 2014, dengan 32 anggota dan dipimpin oleh Bapak Muslim. Organisasi ini memiliki aturan tersendiri untuk memastikan semua anggota dapat berpartisipasi dan menabung di Lumbung Mataraman mereka. Semua anggota setuju untuk menabung 50 kg beras kering siap giling per anggota pada setiap musim panennya.

Selain itu, mereka sepakat bahwa setiap pinjaman beras kering maksimal 1 kuintal, dan akan dikenakan biaya 10% dari jumlah pinjaman. Mereka menyebutnya sebagai "biaya layanan," bukan bunga atau biaya pinjaman. Beberapa aturan lainnya adalah sebagai berikut: (i) jika seseorang meminjam beras atau padi, mereka harus mengembalikannya dalam bentuk beras (padi), dan harus dibayar kembali dalam tiga angsuran selama tiga musim panen, dengan maksimal tiga angsuran; (ii) biaya layanan sebesar 10% dikenakan untuk pinjaman; (iii) cadangan beras wajib sebesar 50 kg per panen; (iv) kontribusi bulanan sebesar Rp. 50.000; dan (v) rapat anggota diadakan setiap minggu pada hari pembayaran upah.

Mengenai pengembalian padi, anggota Lumbung Mataraman diharuskan mengembalikannya dalam bentuk padi dari panen terakhir mereka, dan padi tersebut harus bersih dan bebas dari kotoran. Jenis beras tidak

mempengaruhi proses pinjaman ini, kecuali jika pinjaman diberikan dalam bentuk beras (Wawancara dengan Kepala Lumbung Mataraman Timbul Asih, Bapak Muslim, Februari 2025). Berikut ini adalah catatan dari kegiatan Lumbung Mataraman Timbul Asih.

Gambar 1. Contoh Kegiatan di Lumbung Mataraman Timbul Asih Bantul

18/5 - 2024
5

PENGUMPULAN GABAH
LUMBUNG

NO	NAMA	JUMLAH / ANGGOTA Kg	PINJAMAN Kg
1	SUNARJO CDUKUHJ	50 kg	DIPINJAM 100kg
2	SAMADI	50 kg	DIPINJAM 100kg
3	TUKIJAN	50 C22 Rp.	100 kg
4	SUBARJO	50 kg	DIPINJAM 100kg
5	SEDIYO KAHARJO	50 kg	-
6	HARJO WIYONO	50 kg	PINJAM 50
7	SARJO UCJ	50 kg	-
8	SAWJI/MIKO SUYARNO	50 kg	100 kg
9	SUHARNO	50 kg	DIPINJAM 100kg
10	RAMEDI	50 kg	-
11	JUWARYONO	50 kg	-
12	NGATIJAN	50 kg	DIPINJAM 50
13	LASIMIN	50 kg	DIPINJAM 100
14	SUPI DUYATIN	50 kg	-
15	WIDODO	50 kg	DIPINJAM 100kg
16	SUKIMIN	50 kg	DIPINJAM 50
17	MUDIKAMTANO	50 kg	DIPINJAM 50
18	Lasimin	-	-
19	KAWIT RT 06	50 kg (SS)	-
19	PABYANTO (Tampak)	50 kg	di pinjam 50
20	SUDARMA	(225000) 50 kg	PINJAM 100kg

Sumber: Data Primer, 2025

Catatan di atas menunjukkan adanya mekanisme distribusi antara penyimpanan dan peminjaman beras yang dilakukan para anggota. Sekalipun catatan bersifat sederhana, namun setiap anggota memahami dan mempercayai antara satu dengan lainnya. Ikatan kepercayaan dan kegotongroyongan dalam Lumbung Mataraman menjadi perangkat penting dalam menggerakkan aktivitas kelembagaan sosial ini. Pelanggaran atas kesepakatan akan terkena sanksi sosial bersama yang memungkinkan anggota masyarakat mengalami tekanan secara sosial. Karenanya, mekanisme sosial jauh lebih dikembangkan daripada aturan prosedural.

3. Relasi Kuasa Deliberatif dalam Akses Pemanfaatan Tanah

Hingga tahun 2025, Lumbung Mataraman masih ada dan aktif menggerakkan program ketahanan pangan di pedesaan Yogyakarta. Idealnya, setiap desa memiliki satu Lumbung Mataraman. Namun, kenyataannya, ada beberapa desa yang memiliki dua atau tiga Lumbung Mataraman. Meskipun program ini ditekankan di tingkat desa, seringkali masyarakat di tingkat dusun atau perdukahan (sub-pemerintahan di bawah desa) mengambil inisiatif untuk mendirikan lembaga-lembaga ini. Terlebih lagi, kegiatan Lumbung Mataraman tidak selalu berorientasi pada pengembangan sektor hulu pertanian, tetapi juga memungkinkan kegiatan di sektor hilir pertanian. Ketika aspek hilir ini diberi ruang, banyak kegiatan usaha berbasis sektor pertanian dikembangkan oleh masyarakat.

Sektor pertanian hulu mencakup semua aspek budidaya, pengembangan benih, dan produktivitas pertanian. Bentuk jadi dari pengembangan sektor hulu, misalnya: padi, jagung, umbi-umbian (singkong, ubi jalar), kacang-kacangan (kacang tanah, kacang hijau, kedelai), rimpang, sayuran, buah-buahan, dan produk pertanian non-pangan (nilam, rumput gajah). Tingkat produktivitas sektor pertanian hulu sepenuhnya bergantung pada (i) ketersediaan lahan yang memadai, luas, dan sesuai (subur) untuk tanaman; (ii) pemanfaatan teknologi yang tepat yang memfasilitasi produktivitas dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi; (iii) dukungan dari saran dan infrastruktur pertanian; dan (iv) sistem manajemen yang baik, cerdas, efektif, dan efisien (Barki & Rachmah, 2024; Farah et al., 2025).

Dari keempat aspek peningkatan produktivitas sektor hulu pertanian, ketersediaan lahan merupakan hal yang sangat penting. Aspek ini mencakup beberapa sisi. *Pertama*, wilayah tersebut berkaitan dengan ketersediaan lahan yang dianggap sebagai wilayah ideal untuk pengembangan pertanian. Misalnya, usaha tani padi sawah memerlukan lahan minimal 0,5 hektar untuk satu keluarga atau satu rumah tangga, sesuai perhitungan BPS (Girma Asefa & Ayalew Muluken, 2024). Luasan 0,5 hektar menjadi perhitungan terbaru oleh BPS pada tahun 2000-an terkait kemampuan petani dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, baik kebutuhan pangan, sandang dan papan. Sebelumnya, angka ideal pertanian padi sawah setidaknya 2 hektar per setiap rumah tangga, hal serupa juga terjadi di Vietnam dan Bangladesh (Bich Tho & Umetsu, 2022; Girma Asefa & Ayalew Muluken, 2024; Salam et al., 2023).

Aspek luas lahan menjadi bermasalah ketika suatu wilayah telah mengalami banyak reorganisasi spasial akibat pesatnya perkembangan industri, pariwisata, dan pendidikan. Reorganisasi spasial ini menyebabkan lahan pertanian berubah menjadi rumah kos, restoran, hotel, dan destinasi wisata. Penyusutan dan konversi lahan pertanian menjadi lahan industri dan perdagangan umum di Yogyakarta dalam periode lima tahun (2015-2020) mencapai 2.520 hektar. (Puspitaningrum & adi Mudiparwanto, 2024; Sustyaningrum et al., 2024a) Angka ini setidaknya menghilangkan jumlah produksi beras sekitar 12.600 ton per musim (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, 2025; Sustyaningrum et al., 2024b). Akhirnya, wilayah Yogyakarta telah mengalami defisit beras yang besar dalam lima tahun terakhir (Harini et al., 2023).

Daerah pedesaan sebelumnya dikenal karena kemampuannya menghasilkan beras dalam jumlah besar, dan pernah mengalami surplus beras. Fenomena ini menunjukkan bahwa penurunan luas lahan dan konversi lahan dengan mekanisme reorganisasi spasial dari pertanian ke industri dan perdagangan telah menyebabkan penurunan produktivitas produk pertanian. Meskipun teori terbaru tentang produktivitas pertanian menyatakan bahwa hasil pertanian tidak selalu berdasarkan luas lahan, dan tidak selalu berdasarkan penggunaan lahan (Ivanka et al., 2024), namun pada kenyataannya, teori ini tidak sejalan dengan situasi faktual di Yogyakarta. Bahkan, pada tahun 2024, Yogyakarta pedesaan dinobatkan oleh BPS sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia, dan daerah yang mengalami krisis pangan (Indrakusuma et al., 2024; Samputra & Antriyandarti, 2024; Y. S. Susilo, 2010b).

Peringkat terendah ini didasarkan pada analisis pemenuhan kebutuhan dasar (PBB), sebagaimana digunakan oleh badan PBB (Indrakusuma et al., 2024; Y. S. Susilo, 2010b). Terlepas dari penolakan pemerintah DIY terhadap peringkat provinsi tersebut, kenyataannya adalah wilayah Yogyakarta mengalami penyusutan lahan pertanian yang besar sehingga mengganggu produktivitas pertanian. Fakta ini membuktikan bahwa luas lahan merupakan salah satu indikator penting peningkatan kuantitas produksi pertanian (Liu et al., 2020).

Kedua, aspek kesuburan tanah. Aspek ini umumnya disebabkan oleh kandungan nutrisi tanah yang cukup baik untuk perkembangan tanaman. Kandungan ini tentu ada pada tanah yang belum diolah secara intensif untuk pertanian dalam berbagai sistemnya. Tanah dengan intensitas pengolahan yang tinggi memiliki kandungan nutrisi yang rendah. Oleh karena itu, wajar jika tanah seperti itu membutuhkan penggunaan pupuk organik dan non-organik dalam jumlah besar. (Ma et al., 2023) Beberapa teknik untuk mengembalikan kesuburan tanah telah dilakukan, salah satunya dengan melakukan diversifikasi budidaya secara berselang-seling. Hal ini memungkinkan tanah untuk tidak jenuh, tetapi terus menghasilkan kesuburan yang memadai. (Hartina et al., 2025; Zong et al., 2024) Oleh karena itu, lahan baru yang baru saja dibersihkan untuk pertanian akan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan produktivitas pertanian.

Ketiga, aksesibilitas jarak ke lahan pertanian. Dalam tradisi Jawa, ruang mata pencaharian (sawah dan kebun) umumnya dekat dengan ruang permukiman. Desain organisasi spasial semacam ini telah diatur sejak proses “*babad alas*” (membuka hutan) dari tradisi leluhur. Pilihan ini bertujuan untuk memungkinkan masyarakat mengelola sawah dan kebun mereka dengan baik dan mudah. Namun, seiring waktu, terutama ketika Yogyakarta menjadi destinasi wisata dan pendidikan, reorganisasi ruang pertanian menjadi pemukiman baru (perumahan, hotel, ruang mata pencaharian non-pertanian) sangat tinggi. Sawah dan ladang mulai jauh dari daerah permukiman mereka. Bahkan, pembelian sawah atau kebun baru setelah penjualan lahan pertanian di sekitar rumah mereka sering kali jauh di luar desa dan kecamatan mereka. Situasi ini memengaruhi produktivitas pertanian yang mereka kelola.

Tiga aspek terkait luas lahan di atas juga terlihat dalam pengelolaan pertanian di masyarakat pedesaan Yogyakarta. Ancaman kehilangan lahan akibat reorganisasi spasial atau kemiskinan masyarakat ditanggapi oleh pemerintah Yogyakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta dengan menyediakan lahan baru untuk sektor pertanian yang dikelola masyarakat. Pada tahun 2020, berdasarkan amanat UU No. 13/2012 tentang Kekhususan Daerah Yogyakarta, yang salah satunya berisi pengaturan khusus terkait hukum dan tanah, pemerintah DIY mendorong pengendalian dan pengaturan tanah kesultanan (Widiyasno et al., 2020). Terlebih dalam UU tersebut disebutkan bahwa tanah Kesultanan dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Dalam konteks ini, setidaknya ada dua kriteria tanah kesultanan yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pertanian bagi kelompok Lumbung Mataraman itu.

Tanah kas kalurahan adalah tanah asset di tingkat kalurahan yang berasal dari pemberian kesultanan di masa lalu atau tanah hasil babad alas bersama-sama warga. Sebelum tahun 2012, tanah-tanah tersebut dimiliki dan dikelola oleh desa (Kalurahan). Tanah ini dialokasikan untuk insentif tambahan bagi pejabat desa, fasilitas umum, dan lapangan kerja jaminan sosial bagi warga yang dianggap kurang mampu. Semua pengelolaan diserahkan kepada pemerintah desa, khususnya kepala desa. Namun, pada tahun 2015, terjadi penertiban tanah-tanah kas desa tersebut. Semua tanah kas menjadi "Tanah Kesultanan yang digunakan oleh Pemerintah Desa". Klausul ini menyiratkan bahwa semua tanah di Yogyakarta yang belum bersertifikat atau dikendalikan oleh pemerintah kesultanan dan pemerintah provinsi Yogyakarta pada dasarnya milik Kesultanan Yogyakarta.

Oleh karena itu, semua tanah kas desa didorong untuk bersertifikat dengan nama "Tanah milik Kesultanan yang digunakan oleh Pemerintah Desa, misalnya Desa Sidorejo". Pada tahun 2025, total luas lahan kesultanan yang berasal dari lahan kas desa akan mencapai 13.010 hektar atau sekitar 1600 bidang tanah. Ini setidaknya 72 persen dari total luas lahan kas desa di seluruh wilayah Yogyakarta (Erna Sri Wibawanti et al., 2024).

Kedua, tanah yang berasal dari Tanah Sultan (SG) dan Tanah Pakualaman (PG). Tanah-tanah ini merupakan hak eksklusif keluarga Sri Sultan Hamengkubuwono dan Pakualaman. Tanah-tanah ini sebelumnya dikendalikan oleh kedua keluarga tersebut melalui akuisisi langsung, penyerahan kekuasaan, upeti, atau hadiah dari raja-raja yang ditaklukkan atau mengakui kekuasaan Mataram (Illiyani, 2020). Luas dan distribusi Tanah Sultan dan Tanah Pakualaman dapat dilihat dengan jelas pada tabel di bawah ini (Tabel 3).

Tabel 2. Luas dan Distribusi Tanah Sultan dan Tanah Pakualaman.

No	Kabupaten / Kota	Area	Akses Swapraj a	Area Administrat if Propinsi	Kepemilikan dan Penguasaan Tanah				Total	Thpd Luasan Propin si
					CD	SG	PAG	Tanah Kas Desa		
					(ha)	(ha)	(ha)	(ha)		
1	Kota Yogya	325	80,05	2.46	21,89	80,05	3,00	16,11	104,94	0.03
2	Sleman	47.482	30,16	0.64	1,70	306,16	-	6.435,30	6.743,16	2.21
3	Kulonprog o	58.627	1.037,65	1.77	-	2.051,99	330,62	2.746,54	5.128,95	1.68
4	Bantul	50.685	1.669,75	3.29	10,00	2.081,34	962,62	3.247,54	6.301,50	2.06
5	Gn. kidul	148.536	581,50	0.39	-	581,50	-	581,50	1.163,00	0.38
	Total	305.655	3.675,11	8.55	33,59	5.101,04	1.296,24	13.010,68	19.441,55	6.38

Sumber: Puslitbang BPN RI, 2019

Data di atas menunjukkan bahwa Sultan Yogyakarta menguasai banyak lahan (SG) di wilayah Sleman, Bantul, dan Gunungkidul. Sementara itu, keluarga Pakualaman memiliki lahan PG yang luas di Kulonprogo dan Gunungkidul. Dengan total luas lahan yang begitu besar, keberadaan lahan ini sangat berkontribusi pada pengembangan sektor pertanian di wilayah Yogyakarta.

Pemanfaatan lahan SG/PG sebenarnya telah dilakukan sejak lama oleh kesultanan. Melalui mekanisme pengajuan kepada Paniterokismo, kesultanan memberikan hak kepemilikan dan pengelolaan kepada masyarakat yang menerima hibah atau permohonan tertentu yang disetujui. Para penerima hibah kemudian mengelola lahan SG/PG sesuai dengan perjanjian pemanfaatan dengan kesultanan.

Apa yang dilakukan Kesultanan Yogyakarta sebelumnya, kemudian dikembangkan dalam bentuk yang cukup progresif. Salah satunya adalah dalam bentuk penegasan penggunaan dan pemanfaatan tanah-tanah kesultanan untuk mendukung pertanian berkelanjutan melalui program Lumbung Mataraman. Jika sebelumnya pemberian hak kepemilikan dan pemanfaatan lahan kesultanan lebih terbatas dan ditentukan oleh kesultanan, kini proses dan tujuan pemanfaatannya didiskusikan bersama antara kesultanan, pemerintah, dan masyarakat (kelompok petani) yang mengajukan permohonan pemanfaatan tanah kesultanan tersebut. Dalam konteks ini, Lumbung Mataraman tampak sebagai ruang negosiasi dan musyawarah antara kelompok masyarakat dan penguasa mereka (Niehaus, 2023), baik aktor kekuasaan dalam pengertian legitimasi tradisional (Kesultanan) maupun aktor kekuasaan dalam pengertian administratif formal (Pemerintah Provinsi dan Kabupaten).

Mekanisme pelaksanaan program Lumbung Mataraman didasarkan pada usulan dari anggota masyarakat atau kelompok petani di tingkat desa. Mereka dapat mengusulkan dua sektor sekaligus (hulu - hilir) atau secara terpisah (hulu atau hilir), seperti: (i) Lumbung Mataraman berbasis produktivitas pertanian organik, dan perluasan distribusi produksi kepada konsumen; (ii) Lumbung Mataraman mendorong budidaya pisang, dan pengembangan keripik pisang sebagai komoditas unggulan; (iii) Penciptaan Budidaya Bawang Bombay dengan Dukungan Lumbung Mataraman; (iv) Lumbung Mataraman dengan meningkatkan Budidaya Kedelai, dan pengembangan keripik tempe; atau (v) Lumbung Mataraman khusus pengolahan dan pemasaran keripik

tempe, keripik pisang, biji melinjo, bawang goreng, dan lain-lain. Semua usulan ini didasarkan pada hasil musyawarah atau pertemuan anggota masyarakat yang dikembangkan berdasarkan visi bersama, karakter mata pencaharian yang sama, dan kedekatan jenis usaha yang dikembangkan sebelumnya.

Untuk mengatasi kendala utama terkait keterbatasan atau tidak tersedianya lahan untuk sektor pertanian hulu, setiap kelompok mengkomunikasikan hal ini kepada Dinas Pertanian dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, sebagai sektor utama. Melihat nilai strategis dari usulan dan inisiatif masing-masing kelompok, Dinas membahas masalah ini dengan kesultanan untuk mendapatkan dukungan berupa penyediaan tanah kesultanan, baik dari SG/PG maupun tanah kas desa. Paniterokismo dan Danaraiya Keistimewaan memberikan pertimbangan terkait usulan tersebut, dan berdiskusi antara pihak-pihak terkait (masyarakat pengusul, kantor). Jika usulan tersebut bernilai strategis dan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas, maka akan diberikan jatah tanah kesultanan untuk jangka waktu tertentu guna mendukung usulan tersebut. Dukungan ini penting agar masyarakat dapat sepenuhnya berkonsentrasi pada pelaksanaan usulan mereka. Dinas Pertanian dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dengan dukungan dana APBN, juga memberikan bantuan untuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok petani.

Meskipun hanya terlihat dari aspek penyediaan tanah, respons kesultanan yang bersedia menyerahkan asetnya untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat, tanpa konsekuensi berupa sewa dan lainnya, merupakan bukti keberadaan kekuasaan sosialis dan dilaksanakan melalui mekanisme demokrasi deliberatif. Dalam konteks ini, apa yang telah dilakukan Kesultanan Yogyakarta telah melampaui tradisi dan sistem monarki feodalnya, dari kekuasaan feodal menjadi kekuasaan yang bersedia mendengarkan keinginan dan kepentingan masyarakat. Secara teoritis, proses demokrasi deliberatif terlihat dalam pertukaran dan diskusi tentang penggunaan aset penguasa oleh masyarakat (kelompok petani/kelompok perempuan petani), pemerintah (Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat) dan kesultanan (Paniterakismo). Akhirnya, tanah kesultanan dapat dimanfaatkan dan memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan pertanian berkelanjutan, mengatasi krisis pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kekuasaan sultan terwujud bagi rakyatnya (Setiawati, 2011).

4. KESIMPULAN

Program Lumbung Mataraman yang dilakukan pemerintahan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sebuah kebijakan dan program yang diikhtiarkan untuk membangun ketahanan pangan dan pengembangan pertanian berkelanjutan di masyarakat. Penghilangan kelaparan dan menyediakan pangan yang cukup di tingkat pedesaan menjadi fokus tujuan program Lumbung Mataraman ini. Sebagai sebuah program pemerintah, program ini mendapat dukungan penuh dari Kesultanan Ngayogyakarta sebagai entitas kekuasaan tradisional yang dilindungi oleh UU No. 13 Tahun 2012 terkait Keistimewaan Yogyakarta. Dukungan itu adalah pemberian akses pemanfaatan tanah-tanah kesultanan, baik dalam bentuk *Sultan Ground* ataupun tanah kas kalurahan yang hak pengelolaannya diserahkan kepada pihak Kalurahan.

Masyarakat pun berpartisipasi penuh untuk mengikuti dan melaksanakan program ini sebaik mungkin. Namun, partisipasi itu sering kali dihadapkan pada kendala keterbatasan lahan pertanian untuk pelaksanaan inisiatif-inisiatif kolektif pengembangan pertanian terpadu dan unit-unit usaha pelengkapannya. Walaupun pada pengusulan inisiatif secara deliberatif di tingkat individu, setiap orang diminta untuk memberikan pertimbangan dan solusi atas ketersediaan lahan yang dibutuhkan itu. Pada praktiknya, akses pemanfaatan lahan kepada perseorangan di tingkat pedesaan yang terbatas pun tidak mungkin dilakukan.

Dengan mempertimbangkan dukungan akses yang disediakan oleh pihak kesultanan, banyak kelompok Lumbung Mataraman yang mengajukan inisiatif-inisiatif usaha pengembangan pertanian beserta unit-unit usahanya secara deliberatif kepada pihak kraton untuk memberikan tanah-tanah kesultannya. Dalam konteks ini, pihak kesultanan pun memberikan izin dan akses terhadap tanah kesultanan berdasarkan inisiatif yang diajukan. Tidak ada kasus penolakan apapun dari Kraton, saat pengajuan inisiatif pemanfaatan tanah kesultanan itu untuk pertanian dan unit usaha yang dikembangkannya. Semua usulan dan inisiatif yang dilakukan secara deliberatif oleh kelompok Lumbung Mataraman diterima baik.

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa aktivitas Lumbung Mataraman tidak sekadar diartikan sebagai sebuah program pemerintah terkait pembangunan pertanian saja. Namun, di dalamnya ada proses dan mekanisme deliberatif di mana setiap usulan dan inisiatif masyarakat dalam pemanfaatan tanah-tanah kesultanan itu direspons baik oleh Kesultanan. Penerimaan inisiatif secara deliberatif itu telah menciptakan suatu ekosistem baru dalam relasi kuasa pada sistem monarki tradisional yang ada. Sistem ini pada umumnya bertumpu pada pola patron klien secara kaku dan tidak menghendaki adanya inisiatif dari pihak masyarakat. Terlebih ketika masyarakat meminta akses terhadap asset kesultanan. Namun, pola patron klien di lingkungan masyarakat Yogyakarta bertransformasi menjadi pola deliberatif, di mana setiap usulan dan inisiatif didengar,

dipertimbangkan dan diafirmasi sebaik mungkin. Pola deliberatif seperti inilah yang perlu dikembangkan oleh pihak pemerintah di berbagai tingkatnya dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunannya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional yang telah memfasilitasi pembiayaan dan penelitian studi doktoral dalam skema *Degree by Research* (DBR) di Universitas Indonesia.

REFERENCES

- Abusaada, H., & Elshater, A. (2024). Developing a guiding framework based on sustainable development to alleviate poverty, hunger and disease. *Archnet-IJAR: International Journal of Architectural Research*, 18(2), 432–452. <https://doi.org/10.1108/ARCH-03-2023-0076>
- Akdeniz, E. (2020). Weber's Charismatic Leadership in Times of Crisis. *Journal of International Social Research*, 13(73).
- Anders, A. D. (2019). *Post-Critical Ethnography*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.342>
- Anders, A. D., & Lester, J. N. (2019). Examining loss: Postcritical ethnography and the pursuit of what could be otherwise. *Qualitative Inquiry*, 25(9–10), 925–935.
- Anderson, J. C., & Narus, J. A. (1990). A model of distributor firm and manufacturer firm working partnerships. *Journal of Marketing*, 54(1), 42–58.
- Anisya, A. P. M., & Waluyati, L. R. (2019). Peluang Desa Lumbung Pangan dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Tani. *AGRARIS: Journal of Agribusiness and Rural Development Research*, 5(2). <https://doi.org/10.18196/agr.5284>
- Antara. (2024, May 21). KPPD Sleman petakan ribuan bidang tanah kasultanan. *Antara News*. <https://jogja.antaranews.com/berita/60684/kppd-sleman-petakan-ribuan-bidang-tanah-kasultanan>
- Astuti, S. (2023). Optimization of Yard Land Through the Lumbung Mataraman Program to Support Urban Food Security During the Pandemic Covid 19. In *Proceedings of the International Symposium Southeast Asia Vegetable 2021 (SEAVEG 2021)* (pp. 568–572). Atlantis Press International BV. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-028-2_58
- Bich Tho, L. C., & Umetsu, C. (2022). Sustainable farming techniques and farm size for rice smallholders in the Vietnamese Mekong Delta: A slack-based technical efficiency approach. *Agriculture, Ecosystems & Environment*, 326, 107775. <https://doi.org/10.1016/j.agee.2021.107775>
- Conder, T. (2024). A Moral Vision of Postcritical Ethnography: Reflexive Sensitivities That (In)Form Ethnographic Political-Moral Agency. In *Evolutions in Critical and Postcritical Ethnography* (pp. 133–160). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-58827-3_5
- Consentino, F., Vindigni, G., Spina, D., Monaco, C., & Peri, I. (2023). An Agricultural Career through the Lens of Young People. *Sustainability*, 15(14), 11148. <https://doi.org/10.3390/su151411148>
- Danugroho, A., Fadila, R., Fikry Madani, A., & Adib, M. (2025). Lumbung Mataraman as a Strengthening of Food Security in the Special Region of Yogyakarta. *Biokultur*, 14(1), 62–81. <https://doi.org/10.20473/bk.v14i1.65565>
- Du, L. (2022). "Legitimate Authority" in the Chinese Tradition: Ethics-Politics. *International Confucian Studies*, 1(1), 81–95. <https://doi.org/10.1515/icos-2022-2010>
- Erna Sri Wibawanti, Raden Murjiyanto, Wiwin Budi Pratiwi, & Imam Amalda Rizki Harahap. (2024). Kepastian dan Perlindungan Hukum Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten oleh Masyarakat Pasca Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 31(3), 536–559. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss3.art3>
- Farah, A. A., Mohamed, M. A., Musse, O. S. H., & Nor, B. A. (2025). The multifaceted impact of climate change on agricultural productivity: a systematic literature review of SCOPUS-indexed studies (2015–2024). *Discover Sustainability*, 6(1), 397. <https://doi.org/10.1007/s43621-025-01229-2>
- Faro, E. Z., Taber, P., Seaman, A. T., Rubinstein, E. B., Fix, G. M., Healy, H., & Reisinger, H. S. (2024). Implicit and explicit: a scoping review exploring the contribution of anthropological practice in implementation science. *Implementation Science*, 19(1), 12. <https://doi.org/10.1186/s13012-024-01344-0>
- Farooq, N., Ullah, A., Shah, M., & Idrees, M. (2022). The Influence of Agricultural Land Access on Youth's Attitude towards Agricultural Occupation. *Sarhad Journal of Agriculture*, 38(3).
- Geary, W. N. M. (1913). Land tenure and legislation in British West Africa. *Journal of the Royal African Society*, 236–248.

- Gin, O. K. (2022). Monarchy in Brunei. In *Routledge Handbook of Contemporary Brunei* (pp. 33–45). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003020431-3>
- Guerrero-Sierra, H., Duque, P., & Niño, C. (2024). Analysis of worldwide research on clientelism: Origins, evolution, and trends. *Social Science Information*, 63(3), 319–353. <https://doi.org/10.1177/05390184241268381>
- Han, D., Qiao, J., & Zhu, Q. (2021). Rural-Spatial Restructuring Promoted by Land-Use Transitions: A Case Study of Zhulin Town in Central China. *Land*, 10(3), 234. <https://doi.org/10.3390/land10030234>
- Harini, R., Yunus, H. S., & Hartono, S. (2012). Agricultural land conversion: determinants and impact for food sufficiency in Sleman Regency. *Indonesian Journal of Geography*, 44(2), 120–133.
- Hartatik, E. S., Wasino, W., Handayani, T., & Sudarsih, S. (2023). Village Barn in Coastal Area of Java, From “Lumbung Desa” to Village Unit Cooperative in Demak-Grobogan. *Paramita: Historical Studies Journal*, 33(2). <https://doi.org/10.15294/paramita.v33i2.43880>
- Hartina, Monkham, T., Vityakon, P., & Sukitprapanon, T.-S. (2025). Integrated Soil Fertility Management Enhances Soil Properties, Yield, and Nitrogen Use Efficiency of Rice Cultivation: Influence of Fertilizer Rate, Humic Acid, and Gypsum. *Agronomy*, 15(6), 1335. <https://doi.org/10.3390/agronomy15061335>
- Harttgen, K., & Seiler, J. (2023). Food insecurity and poverty. In *Research Handbook on Measuring Poverty and Deprivation* (pp. 234–242). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781800883451.00034>
- Hastuti, T. K., Rochwulaningsih, Y., Sulistiyono, S. T., & Rinardi, H. (2025). *The Agrarian Reorganization Impact to The Agrarian Structure of Sultanate Yogyakarta 1918-1942* (pp. 295–305). https://doi.org/10.2991/978-2-38476-418-1_23
- Humaedi, M. A. (2016). *Etnografi Bencana; Menakar Peran Para Pemimpin Lokal dalam Pengurangan Resiko Bencana*. Lkis Pelangi Aksara.
- Humaedi, M. A. (2020a). *Menggugah Empati, Menarik Simpati: Kekuatan Etnografi Post-Kritis dalam Mendorong Kebijakan Berbasis Kebudayaan Lokal*. LIPI Press.
- Humaedi, M. A. (2020b). *Menggugah Empati, Menarik Simpati: Kekuatan Etnografi Post-Kritis dalam Mendorong Kebijakan Berbasis Kebudayaan Lokal*. LIPI PRESS. <https://doi.org/10.14203/press.145>
- Humaedi, M. A., Nadzir, I., Himmi, S. K., Astutik, S., Tessa, A., & Andari, R. N. (2024a). Changing Livelihoods, Development, and Cultural Practices: Reshaping Forests Among the Tau Taa Vana People. *Forest and Society*, 8(1), 61–80. <https://doi.org/10.24259/fs.v8i1.26593>
- Humaedi, M. A., Wibowo, D. P., Hariyanto, W., Susilo, S. R. T., Wijayanti, F., Hakim, F. N., Martino, M., Wijaya, G., Andari, R. N., Yumantoko, Y., & Tessa, A. (2025). Shifting collective values: the role of rural women and gotong royong in village fund policy. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 411. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04577-6>
- Humaedi, M. Alie., Nadzir, I., Himmi, S. K., Astutik, S., Tessa, A., & Andari, R. N. (2024b). Changing Livelihoods, Development, and Cultural Practices: Reshaping Forests Among the Tau Taa Vana People. *Forest and Society*, 8(1). <https://doi.org/10.24259/fs.v8i1.26593>
- Illiyani, M. (2020). POLEMIK PERTANAHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 22(3). <https://doi.org/10.14203/jmb.v22i3.1106>
- Indrakusuma, T., Nuryadin, D., & Wijayanti, D. L. (2024). Analysis of “Extreme Poverty” for the special Region of Yogyakarta in Indonesia. *Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology*, 42(6), 393–403. <https://doi.org/10.9734/ajaees/2024/v42i62502>
- Ingram, D. (2011). *Habermas: Introduction and analysis*. Cornell University Press.
- Ivanka, R., Atalla, F., Dita Limbong, A., & Simarmata, T. (2024). Assessing the Current State and Future Trends of Land Use Conversion: Implications for Food Security in Indonesia. *International Journal of Life Science and Agriculture Research*, 3(4). <https://doi.org/10.55677/ijlsar/V03I4Y2024-10>
- Kellner, D. (2000). Habermas, the public sphere, and democracy: A critical intervention. *Perspectives on Habermas*, 1(1), 259–288.
- Kökerer, C. M. (2024). Max Weber and Carl Schmitt on Legitimate Domination: Belief in Legitimacy or Acknowledgement of Legitimacy? *Critical Sociology*. <https://doi.org/10.1177/08969205241276797>
- Kratoska, P. H. (1985). The peripatetic peasant and land tenure in British Malaya. *Journal of Southeast Asian Studies*, 16(1), 16–45.
- Kuning Retno Dewandini, S., Religia, Y., Fauzan Farid Al Hamdi, M., & Devita Sari, S. (2025). Implementation of Lumbung Mataraman to Support Family Food Resilience in Kulon Progo Regency. *SHS Web of Conferences*, 212, 04017. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202521204017>
- Liu, J., Wang, M., Yang, L., Rahman, S., & Sriboonchitta, S. (2020). Agricultural Productivity Growth and Its Determinants in South and Southeast Asian Countries. *Sustainability*, 12(12), 4981. <https://doi.org/10.3390/su12124981>

- Lottholz, P., & Lemay-Hébert, N. (2016). Re-reading Weber, re-conceptualizing state-building: from neo-Weberian to post-Weberian approaches to state, legitimacy and state-building. *Cambridge Review of International Affairs*, 29(4), 1467–1485. <https://doi.org/10.1080/09557571.2016.1230588>
- Ma, G., Cheng, S., He, W., Dong, Y., Qi, S., Tu, N., & Tao, W. (2023). Effects of Organic and Inorganic Fertilizers on Soil Nutrient Conditions in Rice Fields with Varying Soil Fertility. *Land*, 12(5), 1026. <https://doi.org/10.3390/land12051026>
- MacRae, G., & Reuter, T. (2020). Lumbung Nation. *Indonesia and the Malay World*, 48(142), 338–358. <https://doi.org/10.1080/13639811.2020.1830535>
- Ngadi, N., Zaelany, A. A., Latifa, A., Harfina, D., Asiati, D., Setiawan, B., Ibnu, F., Triyono, T., & Rajagukguk, Z. (2023). Challenge of Agriculture Development in Indonesia: Rural Youth Mobility and Aging Workers in Agriculture Sector. *Sustainability*, 15(2), 922. <https://doi.org/10.3390/su15020922>
- Niehaus, M. (2023). Deliberative Democracy and CCL. In *Global Climate Constitutionalism “from below”* (pp. 191–236). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-43191-4_6
- Noblit, G. W., & Anders, A. D. (2024). An Invitation to Postcritical Ethnography. In *Evolutions in Critical and Postcritical Ethnography* (pp. 325–338). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-58827-3_11
- Pandangwati, S. T., Cooke, B., & Neave, M. (2024). Farmers, planning and Agroecological transition: insights from the special region of Yogyakarta, Indonesia. *Australian Geographer*, 55(2), 229–257. <https://doi.org/10.1080/00049182.2024.2350813>
- Peluso, N. L., & Ribot, J. (2020). Postscript: A Theory of Access Revisited. In *Society and Natural Resources* (Vol. 33, Issue 2, pp. 300–306). Routledge. <https://doi.org/10.1080/08941920.2019.1709929>
- Prasada, I. M. Y., & Rosa, T. A. (2018). Dampak alih fungsi lahan sawah terhadap ketahanan pangan di daerah istimewa yogyakarta. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 14(3), 210. <https://doi.org/10.20956/jsep.v14i3.4805>
- Puspitaningrum, S. D., & adi Mudiparwanto, W. (2024). Implementation of Agricultural Land Protection Policy on The Transfer of Functions And Food Security Efforts in The Special Region of Yogyakarta. *LEGAL BRIEF*, 13(2), 604–612.
- Rachmat, M., Budhi, G. S., Supriyati, N., & Sejati, W. K. (2016). Lumbung Pangan Masyarakat: Keberadaan dan Perannya dalam Penanggulangan Kerawanan Pangan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 29(1), 43. <https://doi.org/10.21082/fae.v29n1.2011.43-53>
- Rajab, M. A., Suhaeb, F. W., & Kamaruddin, S. A. (2025). Patron-Client in Socio Economic Relations of Fisherman in the Coastal Area of Bandar Lampung City, Indonesia. *Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology*, 43(2), 89–95. <https://doi.org/10.9734/ajaees/2025/v43i22690>
- Ratnoo, V. D. (2024). Persistent effects of colonial land tenure institutions: Village-level evidence from India. *Journal of Development Economics*, 168, 103247.
- Riawanti, W. (2017). Peningkatan Pendapatan Keluarga Pertanian Berkelanjutan: Studi Kasus Pilot Project Kawasan Rumah Pangan Lestari dalam Program Lumbung Mataraman di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Optimum: Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 7(2), 118. <https://doi.org/10.12928/optimum.v7i2.7919>
- Rifai, R., Kamaluddin, K., & Hidayat, R. (2024). Exploring the Roots and Solutions of Maladministration, Power Abuse, or Corruption in Contemporary Indonesian Villages. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 32(3), 1115–1140. <https://doi.org/10.47836/pjssh.32.3.15>
- Rika, H., Susilo, B., & Nurjani, E. (2016). Geographic Information System-Based Spatial Analysis of Agricultural Land Suitability in Yogyakarta. *Indonesian Journal of Geography*, 47(2), 171. <https://doi.org/10.22146/ijg.9260>
- Rinardi, H., Rochwulaningsih, Y., Suliyati, T., & Widodo, S. K. (2017). Lumbung Desa in Java: A Credit Institution, Poverty Management, and Financial Problem Solving for Villagers During the Colonial Period. *Jurnal Humaniora*, 29(3), 234. <https://doi.org/10.22146/jh.24294>
- Rukundo, P., & Oniang'o, R. (2024). Twenty-five years of the United Nations General Comment number 12 on the human right to adequate food – malnutrition continues to surge. *African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development*, 24(10), 24698–24709. <https://doi.org/10.18697/ajfand.135.25400>
- Salam, M. A., Sarker, M. N. I., & Khan, M. A. R. (2023). Exploring the Role of Planting Scale on Productivity and Efficiency: The Case of Rice Farms in Bangladesh. *International Journal of Plant Production*, 17(2), 205–218. <https://doi.org/10.1007/s42106-022-00229-w>
- Setiawan, T. (2024). The Emerging of Patron-Client Relationship in Contemporary Peasant Social Movement Articulation. *European Journal of Arts, Humanities and Social Sciences*, 1(4), 41–53. [https://doi.org/10.59324/ejahss.2024.1\(4\).03](https://doi.org/10.59324/ejahss.2024.1(4).03)
- Setiawati, A. N. (2011). *Dari tanah sultan menuju tanah rakyat Pola kepemilikan, penguasaan dan sengketa tanah di kota yogyakarta setelah reorganisasi*. STPN Press.
- Spradley, J. P. (2016a). *Participant observation*. Waveland Press.

- Spradley, J. P. (2016b). *The ethnographic interview*. Waveland Press.
- Susilo, B. (2021). Mapping the sensitivity of agricultural land: a study of agricultural land conversion In Yogyakarta urban area. *Seventh Geoinformation Science Symposium 2021, 12082*, 102–110.
- Susilo, Y. S. (2010a). Factors Affecting Food Security in Rural Areas in Yogyakarta Province. *Journal of Indonesian Economy and Business (JIEB)*, 25(2), 239–250.
- Sustyaningrum, K., Arsanti, V., Arfianto, S., & Meliyani, S. (2024a). Analysis of The Impact of Agricultural Land Conversion Towards Food Security in The Special Region of Yogyakarta Province. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 10(1), 1–16.
- Tohir, A., Sanusi, S., & Nuridin, N. (2022). The Problem of The Conversion of Agricultural Land to Housing in The District of Tegal. *Proceedings of the 1st International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education, MALAPY 2022, 28 May 2022, Tegal, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.28-5-2022.2320547>
- Widiyanto, D. (2019). Local Food Potentials and Agroecology in Yogyakarta Special Province, Indonesia. *Forum Geografi*, 33(1), 64–81. <https://doi.org/10.23917/forgeo.v33i1.7795>
- Widiyasno, S., Mutiarin, D., Saputra, H. A., & Latif, I. R. (2020). Land Administration Policy In Bantul and Sleman Districts. *Journal of Government and Civil Society*, 4(2), 249. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v4i2.2573>
- Yudhistira Saraswati, & Pratiwi, R. A. (2024). Optimalisasi Penataan Lumbung Mataraman dalam Mendukung Kawasan Wisata Edukasi Terpadu Padukuhan Ngalian, Desa Widodomartani. *Agrokreatif: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 10(1), 102–111. <https://doi.org/10.29244/agrokreatif.10.1.102-111>
- Zhang, Z., Ghazali, S., Miceikienė, A., Zejak, D., Choobchian, S., Pietrzykowski, M., & Azadi, H. (2023). Socio-economic impacts of agricultural land conversion: A meta-analysis. *Land Use Policy*, 132, 106831. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2023.106831>

MODAL SOSIAL SEBAGAI BASIS KETAHANAN EKONOMI LOKAL PELAKU USAHA INDUSTRI BATU BATA MERAH DI TENGAH KETERBATASAN DUKUNGAN KELEMBAGAAN DESA: STUDI KASUS DESA PENGADANGAN, LOMBOK TIMUR

Hawa Rani Sukma*¹, Elly Malihah Setiadi², Wilodati³

^{1,2,3}Universitas Pendidikan Indonesia

Email*: hawarani871@upi.edu

ABSTRACT

Industri bata merah di Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur menghadapi berbagai tantangan, termasuk dukungan institusional desa yang terbatas yang berdampak pada ketahanan ekonomi para pengusaha. Dalam kondisi ini, modal sosial menjadi sumber daya vital yang dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan ekonomi lokal para pengusaha tersebut. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran modal sosial sebagai dasar ketahanan ekonomi lokal para pengusaha industri bata merah di tengah keterbatasan dukungan institusional desa. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang melibatkan para pengusaha industri bata merah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial, yang tercermin dalam jaringan sosial, kepercayaan, dan norma sosial, memainkan peran penting dalam mendukung ketahanan ekonomi wirausaha dengan memperkuat kerja sama, solidaritas, dan mekanisme adaptasi kolektif. Temuan ini menegaskan bahwa modal sosial berfungsi sebagai landasan ketahanan ekonomi lokal dalam menghadapi keterbatasan dukungan institusional desa.

Kata Kunci: Industri Bata Merah, Ketahanan Ekonomi Lokal, Modal Sosial, Wirausaha.

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan ekonomi terutama akibat ketimpangan antarwilayah, keterbatasan akses sumber daya, dan infrastruktur. Oleh karenanya dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah menjadikan pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama dalam meningkatkan kesejahteraan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di suatu daerah ditandai dengan adanya kenaikan tingkat output barang maupun jasa dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya (Nasution & Pristiyono, 2019). Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan salah satunya dengan terus mendorong peran serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun industri kecil sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

Dalam pembangunan ekonomi lokal, salah satu sector yang berperan strategis bagi perekonomian masyarakat adalah industri kecil. Industri kecil memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi pedesaan. Industri didefinisikan sebagai kegiatan pengolahan barang dengan memanfaatkan tenaga manusia dan mesin (Fahmiya et al., 2023). Berdasarkan Undang-Undang No. 9 tahun 1995, industri kecil atau rumah tangga didefinisikan sebagai unit ekonomi dengan aset bersih maksimal Rp. 200 juta dan omzet tahunan dibawah Rp 1 miliar (Yanti et al., 2017; Verthasari & Hidir, 2025). Meskipun berskala kecil, sektor ini terbukti mampu menjadi penyangga ekonomi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan pemanfaatan sumber daya di lingkungan sekitar.

Salah satu bentuk industri kecil yang memiliki daya tahan relatif kuat adalah industri batu bata merah. Batu bata merah adalah bahan bangunan yang telah lama digunakan masyarakat (Afrisawati et al., 2022). Industri batu bata telah menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya yaitu di Lombok. Lombok diidentifikasi sebagai salah satu wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mempunyai beragam kapasitas usaha berbasis potensi lokal, termasuk industri batu bata merah. Industri batu bata merah telah tersebar beberapa kabupaten, terutama di wilayah kabupaten Lombok Timur. Di Kabupaten Lombok Timur, khususnya di Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, industri batu bata merah telah berkembang secara turun-temurun dan menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat. Berdasarkan data lapangan, terdapat sekitar 126 unit usaha batu bata merah yang menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar. Keberadaan industri ini berperan penting dalam menopang perekonomian rumah tangga, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian luas.

Namun demikian, industri batu bata merah di Desa Pengadangan masih menghadapi berbagai tantangan. Ketergantungan pada metode produksi tradisional, keterbatasan modal dan teknologi, fluktuasi harga bahan baku, serta ketidakpastian pasar menjadi faktor yang memengaruhi keberlangsungan usaha. Di sisi lain, besarnya potensi industri ini belum sepenuhnya diimbangi dengan dukungan kelembagaan desa yang memadai. Selain itu, peran pemerintah desa dalam pemberdayaan ekonomi lokal, pendampingan usaha, maupun fasilitasi permodalan menunjukkan keterbatasan kapasitas kelembagaan, sehingga belum mampu berfungsi optimal dalam mendukung keberlanjutan usaha ekonomi masyarakat desa.

Dalam kondisi keterbatasan dukungan tersebut, pelaku usaha industri batu bata merah mengandalkan modal sosial sebagai strategi untuk mempertahankan keberlangsungan ekonomi. Modal sosial merupakan aset tidak berwujud yang tercermin dalam jaringan sosial, kepercayaan, dan norma yang berkembang dalam kehidupan masyarakat (Widodo, 2016; Rohmah et al., 2024). Fokus utama modal sosial berada pada kapasitas kolektif individu dalam sebuah kelompok untuk saling bersinergi dan membentuk jejaring demi merealisasikan kepentingan bersama (Firmando, 2021). Bebbington (2000; Roslianah, 2023) lebih lanjut menjelaskan bahwa pengembangan modal sosial mampu meningkatkan jangkauan masyarakat dan rumah tangga terhadap sumber daya finansial, lingkungan, serta kualitas sumber daya manusia.

Dalam konteks otonomi desa, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam mengelola dan memberdayakan potensi ekonomi lokal melalui kebijakan, pendampingan usaha, serta penguatan kelembagaan ekonomi desa. Namun, dalam praktiknya, kapasitas kelembagaan desa sering kali belum berjalan optimal sehingga belum mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha lokal secara menyeluruh. Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk mengandalkan mekanisme informal berbasis hubungan sosial sebagai cara bertahan di tengah keterbatasan dukungan formal. Situasi ini menempatkan modal sosial sebagai substitusi sementara atas lemahnya tata kelola kelembagaan desa dalam pembangunan ekonomi lokal.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa modal sosial memiliki peran penting dalam menopang keberlangsungan usaha kecil dan ketahanan ekonomi masyarakat. Imron dan Syafa'at (2020) menemukan bahwa keberhasilan usaha kecil dalam bertahan sangat dipengaruhi oleh kekuatan kerja sama sosial dan tingkat kepercayaan antar anggota masyarakat. Penelitian Auretha et al. (2025) juga menunjukkan bahwa relasi sosial yang kuat menjadi faktor utama dalam menopang usaha pedagang lanjut usia. Sementara itu, Saputro et al. (2020) menegaskan bahwa jaringan sosial dan norma kolektif berperan sebagai penopang keberlanjutan usaha kecil berbasis lokal. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada deskripsi peran modal sosial secara umum dan belum mengkaji secara mendalam bagaimana mekanisme masing-masing komponen modal sosial berfungsi sebagai basis ketahanan ekonomi lokal, khususnya pada industri kecil tradisional di wilayah pedesaan yang menghadapi keterbatasan dukungan kelembagaan desa.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran modal sosial sebagai basis ketahanan ekonomi lokal pelaku usaha industri batu bata merah di Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, di tengah keterbatasan dukungan kelembagaan desa. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi akademik dalam kajian modal sosial dan pembangunan ekonomi lokal, tetapi juga menjadi refleksi kritis bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa agar lebih inklusif dalam mendukung keberlanjutan usaha masyarakat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hal ini digunakan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana modal sosial bekerja sebagai basis ketahanan ekonomi lokal pelaku usaha industri batu bata merah di tengah keterbatasan dukungan kelembagaan desa. Lokasi dalam penelitian ini berada di Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur yang merupakan salah satu sentra industri batu bata merah dengan jumlah tempat pembuatan sebanyak 126 unit usaha yang masih bertahan secara mandiri.

Subjek dalam penelitian ini ditentukan melalui teknik *purposive sampling* untuk mendapatkan data yang sesuai dengan topik ketahanan ekonomi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui (1) Observasi, untuk mengamati langsung praktik penggunaan modal sosial di lokasi usaha maupun di luar lokasi usaha; (2) Wawancara mendalam, untuk menggali persepsi pelaku usaha mengenai bagaimana mereka mengoptimalkan kepercayaan (*trust*) dan jaringan (*networks*) sebagai strategi bertahan; dan (3) Dokumentasi berupa catatan profil industri dan foto kegiatan lapangan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif *Miles and Huberman* yang terdiri atas tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan temuan, dilakukan triangulasi sumber dan triangulasi teknik guna menyilangkan data dari berbagai pihak. Selain itu, peneliti menerapkan teknik *member check* dengan melakukan verifikasi ulang terhadap data analisis kepada para informan untuk memastikan bahwa temuan mengenai modal sosial sebagai basis ketahanan ekonomi lokal ini telah sesuai dengan realitas yang mereka alami di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Usaha Industri Batu Bata Merah dan Tantangan Ketahanan Ekonomi Pelaku Usaha

Industri batu bata merah di Desa Pengadangan merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi masyarakat yang berkembang secara tradisional dan berbasis sumber daya lokal. Usaha ini telah dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat desa dan menjadi sumber penghidupan utama bagi sebagian pelaku usaha. Proses produksi batu bata merah masih mengandalkan teknik sederhana dengan penggunaan tenaga kerja manual, sehingga sangat bergantung pada kondisi alam dan ketersediaan sumber daya lokal.

Dalam praktiknya, pelaku usaha industri batu bata merah menghadapi berbagai tantangan yang berimplikasi langsung terhadap ketahanan ekonomi mereka. Keterbatasan modal usaha menjadi salah satu kendala utama, terutama dalam memenuhi kebutuhan bahan baku dan membiayai proses produksi secara berkelanjutan. Selain itu, fluktuasi permintaan pasar turut memengaruhi stabilitas pendapatan pelaku usaha, mengingat pemasaran batu bata merah masih bersifat lokal dan bergantung pada proyek pembangunan di sekitar wilayah desa.

Faktor lingkungan, khususnya kondisi cuaca, juga menjadi tantangan yang signifikan dalam proses produksi batu bata merah. Pada musim hujan, aktivitas produksi sering kali terhambat karena proses pengeringan batu bata tidak dapat dilakukan secara optimal. Kondisi ini berdampak pada penurunan jumlah produksi dan pendapatan pelaku usaha. Ketergantungan terhadap faktor alam tersebut menjadikan usaha batu bata merah memiliki tingkat kerentanan ekonomi yang cukup tinggi.

Di sisi lain, dukungan kelembagaan desa terhadap pengembangan industri batu bata merah masih belum dirasakan secara optimal oleh pelaku usaha. Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan ekonomi lokal, pendampingan usaha, maupun fasilitasi permodalan menunjukkan keterbatasan kapasitas kelembagaan, sehingga belum mampu berfungsi optimal dalam mendukung keberlanjutan usaha ekonomi masyarakat desa. Minimnya program pemberdayaan, pelatihan keterampilan, serta fasilitasi pemasaran menyebabkan pelaku usaha harus mengandalkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki secara mandiri. Keterbatasan dukungan kelembagaan ini memperkuat kondisi kerentanan ekonomi pelaku usaha, terutama dalam menghadapi perubahan pasar dan tekanan ekonomi jangka panjang.

Meskipun berada dalam kondisi yang penuh keterbatasan, pelaku usaha industri batu bata merah tidak sepenuhnya berada dalam posisi pasif. Mereka mengembangkan berbagai strategi bertahan yang bersumber dari hubungan sosial dan nilai-nilai kebersamaan yang telah lama tumbuh dalam kehidupan masyarakat desa. Strategi bertahan tersebut tercermin dalam pemanfaatan modal sosial sebagai basis pertahanan ekonomi pelaku usaha industri batu bata merah di Desa Pengadangan.

Modal Sosial dalam Aktivitas Usaha Industri Batu Bata Merah di Desa Pengadangan

Modal sosial menjadi unsur penting yang menopang keberlangsungan usaha industri batu bata merah di Desa Pengadangan. Modal sosial sendiri menurut Putnam *dalam* (Lubis, 2001; Alfitri, 2023) sebagai suatu tatanan sosial dapat ditingkatkan melalui elemen-elemen fundamental organisasi, yang meliputi kepercayaan, aturan kolektif, serta jalinan kerja sama antarwarga. Modal sosial yang dimiliki pelaku usaha batu bata merah terbentuk melalui interaksi sosial jangka panjang yang melibatkan hubungan kekerabatan, kedekatan tempat tinggal, serta kesamaan profesi. Modal sosial ini tidak hanya berfungsi sebagai perekat sosial, tetapi juga menjadi sumber daya yang dapat dimobilisasi untuk mendukung aktivitas ekonomi.

Modal sosial ini menurut Lesser (2000, Board dan Presutti, 2004; Sayuti, 2024) terdiri dari 3 bentuk yaitu jaringan sosial, kepercayaan, dan norma sosial. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, diperoleh bahwa pelaku usaha batu bata merah di Desa Pengadangan memiliki ketiga bentuk modal sosial tersebut. Ketiga bentuk modal sosial tersebut sangat kuat dan melekat pada kehidupan sehari-hari pelaku usaha. Selain itu, ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan membentuk mekanisme kerja sama yang memungkinkan pelaku usaha bertahan di tengah keterbatasan modal, teknologi, serta dukungan kelembagaan.

1) Jaringan Sosial

Jaringan sosial yakni sekumpulan individu yang dipersatukan melalui ikatan simpati, komitmen moral, serta pola timbal balik dan partisipasi publik yang saling menguatkan (Pratikno dkk: 8; Alfitri, 2023). Jaringan sosial dalam industri batu bata merah terbentuk secara informal melalui hubungan kekerabatan dan kedekatan sosial, dimana interaksi antar pelaku usaha sering kali berlangsung intens dan berkelanjutan. Jaringan sosial ini menjadi sarana utama bagi pelaku usaha dalam membangun kerja sama ekonomi.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa jaringan sosial dimanfaatkan pelaku usaha dalam berbagai aspek produksi seperti saling membantu tenaga kerja, meminjamkan alat produksi, serta berbagi bahan baku. praktik kerja sama tersebut dilakukan tanpa adanya perjanjian formal, namun tetap berjalan baik karena dilandasi oleh hubungan sosial yang kuat. Jaringan sosial ini memungkinkan pelaku usaha untuk mengatasi keterbatasan sumber daya yang dimiliki secara individual. Selain itu, jaringan sosial juga berfungsi

sebagai media pertukaran informasi antar pelaku usaha. Informasi mengenai harga jual, permintaan pasar, dan ketersediaan bahan baku diperoleh melalui interaksi sosial sehari-hari. Pertukaran informasi ini membantu pelaku usaha menyesuaikan strategi produksi dan pemasaran sesuai dengan kondisi pasar yang dinamis.

2) Kepercayaan

Menurut Hasbullah, kepercayaan merupakan pondasi yang mempererat kohesi sosial serta membangun keyakinan antarwarga, di mana kedua elemen tersebut berperan dalam memperkuat struktur modal social (Sayuti, 2024). Selain itu dalam interaksi ekonomi, rasa percaya menjadi elemen fundamental yang berfungsi sebagai penggerak utama dalam memfasilitasi keterlibatan sukarela di sektor produksi maupun aktivitas perdagangan (Santoso, 2020). Kepercayaan dalam industri batu bata merah terbentuk dari pengalaman serta interaksi yang terus berulang. Pelaku usaha cenderung mempercayai sesama pelaku usaha yang telah dikenal secara sosial maupun kekerabatan, sehingga memungkinkan terjadinya kerja sama ekonomi tanpa mekanisme formal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan dalam industri batu bata merah tercermin dalam praktik saling membantu, pinjam-meminjam alat, hingga pada sistem pembayaran tanpa adanya perjanjian tertulis terutama diantara para pelaku usaha dengan pembeli. Dalam kondisi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal, kepercayaan menjadi modal penting yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh dukungan ekonomi dari jaringan sosialnya. Kepercayaan berfungsi sebagai pengganti mekanisme formal dalam menjamin kelangsungan kerja sama ekonomi, sekaligus mengurangi risiko konflik dan ketidakpastian usaha. Dengan adanya kepercayaan, biaya ekonomi yang harus dikeluarkan pelaku usaha dapat ditekan. Dengan demikian, modal sosial tidak hanya berfungsi sebagai perekat sosial, tetapi juga menjadi mekanisme pertahanan ekonomi yang memungkinkan pelaku usaha bertahan di tengah keterbatasan dukungan kelembagaan desa.

3) Norma Sosial

Norma adalah serangkaian regulasi sosial yang menjadi pedoman perilaku bagi setiap individu di dalam kelompok atau lembaga sosial yang bersangkutan (Alfitri, 2023). Norma sosial dalam industri batu bata merah ini muncul dalam bentuk aturan tidak tertulis. Aturan tidak tertulis tersebut terdapat pada penetapan harga awal penjualan batu bata merah yang seragam diantara para pelaku usaha. Aturan ini berfungsi sebagai alat pengendali sosial yang menjaga keseimbangan hubungan ekonomi antar pelaku usaha. Pelaku usaha cenderung menghindari praktik-praktik yang dapat merugikan pihak lain, seperti persaingan tidak sehat atau pelanggaran kesepakatan informal. Dengan adanya aturan yang disepakati bersama, tercipta iklim usaha yang relatif stabil dan kondusif.

Selain norma tidak tertulis, terdapat nilai-nilai yang sangat dijaga yaitu nilai kejujuran dan gotong royong yang berfungsi dalam menjaga solidaritas diantara pelaku usaha. Adanya nilai-nilai inilah yang menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas produksi dan distribusi. Nilai-nilai tersebut membentuk perilaku kolektif pelaku usaha dalam berinteraksi dan bekerja sama. Oleh karenanya, dengan adanya norma tidak tertulis dan nilai-nilai yang dijalankan ini juga dapat mendorong terbentuknya solidaritas ekonomi di antara pelaku usaha. Solidaritas ini tercermin dalam kesediaan untuk saling membantu ketika menghadapi kesulitan ekonomi atau kendala produksi. Solidaritas ekonomi berbasis norma sosial tersebut menjadi faktor penting yang memperkuat ketahanan ekonomi kolektif pelaku usaha industri batu bata merah.

Peran Modal Sosial dalam Menopang Ketahanan Ekonomi Pelaku Usaha di Tengah Keterbatasan Dukungan Kelembagaan

Ketahanan ekonomi pelaku usaha dalam penelitian ini dipahami sebagai bagian dari ketahanan lokal, yaitu kemampuan masyarakat desa untuk bertahan, beradaptasi, dan melanjutkan aktivitas ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya internal, khususnya modal sosial, ketika dukungan kelembagaan formal belum berfungsi secara optimal. Modal sosial yang dimiliki pelaku usaha industri batu bata merah berperan signifikan dalam menopang ketahanan ekonomi mereka, khususnya di tengah keterbatasan dukungan kelembagaan desa. Ketika dukungan formal belum optimal, modal sosial berfungsi sebagai mekanisme alternatif yang memungkinkan pelaku usaha tetap bertahan dan menjalankan aktivitas ekonominya. Keberperanan modal sosial yang tercermin melalui adanya pemanfaatan jaringan sosial, kepercayaan, strategi bertahan, adaptasi

terhadap minimnya dukungan pemerintah serta bentuk solidaritas sosial yang terbangun antar pelaku usaha, pekerja, maupun pembeli menjadi faktor penopang utama dalam keberlangsungan industri batu bata merah di Desa Pengadangan.

Dalam konteks ini, modal sosial diposisikan sebagai basis ketahanan ekonomi lokal, yaitu fondasi sosial yang memungkinkan pelaku usaha membangun berbagai strategi bertahan, seperti kerja sama produksi, saling membantu dalam permodalan, dan berbagi jaringan pemasaran. *Pertama*, adanya jaringan sosial dapat dimanfaatkan sebagai sumber kekuatan material dan non-material. Dimana jaringan sosial sering kali dimanfaatkan sebagai wadah untuk saling membantu baik dalam modal, tenaga, alat, bahkan saling memberikan informasi dan saran untuk keberlangsungan usaha. *Kedua*, modal sosial berupa kepercayaan berperan sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang baik untuk usaha. Pengambilan keputusan berdasarkan kepercayaan ini berdampak positif terhadap usaha terutama dalam peningkatan kualitas hasil produksi. *Ketiga*, modal sosial dapat berperan sebagai strategi bertahan ditengah tantangan. Modal sosial sebagai strategi bertahan ini diwujudkan dalam kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dalam pembelian bahan baku, hingga penjualan. Dan yang *keempat*, modal sosial dapat menjadi cara adaptasi di tengah minimnya peran kelembagaan formal terutama pemerintah desa. Dimana pelaku usaha memanfaatkan jaringan yang merujuk pada *general trust* untuk memperoleh bantuan informasi dan pemasaran untuk keberlanjutan usaha batu bata merahnya karena ketidakadaan dukungan dari pemerintah desa.

Keberperanan modal sosial terhadap ketahanan ekonomi pelaku usaha industri batu bata merah ini juga dapat dilihat dari empat variable dari ketahanan tersebut. Dimana empat variable tersebut diantaranya yaitu kepemilikan tanah, jumlah pendapatan keluarga, pembiayaan pendidikan, serta tabungan keluarga (Alie & Elanda, 2020). Dari hasil penelitian menunjukkan sebagian besar pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari walaupun kadang ada yang menyatakan masih kurang cukup, dapat membiayai pendidikan anak, serta memiliki tabungan walau dalam jumlah yang terbatas. Meskipun pendapatan yang diperoleh relatif terbatas, keberadaan modal sosial memungkinkan pelaku usaha untuk mengurangi tingkat kerentanan ekonomi melalui mekanisme saling membantu dan kerja sama.

Namun demikian, ketahanan ekonomi yang dibangun melalui modal sosial masih memiliki keterbatasan. Modal sosial yang bersifat internal cenderung memperkuat hubungan dalam komunitas, tetapi belum sepenuhnya membuka akses terhadap jaringan eksternal yang lebih luas. Oleh karena itu, penguatan modal sosial perlu diimbangi dengan peningkatan peran kelembagaan desa agar ketahanan ekonomi pelaku usaha industri batu bata merah dapat berkembang secara lebih berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa modal sosial memegang peranan penting sebagai basis ketahanan ekonomi local pelaku usaha industri batu bata merah di Desa Pengadangan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Di tengah keterbatasan dukungan kelembagaan desa dan berbagai kendala struktural, pelaku usaha mampu mempertahankan keberlangsungan ekonomi rumah tangga melalui pemanfaatan jaringan sosial, kepercayaan, dan norma yang tumbuh dalam komunitas lokal. Modal sosial memungkinkan terbangunnya kerja sama, saling membantu, serta mekanisme adaptasi kolektif yang berfungsi sebagai strategi bertahan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Namun demikian, ketahanan ekonomi lokal yang bertumpu pada modal sosial masih memiliki keterbatasan apabila tidak diiringi dengan dukungan kelembagaan yang memadai. Ketergantungan pada jaringan informal dan solidaritas komunitas belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan struktural seperti keterbatasan modal, teknologi produksi, dan akses pasar. Oleh karena itu, penguatan peran pemerintah desa dan lembaga terkait menjadi penting agar modal sosial yang telah terbentuk dapat dioptimalkan melalui kebijakan pemberdayaan dan pendampingan usaha, sehingga ketahanan ekonomi lokal pelaku usaha industri kecil dapat berjalan. Selain itu, diperlukan integrasi antara modal sosial masyarakat dengan kebijakan pembangunan desa agar ketahanan ekonomi lokal tidak hanya bersifat bertahan, tetapi juga mampu berkembang secara berkelanjutan.

REFERENCES

- Afrisawati, A., Irianto, I., & Sahren, S. (2022). Workshop Pemasaran Batu-Bata Menggunakan Media Sosial Pada Kelompok Pengrajin Batu-Bata di Kelurahan Pulo Bandring. *Jurnal Pemberdayaan Sosial Dan Teknologi Masyarakat*, 2(1), 32. <https://doi.org/10.54314/jpstm.v2i1.888>
- Alfitri. (2023). *Pengukuran Modal Sosial*. Idea Press Yogyakarta.
- Alie, A., & Elanda, Y. (2020). Perempuan Dan Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi Di Kampung Kue Rungkut Surabaya). *Journal of Urban Sociology*, 2(2), 31. <https://doi.org/10.30742/jus.v2i2.995>
- Auretha, N. L., Suwartiningsih, S., & Wahyudi, A. (2025). PERAN MODAL SOSIAL DALAM KEBERTAHANAN PEDAGANG LANJUT USIA DI PASAR PROJO AMBARAWA, KAB.SEMARANG, JAWA TENGAH. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(2), 514–523.
- Fahmiya, A. A., Ruja, I. N., Purnomo, A., Sukanto, S., & Bramantya, D. G. P. (2023). Kontribusi industri batu bata merah terhadap pendapatan pekerja di Desa Ngreco Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri. *Jurnal Integrasi Dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial (JIHIS)*, 3(3), 197–202. <https://doi.org/10.17977/um063v3i3p197-202>
- Firmando, H. B. (2021). Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Pengembangan Sektor Perdagangan Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi di Tapanuli Utara). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 107. <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i1.8780>
- Imron, A., & Syafa'at, M. (2020). Revitalisasi Home Industry Berbasis Modal Sosial Sebagai Strategi Ketahanan Ekonomi Menghadapi Pandemi Covid-19. *Prosiding Nasional Covid-19*, 97–101. <https://ojs.literacyinstitute.org/index.php/prosiding-covid19/article/view/45>
- Nasution, A. P., & Pristiyono. (2019). ANTISIPASI KETAHANAN EKONOMI KELUARGA DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN. *Jurnal Ecobisma*, 6(1), 90–97.
- Rohmah, R. I., Rusdijjati, R., & Murniningsih, R. (2024). Kesejahteraan Pekerja, Analisis dari Status Pekerjaan dan Modal Sosial melalui Pasar Kerja. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 414–427. <https://doi.org/10.33059/jseb.v15i2.8720>
- Roslianah. (2023). Penguatan Modal Sosial Untuk Pemberdayaan Strengthening of Social Capital for Empowerment of. *Pallangga Praja*, 5(1).
- Santoso, P. T. (2020). *Memahami Modal Sosial*. CV Saga Jawadwipa.
- Saputro, N. A., Suharso, P., & Hartanto, W. (2020). Modal Sosial Pada Industri Kreatif Berbasis Potensi Lokal Pada Kerajinan Batik Jember. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 14(2), 332–336. <https://doi.org/10.19184/jpe.v14i2.16378>
- Sayuti, R. H. (2024). *Modal Sosial Dan Pembangunan Masyarakat*. Yayasan Sahabat Alam Rafflesia.
- Verthasari, I., & Hidir, A. (2025). *Modal Sosial Industri Keripik Sanjai di Kota Bukitinggi*. 3(1), 619–623.

PRAKTIK *GOVERNANCE* YANG TERMEDIATISASI: ANALISIS MULTIMODAL PADA *CHANNEL* YOUTUBE @*BIDANGKEBUDAYAAN* MILIK DISPARBUDPORA KABUPATEN SUMEDANG

Ulfah Aristia Tresna Gunawan

Kajian Budaya dan Media, Universitas Gadjah Mada
ulfaharistiatresnagunawan@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini berfokus menelaah bagaimana praktik *governance* yang dimediasasi secara visual menjadi produk digital yang didistribusikan melalui media sosial, konten video tidak hanya didudukan sebagai instrumen komunikasi dan arsiparis publik, namun menjadi produk visual yang berkelindan dengan *logika platform* yang sebelumnya tidak ada dalam logika birokrasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif, analisis dilakukan terhadap salah satu video yang terdapat dalam platform YouTube milik Bidang Kebudayaan Disparbudpora Kabupaten Sumedang dengan menggunakan metode multimodal. Hasil penelitian ini menunjukkan keterhubungan yang penting antara moda verbal dan visual dalam video yang saling membangun makna institusional. Moda verbal hadir dalam bentuk tertulis dan lisan, di mana teks tertulis berfungsi menegaskan otoritas administratif dan dominasi institusional. Sementara moda verbal lisan digunakan oleh aktor tertentu untuk menggerakkan narasi utama. Sementara moda visual berperan memvalidasi kehadiran aktor institusional di lapangan, namun video cenderung beroperasi sebagai performa apresiasi institusi alih-alih ruang dialogis terbuka.

Keyword: Mediatisasi, *Governance*, Video

1. PENDAHULUAN

Pergeseran habitus dalam berkomunikasi yang menjadi semakin terdigitalisasi membawa pengaruh besar terhadap dimensi kehidupan bermasyarakat. Merujuk pada *tempo.co* (2025) eksistensi media sosial mengalami transformasi signifikan secara global yang mencangkup pertumbuhan jumlah pengguna, evolusi platform serta dampaknya terhadap bidang sosial dan ekonomi. Kondisi ini mengharuskan pemerintah mengambil tindakan cepat untuk terus melakukan transformasi pelayanan publik ke dalam kanal informasi teknologi digital, salah satunya melalui optimalisasi pemanfaatan media sosial. Selaras dengan apa yang dijelaskan Apandi (2020, dalam Sangaji & Irianto 2025) digitalisasi layanan publik dapat merujuk pada penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Implementasinya dapat melibatkan pemanfaatan berbagai platform digital seperti situs web, aplikasi seluler, media sosial, dan layanan pesan instan. Pemanfaatan media sosial bukan hanya sebuah *tren*, lebih dari itu dapat menjadi kebutuhan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai alat yang dapat memfasilitasi komunikasi dua arah, media sosial dapat menghubungkan agenda pemerintah dengan masyarakat luas, bahkan menawarkan potensi besar untuk meningkatkan efektivitas komunikasi antara instansi pemerintah daerah dengan masyarakat yang dilayani (Mubarok, 2022 dalam Supriyanto et al., 2024). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, penggunaan media sosial juga menjadi bentuk dari penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), menjadi wujud transformasi digital yang mengintegrasikan aktivitas penyampaian informasi secara konvensional ke dalam bentuk-bentuk digital (Fansuri et al., 2024).

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya, media sosial dapat menjadi instrumen penting yang mendorong transparansi dan akuntabilitas publik, harapannya masyarakat dapat terlibat dalam membantu mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan masukan, saran, dan bahkan kritikan yang membangun bagi pembangunan daerahnya (Paribrata, 2017; Suryani, 2017 dalam Fansuri et al., 2024). Sebelum masifnya penggunaan media sosial, pemerintah daerah hanya memiliki ruang publik fisik, namun kini media sosial menjadi infrastruktur digital yang membentuk ruang keterlibatan masyarakat secara langsung. Hal ini dapat mengantisipasi kesenjangan yang terjadi antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta berpeluang membentuk hubungan yang lebih kolaboratif dan inklusif (Supriyanto et al., 2024). Kesadaran pemerintah untuk turut mengoptimalkan media sosial bahkan telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Pemerintah. Kebijakan tersebut ditetapkan untuk memberikan acuan dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan pemanfaatan media sosial di instansi pemerintah. Hal ini semakin mempertegas bagaimana peranan media sosial dewasa ini telah menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan, mengingat bahwa media sosial bukan sekedar teknologi komunikasi yang dapat memberikan efektifitas dan efisiensi, namun dapat menjadi ruang publik yang dikonstruksi oleh teknologi jaringan,

menjadi medium yang mengubah cara masyarakat berdemokrasi, mampu memindahkan pertukaran informasi dan diskusi secara fisik ke dalam ruang yang dibuat oleh algoritma (Boyd, 2010).

Kabupaten Sumedang menjadi salah satu daerah yang aktif memperkuat pengimplementasian SPBE guna mendorong reformasi birokrasi dan kualitas pelayanan public berbasis digital (*sumedangkab.go.id*, 2026). Komitmen tersebut menjadikan Kabupaten Sumedang menjadi salah satu pemerintah daerah yang terbukti unggul dalam inovasi-inovasi layanan digital (Wijaya, 2023 dalam Barsei et al., 2023).

Tidak hanya bagian humas pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang, bahkan beberapa organisasi perangkat daerah seperti Disparbudpora cukup aktif dalam memanfaatkan media sosial sebagai medium komunikasi publik. Jika ditelusuri, Dinas Pariwisata, kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga atau Disparbudpora Kabupaten Sumedang memiliki lebih dari satu akun media sosial dengan format yang berbeda, mulai dari eksistensinya di platform Instagram, Facebook hingga YouTube. Dalam hal ini, media sosial memiliki banyak peluang yang dapat dimanfaatkan, selain menjadi sarana program pemasaran pariwisata, promosi *event* dan kegiatan, media sosial dapat menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah dan *influencer* sebagai pihak eksternal (Etin et al., 2024) dalam membantu mendorong terjadinya strategi pemasaran yang dapat mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan. Hal tersebut memperlihatkan bagaimana media sosial mampu menggeser sekat birokrasi yang kaku secara lebih mudah, sementara masyarakat memiliki akses yang besar dalam melihat apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah. Adapun dari beberapa akun media sosial yang dikelola oleh Disparbudpora Kabupaten Sumedang, platform YouTube menjadi menarik untuk dieksplorasi lebih dalam, terlebih lagi bahwa pada praktiknya, Bidang Kebudayaan melakukan pemanfaatan platform YouTube secara aktif.

Tidak dapat dipungkiri bahwa “*YouTube was increasingly one of several mainstream social media platforms on which universities, businesses, and government departments generally could be expected to have a presence.*” (Burgess & Green, 2018). Di era digital, peranan media sosial seperti YouTube dapat menjadi ekspektasi publik, jika sebuah instansi pemerintahan tidak mengoptimalkan media sosial, maka berpeluang memunculkan keraguan publik yang mempertanyakan transparansi atau profesionalisme instansi. Namun dalam hal ini, optimasi YouTube yang dilakukan khusus oleh Bidang Kebudayaan juga memperlihatkan bahwa proses *mediatization of governance* tidak berlangsung secara bersamaan dalam sebuah institusi, melainkan muncul melalui praktik-praktik spesifik pada bidang tertentu yang memiliki kebutuhan tinggi akan dokumentasi visual di ruang digital. Bidang Kebudayaan memiliki keselarasan dengan kebutuhan representasional yang spesifik pada praktik kebudayaan, hal ini terlihat dari karakteristik kerjanya yang bertumpu terhadap visualitas. Mulai dari objek kesenian, artefak, cagar budaya, pertunjukan hingga proses ritual acap kali bersifat performatif dan kurang lengkap jika hanya sekedar direpresentasikan melalui teks atau gambar statis, sehingga YouTube sebagai platform berbasis audio-visual dapat menjadi ruang ideal dalam mendistribusikan informasi, edukasi bahkan promosi.

Optimalisasi akun YouTube @KEBUDAYAANSUMEDANG milik Bidang Kebudayaan (Disparbudpora) Kabupaten Sumedang terbilang cukup konsisten dalam memproduksi konten video, hal ini terlihat dari kuantitasnya yang telah diunggah sejak tahun 2019. Menurut data akun tersebut memiliki 94 video dengan total 319,389 tayangan dan telah berhasil mendapatkan 3.005 subscribers (data diambil pada tanggal 27 Januari 2025), meskipun frekuensinya masih rendah namun terdapat langkah strategis dalam pengoptimalan konten secara berkala melalui berbagai video yang dikemas secara bervariasi, seperti yang terdapat dalam *Playlists* khusus meliputi— Film Dokumenter Sumedang, Video Klip Sumedang, *Event* Sumedang, Wayang Golek Sumedang dan Pertunjukan Seni Sumedang. Sementara video lainnya seperti Film Pendek hingga Video Dokumentasi Budaya yang menampilkan ekspedisi ke beberapa tempat-tempat bersejarah di Kabupaten Sumedang. Produk konten yang termuat dalam akun YouTube tersebut tidak hanya menjadi tontonan, melainkan menjadi ruang interaksi yang dapat menghadirkan forum diskusi, dalam hal ini teknologi jaringan mengubah konten audio-visual menjadi jaringan sosial lewat fitur teknis yang disediakan oleh platform.

Mengacu pada perspektif Boyd (2010), meski banyak orang seringkali menganggap YouTube sebagai ruang kumpulan video. YouTube sangat memenuhi kriteria sebagai *social network site* dan menjadi bagian dari *networked publics* yang memenuhi empat kriteria— yakni *persistence*, *visibility*, *spreadability* dan *searchability*. Dengan kemampuan *persistence*, video yang diunggah dapat disimpan hingga ditonton secara berulang sebagai arsip digital, sebagaimana akun YouTube @KEBUDAYAANSUMEDANG sebagai media arsip kreatif yang berpeluang menjadi medium pelestarian, di mana visualisasi sejarah dan budaya dapat hidup melalui upaya digitalisasi, menjadi arsip yang dapat tersimpan untuk generasi mendatang. *Visibility*, memungkinkan video yang diunggah di YouTube dapat dilihat oleh jutaan orang, tidak sekadar masyarakat Sumedang namun juga memungkinkan menjangkau masyarakat lain di luar wilayah Kabupaten Sumedang. *Spreadability*, memungkinkan video didistribusikan dengan mudah secara lintas-platform, YouTube sendiri dirancang dengan fitur-fitur *link*, *share* dan kode HTML yang menciptakan penyebaran konten ke platform lain, hal ini mendorong keterlibatan *engagement* dan jaringan penonton yang lebih luas. Sedangkan

searchability berarti dalam platform YouTube siapa pun bisa mencari konten, topik hingga informasi dengan mudah, melalui akun YouTube yang dikelola oleh Bidang Kebudayaan Disparbudpora Kabupaten Sumedang, masyarakat bisa melihat gambaran agenda, program kerja hingga capaian strategis Bidang Kebudayaan yang termediasi melalui konten-konten audio-visual.

Penelitian terkait pemanfaatan media sosial sebagai praktik digitalisasi atau *e-governance* sudah banyak dilakukan, namun penelitian yang melihat konten arsip dokumentasi budaya sebagai bagian dari praktik kinerja pemerintahan yang dimediasasi masih relatif terbatas, terutama analisis terkait produk digital berbasis video yang didistribusikan melalui platform YouTube. Dalam konsep *mediatization* (Couldry & Hepp, 2017) realitas sosial seperti produk-produk kebudayaan mengalami transformasi komunikatif dan proses sosial, di mana tidak hanya terjadi pada cara penyampaian pesan, namun juga perubahan pada praktik sosial. Ketergantungan pada media sebagai infrastruktur menjadi media tidak lagi dilihat sebagai medium perantara komunikasi semata, lebih dari itu adalah fondasi realitas sosial yang membentuk cara aktor di dalamnya, termasuk instansi pemerintah bertindak, berhubungan dan menegosiasikan makna. Dalam hal ini, video dalam akun YouTube @KEBUDAYAANSUMEDANG menjadi manifestasi dari *Mediatization of Governance*, pelaksanaan pemerintahan tidak hanya dijalankan secara administratif, tetapi juga dikonstruksi melalui praktik representasi performatif yang kerap berkelindan dengan logika platform. Ketika instansi pemerintahan seperti Disparbudpora Bidang Kebudayaan Kabupaten Sumedang memilih platform YouTube untuk dioptimalisasi, maka konten-konten yang diunggah di dalamnya tidak akan terlepas dari *guiding logic* platform yang tidak ada dalam logika birokrasi sebelumnya. Melalui mediatisasi, Bidang Kebudayaan tidak hanya menjadi bukti kerja nyata namun ikut mempertunjukkan kinerjanya lewat visibilitas digital, sehingga konten video sebagai produk mediatisasi bukanlah sesuatu yang netral. Korthagen dan Klijn (2014) bahwa "*media do not neutrally transmit information, but, like all institutions, shape and select information in certain ways*" (Altheide and Snow 1979, Mazzoleni and Schulz 1999, Cook 2005, Parkinson 2006), konten yang didistribusikan melalui media menjadi hasil seleksi yang membentuk representasi *governance* yang memusatkan pada figurasi tertentu.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan melakukan analisis terhadap salah satu video yang terdapat dalam platform YouTube Kebudayaan Sumedang, sebuah media kreatif dan arsip video bidang kebudayaan disparbudpora Kab. Sumedang dengan memfokuskan analisis pada konten video dokumentasi kebudayaan yang berjudul "*DISCOVERY: Columnar Joint – GUNUNG SUSURU Sumedang*", diunggah pada 3 Oktober 2025 dengan total durasi 8:46 menit. Pemilihan objek penelitian ini didasari pada pengemasan konten yang secara eksplisit menunjukkan adanya upaya mediatisasi atas performa kehadiran kinerja pemerintah Bidang Kebudayaan Disparbudpora Kabupaten Sumedang yang berkelindan dengan logika platform YouTube, selain itu pemilihan konten tersebut juga tidak lepas dari pertimbangan pemilihan *engagement*, meskipun tingkat *engagement* konten tersebut tidak tergolong tinggi namun cukup menonjol jika dibandingkan dengan konten lainnya yang serupa (konten dengan muatan kunjungan warisan budaya) pada akun yang sama. *Engagement* yang diperoleh meliputi— 808 tayangan, terdapat 53 *likes* dan 5 komentar yang menunjukkan masih mengindikasikan adanya interaksi dari audiens. Kendati demikian, *engagement* pada konten tersebut tidak menjadi indikator utama yang menentukan penelitian, namun hal ini tetap menjadi salah satu pertimbangan dalam pemilihan objek karena menandakan kecukupan dalam menarik perhatian dan pemaknaan pesan oleh audiens. Teknik pengumpulan data akan dilakukan melalui observasi daring melalui teknik simak catat yang menyimak penggunaan bahasa dan visual secara cermat, selain itu teknik studi pustaka juga dilakukan guna mengumpulkan data melalui penelaahan literatur, buku, catatan hingga berita yang relevan dengan topik penelitian.

Konten video yang terdapat dalam platform YouTube kaya akan visual dan narasi, kondisi ini selaras dengan penjelasan Denzin & Lincoln (2018), bahwa terdapat berbagai jenis data empiris yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, diantaranya narasi, teks budaya hingga materi visual. Adapun penelitian kualitatif terletak secara situasional dan kontekstual, terdiri dari serangkaian interpretatif yang membuat sesuatu menjadi tampak, dalam hal ini posisi peneliti tidak hanya melihat realitas namun mengubah cara realitas itu dipahami. Adapun penelitian ini akan menggunakan metode multimodal dengan melakukan analisis mendalam pada aspek visual, audio, teks dan struktur konten guna membaca representasi serta praktik produksi, sebagaimana dikembangkan oleh Kress (2010) dalam konsep multimodal, setiap moda melakukan *division of semiotic labour* atau pembagian kerja semiotik berbeda yang di orkestrasi untuk memproduksi makna tertentu. Landasan konsep multimodalitas ini dapat menafsirkan dan memahami data visual maupun non-visual secara simultan, guna mengkaji berbagai moda komunikasi melalui gambar (diam atau bergerak), video, audio serta material tiga dimensi (Dicks, 2019 sebagaimana dikutip dalam Fazeli et.al, 2023).

Melalui pembacaan ini, analisis dilakukan guna mengungkap bagaimana konten video yang dibentuk melalui unsur moda seperti verbal, visual dan audio yang diunggah dalam platform YouTube merefleksikan

konsep *mediatization of governance*, di mana kinerja dan kehadiran pemerintahan bidang kebudayaan dimediasi serta diarsipkan secara terbuka melalui orkestrasi multimodal. Di mana terdapat moda dalam konten video yang saling menjalankan fungsinya secara spesifik, meski setiap moda memiliki kekuatan dan keterbatasannya masing-masing, sebagaimana gambar dapat memperlihatkan apa yang membutuhkan waktu lama jika harus di baca, sementara teks atau narasi dapat menamai apa yang sulit ditampilkan secara visual (Kress, 2010). Hal ini menjadi penting karena dalam komunikasi manusia tidak pernah sepenuhnya dalam moda verbal, sebab ada gestur, visual, hingga material yang menyertainya, sementara platform YouTube membuat visibilitas multimodalitas menjadi lebih terlihat, praktik komunikasi dalam hal pelaksanaan pemerintahan yang sebelumnya berlangsung di belakang layar, kini menjadi terekspos dan terencana karena direkam, ditampilkan ulang hingga diedarkan secara publik menjadi objek representasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebuah konten dapat dipahami sebagai produk komunikasi yang tidak bersifat netral, melainkan dihasilkan melalui proses produksi makna yang dikonstruksi oleh aktor pembuatnya dan kerap bersinggungan dengan logika platform tertentu. Guna menganalisis konten video, analisis tidak cukup dengan hanya membaca narasi dan teks verbal semata, sebab konten video juga tersusun melalui berbagai moda di dalamnya, termasuk visual dan audio. Sehingga mengacu pada konsep Kress (2010), video yang termuat dalam akun YouTube @KEBUDAYAANSUMEDANG dapat dipahami sebagai teks multimodal yang setiap modanya memiliki potensi semiotik berbeda yang bekerja untuk saling memproduksi makna. Video konten “**DISCOVERY: Columnar Joint – GUNUNG SUSURU Sumedang**” (link akses: <https://www.youtube.com/watch?v=PK0hNVzMk8M>) dengan durasi 8 menit lebih ini, secara konsep memuat pendokumentasian tindak lanjut lapangan terhadap situs temuan columnar joint yang berada di Gunung Susuru, Dusun Sahang, Desa Dayeuh Luhur, Kecamatan Ganeas. columnar joint atau biasa disebut kekar tiang merupakan struktur khas yang umum dijumpai pada batuan basal tetapi kadang kadang juga terdapat pada batuan beku jenis lainnya. Struktur batu ini disebabkan karena adanya pendinginan dan penyusutan merata dalam magma, biasanya dicirikan dengan perkembangan empat, lima, atau enam sisi prisma dan kemungkinan juga dipotong oleh retakan yang melintang (Suryawan et al., 2018).

Video yang dipublikasikan melalui akun YouTube @KEBUDAYAANSUMEDANG milik Bidang Kebudayaan tersebut menampilkan kehadiran langsung Kepala Bidang Kebudayaan beserta Kepala Desa Dayeuh Luhur, Kadus Saheng serta Masyarakat Dusun Sahang Kombinasi dalam konten video tersebut juga terbentuk melalui proses penyuntingan video yang ditambahkan *teks, backsound, opening* hingga *credit* di akhir videonya. Hal ini menunjukkan bahwa video dokumentasi budaya oleh Bidang Kebudayaan Disparbudpora tidak ditampilkan dalam keadaan mentah, melainkan hadir melalui konstruksi yang berkelindan dengan logika platform. Penyuntingan sendiri bukan sekadar tahap akhir dalam proses pembuatan video, namun juga menjadi bentuk negosiasi instruksi resmi dari ekosistem YouTube, sebagaimana rekomendasi yang tercantum dalam YouTube Help melalui *Creator Tips* bahwasannya pengeditan adalah upaya sadar yang dirancang untuk menghasilkan video yang baik dan menjadi strategi dalam menarik reaksi audiens. Sehingga Bidang Kebudayaan sebagai aktor *designer* yang memproduksi video konten tersebut, sejatinya telah melakukan orkestrasi berbagai moda dengan mekanismenya yang ditentukan oleh *affordance* teknologi.

3.1. Moda Verbal (Bahasa)

3.1.1 Verbal Tertulis (*written discourse*)

Dalam video, moda verbal muncul berupa verbal tertulis (*written discourse*) dan verbal lisan (*spoken discourse*), di mana keduanya hadir dengan fungsinya masing-masing. Beberapa verbal tertulis yang ditemukan dalam video diantaranya teks opening berupa tipografi, teks titik lokasi perjalanan, teks lokasi hingga credit di akhir video.



Gambar 1. Teks Opening Konten Video “DISCOVERY: Columnar Joint – GUNUNG SUSURU Sumedang”

Dalam konten video yang didistribusikan secara luas melalui YouTube, konten tidak hanya menjadi arsip digital yang pasif, namun eksistensinya hadir untuk mendapat atensi yang lebih besar dari audiens. Opening dalam video merupakan cuplikan pertama yang dapat meningkatkan profesionalisme video, teks dalam opening dapat berfungsi sekaligus untuk menekankan arah kepada audiens tentang apa yang akan mereka tonton. Sebagaimana penganalogian teks yang diposisikan seperti *pearls on a string* (Kress, 2010). Teks yang ada dalam opening sebagai moda verbal tertulis bekerja secara linier, menjadi kerangka yang mengarahkan isi penayangan video konten tersebut yang sejak awal telah menentukan arah pemaknaan. Dalam teks “Columnar Joint - Gunung Susuru Sumedang” yang dimunculkan di awal video, semakin menegaskan bahwa video tersebut akan mengangkat sebuah objek budaya yang terdapat di Gunung Susuru Sumedang, teks memberi identitas sebagaimana tindak lanjut lapangan yang dilakukan Bidang Kebudayaan untuk menilik situs columnar joint. Adapun dalam teks ‘Columnar Joint’ yang dihadirkan tidak ditampilkan melalui penulisan teks biasa, namun teks hadir melalui teknik tipografi yang menonjolkan *pattern* bebatuan guna mengekspresikan nuansa dan topik dari isi konten tersebut. Dilansir melalui telkomuniversity.ac.id (2023). Teknik tipografi tidak sekedar untuk memperhitungkan penampilan dan kesan visual semata, namun juga turut memperhatikan aspek daya tarik, pemahaman pembaca serta maksud pesan yang ingin disampaikan.



Gambar 2. Teks Lower-Third yang Muncul dalam Layar

Teks tertulis juga muncul melalui teknik *lower-third* yang ditempatkan pada bagian bawah layar video, teknik ini menjadi penanda yang memberikan informasi identitas pada siapa saja yang berbicara. Sebagaimana ditegaskan Purnomo & Islami (2023) teknik *lower-third* bertujuan untuk memberikan manfaat bagaimana cara menambahkan serta memberikan informasi tambahan tanpa mendistraksi visual utama, melalui *lower-third* pula aktor yang berbicara dalam konten video dapat diketahui identitasnya seperti nama dan jabatan yang dimilikinya, tanpa harus memperkenalkan diri secara. Teks yang muncul melalui *lower-third* tersebut diantaranya Suhadi S. Kom sebagai Jafung Bidang Kebudayaan Disparbudpora Kab. Sumedang, Moh. Budi Akbar, S. Sok sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Disparbudpora Kab. Sumedang, serta Eman Senin Sutisna sebagai Kepala Desa Ganeas. Dalam observasi yang penulis temukan, penjabaran teks ‘Kepada Desa Ganeas’ di dalam video seharusnya merujuk pada ‘Kepada Desa Dayeuhluhur’ tempat di mana objek columnar joint ditemukan. Menurut laporan portal *inisumedang.com* (Arif, 2005) disebutkan bahwa nama Eman Senin Sutisna yang juga muncul dalam *lower-third* merupakan seorang Kepala Desa Dayeuhluhur. Sehingga hal ini dapat menjadi indikasi bahwa dalam konten video tersebut tidak luput dari kesalahan teknis. Mengingat bahwa Desa Ganeas maupun Desa Dayeuhluhur merupakan dua wilayah administratif yang memiliki dua kepala desa berbeda. Dalam konteks pelaksanaan pemerintahan yang dimediasasi, konten video yang didistribusikan dalam platform YouTube tidak hanya menjadi produk komunikasi semata, sehingga diskrepansi data seperti

penyebutan identitas kepada desa dapat berimplikasi pada profesionalisme representasional institusi itu sendiri. Dalam orkestrasi multimodal, identitas Kepala Desa Dayeuhluhur menjadi penting sebagai representasi yang mewakili warga Dayeuhluhur yang menjadi objek ditemukannya *columnar joint*, sehingga proses konstruksi pula penting untuk memerhatikan akurasi, sementara itu nama Dayeuhluhur tetap ditegaskan dalam setiap narasi video.

Terlepas dari itu, secara implisit konstruksi ini menunjukkan bagaimana kehadiran teks *lower-third* memperlihatkan siapa saja yang hadir dan diberikan *agency* untuk bersuara, ketiganya sama-sama menjadi aktor birokrasi yang dapat mewakili ‘suara institusi’. Kabid dan Staff mewakili pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, sementara itu Kepala Desa memiliki peranan yang sentral dalam tata kelola pemerintahan desa, secara administratif ia merupakan pemimpin eksekutif dalam ruang lingkup desa. Dalam konteks mediatisasi, posisinya menjadi strategis sebagai pemberi validasi atas agenda tindak lanjut lapangan yang dilakukan Bidang Kebudayaan sebagai wakil pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, sekaligus menjadi bentuk sinergitas diantara kedua instansi tersebut. Dalam hubungan birokrasi, pemerintah desa dan Disparbudpora memiliki peranan vital yang berfokus pada kemitraan strategis dalam pengembangan potensi lokal, sebagaimana *columnar joint* yang disinyalir dapat menjadi sebuah potensi dalam video tersebut.

Sementara itu, penulis tidak menemukan teks *lower-third* yang muncul untuk memberi identitas pada beberapa orang lainnya atau warga sekitar yang turut menemukan *columnar joint* di daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa konten video tersebut dikonstruksi dengan menampilkan siapa yang berbicara dan dapat validasi melalui praktik identifikasi dalam bentuk moda verbal, sekaligus secara implisit menunjukkan siapa saja yang hadir namun tidak bertindak untuk memberikan suaranya. Dalam bentuk mediatisasi (Couldry & Hepp 2010) memungkinkan terjadinya pemberian *agency* kepada figurasi tertentu dari orang dan institusi, dengan memberi mereka peluang-peluang khusus dalam konstruksi dunia sosial sekaligus membatasi *agency* dari pihak-pihak lainnya. Bentuk mediatisasi ini menentukan kapasitas dalam mengonstruksi realitas sosial yang dikenali dan dimaknai melalui konten video yang terdapat dalam platform YouTube. Melalui kehadiran *lower-third* penulis dapat mengidentifikasi bagaimana ketiga aktor tersebut hadir tidak hanya bertindak untuk memberikan suara namun juga diberikan identitas dan makna yang dapat diidentifikasi secara mudah oleh audiens, *agency* yang dimiliki ketiga aktor tersebut juga memberi legitimasi peran yang menentukan otoritas suara, serta menstabilkan posisi bahwa apa yang sedang dibicarakan menjadi sumber penting. Dalam konten video tersebut *lower-third* bukan sekadar teks kecil yang memberikan identitas seseorang, namun juga memperkuat *agency* institusional dalam memproduksi *voice*, sebagaimana mengacu pada Couldry (2010) yang memandang *voice* sebagai bentuk *reflexive agency*, dalam konteks multimodal, moda verbal tertulis berfungsi sebagai sarana artikulasi *voice* yang mengarahkan audiens untuk membaca ketiga aktor tersebut bukan lagi sebagai individu biasa, melainkan sebagai representasi negara yang dan mendapatkan legitimasi sah dari struktur pemerintahan.



Gambar 3. Teks sebagai Otoritas Administratif

Dalam konten video, ditemukan teks yang hadir sebagai representasi otoritas administratif yang dapat memberi makna dan konteks geografis secara langsung. Eksistensi teks yang muncul beriringan dengan grafis saling bekerja sama dalam memberikan *agency* pada lokasi tersebut. Tanpa adanya teks yang jelas, audiens akan cukup kesulitan untuk memahami kemunculan *icon location* hingga garis konektor yang meliuk-liuk berwarna putih, sementara itu dengan bantuan visual di belakangnya audiens hanya akan melihat bundaran jalan dengan spot mahkota binokas. Ketika teks penamaan itu dimunculkan, maka audiens akan lebih mudah memahami bahwa bagian konten tersebut menunjukkan titik keberangkatan hingga titik tujuan dari agenda tindak lanjut lapangan yang dilakukan Bidang Kebudayaan. Teks ‘Sumedang Kota’ mengindikasikan titik awal perjalanan, sebuah ruang yang mengacu pada pusat pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang, di mana dalam ruang tersebut menjadi tempat Disparbudpora Kabupaten Sumedang berada, posisi ini turut memastikan bahwa

inisiatif berangkat dari koordinasi formal pemerintahan yang terletak di Kota Sumedang. Sementara itu teks ‘Gunung Susuru’ mengindikasikan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Sumedang yang menjadi titik tujuan dalam video tersebut. Teks ini memberikan penanda penting yang semakin menegaskan bahwa Gunung Susuru menjadi tempat ditemukannya objek *columnar joint*. Selanjutnya teks juga hadir untuk mempertegas keterangan terkait lokasi dengan lengkap dan spesifik. Moda verbal tertulis yang hadir bertugas dalam memberikan presisi administratif, sehingga tanpa kehadirannya, audiens hanya akan melihat gambaran perjalanan dinas melalui moda visual semata. Eksistensi teks ini dapat menjadi instrumen kontekstual spasial yang memberikan legitimasi faktual yang dapat meningkatkan kebenaran informasi yang disampaikan melalui konten video. Namun temuan mengenai ketidaksesuaian identitas Kepala Desa (dalam gambar 2) menunjukkan adanya kontradiksi, di satu sisi video konten berusaha tampil presisi secara lokasi, namun di sisi lain terjadi kesalahan teknis yang menyebabkan pelemahan validitas narasi.



Gambar 4. Teks Credit

Moda verbal tertulis muncul pula di bagian akhir berupa credit. Dalam hal ini, credit tidak semata-mata hadir sebagai pelengkap yang dapat menghindari pelanggaran Hak Cipta semata namun juga memberikan fungsi simbolik yang lebih luas. Teks “Dokumentasi Arsip Bidang Kebudayaan Disparbudpora Kabupaten Sumedang Tahun 2025” menjadi penegasan dominasi institusional yang memperlihatkan bagaimana mediatisasi dilakukan secara langsung oleh Bidang Kebudayaan, instansi mengkonstruksi temuan *columnar joint* bukan hanya sebagai temuan warga, namun menjadi arsip penting bagi pemerintah daerah. Arsip tersebut pula dapat menjadi bukti konkrit bagaimana agenda tindak lanjut lapangan termediatisasi sebagai validasi kerja Bidang Kebudayaan. Di era digital, media memegang peranan penting dalam sebuah instansi pemerintahan, sehingga tata kelola mengadaptasi ritme kerja media dengan mengembangkan formatnya. Meski birokrasi tertulis tetap ada namun tidak dipungkiri bentuk pengemasannya menjadi lebih bervariasi, sebagaimana arsip dokumentasi Bidang Kebudayaan yang dibuat menjadi konten video yang dapat didistribusikan secara luas melalui platform YouTube. Tindakan pemerintah yang dimediatisasi tersebut memungkinkan untuk mendapat makna dan legitimasi dari publik, Sebagaimana proses historis sebelumnya bahwa peredaran dokumentasi tertulis mengubah praktik pemerintahan untuk berinteraksi dengan wilayahnya kekuasaannya (Couldry & Hepp, 2017), bentuk-bentuk *governance* yang semakin termediatisasi dewasa ini, seperti konten video arsip dokumentasi Bidang Kebudayaan Disparbudpora Kabupaten Sumedang yang juga mengubah cara bagaimana otoritas ditunjukkan, keterlibatan partisipasi hingga representasi ditampilkan.

Lebih lanjut, dalam credit tersebut tidak ditemukan daftar seluruh tim di balik layar yang berkontribusi dalam pembuatan konten video tersebut. Meski umum terjadi, ketidakcantuman identitas tim pencipta dalam credit tetap memunculkan risiko dari sisi etika yang perlu dipertimbangkan. Selain memiliki fungsi sebagai stempel, credit juga menjadi bagian penting sebagai ruang pengakuan dan apresiasi terbuka kepada seluruh tim yang terlibat dalam proses kreatif pembuatan video konten. mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014, sejatinya pencipta yang terlibat dalam pembuatan karya memiliki hak moral untuk dicantumkan namanya. Meski tim di belakangnya terafiliasi dengan instansi Disparbudpora, namun hak moral tetap melekat pada individu di baliknya meski terdapat hubungan kerja di dalamnya. Dalam konsep mediatisasi (Couldry & Hepp, 2017) credit dapat dilihat sebagai bentuk simbolik pengakuan *agency*, tim produksi di balik layar secara faktual menunjukkan kolektivitas kerja, mereka ada dalam praktik namun tidak diberikan pengakuan secara simbolik. Sementara itu sentralitas instansi pemerintahan yang dihadirkan dalam credit menunjukkan sebagai aktor tunggal, sementara tim di belakang layar absen secara simbolik, sehingga credit tersebut menunjukkan adanya penyeragaman representasi simbolik dimana *agency* tim produksi diringkas ke dalam satu subjek kolektif.

3.1.2 Verbal Lisan (*spoken discourse*)

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya melalui teks *lower-third* (data: gambar 2) terlihat hanya ada tiga aktor yang muncul untuk berbicara sehingga moda verbal lisan hanya muncul dari ketiga aktor tersebut. Secara keseluruhan teknik komunikasi yang dikemas dalam konten video bukanlah dalam bentuk wawancara dialogis, melainkan dalam bentuk monolog yang terorkestrasi, ketiganya tidak melakukan dialog satu sama lain, melainkan menyampaikan narasi pembicaraan langsung secara bergantian. Dalam konten video tersebut terdapat kontruksi representasi naratif dari setiap masing-masing aktor dengan menyampaikan pesan yang berbeda dan terstruktur, memberikan kesan bagaimana ketiganya menjalankan fungsi birokrasi yang saling melengkapi dalam membangun citra pemerintahan yang responsif.

Narasi yang Muncul Sebagai *Triggering Event*

Pada bagian awal, narasi verbal lisan dihadirkan lewat Jafung Bidang Kebudayaan Disparbudpora Kab. Sumedang. Aktor dalam bagian ini menjadi perpanjangan tangan instansi yang membuktikan bahwa pemerintah telah hadir sebelum dilaksanakannya tindak lanjut lapangan yang dimediasi secara matang melalui verifikasi awal yang juga dimediasi, sekaligus memvalidasi temuan awal dari objek *columnar joint* di Gunung Susuru. Hal ini selaras dari narasi yang disampaikan “... izin pimpinan melaporkan, hari ini saya berada di gunung susuru... ditemukan lempengan batu yang cukup besar...”, kemudian narasi tersebut dilanjutkan dengan harapan agar apa yang telah menjadi temuan tersebut dapat segera ditindak lanjuti oleh pihak-pihak terkait, seperti Kabid Kebudayaan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Dalam konten video yang dikonstruksi sebagai hasil dari mediatisasi, penempatan narasi di bagian di awal sekaligus memberikan justifikasi teknis yang dapat menjadi *triggering event*, di mana agenda tindak lanjut lapangan menjadi agenda responsif yang dilakukan Bidang Kebudayaan untuk merealisasikan apa yang telah disampaikan oleh Jafung Bidang Kebudayaan tersebut. Mengacu pada Couldry & Hepp (2017) bahwa “*certain forms of mediatization offer agency to certain figurations... while limiting the agency of others.*”, dalam hal ini aktor tetap mendapat *agency* namun muncul dari posisi relasionalnya dalam figurasi yang dimediasi meski dalam koridor yang terbatas, ia berperan dalam menonjolkan bagaimana pemerintah tampak hadir dengan membawa data lapangan, narasinya menggerakkan cerita dalam konten video namun tetap ada batasan secara simbolik, *agency*-nya cukup untuk melakukan validasi, namun tidak mendapatkan klaim otoritas untuk menjelaskan keseluruhan narasi dalam konten video.

Narasi Kolaboratif & Performatif

Dalam konten video tersebut, Kepala Bidang Kebudayaan memegang peranan penting sebagai narator yang menunjukkan kehadiran pemerintah daerah, ia menjadi aktor sentral yang memiliki otoritas dalam mewakili narasi pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang. Narasinya awalnya yang dibuka dengan “... hari ini Bidang Kebudayaan berada di Gunung Susuru, Dusun Sahang, Desa Dayeuhluhur, Kec. Ganeas” tidak hanya merepresentasikan bentuk laporan, namun juga menunjukkan performa pemerintahan yang responsif dengan mengubah temuan warga atas *columnar joint* menjadi agenda resmi pemerintahan. Terdapat narasi sinergitas juga disampaikan secara langsung melalui pernyataan “... kami didampingi oleh Pak Kades beserta beberapa tokoh masyarakat, ada Pak Kadus, Pak RT..” hal ini menunjukkan bahwa dalam konten video pemerintahan daerah dalam agendanya kerap bersinggungan dengan tokoh-tokoh lokal dengan turut serta dimediasi. Kehadiran tokoh masyarakat ini bukan sekadar formalitas koordinasi, namun berperan sebagai fungsi strategis yang sangat krusial dalam birokrasi pemerintahan, tanpa adanya masyarakat lokal yang tampil dalam layar maka agenda tindak lanjut dapat dianggap sebagai tindakan invasi yang tidak melibatkan masyarakat setempat. . Sehingga masyarakat yang ikut dihadirkan semakin memperkuat validasi pembangunan yang partisipatif, meski beberapa tokoh masyarakat seperti Pak Kadus, Pak RT ataupun masyarakat di sekitarnya absen dalam moda verbal karena tidak menampilkan posisi untuk berbicara. Kolaboratif yang ditunjukkan juga menjadi upaya dalam mengimplementasikan *good governance* sebagaimana terimplementasi dari narasi yang diungkapkan oleh Kepala Bidang Kebudayaan “...kami juga berkomitmen dengan Pak Kades dan masyarakat untuk sama-sama menjaga tinggalan geologi ini dan bukan hanya tinggalan geologi tapi tinggalan biologi dan budaya yang ada di khususnya di Desa Dayeuhluhur, umumnya di Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang...”.

Sebagai aktor sentral, Kepala Bidang Kebudayaan memperoleh *agency* interpretatif melalui figurasi praktik yang termediatisasi, ia menjadi pembawa narasi yang tidak hanya melaporkan, namun juga mengarahkan cara publik memahami realitas budaya dengan menjelaskan dan membongkai makna dari objek *columnar joint*, ketika narasi tersebut dimediasi dalam bentuk konten video, maka kapasitas dan kredibilitasnya sebagai pemimpin berpeluang diakui secara publik. Sebagai contoh, penjelasan muncul melalui konteks yang menjelaskan *history value* dari objek yang bersangkutan “*ada columnar joint atau terbentuk dulunya itu lahar dingin yang mengeras menjadi batu, yang dimungkinkan ini di zaman tersier pernah ada gunung merapi purba*

di sini sekitar mungkin 20-60 juta tahun yang lalu..” lebih lanjut ia juga mendeskripsikan bagaimana objek yang terdapat di Gunung Susuru memiliki keunikannya tersendiri karena posisinya yang miring jika dibandingkan secara ilmiah dengan tempat lain. Narasi yang disampaikan tersebut melalui konten video, secara tidak langsung dapat menjadi bukti performativitas visual yang menunjukkan kompetensinya dalam berkomunikasi. Kompetensi tersebut merujuk pada bagaimana seorang pemimpin publik dalam menyampaikan ide, sikap, nilai-nilai kepada pegawainya, salah satunya melalui penyampaian informasi (Suliyadi, 2018). Ketika praktik tersebut dimediasasi melalui platform YouTube, penyampaian informasi tidak terbatas pada ruang internal birokrasi, namun juga sasarannya tertuju kepada audiens publik yang lebih luas.

Selain itu, narasi performatif juga ditunjukkan sebagai upaya revolusioner juga muncul melalui moda verbal lisan. Columnar joint dibingkai memiliki nilai yang unik, langka dan dikagumi, sehingga objek tersebut bukan lagi sebagai benda mati tanpa makna, namun juga menjadi aset yang berpotensi bagi Kabupaten Sumedang “... *struktur batu ini juga mudah-mudahan bisa ikut memperkuat juga harapan Kabupaten Sumedang untuk dijadikan kawasan geopark...*”. Visi tersebut juga diperkuat dengan upaya perealisasiannya melalui narasi yang mengindikasikan mobilisasi sumber data intelektual, hal ini menunjukkan pengakuan dan keterbatasan bahwa Bidang Kebudayaan tidak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan visi dalam menciptakan kawasan geopark di Kabupaten Sumedang, meski memiliki otoritas administratif namun pemerintah tidak memiliki otoritas secara epistemik, agar temuan tersebut mendapatkan legitimasi secara ilmiah maka kehadiran para ahli dan akademisi memegang peranan penting. Dalam hal ini, mediatisasi yang didistribusikan melalui platform YouTube dapat bertransformasi menjadi katalisator inklusif di mana undangan atau ajakan disampaikan secara terbuka.

Narasi Legitimasi Penutup

Kepala desa melalui narasi yang disampaikannya menjadi aktor yang berperan dalam memberikan legitimasi dan apresiasi terhadap tindak lanjut lapangan yang dilakukan oleh Bidang Kebudayaan Disparbudpora Kabupaten Sumedang, munculnya moda verbal lisan melalui Kepala Desa pula kemudian menegaskan sinergitas yang tidak hanya diklaim dari pihak Bidang Kebudayaan sebagai wakil pemerintah daerah, namun juga terverifikasi dari sisi masyarakat setempat yang diwakilkan oleh kepala desa, hal ini tercermin dari ungkapannya “*Intinya saya berterima kasih sudah sigap ini dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Sumedang untuk mengunjungi tempat ini. Mudah-mudahan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sumedang terus maju dan mudahan-mudahan Kabupaten Sumedang terus maju juga, menjadi icon tentang temuan-temuan purbakala yang ada di Kabupaten Sumedang.*”. Meski diberikan ruang untuk berbicara namun dalam kerangka figurasi yang termediatisasi ia mendapat *agency* yang berbeda dengan aktor sentral yang dapat menafsirkan objek columnar joint secara mandiri, representasi posisi Kepala Desa dalam video konten hanya berbicara untuk menyampaikan harapan dan ungkapan terima kasih. Adapun narasi harapannya tersebut dibuktikan dengan penyampaian narasinya “*mudah-mudahan dengan adanya temuan ini, Kabupaten Sumedang pada umumnya, khususnya untuk Desa Dayeuhluhur, Kecamatan Ganeas bisa menjadi suatu tempat wisata ke depannya...*”. Sementara itu narasi Kepala Desa tersebut yang diletakan di urutan akhir vidio merupakan hasil kontruksi yang mengorkestrasi narasi secara terstruktur dengan membangun logika aksi-reaksi— di mana pemerintah datang, hadir dan membawa visi kemudian masyarakat setempat yang diwakilkan kepala desa memberikan apresiasi dan menaruh harapannya.

3.2. Moda Visual (Gambar)

3.1.2 Visual (Gambar)

Gambar menjadi komponen dasar video yang tidak dapat dipisahkan, kehadirannya dapat menangkap satu momen dengan moda yang seolah-olah hidup dan bergerak. Video YouTube menjadi konten yang sangat mengandalkan visualitas. Dalam konsep multimodal, visual memiliki kapasitas semiotiknya sendiri dalam membangun makna dengan bekerja berdampingan bersama moda verbal (Couldry & Hepp, 2017). Dalam mediatisasi tindak lanjut lapangan yang menjadi agenda Bidang Kebudayaan, visual tidak hanya sekadar menampilkan estetika namun juga bekerja sebagai praktik sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam moda verbal sebelumnya, saat ketiga aktor berbicara, visual yang hadir menampilkan fisik ketiganya, meski dalam beberapa bagian tidak berada dalam satu bingkai yang sama, tanpa adanya visual yang dihadirkan, audiens tidak dapat melihat dan memaknai bagaimana gambaran ketiga aktor tersebut, seperti cara komunikasinya melalui bahasa tubuh hingga ekspresinya ketika berbicara.



Gambar 5. Sample Visual Asimetris Relasi Kuasa dalam *Frame*

Konten video menunjukkan bahwa aktor yang berbicara pasti akan mendapat ruang dalam bingkai, sehingga dapat dipastikan bahwa Kepala Bidang Budaya sebagai aktor sentral dalam konten tersebut lebih banyak mendapatkan sorotan dibandingkan aktor lainnya. Sementara itu, beberapa tokoh masyarakat dan warga sekitar yang terlihat, tidak absen secara visual, namun eksistensinya menjadi subjek yang pasif, mereka tertangkap kamera namun hanya sebagai pelengkap. Dalam studi media, visual menjadi mekanisme seleksi yang dapat mengkonstruksi siapa dan apa yang mendapat ruang di mata publik. Kamera secara konsisten memberikan banyak sorotan melalui teknik pengambilan *close-up* hingga *full body* terhadap kehadiran Kepala Bidang Kebudayaan. Butler (sebagaimana dikutip dalam Couldry, 2003) mengungkapkan bahwa proses materialisasi memungkinkan beberapa jenis *voice* muncul sebagai "*possible*" (dianggap ada) dan yang lain tidak (dianggap tidak ada). *Voice* dalam dimensi visual bukan sekadar tentang siapa yang berbicara dan tertangkap kamera, melainkan tentang siapa yang identitasnya divalidasi oleh bingkai tersebut. Kendati kepala desa dimunculkan dalam sorotan tertentu guna mewakili masyarakat sekitar dalam kerangka administratif, sejatinya ia tidak memiliki kendali penuh atas bingkai visual maupun arah dokumentasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam praktik mediatisasi *voice* dari masyarakat setempat tidak sepenuhnya dihilangkan, namun dimediasi dan dibatasi melalui konstruksi logika produksi media, mereka hadir dalam bingkai, namun tidak memiliki *agency*.

Asimetris relasi kuasa dalam *frame* tidak bisa dilepaskan dari praktik mediatisasi yang tunduk pada logika produksi media, sehingga kondisi ini rentan memunculkan ketimpangan yang hanya menjadikan subjek lainnya sebagai alat penanda ruang, bahwa lokasi itu nyata sekaligus menempatkan masyarakat dalam bingkai visual guna memvalidasi klaim 'laporan warga' yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan dalam konten video tersebut secara langsung. Sehingga konten video yang menjadi produk mediatisasi *governance* tersebut lebih cenderung bersifat performa-apresiasi, alih-alih deliberatif yang menghadirkan dokumentasi dialogis terbuka terhadap semua subjek yang dimunculkan di dalam bingkai dan membuka kemungkinan suara alternatif, teknik komunikasi yang terlihat pun menjadi monolog yang terorkestrasi. Ketika kamera hanya memberi sorotan khusus pada siapa yang berbicara, visual bukan hanya keputusan estetika, namun menjadi bagian dari *media process* yang menstabilkan siapa yang berbicara dan relevan untuk mendapatkan sorotan khusus dalam bingkai



Gambar 6. Sample Visual *B-Roll*

Selain pengemasan visual yang menampilkan subjek berbicara secara langsung ke kamera, penulis menemukan pula beberapa moda visual non-verbal berupa cuplikan video sisipan yang banyak dihadirkan untuk memperkaya konteks cerita dan menjadi daya tarik visual, seperti rekaman perjalanan, pemandangan alam, hingga detail objek temuan columnar joint. Dalam praktik produksi audiovisual, elemen visual pendukung yang dimunculkan dalam konten video dikenal dengan istilah *b-roll*. Elemen ini biasa hadir terutama dalam konten non-fiksi seperti berita, dokumenter dan *reality show*, sebagaimana yang ditemukan dalam konten video *b-roll* ditampilkan sebagai *cutaway* pada jalur gambar ketika audio narasi tetap berjalan (Bowen, 2018), gambar (6) menjadi *sample data* yang menunjukkan adanya penyisipan elemen visual *b-roll* dengan menampilkan detail objek columnar joint, visual ini memegang peranan krusial yang dapat memberikan legitimasi narasi terkait informasi columnar joint yang dipaparkan oleh Kepala Bidang Kebudayaan. Tanpa adanya elemen *b-roll*, konten akan menjadi kaku dan kehilangan kesan narasi yang relevan dan kontekstual, sehingga peranannya tidak hanya menambah nilai estetika semata.

Variasi teknik pengambilan gambar yang hadir dalam elemen *b-roll* pula sangat beragam, tidak hanya menggunakan teknik pengambilan gambar melalui *tight shot* atau *long shot* namun juga menghasilkan visual yang memperlihatkan fotografi udara melalui teknologi drone. Dalam konteks video tindak lanjut lapangan, penggunaan drone dilakukan untuk menampilkan gambaran luas dari objek lokasi tempat columnar joint berada, yakni di Gunung Susuru. Ketika video hanya menampilkan narasi monolog aktor-aktor dalam konten video, maka dokumentasi hanya akan menjadi visual yang mentah, tanpa memberikan ruang visual yang proporsional bagi objek columnar joint dan lokasi Gunung Susuru itu sendiri, akibatnya audiens hanya disuguhkan redundansi visual yang memicu kejenuhan. Hal ini menunjukkan, konten video sebagai produk mediatisasi *governance* berkelindan dengan logika platform, praktik komunikasi institusional harus menyesuaikan diri, beberapa elemen *b-roll* yang hadir konten video menjadi praktik bagaimana figurasi *governance* bernegosiasi dengan logika platform. Dalam hal ini video tidak hanya sekadar menyampaikan informasi terkait agenda tindak lanjut lapangan, namun mengonstruksikan menjadi semenarik mungkin, sehingga dapat memenuhi ekspektasi konsumsi dengan menyesuaikan audiens sebagai individu yang memproses realitas secara visual.

4. KESIMPULAN

Dari penelitian ini ditemukan, bahwasannya video dengan judul “**DISCOVERY: Columnar Joint – GUNUNG SUSURU Sumedang**” sebagai dokumentasi arsip Bidang Kebudayaan memuat moda yang saling terhubung—beberapa moda verbal dihadirkan untuk menunjukkan otoritas administratif dan penegasan dominasi institusional oleh Bidang Kebudayaan. Selain itu moda verbal yang menggerakkan konten video hadir melalui narasi tiga aktor yang muncul dalam konten video tersebut, meliputi Jafung Bidang Kebudayaan Disparbudpora Kabupaten Sumedang, Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Sumedang dan Kepala Desa Dayeuhluhur yang memiliki *agency* berbeda sebagai efek dari figurasi *governance* yang termediatisasi. Adapun moda visual berperan penting dalam menguatkan validasi konkrit atas kehadiran aktor ketiganya di lapangan, melalui kerja sama moda-moda tersebut, konten video dapat berpotensi membangun citra atas kinerja Bidang Kebudayaan yang responsif dan kolaboratif. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa video tersebut cenderung bersifat performa-apresiasi, bukan dialogis terbuka yang hadir memunculkan suara alternatif. Agenda tindak lanjut lapangan yang di klaim sebagai bentuk laporan warga, justru tidak menampilkan interdependensi yang aktif antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat sebagai pihak pelapor atas objek columnar joint tersebut.

Sementara itu, konten video sebagai praktik kinerja pemerintahan yang dimediatisasi sejatinya tidak berperan sebagai *database* internal semata, namun juga didistribusikan melalui YouTube yang berkelindan dengan logika platform, sehingga praktik kinerja yang termediatisasi menjadi orkestrasi yang tidak netral. Melalui ruang media sosial, Bidang Kebudayaan tidak hanya berperan sebagai pelayan publik, namun juga berperan sebagai kurator realitas yang turut membentuk cara *governance* dipahami dan dialami sebagai realitas visual. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pendistribusian arsip dokumentasi agenda tindak lanjut lapangan yang memanfaatkan platform YouTube, dapat menjadi manifestasi dari inovasi pelayanan publik di era digitalisasi. Praktik ini dapat berkontribusi dalam memberikan nilai transparansi yang berpeluang menjadi ruang publik digital, di mana masyarakat bisa mengakses arsip kinerja Kebudayaan Daerah secara lebih mudah, sekaligus menjadi bentuk edukasi yang efektif dalam mengenalkan potensi daerah berupa objek columnar joint.

REFERENCES

- Barsei, A. N., Nugroho, S. A., Ghassani, G. A., & Trianita, L. N. (2023). Inovasi Digital pada Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam Mendorong Open Government. *Matra Pembaruan*, 7(2), 99–110. <https://doi.org/10.21787/mp.7.2.2023.99-110>
- Bowen, C. J. (2018). *Grammar of the edit*. Routledge.
- Boyd, Danah. (2010). "Social Network Sites as Networked Publics: Affordances, Dynamics, and Implications." In *Networked Self: Identity, Community, and Culture on Social Network Sites* (ed. Zizi Papacharissi), pp. 39-58.
- Burgess, Jean., & Green, Joshua. (2018). *YouTube: online video and participatory culture*. Polity Press.
- Couldry, & Hepp. (2017). *Mediated Construction of Reality: Society, Culture, Mediatization*. Polity Press.
- Couldry, Nick. (2010). *Why voice matters: culture and politics after neoliberalism*. SAGE.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research*. SAGE.
- Fansuri, H., Sartika, I., Ismiyanto, D., Pendayagunaan, K., Negara, A., & Birokrasi, R. (2024). *Inovasi Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah: Studi pada Tingkat Kementerian/Lembaga*. <https://doi.org/10.33701/jmb.v6i1.4235>
- Fazeli, S., Sabetti, J., & Ferrari, M. (2023). Performing Qualitative Content Analysis of Video Data in Social Sciences and Medicine: The Visual-Verbal Video Analysis Method. *International Journal of Qualitative Methods*, 22. <https://doi.org/10.1177/16094069231185452>
- Fitriyah, N., & Suliyadi, A. (2018). Membangun kompetensi pemimpin dalam mengelola organisasi publik: Strategi dan aplikasi. *Madani*, 10(1), 79–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.52166/madani.v10i1.941>
- Kress, G. (2009). Multimodality: A social semiotic approach to contemporary communication. In *Multimodality: A Social Semiotic Approach to Contemporary Communication*. Routledge Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.4324/9780203970034>
- Marliyana, P. (2026, 6 Januari). *Sumedang berhasil membangun ekosistem pemerintahan digital*. Pemerintah Kabupaten Sumedang. <https://sumedangkab.go.id/berita/detail/sumedang-berhasil-membangun-ekosistem-pemerintahan-digital>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.
- Republik Indonesia. (2018). *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182.
- Sangaji, M. S. J., & Irianto, J. (2025). Transformasi Inovasi Pelayanan Publik menuju Pemerintahan Digital. *Jejaring Administrasi Publik*, 17(1), 54–70. <https://doi.org/10.20473/jap.v17i1.72708>
- Silvia Wandanita Etin, Gilang Pratama Putra, & Tedi Supriadi. (2024). Strategi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang dalam Upaya Mewujudkan Sumedang Sebagai Kabupaten Pariwisata. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(12). <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i12.4928>
- Suryawan, G., Fadhila, M. F., & Muslim, D. (2018, 5–6 September). Penilaian kualitas batuan berdasarkan metode SSR dan RMR serta aplikasinya terhadap kegiatan pertambangan pada area columnar joint di daerah Pasanggahan, Sumedang. Dalam *Perspektif Ilmu Kebumihan dalam Kajian Bencana Geologi di Indonesia: Proceeding Seminar Nasional Kebumihan Ke-11*. Grha Sabha Pramana, Yogyakarta.
- Supriyanto, D., & Noegroho, A. (n.d.). Media Sosial dalam Efektivitas Komunikasi Pelayanan Publik Instansi Pemerintah Daerah. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 7796–7810.

STRATEGI RESILIENSI PARIWISATA PESISIR SELATAN TULUNGAGUNG TERHADAP *MULTI-HAZARD*: ANALISIS KERENTANAN DAN PERAN *STAKEHOLDER*

Keisha Shafira Azzahra

Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan, dan Kebumihan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya

E-mail: keishaashafira@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini merumuskan strategi ketahanan untuk pariwisata pesisir di Selatan Tulungagung yang menghadapi ancaman multi-bencana dengan menganalisis kerentanan sosial dan ekonomi serta mengidentifikasi peran pemangku kepentingan. Menggunakan pendekatan campuran, konsultasi Delphi untuk menentukan faktor-faktor pengembangan kunci, survei lapangan untuk menilai kerentanan rumah tangga dan usaha, pemetaan bahaya sesuai dengan Peraturan BNPB No. 2 (2012), dan triangulasi dengan tinjauan kebijakan dan praktik terbaik, penelitian ini mengevaluasi paparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi komunitas lokal dan aktor pariwisata. Hasil menunjukkan kerentanan sosial yang tinggi di kalangan rumah tangga yang bergantung pada pariwisata, sensitivitas ekonomi pada usaha mikro musiman, dan celah dalam kepercayaan sistem peringatan dini dan ketahanan infrastruktur. Pemangku kepentingan (pemerintah daerah, BPBD, POKDARWIS, sektor swasta, dan kelompok masyarakat) menunjukkan peran yang saling melengkapi namun mekanisme koordinasi yang terbatas. Strategi yang direkomendasikan meliputi pembangunan kapasitas yang ditargetkan, diversifikasi mata pencaharian yang terkait dengan pariwisata, retrofit infrastruktur, penyebaran peringatan dini berbasis komunitas, dan pembentukan platform manajemen bencana multi-pemangku kepentingan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi kerentanan, mempertahankan mata pencaharian, dan meningkatkan keamanan destinasi sambil mendukung kelangsungan pariwisata di bawah kondisi multi-bencana.

Keyword: Strategi Resiliensi; Multi-Hazars, Pariwisata Pesisir.

1. PENDAHULUAN

Pariwisata pesisir di Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu penggerak utama perekonomian lokal yang berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan rumah tangga, serta pengembangan usaha mikro dan kecil berbasis sumber daya pesisir, terutama pada wilayah pesisir selatan yang memiliki daya tarik alam unggulan. Namun, di balik potensi ekonomi tersebut, berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Timur Tahun 2011–2031, Kabupaten Tulungagung termasuk dalam Kawasan Rawan Bencana, dan memiliki tingkat kerawanan bencana yang sedang, tercermin dari Skor Indeks Risiko Bencana sebesar 125,29 (IRBI, 2023). Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) (2025), risiko ini terdiri dari sembilan jenis bencana, yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, tanah longsor, kekeringan, serta tsunami. Khususnya di kawasan pesisir Pantai Sine, data kerentanan BPBD Kabupaten Tulungagung tahun 2025 menunjukkan terdapat risiko tinggi terhadap bencana tsunami, banjir rob, cuaca ekstrem, tanah longsor, gelombang ekstrem, dan abrasi. Risiko ini tidak hanya mengancam keberlanjutan pariwisata, tetapi juga berdampak serius terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Kondisi tersebut telah tercermin dalam berbagai kejadian yang menunjukkan bagaimana risiko-risiko tersebut berdampak nyata terhadap masyarakat pesisir. Pada tahun 2020, Desa Kalibatur mengalami banjir rob yang merendam puluhan rumah nelayan dan warung di pinggir pantai. Hantaman gelombang kuat bahkan menyebabkan kerusakan pada satu rumah dan beberapa gazebo (Muttaqin, 2020; Manna, 2020). Di tahun yang sama, warga Dusun Sine tercatat melakukan evakuasi sebanyak empat kali akibat isu potensi tsunami besar yang dipicu oleh fenomena ikan terdampar di pesisir pantai sebagai sebuah pertanda bencana menurut kepercayaan lokal (*detikNews*, 2020). Meskipun *Early Warning System* (EWS) telah terpasang di Pantai Sine untuk memberikan informasi dini, namun alat tersebut beberapa kali berbunyi tanpa sebab akibat kesalahan teknis, sehingga pihak BPBD memutuskan untuk menonaktifkannya agar tidak menimbulkan kepanikan (BPBD, 2024). Suswanto (2025) juga menambahkan bahwa sebagian warga kini sudah tidak lagi mempercayai keberadaan EWS. Kejadian-kejadian tersebut membuktikan bahwa kapasitas masyarakat di Desa Kalibatur masih tergolong rendah. Hal ini sejalan dengan definisi kerentanan dari IPCC (2012), yang menyatakan bahwa kerentanan merupakan fungsi dari paparan terhadap bahaya, sensitivitas terhadap dampak, dan kapasitas adaptif masyarakat. Dalam hal ini, rendahnya kapasitas adaptif tercermin dari ketidakmampuan masyarakat dalam memahami risiko tsunami serta keterbatasan akses terhadap informasi yang akurat, termasuk kepercayaan terhadap sistem peringatan dini.

Dalam upaya mengurangi dampak risiko terhadap pariwisata, terutama di wilayah pesisir, pendekatan yang bersifat pencegahan dan terencana menjadi sangat penting. Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menekankan pentingnya tindakan terpadu dan inklusif untuk mencegah bencana baru serta mengurangi risiko yang sudah ada. Prinsip ini mencakup peningkatan kesiapsiagaan terhadap tanggap darurat dan pemulihan, serta upaya mengurangi

tingkat paparan dan kerentanan terhadap bahaya, demi memperkuat ketangguhan masyarakat (UNDRR, 2015). Hal ini menjadi sangat relevan dalam konteks pariwisata pesisir Pantai Sine yang berada di wilayah dengan tingkat risiko sedang hingga tinggi terhadap bencana alam seperti tsunami, cuaca ekstrem, banjir rob, gelombang ekstrem, dan abrasi sehingga pembangunan pariwisata di kawasan ini menuntut pendekatan yang tidak semata berorientasi pada pertumbuhan, melainkan juga pada pengelolaan risiko dan penguatan resiliensi secara terintegrasi.

Berangkat dari kondisi tersebut, tujuan utama studi ini yaitu merumuskan strategi resiliensi bagi pengembangan pariwisata pesisir selatan Tulungagung yang secara eksplisit mempertimbangkan tingkat kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat setempat serta peran dan interaksi para pemangku kepentingan dalam sistem pengelolaan risiko bencana, dengan asumsi bahwa efektivitas upaya pengurangan risiko tidak hanya ditentukan oleh keberadaan infrastruktur fisik, tetapi juga oleh kapasitas adaptif masyarakat, kesiapan kelembagaan, serta koordinasi lintas sektor. Secara teoritis, Wisner et al. (2004) dalam *At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters*, menegaskan bahwa meskipun bencana dipicu oleh bahaya alam atau buatan manusia, tingkat risiko yang ditimbulkan sangat bergantung pada kerentanan dan kapasitas masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan analisis kerentanan sosial-ekonomi sebagai landasan untuk memahami kelompok paling berisiko dan faktor-faktor struktural yang memperbesar dampak bencana terhadap aktivitas pariwisata, sekaligus mengkaji bagaimana peran pemerintah daerah, BPBD, pelaku usaha, komunitas lokal, dan sektor swasta dapat disinergikan dalam kerangka kebijakan yang lebih responsif dan kontekstual. Sasaran penelitian meliputi identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh, analisis kondisi eksisting dan potensi permasalahannya, serta perumusan arahan pengembangan pariwisata yang aplikatif dan dapat diimplementasikan untuk mendukung pariwisata pesisir yang berkelanjutan dan resilien.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyusunan strategi resiliensi yang menggabungkan secara komprehensif hasil analisis kerentanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir, peta bahaya *multi-hazard* yang menggambarkan tingkat paparan spasial terhadap berbagai ancaman alam, serta mekanisme kolaborasi *multi-stakeholder* yang menegaskan pembagian peran dan tanggung jawab antar aktor dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi kebijakan, sehingga strategi yang dihasilkan tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga operasional dan adaptif terhadap kondisi lokal, melalui pendekatan ini, studi diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan pelaku pariwisata lokal dalam merancang kebijakan pengembangan pariwisata pesisir yang aman, berkelanjutan, dan berdaya tahan, sekaligus memberikan model yang dapat direplikasi atau disesuaikan pada wilayah pesisir lain dengan karakteristik risiko yang serupa.

Ruang lingkup wilayah penelitian mencakup kawasan wisata pesisir Pantai Sine dan wilayah sekitarnya yang secara administratif berada di Kabupaten Tulungagung, dengan mempertimbangkan keterkaitan spasial antara kawasan pantai, permukiman masyarakat, dan infrastruktur pendukung pariwisata. Ruang lingkup substansi penelitian meliputi aspek pengembangan pariwisata pesisir, kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat, serta risiko bencana alam yang relevan dengan karakteristik wilayah pesisir selatan. Adapun ruang lingkup pembahasan difokuskan pada analisis faktor-faktor pengembangan pariwisata tanggap bencana, kondisi eksisting dan permasalahannya, serta perumusan arahan pengembangan yang mengintegrasikan prinsip pengurangan risiko bencana dan pembangunan pariwisata berkelanjutan. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat dirasakan baik secara teoritis maupun praktis.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian perencanaan wilayah dan kota, khususnya dalam konteks integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam pengembangan pariwisata pesisir. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa di wilayah pesisir lainnya dengan karakteristik risiko yang sejenis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung, pengelola kawasan wisata, dan pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata pesisir yang lebih aman, inklusif, dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta pelaku pariwisata terhadap pentingnya kesiapsiagaan dan adaptasi terhadap bencana.

2. METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini bersifat kombinasi (*mixed-methods*) yang dirancang untuk menangkap kompleksitas pengembangan pariwisata pesisir tanggap bencana melalui integrasi data kualitatif dan kuantitatif secara sistematis, dengan empat tahap utama yang saling terkait dan disusun secara berurutan untuk memastikan kedalaman analisis sekaligus keterlacakan hasil, tahap pertama difokuskan pada identifikasi faktor-faktor kunci pengembangan pariwisata tanggap bencana melalui metode Delphi dua iterasi yang melibatkan panel berjumlah 12 informan dari latar belakang akademisi, pemangku kepentingan pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata, dan perwakilan LSM, di mana proses iteratif dilakukan untuk

mencapai konsensus atas faktor-faktor prioritas yang relevan dengan konteks lokal pesisir selatan Tulungagung, sehingga keluaran tahap ini berfungsi sebagai dasar konseptual dan operasional bagi tahapan penelitian selanjutnya.

Tahap kedua berupa survei lapangan yang bertujuan mengumpulkan data empiris mengenai kondisi sosial-ekonomi, sumber dan pola pendapatan, tingkat kesiapsiagaan, serta akses terhadap informasi kebencanaan pada rumah tangga dan usaha mikro-pariwisata, dengan jumlah responden masing-masing sebanyak 150 rumah tangga dan 60 unit usaha, yang dipilih menggunakan teknik *stratified random sampling* berdasarkan kedekatan lokasi dengan zona pantai dan tipe usaha untuk memastikan keterwakilan berbagai tingkat paparan dan karakteristik ekonomi, instrumen survei disusun untuk mengukur variabel-variabel kunci yang berkaitan dengan kerentanan dan kapasitas adaptif, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan secara langsung dalam penilaian kerentanan sosial-ekonomi dan analisis sensitivitas sektor pariwisata terhadap gangguan akibat *multi-hazard*.

Tahap ketiga mencakup analisis kerentanan dan pemetaan bahaya yang dilakukan secara terpadu, di mana penilaian kerentanan sosial-ekonomi mengikuti pedoman resmi Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 dengan mengoperasionalkan tiga komponen utama, yaitu paparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptif, yang diukur dan dibobotkan berdasarkan data survei serta informasi kontekstual lokal, secara paralel, pemetaan bahaya *multi-hazard* meliputi ancaman tsunami, abrasi, longsor, dan banjir rob dilakukan dengan memanfaatkan data sekunder dari BPBD yang diperkaya melalui observasi lapangan, sehingga menghasilkan gambaran spasial tingkat risiko yang lebih komprehensif dan relevan untuk perencanaan pengembangan pariwisata pesisir yang aman dan berkelanjutan.

Tahap keempat merupakan proses triangulasi dan perumusan strategi resiliensi yang mengintegrasikan seluruh temuan dari tahapan sebelumnya, termasuk hasil Delphi, survei lapangan, analisis kerentanan, peta bahaya, serta kajian dokumen kebijakan seperti RIPPARDA, RTRW, dan regulasi pariwisata terkait, guna merumuskan strategi pengembangan pariwisata pesisir yang tanggap bencana sekaligus memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, pada tahap ini, prosedur teknis yang telah dipublikasikan sebelumnya, seperti pedoman resmi BNPB, dirujuk dalam daftar pustaka untuk menjaga konsistensi metodologis, sementara hanya prosedur baru dan penyesuaian kontekstual yang dikembangkan dalam penelitian ini dijelaskan secara rinci, sehingga metode yang disajikan tetap ringkas, transparan, dan dapat direplikasi oleh peneliti atau praktisi yang berkepentingan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini bersifat terpadu dengan mengombinasikan pendekatan deskriptif, analitis, dan spasial untuk menangkap kompleksitas pengembangan pariwisata pesisir Pantai Sine yang tanggap bencana. Pendekatan ini dipilih karena pengembangan pariwisata pesisir tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik dan lingkungan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, kelembagaan, serta dinamika risiko bencana yang melekat pada kawasan pesisir selatan Kabupaten Tulungagung. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian terapan (*applied research*) dengan karakteristik studi kasus, di mana Pantai Sine dijadikan sebagai lokasi penelitian utama untuk menggali secara mendalam kondisi eksisting, permasalahan, serta potensi pengembangan pariwisata pesisir yang berorientasi pada prinsip resiliensi bencana. Variabel penelitian disusun secara sistematis untuk merepresentasikan faktor-faktor utama pengembangan pariwisata pesisir tanggap bencana, yang mencakup variabel fisik-lingkungan (seperti kondisi pantai, topografi, dan tingkat paparan bahaya), variabel sosial (tingkat pendidikan, persepsi risiko, kapasitas masyarakat), variabel ekonomi (mata pencaharian, ketergantungan ekonomi terhadap pariwisata, tingkat pendapatan), serta variabel kelembagaan dan kebijakan (peran pemerintah daerah, pengelola wisata, dan pemangku kepentingan lainnya).

Seluruh variabel tersebut dianalisis secara saling terkait untuk memberikan gambaran utuh mengenai kesiapan dan kerentanan kawasan wisata pesisir Pantai Sine dalam menghadapi potensi bencana alam. Populasi penelitian mencakup seluruh elemen yang terlibat dan terdampak langsung oleh aktivitas pariwisata pesisir di Pantai Sine, termasuk masyarakat lokal yang bermukim di sekitar kawasan pesisir, pelaku usaha pariwisata, wisatawan, serta pemangku kepentingan dari unsur pemerintah dan pengelola kawasan. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang dipadukan dengan *proportional sampling*, sehingga responden yang dipilih benar-benar mewakili karakteristik populasi dan memiliki keterkaitan langsung dengan isu pengembangan pariwisata tanggap bencana. Sampel masyarakat lokal dipilih berdasarkan kriteria kedekatan lokasi hunian dengan kawasan pantai dan tingkat ketergantungan ekonomi terhadap sektor pariwisata, sedangkan sampel pemangku kepentingan dipilih berdasarkan peran dan kewenangannya dalam perencanaan, pengelolaan, dan mitigasi bencana di kawasan pesisir.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui survei primer dan sekunder yang saling melengkapi, di mana survei primer dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner terstruktur, wawancara mendalam, serta observasi lapangan untuk memperoleh data faktual mengenai kondisi sosial-ekonomi, persepsi risiko bencana, dan praktik pengelolaan pariwisata yang ada. Sementara itu, survei sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data dari dokumen perencanaan daerah, peta kebencanaan, data statistik resmi, laporan instansi terkait, serta

kebijakan dan regulasi yang relevan dengan pengembangan pariwisata dan pengurangan risiko bencana di Kabupaten Tulungagung. Metode dan teknik analisis data dilakukan secara bertahap dan komprehensif untuk menjawab tujuan penelitian.

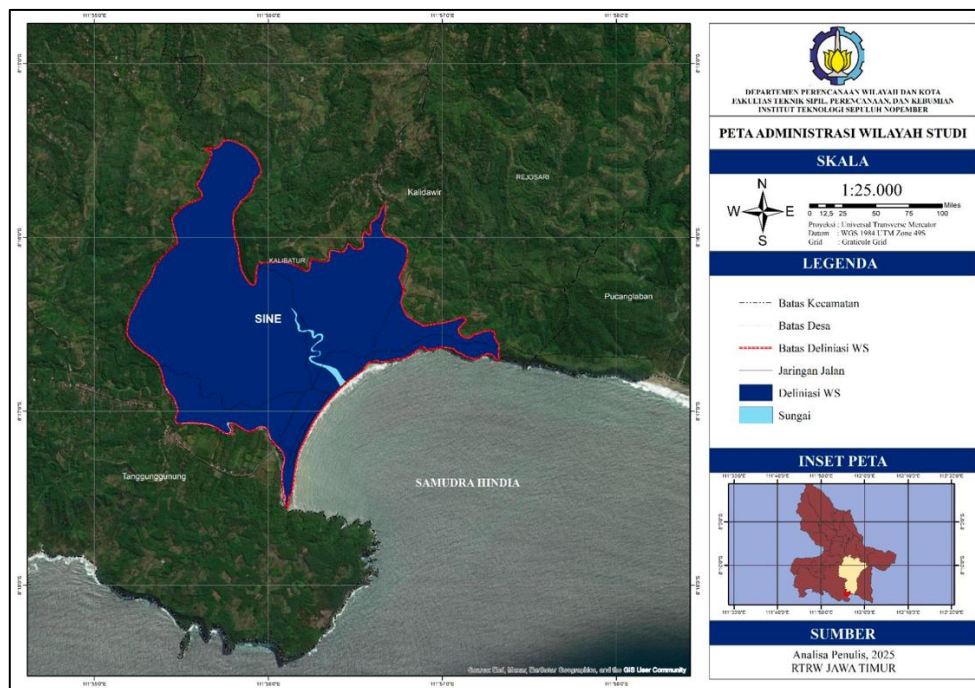
Tahap awal analisis difokuskan pada penentuan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan pariwisata pesisir Pantai Sine yang tanggap bencana, yang dilakukan melalui analisis deskriptif dan analisis komparatif terhadap hasil survei, wawancara, dan data sekunder. Faktor-faktor tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut untuk mengidentifikasi kondisi eksisting masing-masing faktor berdasarkan potensi masalah yang muncul, seperti keterbatasan infrastruktur evakuasi, rendahnya kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, serta ketimpangan manfaat ekonomi pariwisata. Selanjutnya, analisis tingkat kerentanan sosial dan ekonomi dilakukan dengan mengombinasikan indikator-indikator kerentanan yang mencerminkan tingkat paparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptif masyarakat terhadap berbagai bahaya bencana pesisir, sehingga dapat diketahui kelompok masyarakat dan area yang paling rentan. Analisis ini diperkuat dengan pendekatan spasial melalui pemanfaatan peta bahaya *multi-hazard* untuk melihat keterkaitan antara pola pemanfaatan ruang pariwisata dan tingkat risiko bencana yang dihadapi kawasan Pantai Sine.

Tahapan penelitian secara keseluruhan disusun secara sistematis mulai dari tahap persiapan, pengumpulan data, analisis data, hingga perumusan arahan pengembangan. Tahap persiapan meliputi penentuan lokasi penelitian, penyusunan instrumen penelitian, dan pengumpulan data awal terkait kebijakan dan kondisi wilayah. Tahap pengumpulan data dilakukan secara simultan antara survei primer dan sekunder untuk memastikan kelengkapan dan validitas data. Tahap analisis data mencakup seluruh proses pengolahan dan interpretasi data untuk mengidentifikasi faktor pengembangan pariwisata, kondisi eksisting, serta tingkat kerentanan sosial dan ekonomi kawasan. Tahap akhir penelitian diarahkan pada penyusunan arahan pengembangan pariwisata pesisir Pantai Sine yang tanggap bencana, dengan mempertimbangkan hasil analisis kerentanan serta peran dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, sehingga arahan yang dihasilkan tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga aplikatif dan relevan untuk diterapkan dalam kebijakan pembangunan pariwisata pesisir di Kabupaten Tulungagung.

Tabel 1. Distribusi Sampel Berdasarkan Mata Pencaharian dan Kapasitas Ekonomi

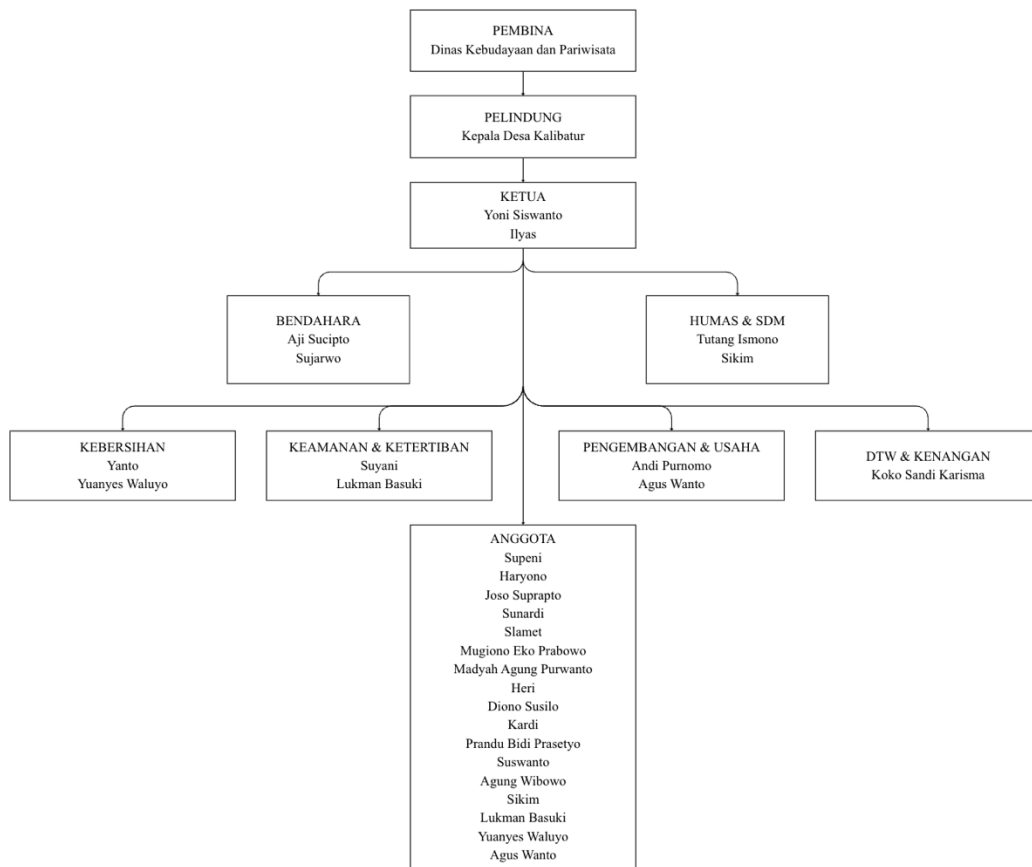
Kelompok Mata Pencaharian	Jumlah Rumah Tangga	Jumlah Usaha Mikro
Nelayan utama	48	0
Nelayan sampingan / pengolahan	32	12
Usaha jasa pariwisata (warung, homestay)	20	38
Total	100	50

Tabel 1 menunjukkan distribusi sampel rumah tangga dan usaha mikro berdasarkan mata pencaharian utama dan kapasitas ekonomi di kawasan pesisir Pantai Sine, di mana rumah tangga nelayan utama mendominasi jumlah sampel rumah tangga namun tidak terwakili dalam kategori usaha mikro formal, yang mengindikasikan ketergantungan tinggi pada sektor penangkapan ikan dengan kapasitas diversifikasi ekonomi yang masih terbatas, sementara kelompok nelayan sampingan atau pengolahan menunjukkan kombinasi antara rumah tangga dan usaha mikro yang mulai berkembang, mencerminkan adanya upaya penambahan nilai ekonomi melalui aktivitas pascapanen dan pengolahan hasil laut, sedangkan kelompok usaha jasa pariwisata memperlihatkan proporsi usaha mikro yang paling besar dibandingkan jumlah rumah tangganya, yang menandakan karakter sektor pariwisata pesisir sebagai sektor padat usaha namun rentan terhadap fluktuasi kunjungan wisata, sehingga secara keseluruhan distribusi ini menegaskan perbedaan kapasitas ekonomi antar kelompok mata pencaharian yang berimplikasi langsung terhadap tingkat kerentanan dan kemampuan adaptif masyarakat pesisir dalam menghadapi gangguan akibat *multi-hazard*.



Gambar 1. Peta Batas Administrasi Wilayah Studi

Strategi resiliensi pariwisata pesisir selatan Tulungagung terhadap *multi-hazard*, yang mencakup ancaman gempa bumi subduksi, tsunami Samudra Hindia, abrasi pantai, longsor perbukitan karst, banjir bandang muara sungai, serta dampak perubahan iklim seperti kenaikan muka air laut, harus disusun berbasis analisis kerentanan spasial sebagaimana tercermin pada peta batas administrasi wilayah studi yang menunjukkan keterkaitan erat antara zona pesisir, alur sungai, jaringan jalan, dan permukiman desa wisata, sehingga pendekatan yang diambil tidak parsial melainkan sistemik dari hulu ke hilir, pada tingkat kerentanan, kawasan wisata pantai di Kecamatan Sine dan sekitarnya umumnya memiliki paparan tinggi karena berhadapan langsung dengan laut lepas, morfologi pantai terbuka, serta konsentrasi aktivitas wisata dan infrastruktur dasar, sementara kapasitas adaptif masyarakat masih bervariasi akibat ketergantungan ekonomi pada pariwisata musiman dan keterbatasan akses informasi kebencanaan, sehingga strategi resiliensi perlu memadukan penataan ruang adaptif (*setback zone*, zonasi aman bangunan wisata, dan perlindungan ekosistem alami seperti vegetasi pantai), penguatan infrastruktur tangguh bencana (jalur evakuasi terintegrasi, rambu tsunami, bangunan evakuasi vertikal, dan akses jalan yang redundan), serta peningkatan kapasitas sosial melalui edukasi sadar bencana bagi pelaku wisata dan masyarakat lokal, dalam konteks ini, peran *stakeholder* menjadi kunci, di mana pemerintah daerah bertanggung jawab pada regulasi, perencanaan berbasis risiko, dan penyediaan infrastruktur, desa dan kelompok sadar wisata (pokdarwis) berperan sebagai aktor utama dalam implementasi lapangan dan pengelolaan destinasi yang adaptif, pelaku usaha pariwisata didorong untuk menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan dan standar keselamatan, akademisi dan lembaga riset berkontribusi dalam pemetaan risiko serta pengembangan model mitigasi, sementara komunitas dan wisatawan turut membangun budaya kesiapsiagaan, sinergi multipihak ini, jika diikat dalam mekanisme kolaboratif yang berkelanjutan, akan meningkatkan kemampuan kawasan pesisir selatan Tulungagung untuk tidak hanya bertahan dan pulih dari bencana, tetapi juga bertransformasi menuju sistem pariwisata yang aman, adaptif, dan berdaya saing jangka panjang di tengah kompleksitas *multi-hazard*.



Gambar 2. Struktur Organisasi POKDARWIS Pantai Sine

Struktur Organisasi POKDARWIS Pantai Sine menggambarkan susunan kelembagaan kelompok sadar wisata yang dibentuk secara formal dan hierarkis sebagai wadah partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan dan pengembangan destinasi Pantai Sine, dengan landasan hukum berupa Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2021, di mana pada tingkat pembina terdapat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang berperan memberikan arahan kebijakan, pendampingan program, serta sinkronisasi pengembangan pariwisata Pantai Sine dengan rencana pembangunan daerah, sementara posisi pelindung dijabat oleh Kepala Desa Kalibatur yang mencerminkan dukungan dan legitimasi pemerintah desa terhadap keberadaan POKDARWIS sebagai mitra strategis dalam pengelolaan potensi wisata desa, struktur inti organisasi dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab atas koordinasi keseluruhan kegiatan, pengambilan keputusan strategis, serta representasi POKDARWIS dalam hubungan dengan pihak eksternal, yang didukung oleh Bendahara sebagai pengelola keuangan organisasi guna menjamin akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana, serta bidang Humas dan SDM yang berfungsi mengelola komunikasi, promosi, kemitraan, dan penguatan kapasitas anggota melalui pembinaan sumber daya manusia, pada level operasional, organisasi ini dibagi ke dalam beberapa seksi fungsional yang saling melengkapi, yakni seksi Kebersihan yang berfokus pada penataan lingkungan, pengelolaan sampah, dan menjaga daya tarik visual kawasan pantai, seksi Keamanan dan Ketertiban yang bertugas menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan melalui pengaturan aktivitas kawasan dan mitigasi gangguan, seksi Pengembangan dan Usaha yang berperan mendorong inovasi produk wisata, penguatan ekonomi lokal, serta pengelolaan usaha penunjang pariwisata, serta seksi DTW dan Kenangan yang berorientasi pada pengelolaan daya tarik wisata dan penciptaan pengalaman berwisata yang berkesan, keseluruhan bidang tersebut diperkuat oleh anggota POKDARWIS yang berasal dari masyarakat setempat sebagai aktor utama dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, sehingga struktur organisasi ini tidak hanya menunjukkan pembagian tugas yang jelas, tetapi juga mencerminkan prinsip partisipatif, kolaboratif, dan berbasis komunitas dalam pengelolaan Pantai Sine, di mana sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, pengurus, dan anggota diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan destinasi, keberlanjutan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat lokal secara berkelanjutan.

Keseluruhan gambar tentunya dapat menggambarkan alur analisis dan substansi penelitian mengenai pengembangan pariwisata pesisir Pantai Sine, dimulai dari pemahaman konteks wilayah melalui peta administrasi dan batas geografis wilayah studi, kerangka berpikir, serta tahapan dan diagram penelitian sebagai dasar metodologis. Selanjutnya, gambar-gambar pada bab analisis menampilkan kondisi eksisting wilayah berupa persebaran atraksi alam, jaringan dan aksesibilitas jalan utama, serta struktur organisasi POKDARWIS sebagai aktor pengelola pariwisata lokal. Pada tahap lanjutan, visualisasi peta kerentanan sosial, ekonomi, dan sosial-ekonomi terhadap bahaya digunakan untuk mengidentifikasi tingkat risiko di wilayah pesisir, yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan peta analisis dan peta arahan pengembangan pariwisata Pantai Sine. Secara keseluruhan, rangkaian gambar tersebut saling terintegrasi untuk mendukung perumusan arahan pengembangan pariwisata pesisir yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek kerentanan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kerentanan sosial menunjukkan bahwa kelompok rumah tangga yang sangat bergantung pada pendapatan musiman, terutama dari sektor pariwisata pesisir dan aktivitas penunjangnya, memiliki tingkat kerentanan yang tinggi karena fluktuasi pendapatan yang tajam, keterbatasan tabungan, serta akses yang tidak merata terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur publik, kondisi ini diperparah oleh rendahnya literasi risiko bencana dan keterbatasan jejaring pengaman sosial formal, sehingga ketika terjadi gangguan kunjungan wisata akibat bencana alam atau peringatan bencana, rumah tangga tersebut cenderung mengalami penurunan kesejahteraan secara cepat dan berkepanjangan, termasuk kesulitan memenuhi kebutuhan dasar dan keterbatasan kapasitas untuk pulih secara mandiri dalam jangka pendek maupun menengah.

Dari sisi ekonomi lokal, usaha mikro pariwisata memperlihatkan sensitivitas yang sangat tinggi terhadap gangguan kunjungan wisata karena struktur usaha yang umumnya berskala kecil, berbasis keluarga, dan berorientasi pada arus kas harian, dengan ketergantungan besar pada musim liburan serta minimnya diversifikasi sumber pendapatan, sebagian besar pelaku usaha belum memiliki cadangan modal yang memadai, belum mengakses skema pembiayaan formal yang fleksibel, dan tidak terlindungi oleh asuransi, baik formal maupun mekanisme perlindungan risiko informal, sehingga setiap penurunan jumlah wisatawan secara tiba-tiba langsung berdampak pada keberlanjutan usaha, pemutusan hubungan kerja informal, serta penundaan pemeliharaan fasilitas yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas destinasi dan memperlambat proses pemulihan pascabencana.

Pemetaan bahaya menunjukkan bahwa zona pantai terdekat diklasifikasikan dalam tingkat eksposur tinggi terhadap ancaman tsunami dan abrasi, sementara zona perbukitan di bagian belakang kawasan wisata lebih rentan terhadap longsor terutama pada musim hujan dengan intensitas curah hujan tinggi, kompleksitas *multi-hazard* ini menuntut sistem kesiapsiagaan yang andal, namun efektivitas sistem peringatan dini (EWS) masih terkendala oleh rendahnya kepercayaan masyarakat akibat pengalaman *false alarm* pada periode sebelumnya, yang memicu respons lambat atau bahkan pengabaian peringatan, serta oleh kapasitas kelembagaan pariwisata lokal seperti POKDARWIS yang meskipun aktif dalam promosi destinasi dan pengelolaan kegiatan wisata, belum sepenuhnya siap menjalankan fungsi tanggap darurat, komunikasi risiko, dan koordinasi mitigasi lintas pemangku kepentingan, sehingga diperlukan penguatan peran kelembagaan agar promosi pariwisata berjalan seiring dengan upaya pengurangan risiko bencana secara terintegrasi.

Temuan penelitian ini sejalan secara kuat dengan kerangka teori Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang menekankan keterkaitan dinamis antara tingkat paparan (*exposure*), sensitivitas (*sensitivity*), dan kapasitas adaptif (*adaptive capacity*) dalam membentuk kerentanan suatu wilayah terhadap ancaman bencana, sebagaimana dikemukakan oleh Wisner et al. (2004) dan ditegaskan kembali dalam kerangka kebijakan global UNDRR (2015), dalam konteks pesisir selatan Tulungagung, tingginya paparan terhadap *multi-hazard* seperti tsunami, abrasi, dan longsor berpadu dengan sensitivitas sosial-ekonomi yang tinggi, ditandai oleh ketergantungan pendapatan musiman, keterbatasan akses layanan dasar, serta struktur usaha pariwisata yang rapuh, sementara kapasitas adaptif masih terbatas akibat lemahnya kelembagaan lokal, rendahnya literasi risiko, dan belum optimalnya kepercayaan terhadap sistem peringatan dini, sehingga kerentanan yang terbentuk bersifat struktural dan sistemik, bukan sekadar akibat faktor alam semata, kondisi ini menguatkan argumen bahwa pengurangan risiko di kawasan pariwisata pesisir tidak dapat dicapai hanya melalui intervensi teknis, melainkan membutuhkan pendekatan terpadu yang menasar akar penyebab kerentanan sosial, ekonomi, dan kelembagaan secara bersamaan.

Dalam kerangka tersebut, kekurangan kapasitas kelembagaan dan ekonomi menuntut strategi intervensi yang menyeimbangkan antara penguatan fisik dan non-fisik secara terintegrasi dan berkelanjutan, di mana pembangunan infrastruktur tahan bencana, seperti jalur dan titik evakuasi yang memadai, fasilitas publik yang

memenuhi standar keselamatan, serta penguatan dermaga dan bangunan penginapan, harus berjalan paralel dengan penguatan kapasitas manusia dan tata kelola kelembagaan melalui pelatihan kesiapsiagaan, simulasi evakuasi berkala, pendidikan risiko bagi pelaku usaha pariwisata dan wisatawan, serta diversifikasi sumber pendapatan untuk mengurangi sensitivitas ekonomi terhadap fluktuasi kunjungan, kejelasan peran *stakeholder* menjadi prasyarat utama keberhasilan strategi ini, dengan pemerintah daerah berfungsi sebagai penentu arah kebijakan melalui regulasi yang berpihak pada keselamatan dan keberlanjutan serta penyedia investasi infrastruktur strategis, BPBD bertanggung jawab atas penyusunan dan pemutakhiran peta bahaya, pengelolaan serta peningkatan kredibilitas sistem peringatan dini (EWS), pelaku usaha dan komunitas lokal menjalankan praktik kesiapsiagaan di tingkat tapak termasuk penyusunan rencana evakuasi dan SOP darurat, sementara sektor swasta berperan mendukung pembiayaan, inovasi, dan pelatihan melalui skema kemitraan dan tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan sintesis tersebut, strategi prioritas yang diusulkan mencakup penguatan kapasitas komunitas melalui program pelatihan evakuasi, simulasi lintas sektor yang dilakukan secara berkala, dan pendidikan risiko yang kontekstual bagi pelaku usaha pariwisata serta wisatawan, diversifikasi ekonomi dengan mendorong pengolahan hasil laut bernilai tambah, pengembangan produk wisata alternatif yang tidak sepenuhnya bergantung pada musim kunjungan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas akses pasar, pembangunan infrastruktur adaptif melalui penguatan fasilitas publik seperti area dan jalur evakuasi yang tertera jelas dan mudah diakses, peningkatan kualitas dermaga dan fasilitas penginapan sesuai standar keselamatan bencana, penguatan sistem peringatan dan komunikasi berbasis komunitas dengan mengintegrasikan EWS teknis dan jaringan informasi lokal serta penerapan protokol verifikasi untuk meminimalkan false alarm dan meningkatkan kepercayaan publik, serta pembentukan platform koordinasi *multi-stakeholder* berupa forum reguler yang melibatkan pemerintah daerah, BPBD, Dinas Pariwisata, POKDARWIS, LSM, dan sektor swasta guna menyelaraskan perencanaan, implementasi, dan respons darurat, yang keseluruhan implementasinya menuntut alokasi sumber daya terintegrasi melalui sinergi pendanaan lokal, kemitraan swasta, dan akses terhadap program mitigasi bencana di tingkat nasional agar strategi resiliensi dapat dioperasionalkan secara efektif dan berkelanjutan.

Wilayah pesisir Pantai Sine memiliki karakteristik yang khas karena berfungsi sebagai kawasan tujuan wisata sekaligus wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Letaknya di pesisir selatan Kabupaten Tulungagung yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia memberikan potensi besar bagi pengembangan wisata bahari, namun pada saat yang sama juga menempatkan kawasan ini pada tingkat paparan yang tinggi terhadap ancaman bencana seperti tsunami, abrasi pantai, dan gelombang ekstrem. Kondisi geografis tersebut menjadikan aspek kerentanan bencana sebagai konteks penting dalam memahami dinamika pengembangan pariwisata di Pantai Sine.

Secara fisik, wilayah Pantai Sine memiliki topografi yang memadukan dataran pantai di bagian depan dengan kawasan perbukitan di bagian belakang. Kombinasi ini membentuk variasi kerentanan yang berbeda antar zona. Kawasan pantai cenderung memiliki tingkat eksposur yang lebih tinggi terhadap bahaya laut, sementara kawasan perbukitan memiliki potensi kerawanan longsor, terutama pada musim hujan dengan intensitas curah hujan yang tinggi. Kondisi fisik tersebut berpengaruh langsung terhadap pola pemanfaatan ruang, aktivitas wisata, serta kebutuhan akan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang sesuai dengan karakter wilayah.

Dari sisi sosial dan ekonomi, masyarakat di sekitar Pantai Sine sebagian besar menggantungkan mata pencaharian pada sektor berbasis sumber daya alam dan pariwisata. Aktivitas ekonomi didominasi oleh nelayan, pengolah hasil laut, serta pelaku usaha jasa pariwisata skala mikro seperti warung makan, penginapan sederhana, dan penyedia jasa wisata. Ketergantungan yang tinggi terhadap aktivitas wisata dan sumber daya alam menyebabkan pola pendapatan masyarakat bersifat fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh musim serta jumlah kunjungan wisatawan. Kondisi ini membuat kapasitas ekonomi rumah tangga dan pelaku usaha relatif terbatas dalam menghadapi gangguan akibat bencana.

Dari perspektif kebencanaan, wilayah Pantai Sine menghadapi ancaman multi-bahaya yang bersifat laten dan berulang. Meskipun kejadian bencana berskala besar jarang terjadi, berbagai gangguan seperti abrasi, banjir rob, serta peringatan dini tsunami pada periode tertentu telah memberikan dampak nyata terhadap aktivitas pariwisata. Isu keselamatan dan kebencanaan terbukti sangat memengaruhi tingkat kunjungan wisatawan, di mana adanya informasi atau peringatan terkait bencana dapat menyebabkan penurunan kunjungan secara signifikan, terutama di luar musim liburan.

Aktivitas pariwisata di Pantai Sine didominasi oleh wisata alam pesisir dan kegiatan bahari yang memanfaatkan keindahan pantai serta lingkungan sekitarnya. Aksesibilitas menuju kawasan wisata relatif memadai untuk mendukung pergerakan wisatawan, namun masih terdapat keterbatasan dalam aspek keselamatan, khususnya terkait jalur evakuasi dan fasilitas pendukung kebencanaan. Kondisi ini menunjukkan

bahwa pengembangan infrastruktur pariwisata belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip ketahanan bencana sebagai bagian dari perencanaan kawasan.

Dari sisi kelembagaan, keterlibatan kelompok sadar wisata dan dukungan pemerintah daerah telah terlihat dalam upaya pengelolaan dan promosi pariwisata. Namun demikian, integrasi aspek kebencanaan dalam tata kelola pariwisata masih belum optimal. Koordinasi antar pemangku kepentingan dalam konteks pengurangan risiko bencana dan respons darurat masih perlu diperkuat agar pengembangan pariwisata dapat berjalan secara berkelanjutan dan aman. Kondisi umum wilayah ini menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata pesisir Pantai Sine tidak dapat dilepaskan dari upaya pengelolaan risiko bencana yang terintegrasi dengan aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

Secara keseluruhan, kondisi wilayah Pantai Sine mencerminkan keterkaitan yang erat antara potensi pariwisata pesisir dan tingkat kerentanan terhadap bencana alam, di mana kedua aspek tersebut saling memengaruhi dan tidak dapat dipisahkan dalam proses pembangunan wilayah. Keindahan alam dan daya tarik wisata yang dimiliki kawasan ini menjadi modal utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, namun pada saat yang sama menciptakan ketergantungan yang tinggi terhadap stabilitas lingkungan dan persepsi keamanan. Ketika ancaman bencana muncul, baik dalam bentuk kejadian nyata maupun peringatan dini, aktivitas pariwisata cenderung mengalami gangguan yang berdampak langsung pada pendapatan masyarakat dan keberlangsungan usaha mikro. Kondisi ini diperkuat oleh keterbatasan kapasitas adaptif masyarakat dan pelaku usaha, yang masih menghadapi kendala dalam hal kesiapsiagaan, perencanaan darurat, serta perlindungan ekonomi jangka panjang. Di sisi lain, upaya pengelolaan pariwisata yang ada masih lebih berorientasi pada aspek pengembangan daya tarik dan pelayanan wisata, sementara dimensi keselamatan dan pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya terintegrasi sebagai bagian utama dari tata kelola kawasan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap gambaran umum wilayah Pantai Sine menjadi landasan penting dalam membaca hasil analisis selanjutnya, karena menunjukkan bahwa keberlanjutan pariwisata pesisir tidak hanya ditentukan oleh potensi alam dan aksesibilitas, tetapi juga oleh kemampuan wilayah dan masyarakatnya dalam mengelola risiko bencana secara terpadu, adaptif, dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Studi ini menegaskan bahwa tingginya kerentanan sosial dan ekonomi di kawasan pesisir selatan Tulungagung memperbesar potensi gangguan terhadap aktivitas pariwisata ketika *multi-hazard* terjadi, kerentanan tersebut muncul dari kombinasi paparan tinggi (zona pesisir yang rawan tsunami, abrasi, dan banjir rob), sensitivitas ekonomi (ketergantungan rumah tangga dan usaha mikro pada pendapatan musiman tanpa cadangan modal yang memadai), serta kapasitas adaptif yang belum kuat (kepercayaan terhadap EWS rendah, keterbatasan akses layanan dasar, dan kelembagaan lokal yang belum terkoordinasi untuk fungsi mitigasi dan tanggap darurat). Dampak nyata dari kondisi ini bukan hanya hilangnya kunjungan wisatawan sementara tetapi juga potensi gangguan jangka panjang terhadap mata pencaharian nelayan dan pelaku usaha pariwisata, berkurangnya kepercayaan investor, serta menurunnya kualitas pengalaman wisata yang pada akhirnya mengancam keberlanjutan ekonomi lokal.

Oleh karena itu, setiap intervensi pengembangan pariwisata harus dipandang sebagai bagian dari upaya pengurangan risiko bencana, bukan sekadar promosi pariwisata, agar pembangunan destinasi bersifat aman, inklusif, dan tahan guncangan. Sebagai respons, strategi resiliensi yang direkomendasikan mengombinasikan intervensi fisik dan non-fisik yang saling menguatkan: penguatan kapasitas masyarakat melalui program pendidikan risiko, latihan evakuasi berkala, dan peningkatan literasi keuangan untuk menumbuhkan kesiapsiagaan serta ketahanan rumah tangga, diversifikasi ekonomi yang aktif mendorong nilai tambah produk perikanan (pengolahan, pengemasan, pemasaran digital) dan pengembangan produk pariwisata non-musiman sehingga pendapatan tidak sepenuhnya bergantung pada musim kunjungan, pembangunan infrastruktur adaptif seperti jalur dan titik evakuasi yang jelas dan mudah diakses, area penampungan sementara yang memenuhi standar keselamatan, serta perkuatan dermaga dan fasilitas penunjang yang dirancang tahan terhadap beban gelombang ekstrem, penyempurnaan sistem peringatan dini yang menggabungkan verifikasi lokal untuk mengurangi false alarm dan jalur komunikasi berbasis komunitas agar informasi cepat dan dipercaya, serta pembentukan mekanisme koordinasi *multi-stakeholder* formal yang memperjelas peran dan tanggung jawab

Pemerintah Daerah, BPBD, Dinas Pariwisata, POKDARWIS, sektor swasta, dan LSM dalam perencanaan, pendanaan, dan respons darurat. Untuk menjembatani rekomendasi tersebut ke tindakan nyata, disarankan langkah implementasi bertahap yang dimulai dengan prioritas jangka pendek berupa pemetaan risiko terperinci, pelatihan komunitas dan simulasi evakuasi, serta pembentukan forum koordinasi lokal, tahap menengah fokus pada investasi infrastruktur evakuasi dan retrofit fasilitas pariwisata, pengembangan program pembiayaan mikro dan skema asuransi mikro untuk UMKM pariwisata, serta *pilot project* diversifikasi usaha yang dapat direplikasi, sementara tahap panjang meliputi integrasi kebijakan resiliensi ke dalam RIPPANDA dan RTRW, pembangunan jaringan infrastruktur yang tahan bencana, serta penguatan kapasitas kelembagaan

melalui pelatihan manajemen risiko dan alokasi anggaran berkelanjutan (APBD, hibah nasional, CSR). Seluruh proses harus dilengkapi mekanisme pemantauan dan evaluasi partisipatif untuk menilai efektivitas intervensi, penyesuaian berbasis bukti, dan kesinambungan pendanaan, serta komitmen berkelanjutan dari semua pemangku kepentingan agar strategi resiliensi ini tidak berhenti pada dokumen, melainkan terwujud menjadi praktik pengelolaan pariwisata pesisir yang aman, berkelanjutan, dan berdaya tahan.

REFERENCES

- Anasco, N. C., Tan, M. L., Dacles, T. P., & Ferreras, C. R. (2021). Community-based disaster risk reduction in tourism-dependent communities: Insights from the Philippines. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 60, 102320.
- Badoc-Gonzales, B. P., Mandigma, M. B. S., & Tan, J. J. (2021). Resilience and sustainability interventions in selected post-Haiyan Philippines MSMEs. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 57, 102162. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2021.102162>
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2012). Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penilaian Risiko Bencana. Jakarta: BNPB.
- Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung. (2025). Laporan evaluasi sistem peringatan dini Pantai Sine. BPBD Kabupaten Tulungagung.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Kabupaten Tulungagung dalam angka 2024. BPS Kabupaten Tulungagung.
- Bernard, H. R., Killworth, P., Kronenfeld, D., & Sailer, L. (2006). Disaster vulnerability of tourists: A case study. *Journal of Travel Research*, 44(3), 327-338. <https://doi.org/10.1177/0047287506291597>
- Bhayu, R. (2022). Local communities' and tourists' adaptation to pandemic-induced social disruption: Comparing national parks and urban destinations. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 82, 103380. <https://doi.org/10.1016/j.ijdr.2022.103380>
- De Vincentiis, L., Petrosillo, I., & Zurlini, G. (2019). Assessing the vulnerability of coastal tourism to climate and disaster risks: A system-based approach. *Sustainability*, 11(14), 3936.
- DetikNews. (2020). Ratusan Warga Pesisir Tulungagung Mengungsi Gegara Isu Tsunami <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5204211/ratusan-warga-pesisir-tulungagung-mengungsi-gegara-isu-tsunami>
- Drabek, T. E. (1995). Disaster responses within the tourist industry. *International Journal of Mass Emergencies and Disasters*, 13(1), 7-23.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2012). Managing the risks of extreme events and disasters to advance climate change adaptation (SREX) (C. B. Field et al., Eds.). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139177245>
- Mandić, A. (2019). Tourism and disaster risk reduction: An institutional perspective. *Sustainability*, 11(5), 1274. <https://doi.org/10.3390/su11051274>
- Manna, A. (2020). Analisis kerusakan pesisir akibat gelombang pasang di kawasan wisata. *Jurnal Geografi Maritim*, 3(2), 55-62.
- Mohsen, M., Aboulnaga, F., Elwan, A., & Elsharouny, M. R. (2019). Risks, policies, measures and actions for climate change adaptation in developing countries. In *Urban climate change adaptation in developing countries*. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-05405-2_6
- Murphy, P. E., & Bayley, R. (1989). Tourism and disaster planning. *Geographical Review*, 79(1), 36-46. <https://doi.org/10.2307/215189>
- Muttaqin, A. (2020). Dampak abrasi terhadap infrastruktur pariwisata pesisir. *Jurnal Pesisir dan Kelautan*, 12(1), 77-85.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2017-2027 [Perda]. (2017). Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Seri E. Pemerintah Kabupaten Tulungagung.

-
- Rindrasah, S. (2015). Manajemen risiko bencana dalam pengembangan destinasi wisata. *Jurnal Pariwisata dan Budaya*, 3(1), 45-54.
- Suswanto, Y. (2025, 24 Maret). Wawancara pribadi. Pokdarwis Pantai Sine, Kabupaten Tulungagung.
- Trapani, F. D., Trovato, M. R., & D'Agostino, A. (2021). Building resilient coastal tourism through disaster risk reduction strategies: Evidence from Mediterranean regions. *Ocean & Coastal Management*, 210, 105695. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2021.105695>
- Tsai, H., & Chen, C. (2010). Disaster preparedness and risk management in tourism. *Tourism Management*, 31(5), 677-687. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2009.07.009>
- United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). (2015). Sendai framework for disaster risk reduction 2015–2030. <https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030>
- Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2004). *At risk: Natural hazards, people's vulnerability and disasters* (2nd ed.). Routledge.

EVALUASI PROGRAM TAHU SUMEDANG DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN SUMEDANG

Rika Kusdinar*¹, Garry Putra Pamungkas², Harlan Fadillah³, Lie Diana Putri⁴, Novi Sulastri⁵, Silvi Yulianti⁶, Siti Komariah⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Sebelas April

Email*¹: rika_kusdinar@unsap.ac.id

ABSTRAK

Pelayanan publik berbasis digital merupakan inovasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik mengembangkan aplikasi Tahu Sumedang sebagai platform pelayanan publik terintegrasi. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala sehingga diperlukan evaluasi program. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Program Tahu Sumedang dalam meningkatkan pelayanan publik, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan evaluasi, serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner, dengan informan aparatur Diskominfo dan Statistik. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Tahu Sumedang telah berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan publik, terutama dalam kemudahan akses dan integrasi layanan. Namun, evaluasi program belum optimal akibat keterbatasan sumber daya evaluator, mekanisme evaluasi yang belum terstruktur, keterbatasan anggaran, serta kendala teknis aplikasi. Upaya perbaikan dilakukan melalui peningkatan kompetensi evaluator, perbaikan perencanaan evaluasi, optimalisasi anggaran, serta penguatan koordinasi dan dukungan pimpinan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas evaluasi dan pengembangan pelayanan publik berbasis digital.

Keyword: Kebijakan Publik, Evaluasi Kebijakan Publik, Evaluasi Program, Program Tahu Sumedang

1. PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan inti dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Secara fundamental, kewajiban negara dalam menyediakan pelayanan diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik harus berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan berorientasi pada peningkatan kualitas dan kepuasan masyarakat. Tuntutan ini mengharuskan setiap instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah untuk meninggalkan paradigma birokrasi lama yang dicirikan sebagai mahal, lambat, dan seram dan beralih menuju pelayanan yang murah, cepat, dan ramah.

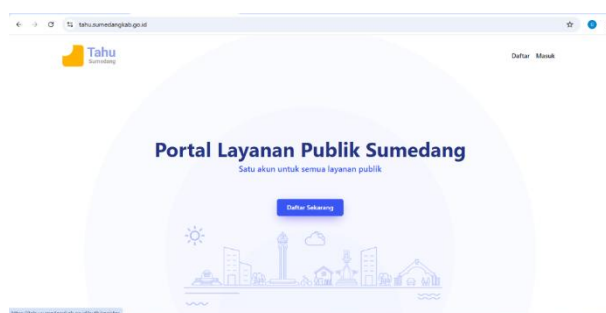
Keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan publik tidak lagi diukur sebatas pada ketaatan prosedur (SOP), tetapi harus dinilai berdasarkan hasil dan manfaat yang dirasakan oleh penerima layanan. Kondisi ini mendorong organisasi publik untuk melakukan inovasi berkelanjutan demi menjamin kualitas layanan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Transformasi digital dalam pelayanan publik telah menjadi bagian dari agenda nasional reformasi birokrasi, khususnya dalam mendorong efisiensi, transparansi, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah pusat hingga daerah didorong untuk memanfaatkan teknologi informasi guna menjawab kebutuhan masyarakat akan layanan yang cepat, mudah, dan tidak berbelit-belit. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah pengembangan sistem pelayanan publik berbasis digital yang terintegrasi.

Sejalan dengan amanat Peraturan presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan pesatnya perkembangan teknologi informasi, Pemerintah Indonesia secara nasional mendorong penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Di tingkat daerah otonom, upaya ini diwujudkan melalui kebijakan strategis seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Sumedang. Pemerintah Kabupaten Sumedang memiliki visi sebagai Sumedang Simpati Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045 di tahun 2025. Visi tersebut menjadi arah gerak kerja bagi Organisasi Perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Sumedang, serta menggunakan visi dan misi tersebut sebagai dasar untuk membangun program strategis, termasuk program *Smart City*.

Untuk mewujudkan Sumedang *Smart City*, Kabupaten Sumedang mengembangkan Program Sumedang *Happy Digital Region*, yang diatur dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Transformasi Digital Menuju Sumedang *Happy Digital Region*. Program ini merupakan rencana pengelolaan dan pembangunan yang memanfaatkan teknologi informasi dengan cara yang inovatif dan terintegrasi untuk menyelesaikan berbagai masalah, salah satunya yaitu program Tahu Sumedang. Kabupaten Sumedang telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam transformasi ini melalui Program Sumedang *Happy Digital Region*. Komitmen ini terbukti dengan capaian Indeks SPBE terbaik secara nasional selama beberapa tahun berturut-turut.

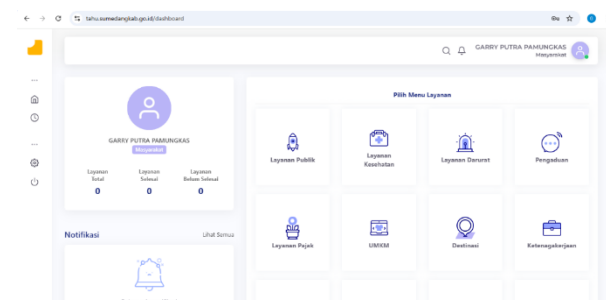
Dalam struktur organisasi daerah, Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik memegang peran sentral sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi, komunikasi publik, dan pengembangan layanan digital di daerah. Di tengah tren digitalisasi tersebut, Kabupaten Sumedang menjadi salah satu daerah yang cukup progresif dalam mengembangkan platform pelayanan digital melalui website bernama Tahu Sumedang (Tanggap, Humanis, dan Unggul). Website ini dirancang sebagai sistem terpadu yang dapat melayani berbagai kebutuhan administrasi masyarakat secara daring. Melalui satu pintu, masyarakat dapat mengakses layanan kependudukan, sosial, pengaduan, hingga pelacakan status dokumen yang diajukan. Hal ini menjadikan Tahu Sumedang sebagai representasi dari upaya pemerintah daerah dalam mengimplementasikan pelayanan publik berbasis teknologi.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang lebih praktis dan mobile, inovasi tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi aplikasi Tahu Sumedang berbasis mobile, yang dibuat dan dikelola oleh Bidang Informatika Diskominfoanditik Kabupaten Sumedang sejak tahun 2022. Aplikasi ini diharapkan mampu menjadi pusat integrasi seluruh layanan perangkat daerah, sehingga masyarakat tidak perlu mengakses banyak aplikasi atau datang secara langsung ke kantor pelayanan. Cukup melalui satu platform, berbagai layanan diharapkan dapat diakses secara mudah, cepat, dan terstandarisasi. Diskominfoanditik Kabupaten Sumedang telah meluncurkan aplikasi Tahu Sumedang, sebuah *Super App* yang mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu platform digital yang mudah diakses. Aplikasi ini dirancang untuk mengoptimalkan pelayanan publik dengan mempermudah akses layanan dan meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan.



Gambar 1. Tampilan Awal Tahu Sumedang

Sumber : <https://tahu.sumedangkab.go.id>



Gambar 2. Tampilan Dashboard Tahu Sumedang

Sumber : <https://tahu.sumedangkab.go.id/dashboard>

Suatu program memiliki sifat yang dinamis, karena selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat. Perubahan-perubahan dan perkembangan kebutuhan tersebut menuntut adanya penelitian dan evaluasi agar program dapat disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan perubahan tersebut. Tidak hanya itu, tetapi kelayakan program juga harus dievaluasi, sehingga dapat diputuskan apakah program tersebut dapat dilanjutkan atau tidak, atau mungkin diganti dengan program yang baru. Begitu pula dengan program Tahu Sumedang. Sebagai aplikasi layanan digital, program ini perlu terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Karena itu, evaluasi penting dilakukan untuk melihat sejauh mana aplikasi ini sudah mencapai tujuan awalnya, baik dari sisi efektivitas layanan, tingkat pemanfaatan oleh masyarakat, maupun kontribusinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Karena aplikasi Tahu Sumedang sudah berjalan cukup lama, tentu perlu dilihat lagi bagaimana perkembangan dan hasilnya sejauh ini. Evaluasi penting dilakukan untuk mengetahui apakah aplikasi ini benar-benar digunakan masyarakat, apakah fiturnya bekerja dengan baik, dan apakah sudah membantu memperbaiki pelayanan publik seperti yang direncanakan. Dengan melakukan evaluasi, pemerintah bisa melihat bagian

mana yang sudah efektif dan bagian mana yang masih perlu diperbaiki, sehingga aplikasi ini tetap relevan dan terus berkembang mengikuti kebutuhan pengguna.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa evaluasi program Tahu Sumedang dalam meningkatkan pelayanan publik oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikasi sebagai berikut:

1. Kinerja aplikasi Tahu Sumedang masih memerlukan peningkatan, yang ditunjukkan oleh munculnya error pada sistem, lambatnya respon aplikasi, serta tampilan antarmuka yang belum sepenuhnya responsif pada berbagai perangkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program secara teknis belum berjalan optimal, sehingga berpotensi menghambat kenyamanan pengguna dan menurunkan kualitas pelayanan publik berbasis digital yang diharapkan.
2. Beberapa aspek pelayanan dalam aplikasi Tahu Sumedang masih perlu ditingkatkan, terutama karena tidak seluruh fitur layanan yang direncanakan telah tersedia atau berfungsi secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa desain program belum sepenuhnya terealisasi dalam implementasi, sehingga tujuan integrasi layanan publik melalui satu platform digital belum tercapai secara maksimal dan masih memerlukan penyempurnaan.
3. Pemanfaatan aplikasi Tahu Sumedang oleh masyarakat masih tergolong rendah. Berdasarkan hasil kuesioner, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat telah mengetahui keberadaan aplikasi, namun belum banyak yang menggunakannya secara aktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak program terhadap peningkatan pelayanan publik belum optimal, serta mengindikasikan perlunya peningkatan sosialisasi, kemudahan penggunaan, dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital tersebut.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali, memahami, dan menginterpretasikan fenomena sosial secara mendalam. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian dilakukan langsung pada situasi yang berlangsung secara alami tanpa rekayasa, sehingga data yang diperoleh lebih kaya dan mencerminkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Metode penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis. (Sugiyono 2022)

Teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan menggunakan *purposive sampling*. Menurut Nasution (2023) “*Purposive sampling* adalah pengambilan sampel yang dilakukan sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan”. Oleh karena itu, subjek penelitian dipilih dari para pelaksana yang memiliki kewenangan, informasi relevan, serta pemahaman mendalam mengenai aspek-aspek yang hendak dikaji. Pemilihan ini diharapkan dapat membantu peneliti memperoleh gambaran yang akurat mengenai situasi penelitian. Sehingga dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang yang dituangkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Subjek Penelitian

No	Unsur	Jumlah
1.	Kepala Bidang Informatika	1
2.	Bidang Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	1
3.	Pranata Komputer	1
Jumlah		3

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Peneliti menggunakan Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2013) sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan
2. Studi Lapangan
 - a. Observasi
 - b. Wawancara
 - c. Dokumentasi
 - d. Triangulasi/gabungan

Sugiyono (2013) menjelaskan dalam pengujian keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi sebagai berikut :

- 1 Uji Kredibilitas (*Credibility*)
- 2 Uji Transferabilitas (*Transferability*)
- 3 Uji Dependabilitas (*Dependability*)
- 4 Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Program Tahu Sumedang dalam meningkatkan pelayanan publik di Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dilakukan untuk menilai sejauh mana program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Seperti halnya dalam teori yang dikemukakan oleh Muhandika, Ambiyar (2019), yang mengemukakan bahwa Evaluasi program merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya suatu program yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan terkait dengan program.

Evaluasi program proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menilai informasi mengenai pelaksanaan suatu program. Informasi yang diperoleh digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, baik untuk menentukan keberlanjutan, perbaikan, maupun efektivitas program tersebut. Evaluasi dilakukan secara ilmiah, menyeluruh, dan berkelanjutan untuk menjamin mutu program berdasarkan kriteria tertentu.

Dalam pelaksanaannya, Program Tahu Sumedang sebagai program pelayanan publik berbasis digital memerlukan penilaian yang komprehensif untuk mengetahui sejauh mana program tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Evaluasi tidak hanya dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan program, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pelayanan publik melalui aplikasi Tahu Sumedang.

Untuk mengetahui evaluasi program Tahu Sumedang di Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang saat ini, peneliti menggunakan 5 dimensi evaluasi program menurut Muhandika, Ambiyar (2019), sebagai berikut :

1. Kebutuhan;
2. Konseptualisasi Program dan desain;
3. Pelaksanaan program;
4. Dampak program;
5. Efisiensi program;

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hasil keseluruhan Evaluasi Program Tahu Sumedang dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang, sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Penelitian

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
1.	Kebutuhan	a. Program sesuai kebutuhan masyarakat	Diskominfoandistik Kabupaten Sumedang memastikan kesesuaian program Tahu Sumedang dengan kebutuhan masyarakat melalui pengembangan aplikasi, dukungan pelayanan perizinan di MPP, serta evaluasi rutin dengan mengumpulkan feedback pengguna. Pelayanan difokuskan pada layanan kependudukan dan masukan yang diterima digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan.
		b. Permasalahan awal teridentifikasi dengan tepat	Permasalahan awal layanan antar dinas yang masih terpisah dan sulit diakses mendorong dibutuhkannya satu pintu layanan. Dari kebutuhan tersebut dikembangkan aplikasi Tahu Sumedang sebagai wadah layanan terpadu berbasis digital yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan dalam satu tempat, terutama bagi generasi muda yang lebih menyukai pelayanan secara online.

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
2.	Konseptualisasi Program dan Desain	a. Program memiliki desain yang jelas	Pelaksana memahami alur dan fitur aplikasi karena digunakan langsung dalam pelayanan dan dipelajari sebelum serta selama bertugas. Desain program dinilai cukup dipahami oleh pelaksana dan pengguna di MPP, meskipun pemahaman masyarakat di wilayah yang lebih jauh belum dapat dipastikan. Aplikasi Tahu Sumedang dinilai mudah dipahami, terlihat dari banyaknya pengajuan dan jumlah pengguna baru yang terus bertambah.
		b. Tujuan dan output terukur	Program Tahu Sumedang dirancang berkelanjutan melalui integrasi berbagai aplikasi layanan menjadi satu aplikasi utama. Tujuan dan output program dipantau melalui dashboard layanan, sedangkan keberhasilan dan keberlanjutan diukur oleh dinas terkait melalui data layanan, IKM, QPI, kepuasan masyarakat, serta kinerja pegawai.
3.	Pelaksanaan Program	a. Program berjalan sesuai rencana	Pelaksanaan program Tahu Sumedang berjalan sesuai rencana awal dan timeline yang telah ditetapkan, namun beberapa pengembangan fitur dan implementasi layanan masih mengalami keterlambatan. Keterlambatan tersebut disebabkan oleh proses integrasi sistem, keterbatasan tim, serta monitoring timeline yang belum formal.
		b. SDM dan fasilitas memadai	SDM pelaksana dinilai cukup memadai dan mampu menangani kendala teknis, namun masih menghadapi keterbatasan pada fasilitas dan kapasitas server serta penempatan SDM. Kendala infrastruktur dan jaringan menyebabkan kinerja aplikasi belum optimal, sehingga beberapa fitur masih perlu diperbaiki dan dukungan infrastruktur terus diupayakan melalui koordinasi dengan pihak terkait.
4.	Dampak Program	a. Program meningkatkan kualitas layanan publik	Aplikasi Tahu Sumedang menyediakan layanan publik berbasis mobile yang memudahkan masyarakat dalam mengakses dan mendaftar layanan. Namun, kualitas pelayanan tetap bergantung pada masing-masing dinas sebagai pemberi layanan, karena Diskominfo hanya berperan sebagai penyedia pintu akses. Proses pengajuan dapat dilakukan kapan saja, meskipun pelaksanaannya tetap mengikuti hari kerja.
		b. Memberikan manfaat bagi masyarakat	Aplikasi Tahu Sumedang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan publik secara online tanpa harus datang langsung dan antre. Layanan dapat diakses dari rumah sehingga menghemat waktu dan biaya, serta sangat membantu terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh karena akses menjadi lebih cepat dan praktis.
5.	Efisiensi Program	a. Pemanfaatan sumber daya optimal	Pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan program Tahu Sumedang telah berjalan dengan dukungan kerja sama pegawai sehingga program tetap berjalan sesuai tujuan. Namun,

No	Dimensi	Indikator	Kesimpulan
			pemanfaatan sumber daya program belum optimal karena jumlah pengguna aplikasi masih relatif rendah dibandingkan total penduduk, yang dipengaruhi oleh kebutuhan layanan yang tidak muncul setiap waktu. Pengelolaan aplikasi dinilai cukup baik, meskipun masih menghadapi kendala gangguan jaringan dari PDN yang sulit ditangani secara langsung.
		b. Perbandingan sumber daya optimal	Program Tahu Sumedang dinilai efisien karena dikembangkan secara internal oleh Diskominfo tanpa anggaran khusus, dengan biaya operasional yang minimal. Tidak adanya biaya hosting, lisensi, maupun server berbayar membuat aplikasi mampu mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu aplikasi dengan pengeluaran yang relatif kecil, meskipun belum terdapat rencana pengembangan baru.

Sumber : Penelitian 2025

Berdasarkan tabel di atas dalam evaluasi program Tahu Sumedang di Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang yang sudah dilakukan masih belum baik. Karena masih terdapat beberapa aspek yang masih perlu diperbaiki dalam proses evaluasi program Tahu Sumedang, akan tetapi terdapat aspek yang telah terpenuhi dalam evaluasi program Tahu Sumedang di Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.

Program sesuai kebutuhan masyarakat dari dimensi kebutuhan menunjukkan hasil yang baik dalam aspek kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, dan terintegrasi. Menurut penelitian Ridzakiy et al. (2026) yang menyatakan bahwa aplikasi Tahu Sumedang menyediakan berbagai informasi layanan publik, mulai dari kependudukan, UMKM, kesehatan, hingga pariwisata Informasi yang disajikan relatif relevan dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung transparansi pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa program Tahu Sumedang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik.

Selanjutnya dalam aspek Permasalahan awal teridentifikasi dengan tepat pun baik karena aplikasi Tahu Sumedang lahir dari kondisi pelayanan publik yang sebelumnya masih terpisah antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan sulit diakses oleh masyarakat. Permasalahan tersebut kemudian direspons melalui pengembangan layanan satu pintu berbasis digital yang mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan dalam satu aplikasi, sehingga hal ini sejalan pendapat Menurut Dunn (2003) dalam Engkus (2022) menyatakan bahwa : Model kebijakan diartikan sebagai representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan aplikasi Tahu sumedang pada aspek permasalahan awal teridentifikasi dilakukan secara sistematis.

Selanjutnya untuk dimensi Konseptualisasi Program dan Desain ada aspek yang belum terpenuhi yaitu Program memiliki desain yang jelas, dikatakan bahwa aplikasi tahu sumedang dirancang dengan alur layanan dan fitur yang relatif mudah dipahami oleh pelaksana maupun pengguna, khususnya di lingkungan mal pelayanan publik (mpp). Para pelaksana memahami penggunaan aplikasi karena telah mempelajarinya sebelum dan selama bertugas, serta menggunakannya secara langsung dalam proses pelayanan. Desain aplikasi dinilai belum komunikatif dan fungsional, tercermin dari meningkatnya jumlah pengajuan layanan dan bertambahnya pengguna baru. Namun demikian, pemahaman masyarakat di wilayah yang lebih jauh dari pusat pelayanan belum dapat dipastikan sepenuhnya, sehingga masih diperlukan penguatan sosialisasi agar desain program dapat dipahami secara merata. Sehingga hal ini sejalan menurut Prakasa et al. (2023) mengatakan bahwa konseptualisasi program dan desain sebagai berikut : Evaluasi pengalaman pengguna dan perbaikan antarmuka diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan digital, terutama terkait usability, alur penggunaan, dan kejelasan informasi kepada pengguna. Hal ini perlunya perbaikan antarmuka dan penguatan sosialisasi layanan digital.

Kemudian dalam Tujuan dan output terukur menunjukkan hasil baik karena program tahu sumedang dirancang secara berkelanjutan melalui integrasi berbagai aplikasi layanan ke dalam satu aplikasi utama. Tujuan program diarahkan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, sementara output program dapat dipantau melalui dashboard layanan. Keberhasilan dan keberlanjutan program diukur menggunakan berbagai instrumen, seperti data layanan, indeks kepuasan masyarakat (ikm), *quality performance indicator* (qpi), tingkat kepuasan masyarakat, serta kinerja pegawai. Sehingga sejalan dengan pendapat Muhardika, Ambiyar (2019) menyatakan bahwa : Memperkuat desain program, karena hasil evaluasi program dapat

mengartikulasikan tujuan dan sasaran program berdasarkan komponen-komponen yang telah dievaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dan output dilakukan secara jelas dan terukur sesuai sasaran yang ditetapkan.

Kemudian untuk dimensi Pelaksanaan Program menunjukkan hasil belum baik, dalam aspek Program berjalan sesuai rencana karena program telah berjalan, pelaksanaan teknisnya masih memerlukan penguatan agar sesuai sepenuhnya dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sejalan dengan dengan penelitian menurut Situmorang, Damanik, dan Darmansyah (2025), menyatakan bahwa : Monitoring dan evaluasi memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, karena mekanisme ini memungkinkan pengidentifikasian hambatan sejak dini dan upaya perbaikan yang tepat. Pelaksanaan Program dalam evaluasi diperlukan penguatan monitoring dan evaluasi agar dapat diidentifikasi dan diperbaiki secara tepat sesuai tujuan program.

Dalam aspek SDM dan fasilitas memadai belum baik karena pelaksanaan program masih menghadapi keterbatasan fasilitas, terutama pada kapasitas server, infrastruktur jaringan, serta penempatan SDM yang belum sepenuhnya ideal. Kendala infrastruktur tersebut berdampak pada kinerja aplikasi yang belum optimal, sehingga beberapa fitur masih memerlukan perbaikan dan pengembangan lanjutan. sejalan dengan penelitian menurut Salamet dan Heru (2021) yang menyatakan bahwa: Sumber Daya Manusia merupakan faktor utama dalam pelaksanaan pelayanan public. Sikap psegawai dalam memberikan pelayanan mempengaruhi kenyamanan masyarakat sebagai pengguna pelayanan. Sikap seseorang dipengaruhi oleh factor dari dalam diri pegawai itu sendiri dan factor lingkungan.

Selanjutnya untuk dimensi Dampak Program menunjukkan hasil yang baik yang mana dalam aspek Program meningkatkan kualitas layanan publik berupa tersedianya layanan publik berbasis mobile yang memudahkan masyarakat dalam mengakses dan mendaftarkan layanan. Sejalan dengan penelitian menurut Van Meter dan Van Hom dalam penelitian Rizqi et al. (2025), menyatakan “Tingkat keberhasilan dapat dilihat dari ukuran dan sasaran kebijakan. Dimana, para pelaksana perlu untuk menegaskan adanya standar dan sasaran kebijakan yang perlu dicapai. Hal ini dikarenakan, suatu kinerja implimentasi kebijakan merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran kebijakan tersebut”.

Kemudian dalam aspek Memberikan manfaat bagi masyarakat baik dengan berupa kemudahan akses layanan publik secara online tanpa harus datang langsung dan mengantre di kantor pelayanan. Sejalan dengan penelitian menurut Zein, Anggraini, dan Malau (2025), Digitalisasi signifikan meningkatkan efisiensi pelayanan publik, antara lain melalui pengurangan biaya operasional, percepatan alur layanan, dan peningkatan akurasi proses layanan. Hal tersebut mengakibatkan akses layanan menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien.

Dalam dimensi terakhir, dimensi Efisiensi Program menunjukkan hasil yang belum baik, dalam aspek Pemanfaatan sumber daya optimal masih terdapat pemanfaatan sumber daya tersebut belum sepenuhnya optimal karena jumlah pengguna aplikasi masih relatif rendah dibandingkan dengan total jumlah penduduk Kabupaten Sumedang. Kondisi ini dipengaruhi oleh kebutuhan layanan masyarakat yang tidak muncul secara terus-menerus, serta kendala teknis seperti gangguan jaringan dari Pusat Data Nasional (PDN) yang tidak dapat ditangani secara langsung oleh pengelola daerah. Sehingga sejalan dengan pendapat menurut Yungkul (2025) menyatakan bahwa : Pemanfaatan sumber daya dalam pelayanan publik dikatakan optimal apabila sumber daya yang tersedia mampu dimanfaatkan secara efisien dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meskipun tanpa penambahan sumber daya yang besar.

Dan aspek Perbandingan sumber daya optimal menunjukkan hasil baik karena aplikasi ini dikembangkan secara internal oleh Diskominfo sanditik tanpa anggaran khusus, sehingga biaya yang dikeluarkan sangat minimal. Tidak adanya biaya tambahan untuk *hosting*, lisensi, maupun server berbayar memungkinkan aplikasi ini mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu platform dengan pengeluaran yang relatif kecil. Meskipun hasil yang dicapai belum sepenuhnya maksimal dari sisi jumlah pengguna, namun dari sisi biaya dan pemanfaatan sumber daya, program ini mampu menghasilkan manfaat pelayanan publik yang signifikan. Sehingga sejalan dengan penelitian menurut Yungkul (2025) menyatakan Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik mempercepat proses pelayanan, mengurangi birokrasi, serta meningkatkan efisiensi layanan dengan biaya operasional yang lebih rendah.

4. KESIMPULAN

Evaluasi Program Tahu Sumedang dalam meningkatkan pelayanan publik menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi program belum dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Evaluasi masih bersifat insidental dan dilakukan ketika terdapat permasalahan teknis atau adanya arahan dari pimpinan. Selain itu, belum terdapat tim evaluator khusus yang secara formal bertanggung jawab terhadap pelaksanaan evaluasi program. Keterbatasan anggaran juga menjadi faktor utama, karena tidak adanya alokasi anggaran khusus untuk pembuatan, pengembangan, pengelolaan, maupun evaluasi Tahu Sumedang. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan pengembangan fitur, pemeliharaan sistem, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar

perbaikan program. Di sisi lain, pemanfaatan Tahu Sumedang oleh masyarakat masih belum maksimal akibat keterbatasan sosialisasi, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap fitur, serta masih ditemukannya kendala teknis dalam penggunaan.

Faktor penghambat dalam evaluasi Program Tahu Sumedang meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan evaluasi, keterbatasan waktu, serta tidak tersedianya anggaran khusus untuk mendukung kegiatan evaluasi program. Selain itu, hasil evaluasi yang telah dilakukan umumnya belum terdokumentasi secara tertulis dan sistematis, sehingga belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan perbaikan program. Faktor penghambat lainnya adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan Tahu Sumedang sebagai sarana pelayanan publik, serta adanya kendala teknis aplikasi yang berpengaruh terhadap kenyamanan dan kepercayaan pengguna.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam evaluasi Program Tahu Sumedang antara lain dengan melakukan perbaikan dan pengembangan aplikasi secara bertahap sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia, meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal antarbidang dan perangkat daerah, serta menyesuaikan pelaksanaan evaluasi dengan kondisi di lapangan. Selain itu, diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar pemanfaatan Aplikasi Tahu Sumedang dapat lebih optimal, serta penguatan komitmen pimpinan dalam mendukung keberlanjutan program. Ke depan, evaluasi Program Aplikasi Tahu Sumedang perlu dilaksanakan secara lebih terencana, terdokumentasi, dan berkelanjutan agar hasil evaluasi dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perbaikan program dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sumedang.

REFERENCES

- Engkus, H., dan M. Si. 2022. *Kebijakan Publik (Konsep, Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi Serta Perubahan)*. Bekasi.
- Muhardika, Ambiyar. 2019. *Metodologi Penelitian Evaluasi Program*. Pertama. Bandung: ALFABETA.
- Nasution, Abdul Fattah. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Pertama. diedit oleh M. Albina. Bandung: Cv. Harfa creative.
- Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Masterplan Transformasi Digital Menuju Sumedang Happy Digital Region
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Prakasa, Rivo Dimas, Satrio Hadi Wijoyo, Intan Sartika, dan Eris Maghfiroh. 2023. "Evaluasi dan Perbaikan Desain Pengalaman Pengguna Aplikasi Pelayanan Publik Smart Kampung Kabupaten Banyuwangi menggunakan Pendekatan Human Centered Design." 7(2).
- Ridzakiy, Muhammad Fathoni, Muhammad Hudzaifah, M. Haidar Hafizh Daniar, Mohamad Davit, dan Triandi Priatna. 2026. "Transformasi Birokrasi Digital: Analisis Efektivitas Super App Tahu Sumedang dalam Akselerasi SPBE di Kabupaten Sumedang." 2:52-63.
- Rizqi, Masykurotur, Aji Putri, Muhammad Emir Al-azkiya, dan Bambang Dewanto. 2025. "Evaluasi Implementasi Program Rumanis Datang Si Kumis Hilang sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Wonogiri." 2024(2):175-95.
- Salamet, Hariyanto, dan Susilo Dwi Heru. 2021. "Evaluasi Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Di Kantor Desa Tanggaran Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek." *Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* XIV:307-27. <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/download/369/321/?utm>
- Situmorang, Mela Safitri, Aulia Sari Damanik, dan Tengku Darmansyah. 2025. "Efektivitas Monitoring dan Evaluasi dalam Implementasi Kebijakan Pendidikan : Pendekatan dan Tantangan." 3.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. 19 ed. Bandung: ALFABETA, CV.
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif*. Ketiga. diedit oleh Sofia Yustiani Suryandari. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Yungkul. 2025. "Optimalisasi Sistem Administrasi Publik dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Pemerintahan di Era Digital." 6(7).
- Zein, Ahmad Wahyudi, Dini Anggraini, dan Rifauziah Arni Malau. 2025. "Peran Digitalisasi dalam Efisiensi Pelayanan Publik : Studi Ekonomi Publik Digital." 2.

IMPLEMENTASI PROGRAM ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI DESA BETING KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Rifatul Mahfuzah

Universitas Riau

rifatul.mahfuzah7029@grad.unri.ac.id

ABSTRAK

Program Zakat Community Development (ZCD) merupakan model pemberdayaan berbasis zakat yang mengintegrasikan pendekatan karitatif dan produktif melalui penguatan kapasitas individu dan komunitas secara berkelanjutan. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, memperkuat kelembagaan lokal, serta mendorong transformasi mustahik menjadi muzakki. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan implementasi Program ZCD di Desa Beting, (2) menganalisis dampak Program ZCD terhadap aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan masyarakat, serta (3) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Desa Beting, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pengelola BAZNAS, pendamping program, pemerintah desa, dan mustahik penerima manfaat, didukung dengan observasi lapangan dan analisis dokumen program. Teknik analisis data mengikuti tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ZCD di Desa Beting dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu perintisan, penguatan, dan pemandirian, dengan intervensi pada lima aspek utama: ekonomi, kesehatan, kemanusiaan, pendidikan, dan dakwah. Secara ekonomi, program ini berkontribusi pada peningkatan aktivitas usaha produktif berbasis potensi lokal, terutama pada sektor perikanan, peternakan, dan UMKM, meskipun tingkat peningkatan pendapatan belum merata di seluruh mustahik. Secara sosial, ZCD mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, serta mengubah pola pikir mustahik menjadi lebih proaktif dan berorientasi pada kemandirian. Dari aspek kelembagaan, program ini berperan dalam pembentukan dan penguatan kelompok usaha bersama sebagai wadah kolaborasi dan pengambilan keputusan kolektif. Keberhasilan implementasi ZCD didukung oleh komitmen pendamping program, dukungan pemerintah desa, serta potensi sumber daya pesisir yang melimpah. Namun, terdapat tantangan berupa keterbatasan modal dan sarana produksi, rendahnya literasi keuangan sebagian mustahik, serta isu keberlanjutan program akibat ketergantungan pada pendamping eksternal dan keterbatasan pembiayaan berkelanjutan. Secara keseluruhan, Program ZCD di Desa Beting telah berkontribusi signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir, namun masih memerlukan penguatan pada aspek pendampingan, kelembagaan lokal, dan strategi keberlanjutan usaha.

Kata kunci: Zakat Community Development, Pemberdayaan Masyarakat, Wilayah Pesisir, Mustahik, Desa Beting.

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks agenda pembangunan nasional, kemiskinan di wilayah pesisir bersifat multidimensi, yang tidak hanya ditandai oleh rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga oleh keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif, rendahnya kapasitas dan keterampilan masyarakat, serta minimnya partisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kompleksitas permasalahan tersebut menuntut pendekatan pengentasan kemiskinan yang tidak semata-mata berfokus pada aspek ekonomi, melainkan juga pada penguatan kapasitas sosial dan kelembagaan masyarakat. Oleh karena itu, strategi pengentasan kemiskinan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat pesisir menjadi semakin strategis dan relevan dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan pembangunan yang menekankan penguatan kapasitas, kemandirian, serta perluasan akses masyarakat dalam mengontrol dan mempengaruhi proses pembangunan. Pendekatan ini menjadi penting karena kemiskinan tidak semata-mata berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga mencerminkan adanya ketidakberdayaan struktural yang membatasi posisi tawar masyarakat dalam struktur sosial dan ekonomi (Suharto, 2014), serta lemahnya akses terhadap sumber daya produktif dan peluang ekonomi. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai strategi kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan model pemberdayaan masyarakat yang efektif dan berkelanjutan, zakat muncul sebagai instrumen sosial-ekonomi yang semakin relevan dalam konteks pembangunan nasional. Sebagai instrumen redistribusi pendapatan, zakat memiliki potensi strategis untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin secara berkelanjutan, khususnya melalui pendekatan pemberdayaan produktif. Pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS-DSKL) yang terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp40,5 triliun pada tahun 2024, menunjukkan besarnya potensi dana umat yang dapat dioptimalkan tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan konsumtif, tetapi juga untuk penguatan kapasitas ekonomi dan kemandirian mustahik.

Sebagai respons terhadap kebutuhan model pemberdayaan yang lebih terintegrasi, BAZNAS mengembangkan program Zakat Community Development (ZCD) yaitu pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas dengan integrasi aspek ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Berbeda dari penyaluran zakat karitatif, ZCD berfokus pada capacity building, penguatan kelembagaan local dan transformasi mustahik menjadi muzakki. Namun secara Nasional, implementasi Zakat Community Development (ZCD) masih menghadapi sejumlah kendala seperti: kualitas pendampingan yang belum merata, kelembagaan komunitas yang belum kuat, keberlanjutan program yang bervariasi, serta transformasi mustahik-muzakki yang belum signifikan. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi empiris terhadap efektivitas implementasi ZCD pada konteks wilayah tertinggal.

Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti, merupakan wilayah prioritas pemberdayaan karena memiliki persentase penduduk miskin tertinggi di Riau, yaitu 20,51% (BPS, 2025). Sebagai wilayah pesisir dan termasuk kategori 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Kepulauan Meranti menghadapi hambatan geografis, rendahnya infrastruktur dasar, akses layanan terbatas, dan ketergantungan ekonomi pada sektor primer seperti perikanan dan hasil laut. Kondisi ini menjadikan Meranti sebagai lokasi strategis penerapan program pemberdayaan berbasis zakat.

Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut dengan menyajikan temuan empiris dan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk pengembangan program ZCD di wilayah pesisir, khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji implementasi dan efektivitas Program Zakat Community Development (ZCD) dalam pemberdayaan masyarakat desa pesisir di Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini juga bertujuan menilai kontribusi ZCD terhadap pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan diatas, Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan implementasi Program ZCD di Desa Beting.
2. Menganalisis dampak Program ZCD terhadap aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan masyarakat.
3. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasi Program ZCD.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di Desa Beting, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian dilakukan di Desa Beting, yang merupakan salah satu desa penerima Program ZCD BAZNAS Provinsi Riau.

Teknik pengumpulan data terdiri dari:

1. Wawancara mendalam dengan pengelola BAZNAS, pendamping program, pemerintah
2. desa, dan mustahik.
3. Observasi lapangan untuk melihat langsung pelaksanaan program.
4. Dokumentasi berupa laporan program, foto kegiatan, dan dokumen terkait.

Teknik analisis data terdiri dari:

1. Analisis data dilakukan melalui tahapan:
2. Reduksi data
3. Penyajian data
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

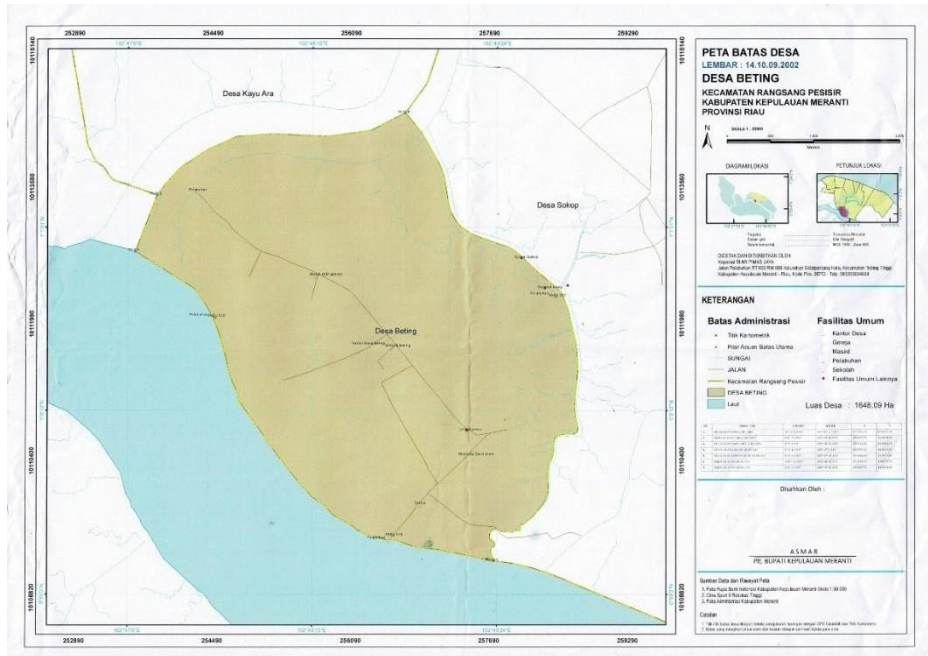
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Wilayah penelitian

Desa Beting merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Disamping 11 (Sebelas) Desa lainnya yaitu Desa Tanjung Kedabu, Sokop, Telesung, Bungur, Tenggayun Raya, Sendaun, Kayu Ara, Sonde, Kedabu Rapat dan Tanah Merah.

Secara geografis, Desa Beting terletak di wilayah pesisir dan kepulauan yang berbatasan langsung dengan perairan laut. Kondisi geografis tersebut menyebabkan Desa Beting memiliki karakteristik wilayah pasang surut serta tingkat aksesibilitas yang relatif terbatas dibandingkan wilayah daratan utama.

Secara administratif, Desa Beting berada dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Rangsang Pesisir dan terdiri atas beberapa dusun dan rukun warga. Jarak desa ke pusat kecamatan dan ibu kota kabupaten relatif jauh, sehingga memengaruhi keterjangkauan pelayanan publik, distribusi barang dan jasa, serta mobilitas ekonomi masyarakat.



Gambar 1. Peta Administrasi Desa Beting

Sumber: Data profil Desa Beting Tahun 2025

Luas wilayah Desa Beting Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti dengan luas lebih kurang 24 km². Secara administratif wilayah Desa Beting berbatasan langsung dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan Sungai Hongkoy
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai galang
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sodor
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Air Hitam

Desa Beting merupakan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan ketinggian rata-rata 2 meter dari permukaan air laut yang merupakan dataran tinggi.

Pelaksanaan Program ZCD di Desa Beting

Program *Zakat Community Development* (ZCD) di Desa Beting menysasar masyarakat atau mustahik yang memiliki potensi usaha produktif, dengan tujuan mendorong kemandirian ekonomi, meningkatkan kemampuan berwirausaha, serta memperbaiki kualitas hidup masyarakat perdesaan pesisir secara berkelanjutan.

Kelompok sasaran utama dalam pelaksanaan Program ZCD di Desa Beting adalah masyarakat yang tergolong mustahik, yaitu rumah tangga dengan tingkat pendapatan rendah dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Mustahik penerima manfaat program sebagian besar berasal dari kelompok nelayan tradisional, buruh harian, pelaku usaha mikro skala rumah tangga, serta masyarakat dengan mata pencaharian tidak tetap.

Penetapan mustahik dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi data oleh lembaga pengelola zakat yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama pemerintah desa dan pendamping program. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerima manfaat benar-benar memenuhi kriteria sebagai mustahik serta memiliki potensi untuk dikembangkan melalui program pemberdayaan. Mustahik tidak diposisikan semata-mata sebagai penerima bantuan, melainkan sebagai subjek pembangunan yang dilibatkan secara aktif dalam seluruh tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan.

Ada beberapa aspek pemberdayaan yang dilakukan di Desa Beting, Kec. Rangsang Pesisir, yakni;

1. Aspek Ekonomi

Dimana aspek ekonomi ini dilakukan untuk menambah laju pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dan juga menggali setiap potensi sumber daya alam yang ada untuk di optimalkan pengolahannya oleh sumber

- daya manusia itu sendiri. Berikut beberapa program pemberdayaan yang telah dilakukan di Aspek Ekonomi; Kelompok UKM Mitra Kerja (Pengolahan Kelapa Terpadu), Kelompok UKM Berkah Bunda (Pengolahan Ikan Lomek), Kelompok Nelayan Barokah dan Kelompok Ternak Sapi Terpadu.
2. Aspek Kesehatan
Aspek kesehatan ini dilakukan untuk mengontrol segi kesehatan masyarakat desa setempat dan tidak hanya itu kesehatan hewan ternak juga dijaga kesehatannya. Berikut beberapa program pemberdayaan yang telah dilakukan di Aspek Kesehatan; Pelayanan Kesehatan Mustahik, Sosialisasi PHBS, Pelayanan Kesehatan Ternak dan Sosialisasi Remaja Siaga.
 3. Aspek Kemanusiaan
Aspek Kemanusiaan lebih cenderung kepada kepedulian sesama terkait kondisi sosial itu terjadi. Berikut beberapa program pemberdayaan yang telah dilakukan di Aspek Kemanusiaan; Bantuan kemanusiaan paket sembako (Paket Logistik Keluarga), Kampung Tanggap Bencana Corona dan Sunat Massal.
 4. Aspek Pendidikan
Aspek pendidikan ini untuk meningkatkan taraf pendidikan masyarakat setempat dengan target masyarakat lebih peduli akan tingkat pendidikan dan kualitas pendidikan. Berikut beberapa program pemberdayaan yang telah dilakukan di Aspek Pendidikan; Edukasi Alam Pulau Kelapa, Fasilitas Pondok Baca dan Fasilitas Guru Ngaji Tradisional.
 5. Aspek Dakwah
Aspek Dakwah ini sebagai bentuk penanaman nilai-nilai agama bagi masyarakat setempat untuk menunjang kualitas agama yang baik. Berikut beberapa program pemberdayaan yang telah dilakukan di Aspek Dakwah; Pembinaan Muallaf, Fasilitas Mengaji Masjid, Majelis Ta'lim Mustahik dan Pesantren Kilat.

Secara keseluruhan, pola intervensi Program ZCD di Desa Beting menunjukkan pendekatan pemberdayaan yang komprehensif melalui diversifikasi sumber penghidupan, penguatan aset produktif, dan peningkatan kapasitas ekonomi mustahik. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi, peningkatan pendapatan, serta penurunan tingkat kerentanan sosial-ekonomi masyarakat perdesaan pesisir.

Penyaluran bantuan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi mustahik, potensi lokal yang dimiliki, serta aspek keberlanjutan usaha yang akan dikembangkan. Dengan pendekatan tersebut, bantuan yang diberikan diharapkan mampu mendorong peningkatan kapasitas usaha dan kemandirian ekonomi mustahik secara bertahap dan berkelanjutan.

Selain aspek material, Program *Zakat Community Development* (ZCD) juga menekankan pentingnya pendampingan dan pembinaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari bantuan yang diberikan. Mustahik tidak hanya menerima bantuan modal usaha, tetapi juga memperoleh pendampingan dalam pengelolaan usaha, penguatan kapasitas, serta pelatihan peningkatan keterampilan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah pesisir. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara optimal, meningkatkan kemampuan kemandirian mustahik, serta mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang.

Dalam konteks Desa Beting, penyaluran bantuan Program *Zakat Community Development* (ZCD) disesuaikan dengan karakteristik mata pencaharian masyarakat yang didominasi oleh sektor perikanan, perkebunan, peternakan serta usaha skala kecil berbasis sumber daya lokal. Penyesuaian ini menunjukkan bahwa Program ZCD dirancang tidak bersifat seragam, melainkan fleksibel dan adaptif terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan potensi lokal masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, Program ZCD diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih tepat sasaran, relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta berkontribusi secara efektif terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik.

Secara umum, bantuan Program ZCD di Desa Beting telah berperan sebagai stimulus awal dalam mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan memperkuat kapasitas sosial komunitas. Bantuan ini menjadi pondasi penting dalam proses pemberdayaan masyarakat perdesaan, yang selanjutnya dianalisis lebih lanjut untuk melihat pengaruhnya terhadap tingkat kemandirian mustahik dan pemberdayaan masyarakat.

Implementasi Program ZCD di Desa Beting

Implementasi Program ZCD di Desa Beting dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi:

1. Perintisan dan Pertumbuhan
 - a. Penyaluran bantuan ternak sapi dan Ternak Kambinh
 - b. Penyaluran bantuan alat tangkap nelayan
 - c. Penyaluran bantuan Penampung Air Hujan (PAH)
 - d. Penyaluran Bantuan Modal Usaha dan Rumah Produksi UMKM
 - e. Penyaluran Bantuan Fasilitas Pondok Baca (Desa Beting)
 - f. Penyaluran Bantuan Fasilitas Mengaji Masjid Al-Mujahiddin (Desa Beting)

- g. Penyaluran Bantuan Sunat Massal (Desa Centai)
 - h. Penyaluran Fasilitas Guru Ngaji dan Majelis Ta'lim (Desa Centai)
 - i. Penyaluran Bantuan Kesehatan Mustahik dan Ternak
 - j. Penyaluran Bantuan Pelatihan Teknis Peternakan, PHBS)
2. Penguatan
- a. Pelatihan dan Penyuluhan dari Dinas Pertanian dan Peternakan untuk kelompok ternak
 - b. Pelatihan Keamanan Pangan dari Dinkes untuk kelompok UMKM
 - c. Penyuluhan dari UPT Puskesmas Kecamatan untuk Kesehatan Masyarakat
 - d. Pelatihan Kewirausahaan untuk Kelompok UKM
 - e. Penyuluh Kesehatan dari Dinas Peternakan untuk Kelompok Ternak
 - f. Pelatihan Keamanan Pangan dari Dinas Kesehatan dan DISPERINDAG-KOP untuk Kelompok UMKM
3. Pemandirian
- a. Pengurusan ijin PIRT dan Sertifikasi Label Halal untuk Kelompok UKM dari DINKES, DISPERINDAGKOP-UKM dan KEMENAG
 - b. Pengembangan Rumah Produksi dan Dapur Produksi UMKM
 - c. Bantuan Alat Baca dan Belajar untuk Pondok Baca
 - d. Bantuan Fasilitas Dakwah dan Mengaji

Dampak Program ZCD terhadap Masyarakat

a. Dampak Ekonomi

Program ZCD berkontribusi pada peningkatan kondisi ekonomi sebagian mustahik melalui pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal, terutama pada sektor perikanan, budidaya, dan pengolahan hasil laut. Bantuan modal usaha yang disertai pendampingan manajerial telah memungkinkan beberapa penerima manfaat untuk meningkatkan volume produksi, memperluas jaringan pemasaran, serta memperoleh pendapatan yang lebih stabil dibandingkan sebelum mengikuti program. Selain itu, adanya pelatihan keterampilan pengolahan hasil laut telah mendorong terciptanya nilai tambah ekonomi, sehingga tidak hanya bergantung pada penjualan bahan mentah. Meskipun demikian, tingkat peningkatan pendapatan belum merata di seluruh mustahik, karena dipengaruhi oleh kapasitas individu, akses pasar, dan ketersediaan sarana produksi.

b. Dampak Sosial

Secara sosial, implementasi Program ZCD mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan kelompok, seperti pertemuan rutin, pelatihan, dan gotong royong. Program ini juga memperkuat solidaritas sosial antarwarga melalui kerja sama dalam pengelolaan usaha bersama dan penyelesaian masalah kolektif. Selain itu, terjadi perubahan pola pikir sebagian mustahik dari sikap pasif sebagai penerima bantuan menjadi lebih proaktif dalam mencari peluang ekonomi. Interaksi yang lebih intensif antara pendamping program, pemerintah desa, dan masyarakat turut memperkuat modal sosial dan kepercayaan (trust) dalam komunitas.

c. Dampak Kelembagaan

Dari aspek kelembagaan, Program ZCD berkontribusi pada terbentuk dan menguatnya kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok penerima manfaat sebagai wadah kolaborasi, belajar, dan pengambilan keputusan kolektif. Kelompok ini berfungsi sebagai sarana koordinasi produksi, distribusi, serta akses terhadap bantuan dan kemitraan eksternal. Selain itu, keberadaan kelompok telah meningkatkan kapasitas organisasi lokal melalui mekanisme kepemimpinan, pembagian peran, dan pencatatan keuangan sederhana. Namun, tingkat kemandirian kelembagaan masih bervariasi antar kelompok, tergantung pada kualitas kepemimpinan dan konsistensi pendampingan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

1. Faktor Pendukung:

- a. Komitmen pendamping program. Keberhasilan implementasi ZCD sangat dipengaruhi oleh peran pendamping yang aktif dalam membimbing, memotivasi, dan memfasilitasi akses mustahik terhadap sumber daya dan jejaring. Pendamping tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator teknis, tetapi juga sebagai penggerak sosial yang membangun kepercayaan dan partisipasi masyarakat.
- b. Dukungan pemerintah desa. Keterlibatan pemerintah desa dalam bentuk fasilitasi lokasi kegiatan, koordinasi dengan masyarakat, serta dukungan kebijakan lokal memperkuat keberlanjutan program. Sinergi antara BAZNAS dan pemerintah desa meningkatkan legitimasi program di tingkat komunitas.
- c. Potensi sumber daya pesisir yang melimpah. Ketersediaan sumber daya perikanan dan hasil laut menjadi basis utama pengembangan usaha produktif, sehingga program ZCD memiliki relevansi tinggi dengan

kondisi lokal Desa Beting.

2. Faktor Penghambat:
 - a. Keterbatasan modal dan sarana. Skala bantuan yang terbatas serta minimnya fasilitas produksi dan pemasaran membatasi kemampuan mustahik untuk mengembangkan usaha secara optimal.
 - b. Rendahnya literasi keuangan sebagian mustahik. Sebagian penerima manfaat masih memiliki keterbatasan dalam pencatatan keuangan, pengelolaan modal, dan perencanaan usaha, yang berdampak pada keberlanjutan usaha.
 - c. Tantangan keberlanjutan program. Ketergantungan pada pendamping eksternal, keterbatasan pembiayaan berkelanjutan, serta fluktuasi kondisi ekonomi dan lingkungan pesisir menjadi tantangan utama dalam menjaga keberlanjutan dampak program.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Zakat Community Development (ZCD) terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Beting, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Program ZCD di Desa Beting telah dilaksanakan melalui tahapan perintisan, penguatan, dan pemandirian dengan pendekatan berbasis komunitas serta pemanfaatan potensi lokal wilayah pesisir. Program ini tidak hanya berorientasi pada bantuan konsumtif, tetapi lebih menekankan pada pemberdayaan produktif melalui penyediaan modal usaha, fasilitas produksi, serta pendampingan dan pelatihan. Pola intervensi yang diterapkan menunjukkan bahwa ZCD dirancang secara adaptif terhadap karakteristik sosial-ekonomi masyarakat pesisir, khususnya pada sektor perikanan, peternakan, dan UMKM berbasis sumber daya lokal.
2. Program ZCD memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan masyarakat Desa Beting pada tiga aspek utama, yaitu ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Secara ekonomi, program ini berkontribusi pada peningkatan aktivitas usaha produktif, diversifikasi sumber penghidupan, serta peningkatan kapasitas produksi sebagian mustahik, meskipun tingkat peningkatan pendapatan belum merata di seluruh penerima manfaat. Secara sosial, program ini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, serta mendorong perubahan pola pikir mustahik dari penerima bantuan menjadi lebih proaktif dan mandiri. Dari aspek kelembagaan, ZCD berkontribusi pada pembentukan dan penguatan kelompok usaha bersama sebagai wadah kolaborasi, pembelajaran, dan koordinasi ekonomi masyarakat.
3. Keberhasilan implementasi Program ZCD di Desa Beting dipengaruhi oleh faktor pendukung berupa komitmen pendamping program, dukungan pemerintah desa, serta potensi sumber daya pesisir yang melimpah. Namun, terdapat pula faktor penghambat yang membatasi efektivitas program, antara lain keterbatasan modal dan sarana produksi, rendahnya literasi keuangan sebagian mustahik, serta tantangan keberlanjutan program akibat ketergantungan pada pendamping eksternal dan keterbatasan pembiayaan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, Program ZCD di Desa Beting dapat dikatakan telah berperan sebagai instrumen strategis dalam pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pendekatan berbasis zakat yang integratif dan berkelanjutan. Meskipun demikian, diperlukan penguatan lebih lanjut pada aspek pendampingan, kelembagaan lokal, dan keberlanjutan usaha agar tujuan transformasi mustahik menjadi lebih mandiri dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Provinsi Riau
BAZNAS disarankan untuk memperkuat kualitas dan intensitas pendampingan program ZCD, khususnya dalam aspek manajemen usaha, literasi keuangan, dan pemasaran produk. Selain itu, perlu dikembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis indikator keberlanjutan agar dampak program dapat terukur secara lebih sistematis dalam jangka panjang.
2. Bagi Pemerintah Desa Beting
Pemerintah desa diharapkan dapat lebih aktif dalam mendukung keberlanjutan Program ZCD melalui integrasi program ini dengan perencanaan pembangunan desa, fasilitasi akses pasar bagi produk mustahik, serta penguatan kelembagaan kelompok usaha masyarakat. Sinergi antara pemerintah desa dan BAZNAS perlu terus diperkuat agar pemberdayaan masyarakat lebih berkelanjutan.
3. Bagi Pendamping Program ZCD
Pendamping program perlu meningkatkan pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan lokal, serta mendorong kemandirian kelompok mustahik agar tidak terlalu bergantung pada bantuan eksternal. Pendampingan juga perlu difokuskan pada penguatan kapasitas kepemimpinan dan manajerial dalam kelompok usaha bersama.

4. Bagi Mustahik Penerima Manfaat
Mustahik diharapkan lebih proaktif dalam mengelola bantuan yang diberikan, meningkatkan keterampilan usaha, serta memperkuat kerja sama dalam kelompok agar usaha yang dikembangkan lebih berkelanjutan. Selain itu, perlu adanya komitmen untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi dan pasar.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya
Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji dampak Program ZCD secara kuantitatif dengan pendekatan longitudinal guna melihat perubahan kondisi ekonomi mustahik dalam jangka menengah dan panjang. Selain itu, penelitian komparatif antara beberapa desa penerima ZCD juga dapat dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas program.

REFERENCES

- Al-Qaradawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakah: A comparative study of zakah, regulations and philosophy in the light of Qur'an and Sunnah* (Vol. 1–2). Scientific Publishing Centre, King Abdulaziz University.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2020). *Panduan Program Zakat Community Development (ZCD)*. Jakarta: BAZNAS.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Zakat for poverty alleviation and welfare improvement in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 2(1), 141–160.
- BPS Provinsi Riau. (2025). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)*. Chambers, R. (1995). *Rural development: Putting the last first*. London: Longman.
- Department for International Development (DFID). (2000). *Sustainable livelihoods guidance sheets*. London: DFID.
- Huda, N., & Sawarjuwono, T. (2013). Zakat and poverty alleviation: An Indonesian perspective. *Journal of Islamic Economics*, 5(1), 45–60.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Panduan Zakat*. Gema Insani / Republika.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema insani.
- Kartasasmita, G. (1996). *Pemberdayaan masyarakat: Konsep dan implementasi*. Jakarta: LP3ES.
- Korten, D. C. (1987). *Community management: Asian experience and perspectives*. West Hartford: Kumarian Press.
- Kusnadi. (2009). *Keberdayaan nelayan dan dinamika ekonomi pesisir*. Yogyakarta: LKiS.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2015). *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rahman, A. R. A. (2007). *Economic empowerment of the poor through zakat*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI-IDB).
- Satria, A. (2015). *Sosiologi masyarakat pesisir*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Scoones, I. (1998). *Sustainable rural livelihoods: A framework for analysis*. IDS Working Paper 72. Brighton: IDS.
- Sutrisno, E. (2017). Pemberdayaan masyarakat pesisir berbasis potensi lokal. *Jurnal Sosek Kelautan dan Perikanan*, 12(2), 145–160.
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Parsons, R. J., Gutierrez, L. M., & Cox, E. O. (1991). A model for empowerment practice. In R. J. Parsons et al. (Eds.), *Empowerment in social work practice* (pp. 61–78).

DIGITALISASI DAN INOVASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DAERAH

Neng Rahma Nurpadilah Abdurahman
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
nengrahmahurfadilah@gmail.com

ABSTRAK

Digitalisasi dan inovasi menjadi sangat urgent dan penting dalam meningkatkan pelayanan publik di masing-masing daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana strategi digitalisasi dan inovasi dalam pelayanan publik daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Namun, tidak menutup kemungkinan inovasi digital juga sangat bergantung terhadap kesiapan SDM dan literasi digital masyarakat. Dengan demikian inovasi digital ini dapat memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat terhadap mutu pelayanan publik. Penerapan teknologi informasi ini dapat mempercepat alur kerja, meningkatkan keterbukaan, serta menciptakan pengalaman pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana strategi digitalisasi dan inovasi menjadi peluang dan solusi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah dapat meningkatkan kecepatan layanan, memudahkan aksesibilitas, serta meningkatkan akuntabilitas melalui pelaporan dan monitoring yang transparan. Menggunakan metode literatur, penelitian yang lebih mengutamakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada lingkup sosial yang diteliti.

Kata Kunci: Digitalisasi, Inovasi, Pelayanan Publik

1. PENDAHULUAN

Salah satu indikator utama dalam menilai kualitas dan efektivitas kinerja pemerintahan adalah melalui bagaimana dalam melayani publik. Di tengah era digital yang semakin berkembang pesat, inovasi pelayanan publik menjadi sebuah keharusan, bukan lagi sekedar opsi. Penerapan teknologi digital di era 4.0 telah menjadi salah satu pendorong utama perubahan dalam berbagai sektor, termasuk pelayanan publik. Pemerintah, khususnya di tingkat daerah, menghadapi tuntutan untuk memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Teknologi digital dapat menjadi solusi dalam menciptakan inovasi dengan harapan mampu meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan. Teknologi digital seperti aplikasi berbasis web, platform mobile, serta sistem informasi manajemen pelayanan publik, meminimalisir birokrasi, dan mengurangi potensi maladministrasi.

Transformasi digital sebagian besar dilihat sebagai perubahan budaya yang perlu dilakukan dalam suatu organisasi. Penggunaan alat digital akan mengubah cara pemerintah bekerja, berkomunikasi, dan memberikan layanan, tetapi juga dapat memiliki implikasi yang luas, termasuk mengubah struktur dan budaya organisasi, atau melibatkan dan mengintegrasikan penduduk negara dan mitra lainnya dalam desain bersama dan penyampaian layanan publik. Menurut (Dwiyanto, 2021) digitalisasi mampu menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Menurut Rahmadana pelayanan publik adalah bentuk penyediaan jasa yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak swasta baik secara mandiri atau mewakili pemerintah kepada masyarakat, baik secara berbayar ataupun gratis, dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Digitalisasi dan inovasi telah menjadi sebuah perkembangan global dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Banyak negara maju telah mengimplementasikan teknologi digital dalam pelayanan publik, seperti smart city, *e-government* dan lain sebagainya. Namun, di Indonesia ternyata masih banyak daerah-daerah yang belum memanfaatkan teknologi digital secara optimal dalam pelayanan publiknya

Pemerintah di berbagai level menyadari bahwa penyediaan layanan secara daring lebih hemat biaya dibandingkan dengan metode konvensional (Roy, 2017). Inovasi yang meningkatkan kualitas juga diperlukan untuk memberikan pelayanan publik yang optimal. Inovasi ini bisa disebut strategi baru atau kombinasi dari yang lama dan baru yang dapat mengatasi masalah atau memberikan opsi otomatis baru bagi pemerintah untuk lebih memajukan publik dan mengelola dampaknya. Salah satu faktor kendali yang terjadi di atas adalah, masih banyak pemerintah daerah yang seringkali dihadapkan dengan berbagai tantangan, seperti kurangnya infrastruktur, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya transparansi. Hal ini menyebabkan pelayanan publik menjadi lambat, tidak efisien, dan tidak efektif. Selain itu, masyarakat juga semakin menuntut pelayanan publik yang lebih cepat, mudah dan transparan.

Maka dari itu, digitalisasi dan inovasi menjadi sangat urgent dan penting dalam meningkatkan pelayanan publik di masing-masing daerah. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, tentunya diperlukan adanya suatu strategi. Hal ini terkait dengan visi, misi tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen rencana strategi (Renstra). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana strategi digitalisasi dan inovasi dalam pelayanan publik daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.

Selain itu, digitalisasi juga membantu memperbaiki komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Platform digital memungkinkan adanya dialog yang lebih interaktif dan partisipatif publik

dalam pengambilan keputusan. Misalnya, pemerintah dapat menggunakan survei daring untuk meminta masukan warga tentang kebijakan yang sedang dirancang, atau menyelenggarakan forum daring untuk membahas isu-isu penting. Hal ini meningkatkan rasa keterlibatan masyarakat dan menciptakan kepercayaan yang lebih besar terhadap pemerintah, karena warga merasa bahwa suara mereka didengar dan dipertimbangkan. Namun, tidak menutup kemungkinan inovasi digital juga sangat bergantung terhadap kesiapan SDM dan literasi digital masyarakat. Dengan demikian inovasi digital ini dapat memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat terhadap mutu pelayanan publik. Penerapan teknologi informasi ini dapat mempercepat alur kerja, meningkatkan keterbukaan, serta menciptakan pengalaman pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.

Pendekatan ini diyakini mampu meningkatkan efisiensi operasional layanan publik sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan tersebut. Melalui digitalisasi, masyarakat dapat memperoleh informasi maupun melakukan transaksi secara cepat dan praktis tanpa perlu hadir langsung ke kantor pelayanan. Selain itu, digitalisasi juga berkontribusi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, digitalisasi layanan publik menjadi strategi penting untuk meningkatkan mutu, kemudahan akses, serta mempererat hubungan antara pemerintah dan warganya (Santoso & Dewi, 2019).

Peneliti juga menemukan bahwa keberhasilan implementasi teknologi digital sangat bergantung pada faktor-faktor pendukung seperti kesiapan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, serta regulasi yang mendukung. Beberapa daerah yang memiliki infrastruktur teknologi yang memadai dan anggaran yang cukup cenderung lebih sukses dalam melakukan transformasi digital. Sebaliknya, daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan anggaran sering kali mengalami hambatan dalam mengadopsi teknologi ini secara optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana strategi digitalisasi dan inovasi menjadi peluang dan solusi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah dapat meningkatkan kecepatan layanan, memudahkan aksesibilitas, serta meningkatkan akuntabilitas melalui pelaporan dan monitoring yang transparan. Selain itu, kemudahan teknologi digital juga memungkinkan kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dalam mengambil keputusan publik, sehingga menciptakan pelayanan yang lebih partisipatif dan responsif. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini akan mengeksplorasi pengalaman dari berbagai pemerintah daerah dalam mengadopsi teknologi digital, serta memberikan rekomendasi yang strategis bagi pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kajian literatur. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Menurut Sugiyono, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang lebih mengutamakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada lingkup sosial yang diteliti. (Sugiyono, 2018). Penelitian kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam fenomena yang terjadi, khususnya terkait inovasi pelayanan publik berbasis teknologi digital di pemerintah daerah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam proses digitalisasi pelayanan publik melalui analisis literatur yang relevan. Penelitian kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam fenomena yang terjadi, khususnya terkait inovasi pelayanan publik berbasis teknologi digital di pemerintah daerah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang muncul dalam proses digitalisasi pelayanan publik melalui analisis literatur yang relevan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai literatur yang terkait dengan digitalisasi dan inovasi pelayanan publik daerah. Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah sumber yang berasal dari buku, jurnal, artikel, laporan penelitian dan dokumen lainnya yang dapat menunjang pada penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian beberapa hasil yang terkait dengan judul peneliti. Baik dari buku, perpustakaan digital ataupun yang lainnya. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema dan pola dalam literatur, serta sintesis data untuk mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan dapat memudahkan dan memberikan gambaran kepada peneliti data yang komprehensif tentang digitalisasi dan inovasi dalam pelayanan publik daerah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu alasan utama di balik adopsi digitalisasi adalah permintaan masyarakat yang semakin tinggi akan layanan yang lebih baik dan juga pemanfaatan kemajuan teknologi digital. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang siap dijalankan oleh pemerintah baik kementerian, lembaga, maupun pemerintahan daerah merupakan perwujudan reformasi birokrasi. SPBE bisa disebut juga *e-government* merupakan salah satu upaya pemangkasan biaya dan waktu, serta meminimalisasi terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah. Penerapan SPBE ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Indeks pelayanan public adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan public di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan public, aspek konsultasi dan pengaduan, serta aspek inovasi (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi-Indeks Pelayanan Publik (IPP), 2002). Inovasi mewakili kebaruan (Beck & Whistler, 1967) bahwa inovasi berkaitan dengan sesuatu yang baru. Istilah baru di sini bukan berarti produk yang masih orisinal, tetapi lebih mengarah pada newness (kebaruan). Kebaruan ini mengartikan bahwa inovasi adalah mengkreasi dan mengimplementasikan sesuatu yang telah ada menjadi satu kombinasi yang baru. Kebaruan sendiri terkait dengan dimensi ruang dan waktu.

Masyarakat yang berada di zaman modern yang sebagian besar tidak terbiasa dengan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, mengharapkan hal yang sama dari layanan pemerintah. Mereka menginginkan sistem yang mudah dan tidak berbelit-belit. Digitalisasi memungkinkan pemerintah dalam memenuhi harapan ini dengan menyediakan platform daring, di mana warga dapat mengakses layanan kapan saja dan di mana saja, tanpa harus mengantri di kantor pemerintah. Digitalisasi dalam konteks pemerintahan merujuk pada proses mengadopsi teknologi digital untuk menggantikan atau melengkapi sistem manual tradisional. Proses ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyediaan informasi digital, penerapan sistem manajemen berbasis teknologi, hingga pengembangan aplikasi yang mempermudah interaksi antara pemerintah dan warga. Banyak pemerintah daerah mulai menyadari bahwa sistem manual yang digunakan selama beberapa dekade terakhir sudah tidak lagi efisien untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Oleh karena itu, inovasi melalui digitalisasi menjadi jawaban atas tantangan-tantangan ini, dengan memanfaatkan teknologi untuk menciptakan proses yang lebih cepat, hemat biaya, dan bebas dari kendala geografis.

Manfaat Inovasi Digital Pelayanan Publik

Menurut C. Rogers & Shoemaker (1971), inovasi sebagai suatu ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh seseorang satu unit adopsi lainnya. Sedangkan menurut (Gopalakrishnan & Damanpour, 1997), suatu inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem struktur dan administrasi baru, atau rencana yang baru bagi anggota organisasi. Albury (2005) berpendapat bahwa inovasi yang berhasil merupakan kreasi dan implementasi dari proses, produk, layanan, dan metode pelayanan yang baru merupakan hasil pengembangan nyata dalam hal efisiensi, efektivitas, atau kualitas hasil. Penerapan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi digital di pemerintah daerah telah memberikan dampak positif, namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Studi literatur mengungkapkan bahwa beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah berhasil mengimplementasikan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Contoh nyata inovasi ini adalah penggunaan aplikasi layanan perizinan online, sistem administrasi kependudukan berbasis digital, serta platform pengaduan masyarakat yang memungkinkan interaksi langsung antara masyarakat dan pemerintah.

Digitalisasi dalam pelayanan publik juga ternyata memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan efisiensi dan efektifitas birokrasi. Temuan Almahdali menegaskan bahwa digitalisasi sistem informasi publik mendukung praktik *good governance*, terutama dalam aspek keterbukaan informasi dan pengawasan publik. Dampak positif inovasi digital tercermin dari menurunnya jumlah keluhan masyarakat terkait pelayanan administratif. Hal ini sejalan dengan teori pelayanan publik yang menyatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian jasa oleh pemerintah maupun swasta atas nama pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan publik. Sebagaimana ditegaskan pula oleh Prasodjo, pelayanan publik merupakan fungsi utama aparatur negara untuk melayani masyarakat sekaligus menjalankan amanah perundang-undangan.

Tantangan dan Peluang Inovasi Digital Pelayanan Publik

Implementasi inovasi digital di sektor pelayanan publik menghadapi berbagai kendala yang cukup signifikan. Salah satu kendala utama adalah regulasi yang belum mampu mengikuti perkembangan teknologi secara cepat. Selain itu, resistensi internal birokrasi juga menjadi penghambat penting (Walo et al., 2021) menegaskan bahwa budaya organisasi yang belum siap berubah dan proses bisnis yang belum sepenuhnya disesuaikan menghambat transformasi digital meskipun infrastruktur sudah tersedia. Dukungan dan komitmen-

komitmen diberbagai level pemerintahan juga menjadi faktor krusial, sebagaimana dikemukakan oleh (Prabowo, et al., 2022) bahwa tanpa dukungan penuh dari pimpinan pusat hingga daerah, percepatan digitalisasi pemerintah akan sulit terealisasi secara optimal.

Adapun salah satu tantangan tersebut adalah rendahnya literasi digital masyarakat, khususnya dikalangan lanjut usia, dan masyarakat yang kurang faham akan penggunaan digital, kondisi ini yang menyebabkan masyarakat lebih memilih menggunakan cara manual dibanding dengan menggunakan layanan digital. Keterbatasan akses internet juga menjadi hambatan tersendiri bagi beberapa daerah, terutama bagi daerah yang masih minim akan infrastruktur jaringan yang belum stabil.

Kendala infrastruktur yang belum merata di berbagai wilayah Indonesia juga menjadi salah satu tantangan utama dalam realisasi kebijakan pelayanan digital. Karena itu, pemerintah perlu menaruh perhatian khusus pada pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di wilayah-wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Penguatan infrastruktur jaringan internet, penyediaan perangkat digital, serta dukungan listrik yang stabil harus menjadi bagian dari strategi nasional percepatan transformasi digital. Inisiatif seperti “Desa Digital”, “Satu Data Indonesia”, dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) daerah harus diperluas cakupannya untuk menjamin tidak ada satu pun masyarakat yang tertinggal dari akses layanan digital (Amalia & Islami, 2021; Santoso & Dewi, 2019). Data dari BPS (2023) menunjukkan bahwa tingkat literasi digital di Indonesia masih timpang dengan indeks tertinggi berada di wilayah perkotaan.

Selain itu, tantangan lain muncul dalam bentuk keterbatasan literasi digital di kalangan pegawai pemerintah. Untuk mengatasi ini, banyak pemerintah daerah melakukan pelatihan dan program edukasi agar teknologi digital dapat digunakan secara optimal. Di sisi lain, penting juga untuk mempertimbangkan aspek keamanan data dalam digitalisasi layanan publik. Dengan semakin banyaknya data pribadi warga yang disimpan dalam format digital, pemerintah daerah harus memastikan bahwa sistem yang digunakan memiliki perlindungan yang memadai untuk mencegah pelanggaran keamanan. Insiden kebocoran data bisa merusak kepercayaan masyarakat dan menciptakan kerugian besar. Oleh karena itu, pemerintah harus mengadopsi protokol keamanan siber yang ketat dan bekerja sama dengan ahli keamanan untuk melindungi informasi yang sensitif.

Meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar, penelitian ini juga menemukan berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah dalam penerapan inovasi teknologi digital. Salah satu peluang utama adalah kemampuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Dengan adanya sistem berbasis digital, proses birokrasi yang sebelumnya memakan waktu dan penuh dengan prosedur manual dapat dipangkas, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan efisien. Hal ini juga berkontribusi pada peningkatan transparansi karena setiap proses dapat dipantau secara digital. Selain itu, penggunaan teknologi digital memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih dekat dengan masyarakat melalui platform partisipatif. Aplikasi pelaporan dan pengaduan online memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan atau melaporkan masalah langsung kepada pemerintah, sehingga pemerintah dapat merespons lebih cepat dan akurat terhadap kebutuhan masyarakat. Teknologi digital juga membuka peluang bagi kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah dan sektor swasta, terutama dalam pengembangan infrastruktur digital dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Kolaborasi ini dapat membantu pemerintah daerah mengatasi keterbatasan anggaran dan meningkatkan kapasitas teknologi yang dimiliki.

Meskipun banyak manfaat yang ditawarkan oleh digitalisasi, penting untuk diingat bahwa teknologi hanyalah alat, dan keberhasilan sebenarnya terletak pada bagaimana teknologi ini digunakan untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Pemerintah daerah harus tetap fokus pada tujuan utama mereka, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sekedar mengadopsi teknologi untuk terlihat modern. Digitalisasi harus menjadi sarana untuk menciptakan layanan yang lebih efisien, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan warga. Dengan demikian, inovasi melalui digitalisasi dapat memberikan dampak positif yang nyata dan bertahan lama bagi masyarakat. Kesimpulannya, inovasi layanan publik melalui digitalisasi adalah proses yang kompleks namun sangat penting untuk diterapkan oleh pemerintah daerah.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, potensi manfaat yang dapat dihasilkan sangat besar. Dengan perencanaan yang baik, kolaborasi yang efektif, dan fokus pada inklusivitas, digitalisasi dapat membantu pemerintah daerah memberikan layanan yang lebih baik, meningkatkan partisipasi publik, dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera. Perjalanan ini mungkin tidak mudah, tetapi dengan komitmen dan tekad yang kuat, transformasi digital dapat menjadi kenyataan yang membawa perubahan positif bagi semua.

Strategi Peningkatan Mutu Pelayanan Publik

Adapun kunci dalam keberhasilan strategi peningkatan mutu pelayanan digital hasil dari penelitian (Anggraeni et al., 2021; Hamdillah, 2023) yaitu:

- a. Kesiapan sumber daya manusia (SDM): Aparatur harus memiliki literasi digital dan kompetensi operasional terhadap sistem baru

- b. Ketersediaan Infrastruktur Teknologi: termasuk jaringan internet, perangkat lunak, dan perangkat baru
- c. Kebijakan yang Adaptif: regulasi yang mendukung inovasi tanpa membatasi ruang gerak implementasi teknologi baru
- d. Partisipasi Masyarakat: partisipasi aktif warga dapat meningkatkan legitimasi dan efektivitas sistem pelayanan digital
- e. Kualitas Sistem Digital: Sistem baru dirancang dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kecepatan, kemudahan dan integrasi antar layanan.

Dengan demikian, strategi peningkatan mutu pelayanan publik melalui inovasi digital harus mempertimbangkan pendekatan sistematis dan berkelanjutan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Strategi ini menjadi bagian integral dari upaya reformasi birokrasi dalam menciptakan pemerintahan yang responsif, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

4. KESIMPULAN

Pelayanan publik adalah bentuk penyediaan jasa yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak swasta baik secara mandiri atau mewakili pemerintah kepada masyarakat, baik secara berbayar ataupun gratis, dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Digitalisasi dan inovasi menjadi sangat urgent dan penting dalam meningkatkan pelayanan publik di masing-masing daerah. Namun, ternyata masih banyak daerah yang belum memiliki strategi yang jelas dalam mengimplementasikan digitalisasi dan inovasi dalam pelayanan publiknya. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, tentunya diperlukan adanya suatu strategi.

Inovasi layanan publik melalui digitalisasi adalah langkah strategis yang sangat diperlukan di eramodern untuk menjawab tantangan yang semakin kompleks dalam melayani masyarakat. Digitalisasi membantu pemerintah daerah meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik. Dengan memanfaatkan teknologi, proses yang sebelumnya lambat dan berbelit-belit dapat disederhanakan, memberikan pengalaman yang lebih baik bagi warga. Namun ternyata, proses ini juga mendapatkan tantangan tersendiri dalam pengimplementasiannya seperti; kurangnya literasi digital masyarakat, kurangnya infrastruktur di berbagai daerah, terutama daerah 3T dan perlindungan data yang ketat. Keberhasilan implementasi digitalisasi tergantung padaperencanaan yang matang, kolaborasi lintas sektor, dan pelatihan bagi pegawai pemerintah. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk tetap berfokus pada tujuan utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan layanan yang inklusif serta responsif terhadap kebutuhan semua kalangan. Dengan komitmen yang kuat dan pendekatan yang berkelanjutan, digitalisasi dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam layanan publik.

REFERENCES

- Albury, D. (2005). Fostering Innovation in Public Services. *Public Money and Management*, 25(1). <https://doi.org/10.1111/J.14679302.2005.00450.X>
- Amalia, A., & Islami, L. (2021). *Peran Dinas Komunikasi dan Informatika*. PANTAREI, 5(2).
- Anggraeni, F. Amrulloh, R., & Hasan Asy, A. (2021). *Analisis Kualitas Pelayanan Pada Kelurahan Loktabat Utara*. Diakses dari <https://ejournal.stiepancasetia.ac.id/jieb/article/view/664/458>
- Beck, S., & Whistler, T. (1967). Innovative Organizations: A Selective View of Current Research. *Journal of Business*, 40, 462-469.
- BPS. (2023) *Statistik Telekomunikasi Indonesia*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Ding, X. (2022). Research on Peak Experience Design in Rural Cultural Tourism Service System: Take Diejiao Water Village of Foshan as an Example. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 13322, 388–402. https://doi.org/10.1007/978-3-031-05900-1_27
- Dwiyanto, A. (2021), *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Indonesia*, Yogyakarta; Gadjah Mada, University Press.
- Gopalarkrishnan, S., & Damanpour, F. (1997). A review of Innovation Research in Economics, Sociology and Technology Management. *Omega*, 25(1), 15-28.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indeks Pelayanan Publik (IPP). (2020). <https://www.menpan.go.id/site/pelayanan-publik/indeks-pelayanan-publik-ipp>
- Rahmadana, M. F., Siagian, A. T. M. N., Perangin-angin Mori Agustina, Refelino, J., Tojiri, Moch. Y., Siagian, V., Yendrianof Devi, Sari, A. P., Supriadi, M. N., Sari, arlyna H. N., & Syamsul Bahri. (2020).
- Rogers, C., & Shoemaker, F.F (1971). *La Communication of Innovations; A Cross-Cultural Approach*
- Roy, J. (2017). *Digital government and service delivery: An examination of performance and prospects*.
- Santoso, T., & Dewi, M. P. (2019). *Etika Aparatur Sipil Negara dalam Membangun Good Governance*. 179–187.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*: Bandung: Alfabeta.

Terada, S. (2023). A study on the spatial configuration and collective system of street space in Tsutsuishi fishing village in relation to the service wet spaces. *Journal of Asian Architecture and Building Engineering*. <https://doi.org/10.1080/13467581.2023.2229403>

STRATEGI DISPARBUDPORA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS DESENTRALISASI DAN KOLABORASI DI KAWASAN JATIGEDE KABUPATEN SUMEDANG

Siti Lutfiah Fauziah^{*1}, Dinda Dwi Mayrani Irawan², Hani Miftahul Janah³, Ikhsan Muhammad Hanif⁴, Radja Rippana Fauzi⁵
^{1,2,3,4,5}Universitas Sebelas April
Email^{*1}: sitilutfiah.f25@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sumedang dalam mengembangkan pariwisata berdasarkan desentralisasi dan kolaborasi di Kawasan Jatigede, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di lingkungan alami dan menekankan pemahaman mendalam tentang proses pengembangan pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata di Kawasan Jatigede melibatkan pemerintah desa, kelompok kesadaran pariwisata (Pokdarwis), dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti inovasi program yang terbatas, koordinasi antar lembaga yang lemah, dan pemantauan serta evaluasi yang kurang optimal, yang mengakibatkan pengembangan pariwisata yang tidak merata. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini merekomendasikan perlunya memperkuat tata kelola strategis, meningkatkan inovasi berbasis kolaborasi, dan memperbaiki sistem pemantauan dan evaluasi agar lebih terstruktur dan berkelanjutan sehingga pengembangan pariwisata di Kawasan Jatigede dapat berjalan lebih efektif, merata, dan kompetitif.

Kata Kunci: Manajemen Strategi, Kepariwisataan; Strategi Pengembangan Pariwisata.

1. PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Aktivitas pariwisata tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, membuka peluang usaha, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap destinasi rekreasi, pemerintah daerah dituntut untuk mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata secara terencana, berkelanjutan, dan sesuai dengan karakteristik wilayah. Dalam pembangunan daerah, pengelolaan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari kerangka desentralisasi. Desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata yang selaras dengan kebutuhan lokal. Keberhasilan pembangunan pariwisata daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan, melakukan pembinaan, serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Sumedang berperan sebagai instansi utama yang bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan, pengembangan destinasi, peningkatan kapasitas pengelola, pemasaran pariwisata, serta fasilitasi kemitraan.

Kabupaten Sumedang memiliki beragam potensi pariwisata yang meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, dan wisata minat khusus. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018, Kawasan Jatigede ditetapkan sebagai salah satu kawasan prioritas pengembangan pariwisata. Penetapan ini didasarkan pada potensi alam yang dimiliki, terutama keberadaan Waduk Jatigede, serta karakteristik wilayah yang mendukung pengembangan destinasi wisata. Kawasan Jatigede dikenal memiliki daya tarik wisata alam dan buatan yang tersebar di beberapa desa, sehingga memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai kawasan pariwisata unggulan daerah.

Sebagai kawasan prioritas, pengembangan pariwisata Jatigede menuntut peran aktif Disparbudpora dalam mengkoordinasikan berbagai program dan kegiatan pengembangan. Peran tersebut mencakup perencanaan pengembangan destinasi, pembinaan pengelola wisata, penguatan promosi dan pemasaran, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok sadar wisata (pokdarwis), komunitas lokal, dan pelaku usaha. Pendekatan desentralisasi dan kolaborasi menjadi penting mengingat luasnya kawasan Jatigede serta perbedaan kapasitas pengelolaan pada setiap destinasi wisata.

Tabel 1. Jumlah Kunjungan di Kawasan Jatigede Kabupaten Sumedang

No.	Objek Tarik Wisata	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Jumlah	Desa
1	Buricak Burinong	-	42.025	66.876	58.180	35.006	-	-	202.087	Pakualam
2	Taman Seribu Cahaya	-	-	-	-	-	16.228	5.903	22.131	Pakualam
3	Forest Walk	-	-	-	-	-	2.621	21.001	23.622	Pakualam
4	Panjugjungan	-	-	-	-	-	18.276	25.821	44.097	Cilembu
5	Pesona Jatigede	-	8.275	4.251	-	-	-	-	12.526	Jemah
6	Puncak Permata	-	-	10.195	47.629	116.493	167.642	98.535	440.494	Jemah
7	Menara Kujang Sapasang	-	-	-	-	-	306.333	29.225	335.558	Jemah
8	Tanjung Duriat	68.233	55.188	8.487	56.984	130.344	133.736	79.082	532.054	Cisitu
9	Tegal Jarong	-	-	115.560	61.019	53.731	26.363	11.047	267.720	Cijeungjing
10	Puncak Damar	10.596	821	-	1.320	-	-	-	12.737	Pakualam
11	Panenjoan	-	-	80.832	33.483	84.396	-	-	198.711	Pajagan
12	Karedok	-	-	-	-	1.814	1.351	5.490	8.655	Karedok

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Sumedang Tahun 2025

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Disparbudpora Kabupaten Sumedang, jumlah kunjungan wisatawan di Kawasan Jatigede pada periode 2018–2024 menunjukkan pola yang fluktuatif. Beberapa destinasi mengalami peningkatan jumlah kunjungan yang cukup signifikan, sementara destinasi lainnya mengalami penurunan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perbedaan pengelolaan destinasi, keterbatasan operasional, serta belum meratanya dukungan pengembangan pada setiap objek wisata.

Melihat kondisi tersebut, pengembangan pariwisata di Kawasan Jatigede memerlukan strategi yang mampu mengarahkan Disparbudpora dalam menentukan langkah-langkah prioritas. Strategi pengembangan diperlukan agar kegiatan yang dilakukan tidak hanya bersifat rutinitas, tetapi benar-benar mendorong peningkatan kualitas destinasi dan pemerataan perkembangan pariwisata. Dengan strategi yang terarah, pengembangan pariwisata berbasis desentralisasi dan kolaborasi di Kawasan Jatigede diharapkan dapat berjalan lebih terpadu dan memberikan manfaat yang lebih merata bagi masyarakat.

Namun berdasarkan hasil observasi peneliti, ditemukan beberapa indikasi permasalahan dalam strategi pengembangan Pariwisata Jatigede Kabupaten Sumedang, diantaranya yaitu :

1. Rendahnya efektivitas koordinasi vertikal antara Disparbudpora dan Pokdarwis di Jatigede, yang menyebabkan akuntabilitas program dan dampak kebijakan menjadi tidak optimal, meskipun mekanisme koordinasi formal telah tersedia. Hal ini dibuktikan dengan tidak optimalnya indikator Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat dalam pengawasan program sebagaimana tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023, yang menunjukkan adanya gap antara target koordinasi yang ditetapkan dalam Renja Disparbudpora dengan realisasi dampak dilapangan.
2. Keterbatasan inovasi program Disparbudpora yang masih dominan melakukan sosialisasi atau pendampingan dan kendala kapasitas SDM lokal, menghambat terobosan signifikan dalam promosi dan pengelolaan wisata Jatigede. Hal ini dibuktikan dengan tidak tercapainya target Kualitas Daya Saing Destinasi dan Indikator Peningkatan Kapasitas Pengelola sebagaimana tercantum dalam Renstra Disparbudpora Tahun 2024-2026 pada bagian inovasi promosi dan pengembangan, yang mengindikasikan bahwa upaya inovasi saat ini belum mampu mengatasi hambatan SDM dan teknis.
3. Kelemahan fungsi pengawasan dan monitoring Disparbudpora, yang mengakibatkan program pengembangan pariwisata belum merata dan partisipasi pelaku wisata di kawasan Jatigede menjadi kurang optimal. Hal ini dibuktikan dengan belum tercapainya Indikator Pemerataan Pemanfaatan Program Pariwisata dan Indikator Tingkat Partisipasi Usaha Wisata secara keseluruhan wilayah Jatigede sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang tentang prioritas Jatigede, yang menunjukkan adanya kelemahan dalam Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan sesuai Renstra Disparbudpora.

Adapun fokus pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Strategi Disparbudpora Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Desentralisasi Dan Kolaborasi Di Kawasan Jatigede Kabupaten Sumedang;
2. Faktor yang mendukung dan menghambat Strategi Disparbudpora Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Desentralisasi Dan Kolaborasi Di Kawasan Jatigede Kabupaten Sumedang.

2. METODE

Dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut juga sebagai metode naturalstice karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (naturalseting). Hasil dari penelitan kualitatif lebih menekankan pada makna pada generalisasi. Menurut Auerbach & Silver Stein dalam Sugiono (2017) adalah “Penelitian yang melakukan analisis dan interfentasi teks dan hasil interview dengan tujuan untuk menemukan makna dari sebuah fenomena”. Pendekatan ini menekankan pemahaman mendalam tentang konteks, pola, dan makna yang terkandung dalam data, sehingga peneliti dapat menangkap nuansa dan kompleksitas pengalaman subjek. Dengan fokus pada interpretasi, penelitian ini memungkinkan penjelajahan fenomena secara lebih komprehensif, bukan hanya sekadar melihat fakta permukaan, tetapi juga menggali alasan, motivasi, dan hubungan yang membentuk fenomena tersebut. Sedangkan menurut Afrizal (2017) meyebutkan bahwa, “Metode penelitian kualitatif diartikan sebagai cara yang dipakai oleh peneliti untuk memecahkan masalah dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitiannya”.

Subjek penelitian dijelaskan sebagai informan, yang artinya orang-orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi yang menjadi tempat penelitian. Teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian adalah dengan menggunakan purposive sampling. Menurut Sugiono (2017 :96) purposve sampling adalah “Teknik pengambilan sample dengan pertimbangan tertentu”. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah para pelaksana yang dianggap memiliki otoritas, informasi, serta yang paing tahu apa yang kita harapkan, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi situasi yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek peelitian adalah pegawai Disparbudpora Kabupaten Sumedang dan pihak lain yang ada di Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang yang dituangkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Subjek Penelitian

No	Unsur	Jumlah (orang)
1.	Kepala Bidang Pariwisata DISPARBUDPORA Kabupaten Sumedang	1
2.	Analisis Objek Wisata Bidang DISPARBUBPORA Kabupaten Sumedang	1
3.	Sekretaris Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang	1
4.	Pengurus POKDARWIS Desa Karedok Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang	1
Jumlah		4

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi fakta-fakta atau informasi tentang Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang. Oleh karena itu diperlukan rincian data yang dikumpulkan berupa data primer maupun sekunder. Data primer adalah data yang langsung diamati dilapangan melalui wawancara mendalam. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah diolah dan dipublikasikan dari dokumen dan media pemberitaan resmi. Teknik pengumpulan data menurut Sugiono (2020: 63), merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini untuk mendapatkan data. Oleh karena itu, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang diperoleh dari data berikut:

1. Studi Kepustakaan yang dilakukan peneliti melalui sumber-sumber yang akurat dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti
2. Studi Lapangan yaitu teknik yan dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian, diantaranya melalui teknik berikut :
 - a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian untuk mencatat segala kegiatan yang berhubungan dengan permasalahan yang dteliti, dimana peneliti tidak ikut terlibat dalam proses kerja.
 - b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara meminta kepada berbagai pihak yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, mendalam serta terarah sesuai dengan pedoman wawancara

- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa foto-foto dengan catatan harian lapangan yang merupakan pelengkap hasil wawancara dan observasi.
- d. Triangulasi, yaitu Teknik pengolahan data yang bersifat menghubungkan dari berbagai Teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti mengumpulkan pengumpulan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu dengan mengecek kredibilitas data dengan berbagai Teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi pengembangan merupakan suatu rangkaian keputusan dan tindakan yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal. Dalam sektor pariwisata, strategi pengembangan tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada penguatan tata kelola, pemberdayaan masyarakat, serta keberlanjutan destinasi wisata.

Dalam hal ini, pengembangan pariwisata berbasis desentralisasi dan kolaborasi menekankan pada pembagian peran dan kewenangan antara pemerintah daerah, pemerintah desa, serta pihak swasta dalam pengelolaan potensi pariwisata. Melalui pendekatan ini, pengelolaan pariwisata diharapkan lebih responsif terhadap kebutuhan loka, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mendorong sinergi antar pemangku kepentingan. Dengan Strategi Disparbudpora dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Desentralisasi dan Kolaborasi di Kawasan Jatigede perlu diperhatikan beberapa indikator dari dimensi strategi pengembangan menurut Sedamayanti dan Mulyana (2020) sebagai berikut :

- a. Tata Kelola Strategi
- b. Inovasi dan Kolaborasi
- c. Monitoring dan Evaluasi

Berikut adalah hasil penelitian yang telah dilakukan, Strategi Disparbudpora dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Desentralisasi dan Kolaborasi di Kawasan Jatigede adalah sebagai berikut :

1. Tata kelola strategi, di dalam dimensi ini terdapat empat indikator yaitu, perencanaan berbasis potensi lokal, partisipasi masyarakat dan stakeholder, koordinasi antar lembaga, konsistensi dengan kebijakan daerah. Perencanaan berbasis potensi lokal telah menjadi dasar dalam penyusunan arah pengembangan pariwisata di kawasan jatigede, yang dimana perencanaan berbasis loka ini dapat dinyatakan dengan baik, meskipun masih memerlukan penguatan dalam aspek pendalaman data dan pemetaan potensi secara berkelanjutan. Pada partisipasi masyarakat dan stakeholder Disparbudpora telah melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lain melalui kegiatan sosialisasi, pendataan, serta pemetaan potensi desa wisata. Partisipasi masyarakat ini lebih banyak terfokus pada pengelolaan objek wisata, sementara keterlibatan dalam perencanaan pengembangan pariwisata sebagai destinasi terdapat masih terbatas. indikator koordinasi antar lembaga menunjukkan bahwa koordinasi telah dilakukan, khususnya antara Disparbudpora dan lembaga terkait, dalam rangka menyelaraskan program pengembangan pariwisata dengan kebijakan daerah, meskipun belum seluruhnya didukung oleh mekanisme koordinasi yang terstruktur dan terdokumentasi secara merata. Konsistensi dengan kebijakan daerah menunjukkan bahwa strategi pengembangan pariwisata telah dilaksanakan selaras dengan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, meskipun masih diperlukan penguatan koordinasi dan oprimalisasi pelaksanaan strategi secara berkelanjutan.
2. Inovasi dan kolaborasi, di dalam dimensi ini terdapat empat indikator yaitu, inovasi dalam promosi dan pengelolaan wisata, inovasi kebijakan dan program, kolaborasi lintas lembaga, kolaborasi dengan masyarakat lokal. Promosi pariwisata dilaksanakan melalui penyelenggaraan iven pariwisata, kolaborasi digital dengan influencer, serta didukung oleh pelaksanaan Fokus Group Discussion (FGD) dan kegiatan pendampingan yang berfokus pada peningkatan partisipasi pelaku wisata. Pada inovasi kebijakan dan program di kawasan jatigede yang dilaksanakan belum mengalami pembaruan yang signifikan karena masih didominasi oleh kegiatan rutin, seperti sosialisasi, pembinaan, pendampingan, dan Fokus Group Discussion (FGD). Selain itu, pelaksanaan program belum menjangkau seluruh kecamatan, sehingga tingkat partisipasi pelaku wisata belum merata. Kolaborasi diwujudkan melalui kemitraan dengan berbagai lembaga pariwisata serta koordinasi lintas lembaga untuk memastikan keterpaduan fasilitas, aksesibilitas, dan pengelolaan destinasi wisata. Peran kecamatan sebagai fasilitator juga terlihat dalam menghubungkan lembaga pemerintah dengan komunitas lokal. Penyelenggaraan iven musiman, seperti

Festival Jatigede, menjadi sarana kolaborasi yang , melibatkan pemerintah, pelaku wisata, masyarakat, dan UMKM, serta ,mendorong partisipasi pokdarwis.

3. Monitoring dan evaluasi, di dalam dimensi ini terdapat tiga indikator yaitu, pelaksanaan evaluasi berkala, penggunaan hasil evaluasi untuk perbaikan strategi, pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan. Evaluasi difokuskan pada keberhasilan pengelolaan dan promosi yang dilakukan oleh pelaku wisata, dengan keterlibatan aktif pihak kecamatan untuk memastikan bahwa program wisata berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Setiap pelaksanaan even pariwisata dievaluasi bersama mitra melalui diskusi dan penilaian capaian kegiatan, baik dari segi teknis pelaksanaan maupun dampaknya terhadap ekonomi lokal. Hasil evaluasi tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan perbaikan dan penyesuaian strategi pada kegiatan pariwisata berikutnya. Dalam hal ini pelibatan masyarakat melalui peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai bagian dari mekanisme pegawai, khususnya dalam penyampaian laporan dan pengendalian aktifitas dilapangan.

Strategi pengemvangan merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam proses perencanaan pembangunan, melalui strategi pengembangan akan diperoleh arah dan langkah yang jelas megenai apa yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi pengembangan digunakan sebagai pedoman dalam menentukan kebijakan dan program agar dapat dilaksanakan secara terarah dan terencana. Dengan kata lain, strategi pengembangan berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi atau lembaga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Strategi pengembangan sangat penting untuk memastikan bahwa suatu program atau kebijakan dapat dilaksanakan swsuai dengan perencanaan serta mampu mencapai hasil yang diharapkan. Sehingga, melalui strategi pengembangan dapat diketahui arah pengembangan dan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Sebagaimana menurut Heriyani (2020) Strategi pengembangan adalah “usaha terencana dodalam suatu wadah kegiatan usaha suatu atau kelompok dalam proses peningkatan sistem kerajanya guna mencapai suatu tujuan tertentu”.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa strategi Disparbudpora dalam pengembangan pariwisata Jatigede berbasis desentralisasi dan kolaborasi telah berjalan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari penetapan kawasan prioritas pengembangan pariwisata yang telah disesuaikan dengan kebijakan daerah serta komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata. Namun demikian, dalam pelaksanaanya strategi tersebut belum berjalan secara optimal, khususnya pada aspek inovasi program, partisipasi masyarakat, koordinasi antar lembaga, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Adapun faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata Jatigede berasal dari komitmen pemerintah daerah dan potensi sumber daya pariwisata yang dimiliki. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan inovasi program, kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai, lemahnya kordinasi antar pemangku kepentingan, serta pelaksanaan evaluasi yang belum konsisten, sehingga pengembangan pariwisata Jatigede belum berjalan secara merata.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan Strategi Disparbudpora Dalam Pengembangan Berbasis desentralisasi dan Kolaborasi di Kawasan Jatigede Kabupaten Sumedang telah dilaksanakan dan berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari penetapan kawasan Jatigede sebagai kawasan prioritas pengembangan pariwisata daerah yang telah disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Sumedang nomor 4 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah. Pelaksanaan strategi tersebut juga menunjukkan keterlibatan pemerintah Desa, kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Serta kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam perencanaan dan pengelolaan pariwisata. Namun demikian, dalam pelaksanaanya strategi pengembangan pariwisata Jatigede belum berjalan secara optimal karena masih terdapat beberapa hambatan, diantaranya keterbatasan inovasi program yang masih didominasi oleh kegiatan rutin, partisipasi masyarakat yang belum merata, koordinasi antar lembaga yag belum berjalan secara terstrukur, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang belum dilakukan secara konsisten. Faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata Jatigede berasal dari komitmen pemerintah daerah dan besarnya potensi sumber daya pariwisata yang dimiliki kawasan tersebut. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya koordinasi lintas lembaga, serta belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan strategi, sehingga pengembangan pariwisata di Kawasan Jatigede belum berjalan secara merata dan berkelanjutan.

REFERENCES

- Afrizal. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Heriyani. (2020). *Strategi Pengembangan dalam Pembangunan Daerah*. Bandung: Alfabeta,.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Sumedang.
- Sedarmayanti, & Mulyana, D. (2020). *Strategi Pengembangan Organisasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ahmad, A. (2020). Manajemen Strategi dalam Organisasi Publik. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 5(2). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jim/article/view/38940>
- Angela, L., & Widjaja, A. (2022). Implementasi Manajemen Strategi dalam Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(1). <https://journal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/4675>
- Assa. (2022). Dampak Kecerdasan Emosional, Inovasi Danbudayakerja Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawandistartup E-Commerce Xyz. Vol. 6 No. 3, 2022, 1433-1449. <https://www.journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/download/2572/1243>
- Budiarti, I. M. (2021). Kajian Model Pengembangan Sdm Pariwisata. Vol. 2 Issue 1 (2021), 99 – 10.
- Fadillah, G. (2024). Kolaborasi Dalam Pembangunan Pariwisata Berbasis. Volume 8 Nomor 2 Tahun 2024, 33285-33299.
- Hidayat, S. S. (2025). Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Berbasis. 1-9.
- Irawati, F. N. (2024). Kolaborasi Bi Sultra Dan Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka Dalam Pengembangan. Vol. 9; No. 2; April 2024, 101- 110. <https://neosocietal.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/39/30/399>
- Ismail, K. S. (2024). Pengembangan Wisata Bahari-Religi Terintegrasi Konsep. Vol. 6, No. 2, Juni 2024, 74-78.
- Jabar, Y. (2025). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik Untuk. Volume 4, Nomor 1, April 2025, 131-146. <https://ejurnal.uji.ac.id/index.php/WSJ/article/download/3859/2311/15961>

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM SKP DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS APARATUR DI BKSDM KABUPATEN SUMEDANG

Arip Rahman Sudrajat*¹, Nasywa Khairunnisa², Khalisa Afifah Permadya Devi³,
Vina Feniawati⁴, Nanda Rizki Juanda⁵, Dani Sopian⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Sebelas April
Email*¹: ariprahmans@unsap.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan Target Kinerja Karyawan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pejabat dan pegawai negeri sipil yang langsung terlibat dalam penyusunan, implementasi, dan evaluasi Target Kinerja Pegawai, dengan validitas data dijamin melalui triangulasi dan dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif. Temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Target Kinerja Pegawai secara umum telah dilaksanakan dengan baik dan telah berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas aparatur; namun, beberapa tantangan masih ada. Komunikasi terkait kebijakan dilakukan melalui sosialisasi dan bimbingan teknis, namun pemahaman pegawai terhadap aspek teknis, terutama dalam merumuskan indikator kinerja yang dapat diukur, masih tidak merata. Dari segi sumber daya, fasilitas dan infrastruktur relatif memadai, namun perbedaan literasi digital dan keterbatasan bantuan teknis menghambat implementasi optimal. Dari dimensi disposisi, sebagian besar pegawai menunjukkan sikap positif terhadap kebijakan, meskipun sebagian masih memandangnya sebagai persyaratan administratif rather than alat manajemen kinerja. Di sisi lain, dimensi struktur birokrasi menunjukkan bahwa prosedur operasional standar tersedia dan peran-peran telah didefinisikan dengan jelas, namun pemantauan dan evaluasi belum diterapkan secara konsisten. Oleh karena itu, memperkuat komunikasi kebijakan, meningkatkan kompetensi digital, meningkatkan komitmen karyawan, dan mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan diperlukan untuk memastikan implementasi yang lebih efektif dan berkelanjutan dari kebijakan Target Kinerja Karyawan.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Sistem Kinerja Pegawai, Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. PENDAHULUAN

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai individu atau organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan indikator, sasaran, serta standar kerja yang telah ditetapkan. Dalam administrasi publik, kinerja tidak hanya menekankan pada pencapaian output, tetapi juga kualitas layanan, efisiensi proses, serta dampak terhadap masyarakat. Oleh karena itu, kinerja aparatur pemerintah menjadi elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel. Peningkatan kinerja aparatur tidak dapat dilepaskan dari adanya sistem manajemen kinerja yang jelas, terukur, dan berorientasi hasil sehingga memungkinkan terciptanya birokrasi yang modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pilar utama birokrasi diharapkan mampu menjalankan fungsi pelayanan publik serta pelaksana kebijakan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pegawai ASN merupakan profesi yang harus dikelola secara profesional dengan menjunjung nilai dasar, kode etik, serta memiliki kompetensi yang memadai. ASN dituntut untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, melaksanakan kebijakan secara efektif, serta menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugasnya. Dengan kedudukan strategis tersebut, ASN menjadi aktor utama yang menentukan kualitas jalannya pemerintahan.

Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa ASN memiliki tugas utama dalam melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik, serta menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam menjalankan fungsi tersebut, ASN harus bekerja berdasarkan standar kinerja yang dapat diukur. Hal ini menjadi penting mengingat penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional sangat ditentukan oleh kemampuan ASN dalam memberikan kinerja terbaiknya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu instrumen yang mampu mengukur capaian kinerja individu ASN secara objektif, sistematis, dan konsisten.

Dalam rangka memastikan adanya evaluasi kinerja ASN yang terstruktur, pemerintah menerapkan Sistem Kinerja Pegawai (SKP) sebagai alat untuk menilai capaian kinerja individu. SKP merupakan dokumen yang mencakup rencana kerja dan target kinerja yang harus dicapai oleh setiap ASN sesuai jabatannya. Penerapan SKP tidak hanya untuk menilai capaian kinerja, tetapi juga menjadi dasar penetapan pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, pembinaan disiplin, hingga promosi jabatan. Dengan demikian, SKP memiliki peran penting dalam penguatan manajemen kinerja ASN yang berorientasi pada hasil dan akuntabilitas.

Selain sebagai instrumen evaluasi individu, SKP juga berhubungan erat dengan peningkatan akuntabilitas organisasi publik. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama dalam reformasi birokrasi yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil. Melalui penyusunan SKP yang baik, setiap ASN diharapkan memiliki arah kerja yang jelas, target yang terukur, dan laporan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, SKP tidak hanya menilai aspek administratif, tetapi juga mendukung akuntabilitas kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Pada tingkat daerah, peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia aparatur menjadi salah satu prioritas pembangunan dalam rangka memperkuat profesionalisme birokrasi. Pemerintah Kabupaten Sumedang menaruh perhatian besar terhadap peningkatan kompetensi dan akuntabilitas ASN, terutama melalui penerapan sistem manajemen kinerja yang efektif. Sebagai lembaga yang membidangi urusan kepegawaian daerah, BKPSDM Kabupaten Sumedang memiliki tugas strategis dalam memastikan proses penyusunan SKP, evaluasi kinerja, dan pengelolaan ASN berjalan sesuai ketentuan. Upaya penguatan manajemen kinerja ini dilakukan dalam rangka mendukung arah pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam praktiknya, SKP menjadi instrumen penting yang digunakan untuk memetakan kemampuan, kontribusi, serta kualitas kinerja pegawai. Pelaksanaan SKP menuntut setiap ASN untuk menyusun rencana kerja, menetapkan indikator yang terukur, serta melaporkan capaian kerjanya secara teratur. BKPSDM Kabupaten Sumedang berperan dalam memastikan bahwa penyusunan dan pelaksanaan SKP dilakukan secara benar, sehingga mampu mendorong terciptanya budaya kerja yang produktif dan akuntabel. Oleh karena itu, implementasi SKP sangat menentukan efektivitas manajemen kinerja di lingkungan perangkat daerah.

Meskipun demikian, pelaksanaan SKP di lingkungan BKPSDM Kabupaten Sumedang masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pemahaman pegawai, kemampuan adaptasi terhadap sistem digital, serta kualitas pendampingan teknis. Keberhasilan implementasi SKP tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga kesiapan dan kompetensi pegawai. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kondisi empiris terkait pelaksanaan SKP dalam konteks BKPSDM Kabupaten Sumedang sebagai dasar untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

Namun berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang peneliti lakukan, ditemukan beberapa indikasi permasalahan dalam pelaksanaan Sistem Kinerja Pegawai (SKP) di lingkungan BKPSDM Kabupaten Sumedang. Adapun permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman pegawai yang belum merata dalam proses penyusunan SKP karena masih terdapat ASN yang mengalami kebingungan dalam menyusun SKP awal tahun, terutama dalam menerjemahkan tugas jabatan ke dalam rencana kinerja yang terukur. Hal ini terjadi karena tingkat pemahaman setiap pegawai berbeda-beda, sehingga proses penyusunan SKP belum berjalan secara seragam.
2. Adanya kesulitan pegawai dalam beradaptasi dengan perubahan sistem SKP yang terintegrasi ke aplikasi e-Kinerja BKN. Adanya perubahan mekanisme SKP dari pengisian tahunan menjadi pengisian triwulanan melalui aplikasi e-Kinerja BKN menimbulkan tantangan baru bagi pegawai.
3. Pelaksanaan sosialisasi dan pendampingan teknis yang masih belum optimal. Sosialisasi sering kali masih perlu dilakukan berulang karena masih banyak pegawai yang belum memahami prosedur penyusunan SKP dengan benar. Hal ini menunjukkan bahwa proses pendampingan belum berjalan secara maksimal, sehingga masih ada pegawai yang membutuhkan penjelasan lanjutan terkait mekanisme penyusunan SKP.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam implementasi kebijakan Sistem Kinerja Pegawai (SKP) dalam meningkatkan akuntabilitas aparatur di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumedang. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara komprehensif berdasarkan perspektif para pelaksana kebijakan serta kondisi empiris di lapangan.

Lokasi penelitian ditetapkan di BKPSDM Kabupaten Sumedang dengan pertimbangan bahwa instansi tersebut memiliki peran strategis dalam pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara, khususnya dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi SKP. Subjek penelitian meliputi pejabat struktural dan ASN yang terlibat langsung dalam proses implementasi SKP, baik pada tahap perencanaan kinerja, pelaksanaan tugas, maupun pelaporan dan evaluasi kinerja. Penentuan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan keterlibatan langsung dan pemahaman terhadap kebijakan SKP.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai pemahaman pegawai terhadap kebijakan SKP, pengalaman dalam penyusunan dan pelaporan kinerja, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pelaksanaan

SKP, termasuk penggunaan aplikasi e-Kinerja BKN dan pola kerja aparatur. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung berupa dokumen SKP, laporan kinerja, standar operasional prosedur, serta arsip lain yang relevan.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara antar informan serta mencocokkannya dengan hasil observasi dan dokumentasi. Langkah ini dilakukan untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan penelitian.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan pemahaman terhadap pola-pola temuan. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan hasil analisis guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai implementasi kebijakan SKP, faktor penghambat, serta upaya perbaikannya dalam meningkatkan akuntabilitas aparatur di BKPSDM Kabupaten Sumedang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan proses penjabaran keputusan ke dalam prosedur birokrasi, tetapi juga menyangkut bagaimana kebijakan tersebut dijalankan oleh para pelaksana serta dampak yang ditimbulkannya. Implementasi kebijakan Sistem Kinerja Pegawai (SKP) di BKPSDM Kabupaten Sumedang merupakan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur melalui mekanisme penilaian kinerja yang terstruktur, terukur, dan berbasis sistem.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumedang. Implementasi kebijakan SKP menunjukkan adanya upaya sistematis dari organisasi untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas kinerja aparatur. Namun demikian, sebagaimana lazimnya implementasi kebijakan publik di lingkungan birokrasi, pelaksanaan kebijakan SKP juga dihadapkan pada berbagai tantangan struktural, teknis, dan kultural.

Sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat dimensi utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Oleh karena itu, hasil dan pembahasan penelitian ini dianalisis berdasarkan keempat dimensi tersebut, dengan menyesuaikan pada temuan empiris yang diperoleh dari hasil temuan lapangan kami.

Tabel 1. Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Sistem SKP di BKPSDM

No	Dimensi	Kesimpulan
1.	Komunikasi	Sosialisasi dan bimbingan teknis SKP telah dilaksanakan melalui rapat dan koordinasi internal. Namun, pemahaman pegawai belum merata, khususnya dalam menyusun indikator kinerja yang sesuai dengan uraian tugas jabatan.
2.	Sumber Daya	Jumlah pegawai dan sarana pendukung relatif memadai. Kendala utama terletak pada perbedaan kemampuan literasi digital pegawai serta keterbatasan pendampingan teknis dalam penggunaan aplikasi e-Kinerja BKN.
3.	Disposisi	Pegawai pada umumnya memiliki sikap positif terhadap kebijakan SKP. Namun, sebagian masih memandang SKP sebagai beban administratif, sehingga memengaruhi kualitas dan ketepatan waktu penyusunan SKP
4.	Struktur Birokrasi	SOP pelaksanaan SKP telah tersedia dan pembagian tugas telah jelas. Akan tetapi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKP belum dilakukan secara konsisten dan tindak lanjut hasil evaluasi masih terbatas.

Sumber: Hasil Penelitian 2025

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Sistem Kinerja Pegawai (SKP) di BKPSDM Kabupaten Sumedang secara umum telah berjalan cukup baik. Komunikasi terkait kebijakan SKP telah dilaksanakan melalui berbagai forum internal, seperti sosialisasi, rapat koordinasi, serta bimbingan teknis yang berkaitan dengan penyusunan SKP dan penggunaan aplikasi e-Kinerja BKN. Namun demikian, efektivitas komunikasi tersebut belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat pegawai yang mengalami kesulitan dalam memahami aspek teknis penyusunan SKP, khususnya dalam menerjemahkan uraian tugas jabatan ke dalam indikator kinerja yang terukur. Perbedaan tingkat pemahaman ini menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan belum sepenuhnya dapat dipahami secara merata oleh seluruh pegawai sebagai sasaran kebijakan.

Komunikasi merupakan dimensi penting dalam implementasi kebijakan, karena kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran. Sosialisasi tujuan dan sasaran kebijakan yang jelas dapat meminimalkan terjadinya distorsi dalam pelaksanaan kebijakan serta meningkatkan pemahaman aparatur terhadap substansi kebijakan yang diimplementasikan.

Hal ini diperkuat oleh pendapat ahli menurut Agustino (2020) bahwa “komunikasi dalam implementasi kebijakan publik harus disampaikan kepada pelaksana kebijakan secara jelas agar mereka mengetahui apa yang harus dikerjakan dan tidak terjadi bias informasi.”

Maka dapat disimpulkan bahwa kejelasan informasi penyusunan SKP sangat bergantung pada ketepatan penyampaian pesan agar seluruh ASN memiliki persepsi yang sama terhadap tujuan akuntabilitas yang ingin dicapai.

Selain itu, dimensi sumber daya dalam implementasi kebijakan SKP menunjukkan bahwa BKPSDM Kabupaten Sumedang didukung oleh jumlah pegawai serta sarana dan prasarana yang relatif memadai. Ketersediaan fasilitas seperti komputer dan jaringan internet pada dasarnya telah menunjang pelaksanaan SKP berbasis aplikasi e-Kinerja BKN. Akan tetapi, perbedaan kemampuan sumber daya manusia, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi, masih menjadi kendala dalam implementasi kebijakan ini. Tidak semua pegawai memiliki tingkat literasi digital yang sama, sehingga proses pengisian dan pelaporan SKP belum berjalan secara optimal. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan pendampingan teknis, sehingga pegawai yang mengalami kesulitan belum sepenuhnya mendapatkan dukungan yang memadai. Sumber daya memegang peranan penting dalam implementasi kebijakan, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjamin keberlangsungan kebijakan.

Pada aspek kemampuan pegawai dalam penyusunan SKP, kemampuan ASN dalam menyusun SKP secara mandiri relatif beragam, di mana sebagian besar telah memahami pedoman namun masih terdapat ASN yang memerlukan arahan dan pendampingan khusus akibat perbedaan tingkat kompetensi dan disiplin. Hal ini diperkuat dengan pendapat ahli menurut Kasmir (2023) bahwa “kemampuan (*ability*) adalah kecakapan dan potensi yang dimiliki pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar kinerja yang telah ditentukan organisasi.

Dimensi disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan tanggung jawab aparatur sebagai pelaksana kebijakan SKP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pegawai BKPSDM Kabupaten Sumedang pada umumnya memiliki sikap yang cukup positif terhadap kebijakan SKP dan menyadari pentingnya kebijakan tersebut dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur. Namun demikian, masih terdapat sebagian pegawai yang memandang SKP sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai instrumen manajemen kinerja. Persepsi tersebut berdampak pada tingkat kesungguhan dalam penyusunan SKP serta ketepatan waktu pelaporan kinerja, sehingga tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

Pada aspek tanggung jawab pelaksana kebijakan, rasa tanggung jawab ASN dalam melakukan penginputan SKP ke aplikasi e-Kinerja BKN tergolong tinggi karena adanya pemahaman terhadap konsekuensi serta sistem batas waktu otomatis yang memaksa pegawai untuk lebih disiplin.

Hal ini diperkuat dari pendapat ahli menurut Pasolong (2019) bahwa “akuntabilitas dan tanggung jawab merupakan kewajiban bagi setiap aparatur untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misinya

Selanjutnya, pada dimensi struktur birokrasi, implementasi kebijakan SKP didukung oleh struktur organisasi yang jelas serta keberadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur proses penyusunan, pelaporan, dan evaluasi kinerja pegawai. Pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan SKP telah ditetapkan secara formal, sehingga memberikan kejelasan peran bagi masing-masing pelaksana kebijakan. Meskipun demikian, mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan SKP belum sepenuhnya berjalan secara konsisten. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kinerja masih terbatas, sehingga upaya perbaikan kinerja aparatur belum berlangsung secara berkelanjutan.

Pada aspek tanggung jawab, secara normatif SKP dipandang sebagai kewajiban jabatan, namun secara realitas pelaksanaan sistem triwulanan menimbulkan persepsi peningkatan beban kerja bagi ASN akibat meningkatnya frekuensi pelaporan kinerja.

Hal ini diperkuat dari penjelasan ahli menurut Ernawati (Sari, 2022) bahwa “Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara, dan Tuhan.”

Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan persepsi antara aspek normatif kebijakan dan realitas lapangan, sehingga penguatan pemaknaan tanggung jawab jabatan sangat penting untuk mengatasi hambatan implementasi.

4. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan Sistem Kinerja Pegawai (SKP) di BKPSDM Kabupaten Sumedang secara umum telah berjalan cukup baik. Kebijakan SKP telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan didukung oleh upaya sosialisasi, ketersediaan sarana dan prasarana, serta struktur birokrasi yang relatif jelas.

Namun demikian, implementasi kebijakan SKP belum sepenuhnya berjalan optimal. Pada dimensi komunikasi, masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman pegawai terhadap teknis penyusunan SKP, khususnya dalam merumuskan indikator kinerja yang terukur. Pada dimensi sumber daya, meskipun sarana pendukung tersedia, keterbatasan kompetensi digital serta pendampingan teknis masih menjadi kendala dalam pelaksanaan SKP berbasis aplikasi e-Kinerja BKN. Selanjutnya, pada dimensi disposisi, masih ditemukan sebagian pegawai yang memandang SKP sebagai kewajiban administratif, sehingga memengaruhi kualitas dan ketepatan waktu pelaporan kinerja. Adapun pada dimensi struktur birokrasi, keberadaan SOP telah memberikan kejelasan pelaksanaan kebijakan, namun mekanisme monitoring dan evaluasi belum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

Peningkatan efektivitas implementasi kebijakan SKP di BKPSDM Kabupaten Sumedang memerlukan penguatan komunikasi kebijakan yang lebih intensif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia terutama dalam penguasaan teknologi informasi, penguatan komitmen aparatur terhadap tujuan kebijakan, serta optimalisasi monitoring dan evaluasi kinerja secara berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja aparatur yang lebih baik di lingkungan BKPSDM Kabupaten Sumedang.

REFERENCES (10 pt)

- Agustino, L. (2019). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ali, F., & Koton, Y. (2023). *Studi Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Anderson, J. E. (2015). *Public Policymaking (8th ed.)*. Boston: Cengage Learning.
- Edward III, G. C. (2016). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Juri, E. R., Wellem, I., & Tonce, Y. (2023). Pengaruh Kompetensi dan Semangat Kerja terhadap Kinerja Aparatur Desa di Kecamatan Nita Kabupaten Sikka (Studi Kasus Pada Desa Nita, Desa Nitakloang, Desa Tebuk dan Desa Lusitada). Nian Tana Sikka: *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(5).
- Keban, Y. T. (2017). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Meutia, I. (2017). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Mulyadi. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurwanda. (2016). *Implementasi Kebijakan Publik dalam Administrasi Negara*. *Jurnal Ilmu Sosial*, 8(3), 860–872.
- Pasolong, H. (2019). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Sari, M. P., & Hayati, F. (2022). Analisis Upaya Guru dalam Menanamkan Karakter Tanggung Jawab Pada Anak Usia 5-6 Tahun di TK Khairani Aceh Besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan*, 3(1).
- Subianto. (2020). *Implementasi Kebijakan Publik di Daerah*. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(1), 15–30.
- Sunggono, B. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (2015). *The Policy Implementation Process*. *Administration & Society*, 6(4), 445–488.

PENGARUH EFEKTIVITAS PROGRAM APLIKASI SI-PELANGI TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PADA BIDANG REHABILITASI SOSIAL DI DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMEDANG

Teddy Marliady Nurwan^{*1}, Aurel Angelia Syifa², Zahra Amalia Putri³,
Alya Izzati Putri Marsid⁴, Ramlan Fadilah⁵, Imam Nurfiaggi⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Sebelas April

Email ^{*1}: teddy_marliady@unsap.ac.id

ABSTRAK

This study aims to examine the effectiveness of the SI-PELANGI application program on program implementation, identify the relationship between the effectiveness of the SI-PELANGI application program and program implementation, and determine the magnitude of the influence of the SI-PELANGI application program's effectiveness on program implementation in the Social Rehabilitation Sector at the Social Service of Sumedang Regency. This research uses a quantitative approach with a descriptive-verification method. The sampling technique employed is non-probability sampling using a saturated sampling method, making the entire population of 24 respondents the sample of the study. Data collection was conducted through questionnaires, observation, and documentation. The data analysis techniques used include percentage calculation, normality test, correlation coefficient test, significance test, and coefficient of determination test. The results show that the effectiveness of the SI-PELANGI application program falls into the "very good" category with an analysis result of 88.5%, while program implementation is also in the "very good" category with an analysis result of 85.54%. The correlation coefficient test shows a value of 0.713, indicating a positive and significant relationship between the effectiveness of the SI-PELANGI application program and program implementation. Furthermore, the significance test shows that the calculated t-value is greater than the t-table value ($4.7695 > 2.073$), thus supporting the research hypothesis. The coefficient of determination analysis shows that the effectiveness of the SI-PELANGI application program influences program implementation by 50.8%, while the remaining 49.2% is affected by other factors not examined in this study.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan Revolusi Industri 4.0 telah mendorong percepatan digitalisasi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, yang kini dituntut untuk lebih adaptif dalam memanfaatkan teknologi informasi guna memperbaiki kualitas layanan publik. Digitalisasi tidak hanya menjadi simbol modernisasi birokrasi, tetapi juga kebutuhan fundamental untuk menghadirkan pelayanan yang cepat, tepat, dan akuntabel bagi masyarakat. Perubahan ini mendorong instansi pemerintah untuk beralih dari sistem manual menuju platform digital yang terintegrasi, sehingga tata kelola pelayanan dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan. Sejalan dengan tuntutan tersebut, pemerintah Indonesia memberikan dasar hukum yang kuat bagi transformasi digital melalui berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik sebagai pijakan utama penerapan pelayanan berbasis teknologi.

Pemerintah Indonesia telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi transformasi digital melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengamankan bahwa instansi pemerintah wajib mengelola informasi secara elektronik. Ketentuan ini dipertegas dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik pada instansi pemerintah, sehingga seluruh proses pelayanan diarahkan menggunakan teknologi digital yang terstandar dan terintegrasi.

Pada sektor sosial, arah dan kewajiban digitalisasi juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang menegaskan bahwa pemerintah wajib menyediakan layanan rehabilitasi, perlindungan, pendampingan, dan pendataan secara cepat, akurat, serta berbasis teknologi. Hal ini diperkuat dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial, yang mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan layanan rehabilitasi sosial sesuai standar nasional yang menekankan pentingnya data yang lengkap, akurat, dan tepat waktu.

Selain itu, mekanisme penanganan sosial diperjelas melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), yang mengarahkan agar penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu dilakukan secara terintegrasi, cepat, dan berbasis teknologi informasi sehingga proses identifikasi dan rujukan kasus dapat dilaksanakan secara lebih efisien.

Komitmen inovasi pelayanan publik juga menjadi perhatian khusus pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Sumedang yang menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 137 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah. Regulasi ini mewajibkan setiap perangkat daerah untuk menciptakan dan mengimplementasikan inovasi sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam konteks inilah Dinas Sosial Kabupaten Sumedang mengembangkan aplikasi TAHU SUMEDANG yang terintegrasi dengan pelayanan sosial yaitu (Sistem Penanganan Lansia Terlantar, Anak Terlantar,

Gelandangan dan Pengemis, serta Disabilitas Terlantar). Aplikasi ini dirancang sebagai inovasi layanan untuk mendukung pendataan, pelaporan, dan penanganan kasus-kasus sosial secara lebih cepat, akurat, dan sistematis sesuai amanat regulasi pusat maupun daerah.

Program SI-PELANGI diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan pendataan manual yang sebelumnya sering menghambat kecepatan pelayanan. Dengan sistem yang dirancang *real-time*, aplikasi ini seharusnya dapat membantu pegawai lapangan melakukan identifikasi penerima manfaat, mempercepat penyampaian laporan, dan memperbaiki kualitas informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan program rehabilitasi sosial.

Meskipun demikian, pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus. Masih ditemukan hambatan terkait pemahaman pegawai terhadap penggunaan fitur aplikasi, keterbatasan jaringan di lapangan, hingga beberapa fitur yang dirasa belum sesuai kebutuhan teknis petugas. Ketidaksiharian ini menimbulkan keterlambatan input data yang berpengaruh pada ketepatan Pelaksanaan Program.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Efektivitas Program Aplikasi sebagai alat pendukung pelayanan belum sepenuhnya optimal. Untuk memahami sejauh mana Pengaruh Efektivitas Program Aplikasi SI-PELANGI dan bagaimana dampaknya terhadap Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial, penting untuk melihat terlebih dahulu indikasi dan fenomena masalah yang muncul dalam pemanfaatan aplikasi tersebut. Gambaran ini menjadi dasar untuk menilai variabel Efektivitas Program Aplikasi, di mana beberapa indikasi permasalahan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Terjadi ketidaktercapaian target kerja karena sebagian pekerjaan tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa proses kerja belum berjalan secara maksimal, terutama terkait pencapaian sasaran dan ketepatan waktu, sehingga berdampak pada lambatnya penyelesaian layanan serta tidak tercapainya target yang telah ditetapkan. Hal ini dibuktikan dari data pengaduan aplikasi SI-PELANGI tahun 2025, yang menunjukkan bahwa dari 362 pemohon, hanya 353 yang berhasil direalisasikan, sehingga masih terdapat data yang belum terselesaikan.
2. Akses menuju aplikasi sering kali berjalan sangat lambat, bahkan ketika jaringan berada dalam kondisi stabil. Selain itu, pada menu Tahu Sumedang, fitur SI-PELANGI tidak langsung muncul sehingga pengguna harus membuka beberapa tahapan terlebih dahulu sebelum dapat menggunakannya. Kondisi ini membuat proses kerja menjadi kurang efisien karena waktu terbuang hanya untuk menunggu aplikasi merespons atau mencari menu yang diperlukan, sehingga menghambat kelancaran penyelesaian tugas harian. Hambatan teknis ini sejalan dengan permasalahan yang tercantum dalam halaman 23 RENSTRA 2024–2029, yang menyebutkan bahwa “sarana prasarana masih belum memadai dalam mendukung pelayanan kesejahteraan sosial,” sehingga berdampak pada kinerja aplikasi dan kualitas pelayanan yang dihasilkan.
3. Peningkatan capaian layanan pada tahun 2022 menunjukkan adanya perbaikan kinerja, namun juga menggambarkan bahwa proses kerja pada tahun-tahun sebelumnya belum berjalan optimal. Misalnya, seperti yang tercatat pada halaman 19 dalam RENSTRA tahun 2024–2026 bahwa penanganan penyandang disabilitas hanya mencapai 55,53% pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 85,29% pada tahun 2022, sementara beberapa kategori lain bahkan melonjak hingga 100%. Kenaikan yang sangat signifikan dalam waktu singkat ini mengindikasikan bahwa pada periode sebelumnya masih terdapat hambatan dalam alur kerja, mulai dari proses pendataan, penginputan, hingga penyelesaian layanan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa efisiensi dan konsistensi proses kerja belum sepenuhnya stabil, sehingga kinerja baru dapat meningkat setelah dilakukan perbaikan pada tahun berikutnya.

Kondisi tersebut memiliki dampak langsung terhadap Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial yang membutuhkan data akurat dan informatif sebagai dasar keputusan. Ketika data terlambat atau tidak lengkap, maka koordinasi dan tindak lanjut kasus sosial juga terpengaruh. Untuk memahami lebih jauh variabel Pelaksanaan Program, maka penting melihat fenomena di lapangan yang menunjukkan bahwa masih ditemukan hambatan dalam menjalankan program, antara lain:

1. Adanya kesenjangan kemampuan teknis digital di antara pegawai menyebabkan Pelaksanaan Program belum sepenuhnya berjalan optimal. Kondisi ini berpotensi menghambat pencapaian tujuan program karena proses pelaksanaan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan data tingkat pendidikan pegawai pada Bidang Rehabilitasi Sosial yang tercantum dalam RENSTRA 2024–2029 halaman 14–15, yaitu terdapat 2 pegawai berpendidikan S1 dan 4 pegawai berpendidikan S2 dengan latar belakang pendidikan sosial, manajemen, ekonomi, dan hukum. Tidak adanya pegawai dengan latar belakang teknologi informasi menunjukkan bahwa kemampuan teknis digital belum merata, sehingga berdampak pada efektivitas Pelaksanaan Program di lapangan.
2. Pengguna di tingkat desa masih belum sepenuhnya memahami penggunaan aplikasi SI-PELANGI, sehingga proses Pelaksanaan Program belum berjalan optimal. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan sosialisasi secara bertahap bersama para camat di Kabupaten Sumedang. Hingga saat ini,

sudah 268 desa yang mengikuti kegiatan sosialisasi, sementara 2 desa lainnya masih dalam proses penjadwalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman program masih perlu diperkuat agar pelaksanaan layanan dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh desa.

3. Masih terdapat penumpukan kasus yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya. Dilihat pada tahun 2020–2021 capaian keduanya berada pada angka yang relatif rendah dan tidak stabil. Kondisi ini menggambarkan bahwa Pelaksanaan Program belum berjalan optimal pada periode tersebut, sehingga banyak layanan baru dapat diselesaikan setelah adanya peningkatan kinerja dan percepatan tindak lanjut di tahun 2022. Hal ini dibuktikan melalui data capaian kinerja berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam RENSTRA 2024–2029 halaman 19, yang menunjukkan bahwa beberapa kategori pelayanan tiba-tiba mencapai 100% realisasi pada tahun 2022, seperti penanganan anak terlantar dan lansia terlantar.

Berdasarkan indikasi masalah efektivitas program dan pelaksanaan program di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program berkaitan dengan efektivitas program, tinggi rendahnya pelaksanaan program dapat dipengaruhi dan disebabkan oleh efektivitas program.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data deskriptif verifikatif, yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan aplikasi SI-PELANGI serta pengaruhnya terhadap pelaksanaan program rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. Pendekatan kuantitatif dipilih untuk memperoleh gambaran objektif mengenai hubungan antarvariabel berdasarkan data empiris yang terukur

Adapun pengertian dari deskriptif verifikatif yaitu statistik yang berfungsi untuk menggambarkan data sebagaimana adanya tanpa melakukan generalisasi lebih lanjut. Kurniasih (2019) menjelaskan bahwa statistik deskriptif hanya bertujuan menyajikan data dalam bentuk deskripsi, seperti tabel, grafik, persentase, atau nilai rata-rata.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, khususnya pada Bidang Rehabilitasi Sosial. Objek penelitian meliputi efektivitas program aplikasi SI-PELANGI sebagai variabel independen (X) dan pelaksanaan program rehabilitasi sosial sebagai variabel dependen (Y). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2025.

Untuk mempermudah pemahaman selanjutnya, peneliti menguraikan operasionalisasi variabel pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Operasional Variabel Efektivitas Program

Variabel	Dimensi	Indikator	Item
Efektivitas Program (X) Campbell (Ariyani dkk., 2024)	1. Keberhasilan Program	a. Kemudahan dalam menyelesaikan tugas.	1
		b. Kemudahan dalam penanganan data.	2
		c. Kesesuaian data	3
		d. Keamanan data	4
	2. Keberhasilan Sasaran	a. Dukungan sistem terhadap pencapaian target.	5
		b. Keterarahan proses dalam mencapai target.	6
		c. Kecepatan proses penginputan data	7
		d. Efisiensi alur pekerjaan	8
	3. Kepuasan Terhadap Program	a. Dukungan sistem terhadap pelaksanaan pekerjaan.	9
		b. Kemudahan pengelolaan data.	10
		c. Kemudahan pengoperasian	11
		d. Kejelasan panduan penggunaan	12
	4. Tingkat <i>Input</i> dan <i>Output</i>	a. Efisiensi alur kerja.	13
		b. Efisiensi waktu.	14
		c. Kecepatan proses penyelesaian	15
		d. Kapasitas pengelolaan data	16
	5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh	a. Dukungan terhadap sasaran program.	17
		b. Kualitas layanan meningkat.	18
		c. Peningkatan kualitas layanan	19
		d. Kecepatan dan ketepatan	20

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2025

Tabel 2. Operasional Variabel Pelaksanaan Program

Variabel	Dimensi	Indikator	Item
Pelaksanaan Program (Y) Sutrisno (Arlan, 2019)	1. Pemahaman program	a. Pemahaman pegawai terhadap tujuan program.	1
		b. Pemahaman peran pegawai dalam program.	2
		c. Pemahaman cara penggunaan	3
		d. Penguasaan Prosedur	4
	2. Tepat sasaran	a. Kesesuaian penggunaan dengan tugas pegawai.	5
		b. Penggunaan sesuai kewenangan.	6
		c. Ketetapan sasaran layanan.	7
		d. Kemudahan penyaluran layanan	8
	3. Tepat waktu	a. Ketetapan waktu koordinasi.	9
		b. Ketepatan waktu pelaksanaan.	10
		c. Kecepatan penyelesaian layanan	11
		d. Kelancaran alur pelayanan	12
	4. Tercapainya tujuan	a. Kesesuaian fitur dengan kebutuhan kerja.	13
		b. Kemudahan penyelesaian pekerjaan.	14
		c. Peningkatan kualitas layanan	15
		d. Peningkatan standar pelayanan	16
	5. Perubahan nyata	a. Alur kerja tertata	17
		b. Perbaikan proses kerja.	18
		c. Kecepatan penyampaian layanan	19
		d. Kecepatan pengolahan data	20

Sumber: Diolah Oleh Penulis, 2025

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bidang rehabilitasi sosial di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Sumedang berjumlah 24 orang. Teknik penentuan sampel menggunakan sampel jenuh, di mana menurut Sugiyono (2016) mengemukakan bahwa "Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel". Pendekatan ini dipilih karena jumlah populasi relatif terbatas, kurang dari 30 dan seluruh responden memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian.

Untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik responden penelitian, berikut disajikan distribusi pegawai berdasarkan jabatan dan jumlahnya:

Tabel 3. Daftar Nama Jabatan dan Jumlah Pegawai

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Kepala Bidang Rehabilitas Sosial	1
2.	Penyuluh Sosial Ahli Muda	1
3.	Pekerja Sosial Ahli Muda	1
4.	Analisis Masalah Sosial	1
5.	Pengelola Rehabilitas Sosial	1
6.	Pekerja Sosial Ahli Pertama	1
7.	Operator Komputer	1
8.	Pendamping Rehabilitas Sosial	4
9.	Petugas SSQR	13
Jumlah		24

Sumber: Daftar Jabatan dan Jumlah Pegawai Bidang Rehabilitas Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumedang Tahun 2025

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, observasi, dan studi dokumentasi. Kuesioner disusun menggunakan skala Likert untuk mengukur persepsi responden terhadap efektivitas penggunaan aplikasi SI-PELANGI dan pelaksanaan program rehabilitasi sosial. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai proses penggunaan aplikasi dalam pelaksanaan tugas, sedangkan dokumentasi digunakan untuk mendukung data penelitian melalui dokumen resmi seperti RENSTRA.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis statistik kuantitatif, yang meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji persentase, uji normalitas, uji koefisien korelasi, uji signifikan, dan uji koefisien determinasi. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui pengaruh efektivitas penggunaan aplikasi SI-PELANGI

terhadap pelaksanaan program rehabilitasi sosial. Seluruh proses analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak statistik.

Untuk mengetahui Tingkat Efektivitas Program Aplikasi Si-Pelangi dan Pelaksanaan Program pada Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, maka dilakukan pengukuran terhadap item pernyataan dari indikator-indikator variabel Efektivitas Program dan Pelaksanaan Program.

Adapun rumus yang digunakan adalah rumus korelasi product moment yaitu sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Data yang diperoleh dari hasil angket kemudian diberi skor berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk menggambarkan tingkat efektivitas Program Aplikasi SI-PELANGI serta pelaksanaan program pada Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memperoleh gambaran mengenai variabel Pengaruh Efektivitas Program Aplikasi SI-PELANGI Terhadap Pelaksanaan Program pada Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, maka dilakukan pengukuran dengan menggunakan kuesioner yang masing-masing disertai lima alternatif jawaban yang harus dipilih sesuai dengan pendapat responden. Adapun kriteria penilaian presentase sebagai berikut:

1. Nilai kumulatif adalah jumlah nilai dari setiap item pernyataan yang merupakan jawaban dari 24 responden.
2. Persentase adalah nilai kumulatif item dibagi dengan skor ideal dikalikan dengan 100%.
3. Jumlah responden = 24 orang, dan nilai skala pengukuran terbesar = 5, sedangkan skala pengukuran terkecil = 1, sehingga diperoleh jumlah kumulatif nilai terbesar = 24 x 5 = 120, dan jumlah kumulatif nilai terkecil = 24 x 1 = 24. Adapun nilai persentase terbesar adalah = (120/120) x 100% = 100% dan nilai persentase terkecil adalah = (24/120) x 100% = 20%, dari kedua nilai persentase tersebut diperoleh nilai rentang = 100%-20% = 80% dan jika dibagi dengan 5 skala pengukuran didapat nilai interval persentase sebesar = (80%) / 5 = 16% sehingga diperoleh klasifikasi kriteria presentase sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria Penelitian Berdasarkan Presentase

Persentase	Kategori
84,00-100,00	Sangat Baik
68,00-83,99	Baik
52,00-67,99	Cukup Baik
36,00-51,99	Kurang Baik
20,00-35,99	Sangat Tidak Baik

Untuk mengetahui tingkat Efektivitas Program Aplikasi SI-PELANGI pada bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, dilakukan pengukuran melalui penyebaran angket yang memuat 20 pernyataan dengan lima pilihan jawaban pada setiap item. Adapun hasil pengolahan data terhadap variabel Efektivitas Program disajikan sebagai berikut:

Tabel 5. Deskriptif Frekuensi Variabel Efektivitas Program

No	Indikator	Frekuensi	Skor		Prosentase	Kategori
			Aktual	Ideal		
1	Kemudahan dalam menyelesaikan tugas	24	106	120	88,3%	Sangat Baik
2	Kemudahan dalam penanganan data	24	104	120	86,7%	Sangat Baik
3	Kesesuaian data	24	108	120	90,0%	Sangat Baik
4	Keamanan data	24	104	120	86,7%	Sangat Baik
5	Dukungan sistem terhadap pencapaian target	24	107	120	89,2%	Sangat Baik
6	Keterarahan proses dalam mencapai target	24	104	120	86,7%	Sangat Baik
7	Kecepatan proses penginputan data	24	108	120	90,0%	Sangat Baik

No	Indikator	Frekuensi	Skor		Prosentase	Kategori
			Aktual	Ideal		
8	Efisiensi alur pekerjaan	24	108	120	90,0%	Sangat Baik
9	Kemudahan pengelolaan data	24	106	120	88,3%	Sangat Baik
10	Kemudahan pengelolaan data.	24	107	120	89,2%	Sangat Baik
11	Kemudahan pengoperasian	24	107	120	89,2%	Sangat Baik
12	Kejelasan panduan penggunaan	24	104	120	86,7%	Sangat Baik
13	Efisiensi alur kerja	24	106	120	88,3%	Sangat Baik
14	Efisiensi waktu	24	105	120	87,5%	Sangat Baik
15	Kecepatan proses penyelesaian	24	108	120	90,0%	Sangat Baik
16	Kapasitas pengelolaan data	24	106	120	88,3%	Sangat Baik
17	Dukungan terhadap sasaran program	24	103	120	85,8%	Sangat Baik
18	Kualitas layanan meningkat	24	108	120	90,0%	Sangat Baik
19	Peningkatan kualitas layanan	24	109	120	90,8%	Sangat Baik
20	Kecepatan dan ketepatan	24	106	120	88,3%	Sangat Baik
Σ			2124	2400		
Rata-rata			106,2	120		

Untuk mengetahui seberapa baik tingkat Pelaksanaan Program pada bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, pengukuran dilakukan melalui penyebaran angket yang memuat 20 pernyataan dengan lima pilihan jawaban pada setiap item. Adapun hasil pengolahan data terhadap variabel Pelaksanaan Program disajikan sebagai berikut:

Tabel 6. Deskriptif Frekuensi Variabel Pelaksanaan Program

No	Indikator	Frekuensi	Skor		Prosentase	Kategori
			Aktual	Ideal		
1	Pemahaman pegawai terhadap tujuan program	24	103	120	85,8%	Sangat Baik
2	Pemahaman peran pegawai dalam program	24	103	120	85,8%	Sangat Baik
3	Pemahaman cara penggunaan	24	108	120	90,0%	Sangat Baik
4	Penguasaan Prosedur	24	101	120	84,2%	Sangat Baik
5	Kesesuaian penggunaan dengan tugas pegawai	24	106	120	88,3%	Sangat Baik
6	Penggunaan sesuai kewenangan	24	102	120	85,0%	Sangat Baik
7	Ketetapan sasaran layanan	24	102	120	85,0%	Sangat Baik
8	Kemudahan penyaluran layanan	24	104	120	86,7%	Sangat Baik
9	Ketetapan waktu koordinasi	24	101	120	84,2%	Sangat Baik
10	Ketepatan waktu pelaksanaan	24	101	120	84,2%	Sangat Baik
11	Kecepatan penyelesaian layanan	24	100	120	83,3%	Baik
12	Kelancaran alur pelayanan	24	101	120	84,2%	Sangat Baik
13	Kesesuaian fitur dengan kebutuhan kerja	24	103	120	85,8%	Sangat Baik
14	Kemudahan penyelesaian pekerjaan	24	101	120	84,2%	Sangat Baik
15	Peningkatan kualitas layanan	24	102	120	85,0%	Sangat Baik
16	Peningkatan standar pelayanan	24	105	120	87,5%	Sangat Baik
17	Alur kerja tertata	24	102	120	85,0%	Sangat Baik
18	Perbaikan proses kerja	24	104	120	86,7%	Sangat Baik
19	Kecepatan penyampaian layanan	24	102	120	85,0%	Sangat Baik
20	Kecepatan pengolahan data	24	102	120	85,0%	Sangat Baik
Σ			2053	2400		
Rata-rata			102,65	120		

Hubungan Variabel Efektivitas Program dengan Pelaksanaan Program
Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data pada variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan metode uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test* (KS-Z) dengan bantuan *SPSS for Windows*. Hasil uji normalitas digunakan sebagai dasar penentuan kelayakan penggunaan analisis statistik parametric selanjutnya. Adapun hasil pengujian normalitas data disajikan sebagai berikut:

Tabel 7. Uji Normalitas Variabel Efektivitas Program

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Efektivitas Program
N		24
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.64563989
Most Extreme Differences	Absolute	.171
	Positive	.143
	Negative	-.171
Test Statistic		.171
Asymp. Sig. (2-tailed)		.067 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber: Lampiran Output SPSS, 2025

Berdasarkan tabel uji normalitas yang telah disajikan, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,067. Nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada variabel Efektivitas Program berdistribusi normal. Dengan terpenuhinya asumsi normalitas ini, data penelitian dinyatakan layak untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan metode analisis statistik yang telah ditetapkan.

Tabel 8. Uji Normalitas Variabel Pelaksanaan Program

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Pelaksanaan Program
N		24
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	8.13816484
Most Extreme Differences	Absolute	.135
	Positive	.105
	Negative	-.135
Test Statistic		.135
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Lampiran Output SPSS, 2025

Berdasarkan tabel uji normalitas yang telah disajikan, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,200. Nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada variabel Pelaksanaan Program berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas telah terpenuhi dan data penelitian dinyatakan layak untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan metode analisis statistik yang telah ditetapkan.

Uji Koefisien korelasi

Uji koefisien korelasi dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel Efektivitas Program aplikasi SI-PELANGI dengan variabel Pelaksanaan Program di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. Pengujian hubungan antara kedua variabel dilakukan dengan menghitung nilai koefisien korelasi menggunakan rumus *Pearson Product Moment*. Proses pengolahan data dilakukan dengan bantuan aplikasi *SPSS versi 25*. Adapun hasil uji korelasi disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 9. Uji Koefisien Korelasi Efektivitas Program dan Pelaksanaan Program

<i>Correlations</i>			
		Efektivitas Program	Pelaksanaan Program
Efektivitas Program	Pearson Correlation	1	.713**
	Sig. (2-tailed)		.000
	N	24	24
Pelaksanaan Program	Pearson Correlation	.713**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	
	N	24	24

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Lampiran Output SPSS, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel tersebut, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,713. Nilai ini menunjukkan bahwa hubungan antara Efektivitas Program Aplikasi SI-PELANGI dengan Pelaksanaan Program bersifat positif, yang berarti semakin efektif penggunaan aplikasi, maka Pelaksanaan Program juga cenderung semakin baik. Berdasarkan pedoman interpretasi koefisien korelasi, nilai 0,713 termasuk ke dalam kategori hubungan kuat karena berada pada interval 0,60–0,799 (Sugiyono, 2024: 248).

Uji Signifikan

Pengujian signifikansi terhadap koefisien korelasi dilakukan menggunakan uji t untuk mengetahui apakah hubungan antara kedua variabel bersifat signifikan atau tidak. Adapun rumus t hitung yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Selanjutnya nilai t hitung didistribusikan kedalam rumus tersebut, sehingga diperoleh t hitung sebesar:

$$t = \frac{0,713\sqrt{24-2}}{\sqrt{1-0,713^2}}$$

$$t = \frac{3,3442664368}{0,70116403216}$$

$$t = 4,7695$$

Selanjutnya, nilai koefisien korelasi dimasukkan ke dalam rumus tersebut sehingga diperoleh nilai t hitung sebesar 4,7695. Dengan taraf signifikansi 5% dan derajat kebebasan (dk) = n – 2, diperoleh nilai t tabel sebesar 2,073. Kriteria pengujian yang digunakan adalah:

t hitung < t tabel, maka H₀ diterima dan H_a ditolak.

t hitung > t tabel, maka H₀ ditolak dan H_a diterima.

Berdasarkan hasil perhitungan, t hitung (4,7695) > t tabel (2,073). maka H₀ ditolak, artinya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara Efektivitas Program Aplikasi SI-PELANGI terhadap Pelaksanaan Program di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang.

Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui derajat keterkaitan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan dengan menggunakan rumus koefisien determinasi menurut Sugiyono (Sugiyono, 2013) yaitu:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Keterangan:

Kd = Koefisien determinasi

r² = Harga koefisien korelasi yang dikuadratkan

Sehingga diperoleh:
 $Kd = 0,713^2 \times 100\%$
 $Kd = 0,508369 \times 100\%$
 = 50,8%

Tabel 10. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.713 ^a	.508	.485	6.786
a. Predictors: (Constant), Efektivitas Program				

Sumber: Lampiran Output SPSS, 2025

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas, nilai Koefisien Determinasi (*R-Square*) pada variabel Efektivitas Program (X) dan Pelaksanaan Program (Y) adalah sebesar 50,8%, hal ini menunjukkan bahwa Efektivitas Penggunaan Aplikasi SI-PELANGI dipengaruhi oleh Pelaksanaan Program. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 49,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Temuan tersebut sejalan dengan pendapat Effendy (dalam Hikmah, 2025) yang menyatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan hubungan antara hasil yang ditetapkan dan hasil yang dicapai. Artinya, semakin selaras hasil yang diperoleh dengan tujuan yang telah direncanakan, maka semakin tinggi tingkat efektivitas suatu program. Dalam konteks penelitian ini, tingginya nilai korelasi menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan program SI-PELANGI cenderung selaras dengan tujuan efektivitas program yang telah ditetapkan.

Efektivitas Program

Dari hasil pengelolaan Kuesioner Variabel Efektivitas Program Aplikasi SI-PELANGI, terlihat bahwa untuk mengetahui seberapa baik Efektivitas Program Aplikasi SI-PELANGI di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, maka dilakukan perhitungan prosesntase sebagai berikut:

$$\frac{\text{skor total}}{\text{skor ideal}} \times 100\%$$

$$= \frac{2124}{2400} \times 100\% = 88,5\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa persentase variabel Efektivitas Program Aplikasi SI-PELANGI di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang termasuk dalam kriteria Sangat Baik dengan hasil analisis sebesar 88,5%.

Dengan demikian, berarti Efektivitas Program Aplikasi SI-PELANGI di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, sudah dapat dilaksanakan dengan baik, hal tersebut sesuai dengan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Campbell (Ariyani, dkk., 2024), yang menyatakan bahwa Efektivitas Program dapat diukur melalui beberapa aspek utama, yaitu:

- a. Keberhasilan program
- b. Keberhasilan sasaran
- c. Kepuasan terhadap program
- d. Tingkat input dan output
- e. Pencapaian tujuan menyeluruh

Tingginya capaian efektivitas program menunjukkan bahwa sebagian besar dimensi tersebut telah terpenuhi, sehingga aplikasi SI-PELANGI mampu memberikan pengaruh positif dalam mendukung pelaksanaan program rehabilitasi sosial.

Tingginya tingkat efektivitas tersebut tercermin dari capaian beberapa indikator yang memperoleh nilai sangat tinggi. Indikator dengan persentase tertinggi terdapat pada “**Peningkatan Kualitas Layanan**”, yang mencapai 90,8%. Capaian ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi SI-PELANGI memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, baik dari segi kecepatan, ketertiban administrasi, maupun kemudahan pengelolaan data, Sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Campbell (Ariyani, 2024) yaitu mengenai Pencapaian Program Menyeluruh.

Sejalan dengan hal tersebut, Campbell (Mutmainah, 2024) yang menyatakan bahwa “Pencapaian tujuan menyeluruh dapat dilihat dari sejauh mana organisasi mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.”.

Namun demikian, di balik capaian yang sangat baik tersebut, masih terdapat indikator dengan nilai relatif lebih rendah yang terdapat pada indikator “Dukungan Terhadap Sasaran Program”, dengan nilai sebesar 85,8%. Meskipun masih termasuk dalam kategori sangat baik, nilai ini menunjukkan bahwa peran aplikasi SI-PELANGI dalam mendukung ketercapaian sasaran program secara menyeluruh belum sepenuhnya optimal dibandingkan indikator lainnya.

Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui penyempurnaan fitur aplikasi agar lebih berorientasi pada sasaran program, peningkatan pendampingan dan pelatihan bagi pengguna, serta evaluasi penggunaan aplikasi secara berkala.

Pelaksanaan Program

Sementara itu, berdasarkan hasil pengolahan kuesioner variabel pelaksanaan Program Aplikasi SI-PELANGI, untuk mengetahui tingkat pelaksanaan Program Aplikasi SI-PELANGI di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dilakukan perhitungan persentase sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{skor total}}{\text{skor ideal}} \times 100\% \\ &= \frac{2053}{2400} \times 100\% = 85,54\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa persentase variabel Pelaksanaan Program pada Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang termasuk dalam kriteria Sangat Baik dengan hasil analisis sebesar 85,54%.

Capaian Pelaksanaan Program yang tergolong sangat baik tersebut sejalan dengan pendapat Ripley & Franklin (Nurleni, 2023) yang mengatakan bahwa:

Keberhasilan implementasi memiliki arti bagi pihak yang berbeda-beda. Salah satu ukurannya adalah seberapa baik tujuan itu tercapai, baik mengenai prosedur maupun dampak. Ini merupakan suatu definisi keberhasilan yang valid. Ukuran keberhasilan implementasi yang lain dinyatakan dengan aktivitas-aktivitas yang secara umum menunjukkan arah produktif walaupun arah tersebut tidak ditentukan sebelumnya. Ukuran lain yang longgar, yang juga sering kali digunakan adalah waktu yang digunakan untuk menghasilkan kemajuan. Asumsi yang dipakai bahwa semakin pendek waktu yang dilewatkan/dibutuhkan kemajuan itu semakin tinggi tingkat keberhasilan. Sebagaimana diindikasikan diatas kelancaran fungsi operasi dan tidak adanya keluhan atau konflik tentang prosedur-prosedur dianggap sebagai keberhasilan implementasi.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pada bidang rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang telah berjalan dengan baik. Hal tersebut tercermin dari capaian indikator-indikator pelaksanaan program yang menunjukkan hasil positif. Temuan ini sejalan dengan teori Pelaksanaan Program yang dikemukakan oleh Sutrisno (Arlan, 2019), yang menyatakan bahwa efektivitas pelaksanaan program dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu:

- a. Pemahaman Program
- b. Tepat Sasaran
- c. Tepat Waktu
- d. Tercapainya Tujuan
- e. Perubahan Nyata

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat dipahami bahwa terdapat indikator yang sangat mendukung pelaksanaan program pada bidang rehabilitasi sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, yaitu indikator “**Pemahaman Cara Penggunaan**”, yang memperoleh nilai sebesar 90,0% dari responden. Tingginya capaian pada indikator ini menunjukkan bahwa pegawai pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumedang telah memahami prosedur serta mekanisme penggunaan aplikasi SI-PELANGI dengan baik, sehingga aplikasi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung pelaksanaan program.

Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Edward III (Ashary, 2013) yang menyatakan bahwa “salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program adalah pemahaman pelaksana (implementor) terhadap kebijakan atau program yang dijalankan. Pemahaman yang baik akan mempermudah pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata.”

Dengan adanya pemahaman yang baik, pelaksana program dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan.

Hal ini juga sesuai dengan pandangan Van Meter dan Van Horn dalam Pratama (2019) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Dengan demikian, penggunaan aplikasi SI-PELANGI merupakan bagian dari tindakan implementasi kebijakan yang bertujuan untuk mendukung tercapainya tujuan Program Rehabilitasi Sosial.

Pemahaman pelaksana terhadap program juga sejalan dengan pendapat Sutrisno (Dolly, 2024) yang menyatakan bahwa pemahaman program, yaitu untuk mengetahui sejauh mana masyarakat dapat memahami program. Melalui program maka segala bentuk rencanakan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioprasionalkan. Dengan memperhatikan kelompok sasaran maka suatu program dapat dikatakan efektif atau tidak.

Namun demikian, di balik capaian Pelaksanaan Program yang sangat baik tersebut, masih terdapat indikator dengan nilai relatif lebih rendah dibandingkan indikator lainnya. Indikator tersebut terdapat pada indikator "Kecepatan Penyelesaian Layanan", yang memperoleh persentase sebesar 83,3%. Capaian yang relatif lebih rendah pada indikator kecepatan penyelesaian layanan mengindikasikan bahwa penggunaan aplikasi SI-PELANGI dalam mendukung ketepatan waktu pelayanan masih menghadapi beberapa kendala.

Hal ini didukung oleh pendapat Handoko (Syarif, 2020), efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, menurut Siagian (Pasuhuk, dkk., 2021), efektivitas adalah penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Kedua pendapat tersebut menegaskan bahwa ketepatan waktu merupakan unsur penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan suatu program.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang telah berjalan dengan sangat baik. Namun demikian, masih diperlukan upaya perbaikan terutama pada aspek ketepatan waktu penyelesaian layanan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis dari hasil penelitian mengenai Efektivitas Program Aplikasi SI-PELANGI Terhadap Pelaksanaan Program pada Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Efektivitas Program Aplikasi SI-PELANGI pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumedang termasuk kriteria sangat baik dengan presentase mencapai 88,5%. Adapun skor tertinggi ada pada dimensi Pencapaian Tujuan Menyeluruh indikator "Peningkatan Kualitas Layanan" dengan presentase sebesar 90,8%. Sedangkan skor terendah ada pada dimensi Pencapaian tujuan menyeluruh juga pada indikator "Dukungan Terhadap Sasaran Program" dengan prosentase sebesar 85,8%.
2. Tingkat Pelaksanaan Program pada Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sumedang termasuk kriteria sangat baik dengan prosentase mencapai 85,54%. Adapun skor tertinggi ada pada dimensi Tepat Waktu indikator "Pemahaman Cara Penggunaan" dengan prosentase sebesar 90,0%. Sedangkan skor terendah dimensi Tepat Waktu indikator "Kecepatan Penyelesaian Layanan" dengan prosentase sebesar 83,3%.
3. Terdapat Hubungan yang positif dan signifikan antara Efektivitas Program Aplikasi SI-PELANGI dengan Variabel Pelaksanaan Program pada Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang yang berada pada tingkat korelasi yang kuat dengan nilai koefisien korelasi 0,713.
4. Terdapat Pengaruh Efektivitas Program Aplikasi SI-PELANGI Terhadap Pelaksanaan Program pada Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang dengan nilai koefisien determinasi 0,508 atau jika dipersentasekan sebesar 50,8%. Ini menunjukkan bahwa Efektivitas Program Aplikasi SI-PELANGI berpengaruh Sedang terhadap Pelaksanaan Program pada Bidang Rehabilitasi Sosial di Dinas Sosial Kabupaten Sumedang. Adapun sisanya sebanyak 49,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

REFERENCES

- Ariyani, N., Arlan, A. S. B., & Handayani, R. (2024). Efektivitas Penggunaan Aplikasi E-Kinerja Pegawai Pada Kantor Camat Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1(3), 622-633. Diakses pada 21 November, 2025, dari <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/JMSDM/article/view/827>
- Arlan, A. S. B. (2019). Efektivitas Program Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin. *Al Iidara Balad*, 1(2), 37-44. Diakses pada 21 November, 2025, dari <https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/aliidarabalad/article/view/1>
- Ashary, R. (2013) *Implementasi Kebijakan Parkir Kota Surabaya (Study pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya terhadap Pelaksanaan Tempat Parkir Di Jalan Blauran)*. Universitas Brawijaya.
- Dolly, F. I., Sofa, A., & Sakila, B. (2024). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Pemerataan Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Bungo Taman Agung Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. *Jurnal STIA Bengkulu: Committe to Administration for Education Quality*, 10(2), 127-136.
- Hikmah, N., Husaini, M., & Herlinda, S. A. A. (2025). Efektivitas Program Aplikasi Laporan Sebagai Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Masyarakat Pada Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(1), 150-162.
- Kurniasih, D., & Rusfiana, Y. (2021). *Teknik analisa*. Bandung: CV. Alfabeta
- Mutmainah, F., Husaini, M., & Sugiannor, S. (2024). Efektivitas Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Batu Merah dan Desa Lajar). *Jurnal pelayanan publik*, 1(1), 11-19.
- Nurleni, M (2023) *Implementasi Kebijakan Larangan Pengemis Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak*. Universitas Tanjungpura.
- Pasuhuk, D. D., Kaawoan, J., & Pangemanan, S. E. (2021). Efektivitas penggunaan dana desa dalam meningkatkan sarana dan prasarana air bersih di desa Towuntu Barat kecamatan Pasan kabupaten Minahasa Tenggara. *GOVERNANCE*, 1(2).
- Pratama R. N, (2019) *Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Dinas Kominfo Pemerintahan Kabupaten Majalengka*. Universitas Pasundan
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Syarif, L. B. (2020). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Semarang. *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang*, 2(2), 132-150.

DAMPAK SOSIALISASI KEBIJAKAN PROGRAM KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH TERHADAP PEMAHAMAN PENGURUS KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH DI KABUPATEN SUMEDANG (STUDI KASUS DI KECAMATAN SUMEDANG UTARA)

M.Hifdzo Dzirkulah¹, Barokatul Wasliyyah², Dhestya Sabrina G³, Hanum Aisyka B⁴, Aldi Maulana⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Sebelas April

Email*³: dhestyasabrina@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tantangan yang dihadapi oleh pengurus Koperasi Merah Putih di Sumedang Utara dalam memahami kebijakan program. Dengan tujuan mengevaluasi efektivitas sosialisasi kebijakan, penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed-method) dengan desain Convergent Parallel. Studi ini melibatkan survei sensus terhadap 24 pengurus koperasi dan wawancara mendalam. Hasil kuantitatif menunjukkan koefisien korelasi yang kuat (0.763) antara sosialisasi dan pemahaman, meskipun tidak signifikan secara statistik karena ukuran populasi yang terbatas. Lebih penting lagi, temuan kualitatif mengungkap akar masalahnya: proses sosialisasi bersifat satu arah, jarang dilakukan, dan kurang mendalam, sehingga pengurus kesulitan memahami peraturan yang kompleks. Studi ini menyimpulkan bahwa metode sosialisasi saat ini tidak memadai. Untuk benar-benar memberdayakan dewan koperasi dan memastikan kesuksesan program, pendekatan harus beralih dari penyampaian informasi pasif menjadi bimbingan interaktif dua arah yang aktif dan pembinaan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Sosialisasi Kebijakan Publik, Koperasi Merah Putih

1. PENDAHULUAN

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan inisiatif strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Koperasi dipandang sebagai wadah strategis dalam membangun kemandirian ekonomi, memperluas kesempatan usaha, serta memperkuat interaksi sosial berbasis gotong royong.

Sebagai landasan operasional, kebijakan ini didorong oleh Keputusan Presiden Prabowo Subianto berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selaras dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Di Kabupaten Sumedang, pelaksanaan program ini berada di bawah tanggung jawab Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (DISKOPERINDAG). DISKOPERINDAG memiliki mandat untuk melakukan pembinaan, pendampingan, serta memastikan bahwa koperasi desa/kelurahan dibentuk dan dikelola sesuai ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Dalam pelaksanaannya, komunikasi publik menjadi kunci utama. Sebagaimana dijelaskan oleh Luoma-aho dan Canel (2020), strategi komunikasi di sektor publik sangat krusial untuk memperjelas peran pelaksana program agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.

Dampak sosialisasi kebijakan terhadap Pemahaman Pengurus berdasarkan Praktik Penelitian Administrasi (PPA) yang dilakukan di DISKOPERINDAG Kabupaten Sumedang, khususnya di Kecamatan Sumedang Utara, transisi kebijakan ini membawa dampak nyata yang dapat dianalisis melalui dua pendekatan.

Analisis Kuantitatif dan Metodologis Menggunakan pendekatan mixed-methods, penelitian ini menemukan bahwa metode sosialisasi memiliki korelasi sebesar 0,723 terhadap pemahaman pengurus. Hal ini sejalan dengan pandangan Hakim Nasution et al. (2024) yang menyatakan bahwa penggunaan metode penelitian kombinasi sangat efektif dalam membedah fenomena sosial yang kompleks di lapangan. Meskipun pengaruhnya mencapai 66,1%, dampak secara statistik belum signifikan sepenuhnya karena kendala teknis dan populasi yang terbatas.

Analisis Kualitatif dan tantangan struktural dampak sosiologis dari kebijakan ini menunjukkan adanya "kekerasan struktural" terselubung dalam proses percepatan koperasi. Frastiwi mengemukakan bahwa ambisi percepatan seringkali mengabaikan kesiapan kapasitas lokal (Frastiwi, 2025). Hal ini terbukti di Sumedang Utara, di mana sosialisasi yang bersifat satu arah membuat pengurus kesulitan memahami aturan teknis. Rendahnya kompetensi wirakoperasi juga menjadi faktor penghambat, karena menurut Fahmi (2025), kualitas individu pengurus adalah pilar utama dalam menentukan kinerja koperasi pasca-kebijakan diimplementasikan.

Pendekatan Edukasi dalam Sosialisasi Untuk meminimalisir dampak negatif berupa ketidaktahuan pengurus, diperlukan model sosialisasi kebijakan yang lebih humanis. Herlina et al. (2025) menekankan

pentingnya integrasi antara pedagogi dan andragogi (pendidikan orang dewasa) dalam pemberdayaan komunitas (Herlina et al., 2025a). Artinya, sosialisasi kebijakan Presiden tidak boleh hanya sekadar ceramah, melainkan harus berupa pendampingan interaktif yang menyesuaikan dengan karakteristik pengurus di lapangan.

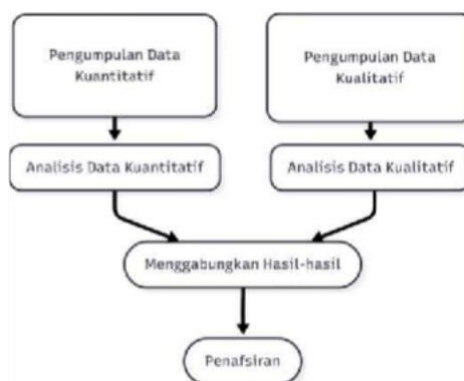
2. METODE

Penelitian ini menggunakan teori *Mixed Methods Pararel Konvergen* yang dikembangkan oleh Creswell dan Clark (2018: 290). Desain paralel konvergen terjadi ketika peneliti menggunakan timing serempak untuk mengimplementasikan *strand-strand* kuantitatif dan kualitatif selama fase yang sama dalam proses penelitian tersebut, memprioritaskan metode-metode secara seimbang, dan mempertahankan *strand-strand* tersebut tetap terpisah selama analisis dan kemudian mencampur hasil-hasilnya selama tahap penafsiran akhir.

Pendekatan ini dipilih karena kompleksitas masalah pemahaman kebijakan tidak cukup jika hanya diukur dengan angka, tetapi memerlukan pendalaman naratif untuk mengungkap "mengapa" dan "bagaimana" proses tersebut terjadi di lapangan.

Lokus penelitian berada di Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, yang menjadi salah satu wilayah percontohan implementasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Partisipan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori. Untuk data kuantitatif, teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh (sensus) karena populasi pengurus koperasi relatif kecil, yaitu seluruh pengurus aktif yang berjumlah 24 orang. Teknik ini memastikan bahwa setiap suara pengurus terwakili tanpa terkecuali, sehingga hasil survei benar-benar mencerminkan kondisi populasi (Hakim Nasution et al., 2024). Sedangkan untuk data kualitatif, informan dipilih secara purposive, meliputi Kepala Bidang Koperasi DISKOPERINDAG Kabupaten Sumedang dan Ketua Koperasi di lokasi penelitian yang dianggap memiliki pengetahuan mendalam tentang program tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: kuesioner tertutup untuk mengukur variabel sosialisasi dan pemahaman, wawancara mendalam (in-depth interview) untuk menggali hambatan di lapangan, serta observasi partisipatif. Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan uji Rank Spearman dengan bantuan SPSS 26 untuk melihat kekuatan hubungan antarvariabel. Sementara itu, data kualitatif dianalisis menggunakan software NVivo 12 Plus. Penggunaan NVivo bertujuan untuk menjaga validitas data melalui visualisasi word tree dan project map, sehingga tema-tema krusial mengenai kendala sosialisasi dapat terpetakan secara objektif dan transparan (Da Silva et al., 2025). Hasil dari kedua metode ini kemudian diintegrasikan dalam satu pembahasan utuh (triangulasi) untuk menarik kesimpulan akhir.



Gambar 1. Desain Pararel Konvergen

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan temuan empiris mengenai efektivitas sosialisasi Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kecamatan Sumedang Utara. Paparan dibagi menjadi tiga segmen utama: analisis statistik untuk melihat tren data, analisis kualitatif untuk menyelami realitas lapangan, dan diskusi integratif yang memadukan keduanya.

Diskusi Integratif

Menjembatani kesenjangan kapasitas mengintegrasikan temuan kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa akar masalah rendahnya pemahaman pengurus bukan terletak pada materi kebijakannya, melainkan pada metode penyampaian. Korelasi kuat (0,763) membuktikan bahwa pengurus memiliki antusiasme dan daya tangkap yang baik, namun potensi ini terhambat oleh frekuensi sosialisasi yang sangat jarang dan metode yang tidak interaktif. Program Koperasi Merah Putih di Sumedang Utara terjebak pada apa yang disebut sebagai administrative compliance trap, di mana fokus pelaksana kebijakan hanya pada target jumlah koperasi yang berdiri, namun abai terhadap kualitas manusianya (Chensie Tendean et al., 2023). Sosialisasi kebijakan yang efektif seharusnya bertransformasi menjadi "pendampingan klinis". Pengurus koperasi desa membutuhkan kehadiran mentor yang siap diajak berdiskusi saat mereka menghadapi kendala nyata, bukan sekadar instruktur yang datang setahun sekali. Jika pola sosialisasi ini tidak diubah dari model instruktif menjadi model konsultatif-partisipatif, maka tujuan besar untuk menciptakan kemandirian ekonomi desa melalui Koperasi Merah Putih akan sulit terwujud secara optimal (Fahmi, 2025).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas sosialisasi kebijakan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kecamatan Sumedang Utara masih menghadapi tantangan fundamental pada aspek metode penyampaian. Secara statistik, ditemukan hubungan yang sangat kuat (koefisien 0,763) antara intensitas sosialisasi kebijakan dengan tingkat pemahaman, yang mengindikasikan bahwa materi kebijakan yang dirancang pemerintah sebenarnya memiliki relevansi tinggi terhadap kebutuhan pengurus. Namun, ketiadaan signifikansi statistik yang disertai temuan kualitatif menyingkap realitas bahwa sosialisasi yang berjalan selama ini cenderung terjebak pada formalitas administratif semata, belum menyentuh esensi pemberdayaan.

Secara humanis, penelitian ini menemukan bahwa para pengurus koperasi mengalami disorientasi peran; mereka diberikan mandat besar untuk menjadi motor ekonomi desa, namun sering kali dibiarkan "berjalan sendiri" memahami regulasi yang rumit tanpa panduan praktis. Metode komunikasi satu arah (top-down) yang diterapkan pemerintah gagal membangun kepercayaan diri dan kompetensi teknis pengurus yang mayoritas adalah warga desa dengan latar belakang pendidikan beragam, (Herlina et al., 2025) Akibatnya, semangat pengabdian pengurus perlahan luntur karena ketidakmampuan menerjemahkan aturan menjadi aksi bisnis yang nyata.

Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya transformasi mendasar dalam pola pembinaan. Pemerintah Kabupaten Sumedang harus beralih dari pendekatan "sosialisasi massal" yang bersifat seremonial menuju model "pendampingan klinis berkelanjutan" (continuous mentoring). Pengurus koperasi membutuhkan kehadiran pendamping yang siap berdialog dan memberikan solusi teknis di lapangan, bukan sekadar instruktur yang membacakan pasal-pasal aturan (Dinar Aulia, 2021). Hanya dengan pendekatan yang lebih memanusiakan dan partisipatif inilah, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat bergeser dari sekadar sukses administrasi menjadi sukses substansi ekonomi.

REFERENCES

- Awan, N. A., & Abbas, M. (2024). Organizational socialization strategies and newcomers identity development: A social identity perspective. *Human Resource Development Quarterly*, 1-19.
- Canel, M. J., & Luoma-aho. (2020). Public sector communicatin: Closing gaps between citizen and public organizations. *Public Relations Review*, 46(1), 1-10.
- Chensie Tendean, F., Tamowangkay, V., & Wilar, W. (2023). *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Yang Terdampak Pandemi Covid-19 Di Desa Kakenturan Barat Kecamatan*.
- Creswill & Clark. (2018). *Mendesain dan melaksanakan mixed methods research*.
- Da Silva, J., Da Costa, F., Melianto, D., & Suparta, M. (2025). *Implementasi Metode Analisis Menggunakan Nvivo Dalam Penelitian Kualitatif*.
- Denhardt, R. B., & Denhardt, J. V. (2015). The new public service revisited. *Public Administrasi Review*, 75(5), 664-672.
- Dinar Aulia, T. (2021). *Pengaruh Pelatihan Terhadap Kompetensi Pengurus Koperasi Di Jawa Timur Dengan E-Learning Sijawara Sebagai Variabel Intervening Tiara Dinar*

- Fahmi, I. (2025). Urgensi Kualitas Wirakoperasi dan Kompetensi Pengurus terhadap Kinerja Koperasi. *J-COOP*, 285(2).
- Frastiwi, Y. S. (2025b). Kekerasan Struktural dalam proses Percepatan Koperasi Merah Putih. *TheJournalish: Social and Government*, 6(4). <https://doi.org/10.55314/tsg.v6i4.1042>
- Hakim Nasution, F., Syahrani Jailani, M., & Junaidi, R. (2024). Kombinasi (Mixed-Methods) Dalam Praktis Penelitian Ilmiah. *Journal Genta Mulia*, 15(2), 251–256.
- Herlina, L., Rosyanafi, R. J., & Purwoko, B. (2025a). Integrasi Pedagogi dan Andragogi dalam Pemberdayaan Komunitas: Studi Kasus pada Program Pendampingan Literasi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Masyarakat di Desa Senaru, Kabupaten Lombok Utara. *Transformasi: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Non Formal Informal*, 11(2), 322–330. <https://doi.org/10.33394/jtni.v11i2.16027>
- Khabibullah, M., & Malik Imam Sholahuddin, G. (2024). Tahapan dan Langkah-Langkah Penerapan Mixed Method Research (MMR) dalam Penelitian Pendidikan. In *QOMARUNA Journal of Multidisciplinary Studies* (Vol. 2024, Number 01).
- Kim, T. Y., Cable, D M., & Kim, S. P. (2005). socialization tactics, employee proactivity, and pearson organization fit. *Journal of applied psychology*, 90(2), 232-241.
- Soares, A., Rodrigues, N., & Rebelo, T. (2025). Unwrapping the influence of proactive personality on job saatisfaction during organizational socialization: Examining the intervening effects oof newcomers' perceptions of person-enviroonment fit. *Psychol Stud*, 70(1): 1336-147.
- Song, Z., Chon, K., Ding, G., & Gu, C. (2015). Impact of organizational socialization tactics on newcomer job satisfactioon and engagement: Core self-evaluation as moderators. *International Journal of Hospitality Management*, 180-189.
- Suleman, U., Rahman, U., & Alauddin Makassar, U. (2025). *Penelitian Korelasional Dan Kausalitas: Pengertian, Proses Dasar, Ragam, Dan Desain*.
- Van Maane, J., & Schein, E. H. (1997). Toward a theory of organizational socialization. *Research in organizational behavior*, 1, 209-264.

STRATEGI KOMUNIKASI PUBLIK KANTOR KECAMATAN SUMEDANG SELATAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS LINGKUNGAN DI KECAMATAN SUMEDANG SELATAN

Elfira Nuraeni¹, M. Sandi Mulyadi², Khairiyah Artika³, Enang Suryana⁴, Widya Kosasih⁵,
Irsan Abdillah Permana^{*6}

Universitas Sebelas Apil

Email ^{*6}: irsanabdillah10@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan sampah di Kecamatan Sumedang Selatan masih menjadi persoalan karena kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaannya belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa program pengelolaan sampah yang ada belum sepenuhnya didukung oleh komunikasi publik yang efektif. Oleh sebab itu, Kantor Kecamatan Sumedang Selatan memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat melalui strategi komunikasi yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana strategi komunikasi publik yang diterapkan, mengetahui hambatan yang dihadapi, serta mengkaji upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang dilaksanakan pada bulan November hingga Desember 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan melalui sosialisasi langsung, pemanfaatan media komunikasi, serta pelibatan perangkat desa dan tokoh masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemui kendala, seperti keterbatasan teknis, perbedaan pemahaman bahasa, dan sikap masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran RT/RW, penggunaan bahasa yang lebih mudah dipahami, serta pelaksanaan edukasi secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Komunikasi Publik, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Sampah

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah hingga saat ini masih menjadi persoalan lingkungan yang cukup serius, baik di tingkat nasional maupun daerah. Permasalahan sampah tidak hanya menyebabkan pencemaran lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat, menurunkan kualitas hidup, serta meningkatkan risiko terjadinya bencana lingkungan seperti banjir. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, terutama di tingkat lokal.

Di Indonesia, permasalahan sampah menunjukkan tingkat urgensi yang tinggi. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023 mencatat bahwa timbulan sampah nasional mencapai sekitar 70 juta ton per tahun, dengan dominasi sampah organik dan plastik. Kondisi tersebut mendorong pemerintah menetapkan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 yang menekankan target pengurangan dan pengelolaan sampah. Kebijakan ini menegaskan bahwa peran masyarakat sebagai penghasil sampah di tingkat sumber menjadi faktor kunci dalam keberhasilan pengelolaan sampah.

Menindaklanjuti kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menetapkan sejumlah regulasi daerah yang mengatur pengelolaan sampah, antara lain Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019, serta Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 yang mengatur pengelolaan sampah perdesaan melalui Wasades. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sumedang juga meluncurkan Gerakan Jumat Bersih (JUMSIH) sebagai upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan, termasuk di wilayah Kecamatan Sumedang Selatan.

**Tabel 1. Jadwal Gerakan Jumat Bersih di Kecamatan Sumedang Selatan
Kabupaten Sumedang**

No	Hari/Tanggal	Desa/Kelurahan (Yang Melaksanakan)
1	Jum'at, 7 November 2025	1. Desa Gunasari 2. Desa Sukagalih 3. Desa Margamekar 4. Desa Ciherang
2	Jum'at, 21 November 2025	1. Desa Citengah 2. Kelurahan Kota Kulon 3. Desa Sukagalih 4. Kelurahan Pasanggrahan Baru 5. Kelurahan Cipameungpeuk 6. Desa GunaSari

No	Hari/Tanggal	Desa/Kelurahan (Yang Melaksanakan)
		7. Desa Margalaksana 8. Desa Suka Jaya
3	Jum'at, 28 November 2025	1. Desa Sukajaya 2. Desa Sukagalih 3. Desa Margamekar 4. Desa Citengah 5. Kelurahan Kota Kulon
4	Jum'at, 28 November 2025	1. Desa Sukagalih 2. Desa Gunasari 3. Desa Citengah 4. Desa Margamekar

Namun dalam pelaksanaannya, kebijakan dan program tersebut di Kecamatan Sumedang Selatan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Berdasarkan laporan kegiatan JUMSIH pada periode November hingga Desember 2025, tingkat keterlibatan desa dan kelurahan masih belum merata. Beberapa wilayah tercatat aktif mengikuti kegiatan, sementara wilayah lainnya menunjukkan tingkat partisipasi yang relatif rendah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa program yang telah dirancang belum sepenuhnya mampu membangun keterlibatan masyarakat secara konsisten.

Strategi ini disusun untuk menjawab berbagai persoalan serta hambatan dalam pengelolaan sampah dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang beragam jenis limbah dan sampah, serta konsekuensinya bagi lingkungan. Akan tetapi berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti, bahwa di ketahui pihak Kantor Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang masih terdapat ke dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi pengelolaan sampah berbasis Lingkungan ialah sebagai berikut:

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah, Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah masih menjadi persoalan, yang tercermin dari perilaku membuang sampah sembarangan, termasuk ke sungai di wilayah Sumedang Selatan. Sebagian warga masih memandang pengelolaan sampah sebagai tanggung jawab pemerintah,

- a. sehingga keterlibatan masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah relatif rendah. Kondisi ini menyebabkan program pemerintah cenderung bersifat sementara dan belum mampu mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan.
- b. Kebiasaan membuang sampah tercampur menjadi satu. Praktik pembuangan sampah tanpa pemilahan masih ditemukan pada sebagian masyarakat di Kecamatan Sumedang Selatan, meskipun kebijakan pengelolaan sampah telah disosialisasikan dan di dukasikan. Kebiasaan ini dipicu oleh faktor kepraktisan, keterbatasan sarana pemilahan, serta rendahnya pemahaman mengenai pentingnya pemilahan sampah. Dampaknya, pengolahan sampah organik dan non-organik tidak berjalan optimal, penerapan prinsip 3R terhambat, dan beban TPS serta TPA semakin meningkat. Selain itu, sampah tercampur mempercepat terjadinya pencemaran lingkungan dan menimbulkan risiko kesehatan.
- c. Sikap penolakan dan rasa sensitif masyarakat terhadap kegiatan edukasi pengelolaan sampah masih menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Sebagian warga merasa enggan melakukan pemilahan sampah atau tidak nyaman ketika diberikan penjelasan mengenai prinsip 3R. Sikap ini umumnya dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman terhadap tujuan program, pengalaman sebelumnya yang kurang menyenangkan, serta anggapan bahwa pengelolaan sampah akan menambah beban dalam aktivitas sehari-hari.

Kondisi tersebut menegaskan pentingnya peran Kantor Kecamatan Sumedang Selatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Partisipasi masyarakat tidak terbentuk secara otomatis, melainkan perlu dibangun melalui strategi komunikasi publik yang terencana, persuasif, dan berkelanjutan. Melalui komunikasi publik yang efektif, pemerintah dapat meningkatkan pemahaman masyarakat, menumbuhkan kesadaran, serta mendorong perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai strategi komunikasi publik kantor kecamatan sumedang selatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Pengertian kualitatif menurut Sugiyono (2020:2) sebagai berikut “Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”

Lokasi penelitian ditetapkan di kantor kecamatan sumedang selatan Kabupaten Sumedang. Penentuan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kantor kecamatan sumedang selatan merupakan instansi pelaksana program pengelolaan sampah berbasis lingkungan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Wawancara dilakukan secara purposive terhadap informan kunci, antara lain Camat, Kepala seksi pemerintahan umum, Kepala sub bagian program dan keuangan, dan kepala sub bagian umum. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen resmi, laporan kegiatan, peraturan perundang-undangan, tabel, serta laporan pelaksanaan kegiatan.

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Unsur	Jumlah (Orang)
1.	Camat	1
2.	Kepala Seksi Pemerintahan Umum	1
3.	Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan	1
4.	Kepala Sub Bagian Umum	1
Jumlah		4

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Kecamatan Sumedang Selatan menerapkan pendekatan komunikasi publik yang terintegrasi guna mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan. Strategi tersebut dianalisis melalui empat aspek utama, yaitu pengenalan khalayak, perancangan pesan, pemilihan metode komunikasi, serta pemanfaatan media. Berdasarkan wawancara dan observasi lapangan, pemetaan khalayak di Kecamatan Sumedang Selatan dilakukan dengan mempertimbangkan tiga karakteristik utama, yakni usia, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi. Dari sisi usia, ditemukan adanya perbedaan pola partisipasi. Kelompok usia lanjut (45 tahun ke atas) cenderung menunjukkan kepedulian dan kedisiplinan yang lebih tinggi dalam praktik pengelolaan sampah, meskipun relatif lebih lambat dalam memahami materi teknis. Sebaliknya, kelompok usia muda (di bawah 40 tahun) lebih cepat menyerap informasi konseptual, namun partisipasi langsung di lapangan masih tergolong rendah akibat kesibukan aktivitas sehari-hari. Berdasarkan tingkat pendidikan, kemampuan memahami informasi teknis—seperti pemilahan sampah organik dan anorganik dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan. Namun demikian, temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang lebih tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan kesadaran dan keterlibatan praktis. Masyarakat dengan pendidikan menengah justru lebih aktif berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan lingkungan seperti Jumat Bersih (Jumsih). Sementara itu, kondisi ekonomi menjadi faktor penghambat struktural bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Fokus utama pada pemenuhan kebutuhan dasar menyebabkan isu lingkungan kurang menjadi prioritas. Selain itu, keterbatasan sumber daya untuk menyediakan fasilitas pemilahan sampah di tingkat rumah tangga turut menghambat pelaksanaan program.

Efektivitas pesan sangat dipengaruhi oleh tingkat kemudahan pemahaman dan daya tarik visual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung kurang responsif terhadap pesan yang bersifat teoritis. Sebaliknya, pesan yang disampaikan melalui praktik langsung dan contoh konkret di lapangan terbukti lebih efektif dalam mendorong perubahan perilaku dibandingkan media cetak seperti pamflet atau brosur. Selain itu, penggunaan pesan persuasif-edukatif yang menampilkan visualisasi dampak nyata dari permasalahan sampah seperti tayangan banjir atau penyebaran penyakit lebih mampu menarik perhatian dan membangkitkan empati masyarakat dibandingkan sekadar imbauan normatif.

Kecamatan Sumedang Selatan menerapkan kombinasi metode komunikasi formal dan informal. Komunikasi antarpribadi dan kelompok dilakukan melalui rapat minggon serta pertemuan informal, seperti kegiatan “ngariung” pada sore hari. Metode ini memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah yang mendorong dialog serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah. Selain itu,

diterapkan pula pendekatan komunikasi berjenjang, dimulai dari tingkat kecamatan, kemudian ke desa atau kelurahan, hingga ke tingkat RT dan RW. Meskipun standar operasional prosedur (SOP) teknis belum sepenuhnya tersusun secara rinci, keberadaan Surat Edaran (SE) Bupati dan instruksi berjenjang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan strategi di lapangan.

Pemilihan media komunikasi disesuaikan dengan pola konsumsi informasi masyarakat. Media sosial, khususnya Instagram dan WhatsApp, dimanfaatkan secara optimal. Instagram digunakan untuk menjangkau kelompok usia muda melalui konten visual yang menarik, sementara grup WhatsApp menjadi sarana koordinasi yang paling efektif dalam penyebaran informasi cepat kepada perangkat desa serta ketua RT dan RW. Selain media digital, media luar ruang juga dimanfaatkan, seperti penggunaan proyektor atau papan informasi di kantor kecamatan untuk menampilkan data dan dokumentasi kegiatan. Hal ini berfungsi sebagai bentuk transparansi sekaligus sarana motivasi bagi masyarakat yang berkunjung. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan media sosial tidak dapat berdiri sendiri. Efektivitasnya sangat bergantung pada keterkaitan dengan kegiatan nyata di lapangan agar pesan yang disampaikan secara digital dapat terinternalisasi dalam perilaku sehari-hari masyarakat.

Secara umum, strategi komunikasi publik yang diterapkan bersifat adaptif dan persuasif. Tantangan utama terletak pada penyelarasan antara pemahaman konseptual masyarakat usia muda dengan tingkat keterlibatan praktis masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam konteks Kecamatan Sumedang Selatan, strategi yang paling efektif adalah komunikasi berbasis aksi (*action-based communication*), di mana proses edukasi tidak hanya dilakukan melalui penyampaian pesan verbal atau media digital, tetapi juga melalui pendampingan langsung serta keteladanan nyata dari aparatur kecamatan.

Strategi komunikasi publik yang diterapkan Kantor Kecamatan Sumedang Selatan dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan bersifat kontekstual dan menyesuaikan karakteristik masyarakat. Variasi usia, tingkat pendidikan, dan kondisi ekonomi memengaruhi pemahaman serta keterlibatan masyarakat. Kelompok usia lanjut relatif lebih konsisten dalam kegiatan kebersihan meskipun membutuhkan pendekatan yang lebih sederhana, sedangkan kelompok usia muda lebih cepat memahami konsep namun belum optimal dalam pelaksanaan. Tingkat pendidikan tidak secara langsung menentukan partisipasi, karena keterlibatan praktis lebih dipengaruhi oleh kebiasaan dan pengalaman lapangan. Sementara itu, keterbatasan ekonomi menjadi faktor penghambat utama, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang cenderung memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar dibandingkan isu lingkungan.

Dari aspek penyampaian pesan, pendekatan yang menekankan praktik langsung dan contoh konkret terbukti lebih efektif dibandingkan komunikasi yang bersifat teoritis. Kegiatan demonstratif dan pendampingan di lapangan mampu meningkatkan pemahaman sekaligus kesadaran masyarakat terhadap dampak pengelolaan sampah. Metode komunikasi yang digunakan mengombinasikan pendekatan formal dan informal melalui pertemuan rutin serta interaksi sosial di tingkat komunitas, sehingga mendorong terbangunnya komunikasi dua arah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

Pemilihan media komunikasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan masyarakat. Media sosial dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran informasi dan koordinasi, sedangkan media luar ruang berfungsi sebagai media transparansi dan penguatan pesan. Hasil penelitian menegaskan bahwa efektivitas strategi komunikasi publik sangat bergantung pada keterpaduan antara penyampaian pesan melalui media dan implementasi nyata di lapangan. Oleh karena itu, komunikasi berbasis tindakan menjadi strategi paling efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah berbasis lingkungan di Kecamatan Sumedang Selatan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi publik yang dilakukan Kantor Kecamatan Sumedang Selatan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pengelolaan sampah berbasis lingkungan sudah cukup efektif, terutama karena pesan disampaikan lewat praktik langsung, komunikasi tatap muka, serta didukung media sosial. Strategi ini dinilai berhasil karena mampu meningkatkan pemahaman warga dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kebersihan maupun pengelolaan sampah. Meski begitu, efektivitasnya belum maksimal dan belum merata, sebab partisipasi masyarakat masih berbeda-beda di setiap wilayah dan belum berjalan konsisten dalam jangka panjang.

Peneliti juga menegaskan bahwa hambatan yang paling menonjol adalah hambatan perilaku, karena berkaitan dengan kebiasaan lama masyarakat yang sulit diubah serta masih rendahnya kepercayaan dan kepedulian sebagian warga terhadap program pemerintah. Kondisi ini membuat partisipasi masyarakat sering hanya muncul sementara, lalu kembali ke kebiasaan sebelumnya meskipun sosialisasi sudah dilakukan. Selain itu, hambatan teknis dan semantik juga turut memengaruhi, seperti keterbatasan akses media sosial pada lansia

dan masyarakat ekonomi rendah serta penggunaan bahasa yang belum selalu mudah dipahami semua kelompok. Dengan demikian, strategi komunikasi publik dapat dikatakan efektif dalam pelaksanaannya, namun masih perlu diperkuat melalui komunikasi yang lebih konsisten, penyusunan SOP formal yang jelas, dan pendekatan persuasif yang dilakukan secara berkelanjutan agar perubahan perilaku masyarakat benar-benar terbentuk dan dapat bertahan dalam jangka panjang.

Untuk memperkuat strategi komunikasi publik, Kantor Kecamatan Sumedang Selatan perlu memiliki standar operasional prosedur (SOP) komunikasi yang jelas dan tertulis agar pelaksanaan sosialisasi lebih terarah dan konsisten. Penyampaian informasi perlu disesuaikan dengan karakteristik masyarakat, baik melalui media digital yang menarik bagi kalangan muda maupun pendekatan langsung dengan bahasa sederhana bagi lansia dan masyarakat berpendidikan rendah. Penggunaan media visual serta praktik langsung pengelolaan sampah perlu ditingkatkan, termasuk pengembangan edukasi berbasis sekolah guna membentuk kebiasaan peduli lingkungan sejak dini.

Dalam mengatasi kendala teknis, peran RT/RW perlu dioptimalkan sebagai penghubung informasi kepada masyarakat, didukung dengan peningkatan kapasitas komunikasi mereka. Penyebaran informasi juga dapat diperkuat melalui papan informasi di lokasi strategis dan konten media sosial yang rutin serta mudah dipahami. Selain itu, penyediaan sarana pendukung seperti tempat sampah terpilah, pengaturan waktu sosialisasi yang fleksibel, serta kesiapan petugas pengganti perlu diperhatikan agar kegiatan berjalan optimal.

Petugas kecamatan perlu dibekali pelatihan komunikasi yang menekankan penggunaan bahasa yang sederhana, santun, dan sesuai budaya lokal. Penyediaan panduan komunikasi praktis, penggunaan bahasa Sunda yang mudah dipahami, serta pemberian ruang umpan balik bagi masyarakat menjadi langkah penting untuk meningkatkan penerimaan pesan. Pendekatan yang humanis dan menghargai masyarakat perlu terus diterapkan agar komunikasi berlangsung lebih efektif.

Upaya perubahan perilaku masyarakat perlu dilakukan melalui sosialisasi yang berkelanjutan, pemberian contoh langsung oleh aparatur, pelibatan tokoh masyarakat, serta penekanan pada manfaat lingkungan dan nilai ekonomi dari pengelolaan sampah. Untuk meningkatkan partisipasi warga, pembentukan kader lingkungan di tingkat RT/RW perlu didorong, disertai pelatihan, pemantauan, dan evaluasi program secara berkala. Dokumentasi serta publikasi keberhasilan kegiatan juga penting sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi masyarakat.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas berbagai media komunikasi terhadap kelompok masyarakat tertentu, menganalisis manfaat ekonomi pengelolaan sampah, serta melakukan studi komparatif dan jangka panjang guna menilai keberlanjutan perubahan perilaku masyarakat.

REFERENCES

- Arifin, A. ((2011)). *Strategi komunikasi*. Bandung: Armico.
- Arifin, A. (2013). *Komunikasi Politik, Pradigm Teori, Aplikasi, Strategi & Komunikasi Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Cangara, H. (2017). *Perencanaan dan strategi komunikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Iriawan, B. (2018). *Pengantar administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam dimensi strategis administrasi publik: Konsep, teori, dan isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Liliwari, A. (2017). *Komunikasi antarbudaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maksudi, B. I. (2019). *Ilmu administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Marwiyah. (2020). *Administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Miles, M. B. (2014). *Qualitative data analysis*. Thousand Oaks: Sage.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Morissan. (2017). *Teori komunikasi: Pendekatan praktis*. Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, D. (2016). *Administrasi publik: Konsep dan praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Kuswara, F. F. (2023). *Komunikasi Dalam Berbagai Sudut Pandang*. Unsap Sumedang
- Creswell, J. W. ((2014)). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Thousand Oaks: Sage.

- Pasolong, H. (2012). *Teori administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, H. (2013). *Teori administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pasolong, H. (2019). *Teori administrasi publik*. Bandung: Alfabeta
- Febianti, F. (2023). *Komunikasi Dalam Berbagai Sudut Pandang*. Unsap Sumedang.
- Henry, N. (2016). *Public administration and public affairs*. New York: Routledge.
- Keban, Y. T. (2019). *Enam dimensi strategis administrasi publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Effendy, O. U. (2017). *Ilmu komunikasi: Teori dan praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Siagian, S. P. (2013). *Filsafat administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, U. (2019). *Asas-asas manajemen*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Jurnal:
- Fauziah, N. R. (2023). strategi komunikasi dalam penyampaian informasi kepada khalayak. *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1–10.
- Handayani, T. (2018). Pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 87–95.
- Henry, N. (2016). *Public administration and public affairs*. New York: Routledge.
- Kurniasari, R. (2019). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan. *Jurnal Administrasi Publik*, 45–56.
- Lestari, S. (2018). Perencanaan dan sosialisasi dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan. *Jurnal Administrasi Lingkungan*, 67–78.
- Muryani. (2016). Pengelolaan sampah berbasis lingkungan dan dampaknya terhadap pencemaran udara, tanah, dan air. *Jurnal Lingkungan Hidup*, 45–54.
- Nugroho, R. (2020). Pendekatan modern dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan dan keberlanjutan perkotaan. *Jurnal Kebijakan Lingkungan*, 89–101.
- Nurdianti, S. R. (2014). Strategi komunikasi dalam proses penyampaian informasi kepada masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1–12.
- Pratama, R. (2018). Strategi pengelolaan sampah perkotaan berbasis 3R. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 101–112.
- Purnomo, A. (2017). Pengelolaan sampah berbasis lingkungan dan partisipasi masyarakat. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 23–34.
- Revinda, E. d. (2020). *Administrasi publik*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Robbins, S. P. (2017). *Organizational behavior (17th ed.)*. Harlow: Pearson Education Limited.
- Saparuddin, & F. (2017). Model pengelolaan sampah berbasis komunitas. *Jurnal Administrasi Negara*, 211–220.
- Sidiq, M. (2024). Metode komunikasi dalam penyampaian pesan publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1–12.
- Suardana, I. W. (2018). *Komunikasi pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Sumedang., P. K. (2014). *Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah*.
- Supriadi, Y. N. (2023). *Organisasi dan administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Syawal. (2023). Strategi komunikasi dalam penyampaian informasi publik. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15–30.

- Tandawuya, A. &. (2024). Strategi komunikasi dalam penyampaian pesan kepada khalayak. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 1–15.
- Tubbs, S. L. (2017). *Human communication: Principles and contexts (13th ed.)*. New York: McGraw-Hill Education.
- Wijayanti, R. &. (2019). Community-based waste management untuk lingkungan berkelanjutan. *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, 55–66.
- Yuliani, S. (2020). Pengelolaan sampah dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 133–145.

Dokumen dokumen

Indonesia., R. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah*.

Indonesia., R. (2017). *Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah*.

Laporan minggon Bulan September-Desember 2025 Kantor Kecamatan Sumedang Selatan

Laporan JUMSIH Bulan November-Desember 2025 Kantor Sumedang Selatan

Surat Edaran Bupati Sumedang Nomor B/2255/600.1.17.3/III/2025 Tanggal 24 Maret 2025 Tentang Upaya Pengurangan dan Penanganan Sampah Di Kabupaten Sumedang

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KECAMATAN SUMEDANG UTARA KABUPATEN SUMEDANG

Citra Nur Farida¹, Ghina Kamelia Passa^{*2}, Restu Dewangga³, Sri Rahayu⁴

Universitas Sebelas April

Email ^{*2}: ghinakamelia1@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, serta mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaannya. Pentingnya transparansi sebagai pilar good governance sesuai amanat UU No. 14 Tahun 2008 menjadi latar belakang penelitian ini. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik observasi, wawancara mendalam secara purposive, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sudah berjalan namun belum optimal. Hambatan utama meliputi ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis, kurangnya kompetensi SDM di bidang digital, serta fenomena rangkap tugas (double job) oleh petugas pelaksana. Upaya yang dilakukan mencakup koordinasi rutin dan optimalisasi sarana yang ada. Kesimpulannya, diperlukan percepatan penyusunan SOP dan peningkatan kapasitas SDM agar pelayanan informasi publik lebih profesional dan transparan.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan, Keterbukaan Informasi Publik.

1. PENDAHULUAN

Pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) bersandar pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang saling terintegrasi. Hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik merupakan hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional oleh Pasal 28 F UUD 1945. Di Indonesia, mandat ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan informasi secara cepat, tepat waktu, dan berbiaya ringan. Implementasi kebijakan ini menjadi instrumen krusial untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, sekaligus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawal kebijakan pemerintah dari tingkat pusat hingga kecamatan.

Kecamatan Sumedang Utara, sebagai salah satu unit kerja perangkat daerah di Kabupaten Sumedang, memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan publik yang berinteraksi langsung dengan 10 desa dan 3 kelurahan. Dengan volume data dan administrasi yang tinggi, kecamatan ini dituntut untuk memiliki manajemen informasi yang profesional melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu. Namun, berdasarkan dokumen perencanaan strategis dan observasi awal, kualitas pelayanan informasi di tingkat kecamatan seringkali masih menghadapi kendala operasional. Isu mengenai kemudahan akses terhadap Daftar Informasi Publik (DIP) dan mekanisme permohonan informasi yang belum terstandarisasi menjadi hambatan nyata dalam memenuhi hak informatif masyarakat secara optimal.

Meskipun landasan formal telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2021 dan Keputusan Camat Sumedang Utara Nomor 34 Tahun 2025, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan (policy) dengan pelaksanaan (implementation). Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku mengakibatkan pelayanan informasi publik masih bersifat ad-hoc atau tidak konsisten. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang harus menjalankan tugas rangkap (double job) memperumit tata kelola dokumentasi di lingkungan kantor kecamatan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai dinamika implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kecamatan Sumedang Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat proses transparansi tersebut.

Dalam konteks administrasi publik modern, keterbukaan informasi publik tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, melainkan sebagai indikator kualitas pelayanan publik dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Implementasi UU KIP pada level kecamatan menjadi sangat penting karena kecamatan merupakan titik temu utama antara kebijakan pemerintah daerah dengan kebutuhan nyata masyarakat. Transparansi informasi mengenai program, anggaran, pelayanan administrasi, hingga keputusan-keputusan strategis kecamatan akan menentukan apakah masyarakat dapat berperan sebagai pengawas sosial (social control) secara efektif. Oleh sebab itu, keterbukaan informasi publik seharusnya menjadi bagian integral dari budaya birokrasi, bukan sekadar pemenuhan formalitas regulasi.

Namun demikian, praktik keterbukaan informasi di tingkat kecamatan kerap menghadapi tantangan struktural dan teknis yang berulang. Hambatan tersebut meliputi lemahnya sistem dokumentasi, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, keterbatasan sarana publikasi informasi, hingga rendahnya pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip pelayanan informasi publik. Kondisi ini berdampak pada munculnya ketidakpastian prosedur pelayanan informasi, lambatnya respon permohonan masyarakat, serta minimnya informasi yang dipublikasikan secara proaktif. Akibatnya, hak masyarakat untuk memperoleh informasi

menjadi tidak terpenuhi secara maksimal, dan tujuan utama UU KIP untuk menciptakan pemerintahan terbuka (open government) menjadi sulit terwujud secara nyata.

Lebih jauh, permasalahan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kecamatan Sumedang Utara juga berpotensi memunculkan konsekuensi sosial-politik berupa menurunnya legitimasi institusi pemerintah di mata masyarakat. Ketika informasi publik tidak mudah diakses, masyarakat cenderung menilai birokrasi sebagai institusi tertutup, lamban, dan tidak responsif. Hal ini dapat memicu rendahnya partisipasi publik dalam program pembangunan serta melemahkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menjadi relevan untuk memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik, sekaligus menjadi masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam memperkuat sistem PPID Pembantu di tingkat kecamatan agar lebih akuntabel, transparan, dan adaptif terhadap tuntutan good governance.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk memberikan gambaran secara mendalam mengenai fenomena implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di lapangan. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti ingin memahami realitas sosial secara menyeluruh dan berinteraksi langsung dengan subjek penelitian guna memperoleh data yang bersifat alamiah. Fokus penelitian diarahkan pada proses kerja PPID Pembantu di Kecamatan Sumedang Utara dengan merujuk pada indikator keberhasilan implementasi kebijakan menurut teori George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga instrumen utama, yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung di kantor Kecamatan Sumedang Utara untuk melihat ketersediaan fasilitas pelayanan informasi dan papan pengumuman publik. Wawancara dilakukan kepada sejumlah informan yang ditentukan secara purposive (bertujuan), yaitu pihak-pihak yang memiliki kewenangan dan pengetahuan mendalam terkait objek penelitian, seperti Camat, Sekretaris Camat sebagai atasan PPID Pembantu, Kasi Pelayanan Publik, serta staf pelaksana teknis. Selain itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen regulasi seperti UU KIP, Perbup Sumedang No. 144 Tahun 2021, SK Camat No. 34 Tahun 2025, serta profil kecamatan.

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengikuti model Miles dan Huberman yang terdiri dari empat tahapan utama: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan merangkum hasil wawancara yang kompleks menjadi poin-poin krusial terkait hambatan dan upaya yang dilakukan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk naratif yang sistematis untuk kemudian divalidasi menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi ini bertujuan untuk menjamin keabsahan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari informan yang berbeda serta mencocokkan hasil wawancara dengan dokumen tertulis yang tersedia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Objektif Implementasi Kebijakan di Kecamatan Sumedang Utara

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kecamatan Sumedang Utara secara administratif telah dimulai dengan adanya landasan hukum berupa Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2021. Sebagai tindak lanjut, pihak kecamatan telah menerbitkan Keputusan Camat Nomor 34 Tahun 2025 yang meresmikan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu. Namun, keberadaan struktur ini masih bersifat formalitas di atas kertas karena dalam praktiknya belum diikuti dengan penyediaan sarana fisik khusus, seperti loket informasi atau ruang dokumentasi yang representatif. Pelayanan informasi masih bercampur dengan aktivitas pelayanan umum harian, sehingga masyarakat terkadang kesulitan membedakan antara prosedur permohonan informasi publik dengan pelayanan administrasi kependudukan biasa. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan telah diadopsi secara organisasi, tetapi belum terinternalisasi secara fungsional dalam budaya kerja sehari-hari. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Agustino (2017) yang menegaskan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berhenti pada penetapan keputusan formal, tetapi harus ditunjukkan melalui tindakan nyata, mekanisme operasional, serta konsistensi pelaksanaan di lapangan.

Selain keterbatasan sarana fisik, penelitian juga menemukan bahwa aspek pengelolaan informasi publik di Kecamatan Sumedang Utara masih belum berjalan sesuai prinsip pelayanan informasi yang sistematis. Daftar Informasi Publik (DIP) yang seharusnya menjadi instrumen utama transparansi belum tersusun secara lengkap dan belum dipublikasikan secara aktif melalui media yang mudah diakses masyarakat. Informasi terkait program kegiatan kecamatan, penggunaan anggaran operasional, maupun laporan kinerja pelayanan publik masih bersifat internal dan hanya dapat diperoleh apabila masyarakat mengajukan permohonan secara langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa kecamatan belum menerapkan mekanisme diseminasi informasi secara proaktif sebagaimana mandat UU KIP, sehingga keterbukaan informasi masih

bersifat reaktif dan belum berorientasi pada pelayanan publik yang terbuka. Situasi tersebut relevan dengan pemikiran Nugroho (2019) yang menjelaskan bahwa kebijakan publik akan kehilangan nilai strategisnya apabila tidak diwujudkan dalam sistem pelayanan yang dapat diakses dan dipahami masyarakat secara mudah. Dengan kata lain, keterbukaan informasi tidak cukup hanya tersedia secara normatif, tetapi harus disusun sebagai sistem pelayanan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam implementasinya, peran PPID Pembantu juga belum berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya manusia dan pembagian tugas yang tidak proporsional. Aparatur yang ditunjuk sebagai PPID Pembantu masih merangkap tugas utama sebagai staf pelayanan umum, sehingga fokus kerja lebih banyak diarahkan pada pelayanan administrasi harian daripada pengelolaan informasi publik. Akibatnya, pengarsipan dokumen, penyusunan klasifikasi informasi, serta pelayanan permohonan informasi tidak memiliki pola kerja yang konsisten. Kondisi ini memperlihatkan bahwa organisasi belum memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai dalam menjalankan fungsi kebijakan secara optimal. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Purwanto dan Sulistyastuti (2015) yang menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya implementor, baik dalam bentuk kompetensi aparatur, struktur kerja, maupun pembagian kewenangan yang jelas. Jika implementor tidak memiliki dukungan kapasitas dan waktu kerja yang cukup, maka kebijakan cenderung berjalan tidak efektif dan hanya menjadi dokumen administratif.

Lebih lanjut, dari sisi tata kelola internal, belum tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi publik memperlihatkan lemahnya aspek koordinasi dan standardisasi layanan. Prosedur pelayanan informasi masih bergantung pada kebiasaan kerja masing-masing petugas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan pelayanan, ketidakpastian waktu pelayanan, serta kerentanan terhadap kesalahan administratif. Padahal, dalam perspektif administrasi publik, birokrasi yang profesional harus memiliki sistem kerja yang terstruktur dan prosedural agar pelayanan publik dapat berjalan secara tertib dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan pandangan Keban (2014) yang menyatakan bahwa administrasi publik modern menuntut adanya pengaturan organisasi yang jelas melalui sistem prosedur kerja, pembagian peran, serta koordinasi yang efektif sebagai fondasi pelayanan publik. Dengan demikian, lemahnya SOP dalam pelayanan informasi publik dapat dipahami sebagai indikator bahwa kecamatan belum membangun sistem kelembagaan yang mendukung keterbukaan informasi sebagai budaya kerja.

Selain itu, kelemahan dalam pengelolaan informasi juga berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal. Publikasi informasi publik belum sepenuhnya memanfaatkan media digital sebagai kanal utama komunikasi publik, padahal penggunaan teknologi informasi dapat mempercepat pelayanan, meningkatkan efisiensi birokrasi, serta memperluas akses masyarakat terhadap dokumen publik. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara tuntutan transformasi pelayanan publik dengan kesiapan organisasi kecamatan dalam membangun sistem informasi yang memadai. Situasi tersebut sesuai dengan pemikiran Akadun (2019) yang menjelaskan bahwa teknologi informasi dalam administrasi pemerintahan seharusnya menjadi instrumen utama untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui sistem data yang terintegrasi, mudah diakses, dan mampu mempercepat proses administrasi. Apabila pemanfaatan teknologi belum terstruktur, maka pelayanan informasi publik cenderung tetap bersifat manual, lambat, dan kurang transparan.

Dengan demikian, kondisi objektif implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kecamatan Sumedang Utara menunjukkan bahwa kebijakan telah berjalan pada aspek legal-formal, tetapi belum sepenuhnya berfungsi secara operasional sebagai instrumen transparansi. Kesenjangan ini tampak pada lemahnya fasilitas pelayanan informasi, belum tersusunnya DIP secara lengkap, keterbatasan sumber daya aparatur, belum adanya SOP baku, serta minimnya dukungan sistem teknologi informasi. Dalam perspektif kebijakan publik, hal ini menegaskan adanya gap antara kebijakan sebagai produk regulasi dengan kebijakan sebagai praktik pelayanan yang dirasakan masyarakat. Anggara (2018) menekankan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks karena dipengaruhi oleh kesiapan organisasi, komitmen pelaksana, serta dukungan sistem kerja yang memungkinkan kebijakan dijalankan secara konsisten. Oleh karena itu, temuan penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa keterbukaan informasi publik di tingkat kecamatan masih membutuhkan penguatan kelembagaan agar prinsip transparansi dan akuntabilitas benar-benar terwujud sebagai praktik good governance.

Hambatan Struktural: Ketiadaan SOP dan Beban Kerja Ganda (Double Job)

Analisis terhadap proses implementasi mengungkap adanya hambatan struktural yang signifikan, yakni belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) tertulis yang spesifik mengenai pelayanan informasi publik. Ketiadaan SOP ini berdampak pada ketidakpastian prosedur bagi pemohon informasi, terutama terkait durasi waktu pemenuhan informasi, tahapan pelayanan, serta mekanisme uji konsekuensi untuk informasi yang dikecualikan. Dalam perspektif administrasi publik, SOP merupakan instrumen penting untuk membangun konsistensi pelayanan dan memastikan pelayanan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas. Hal

ini sejalan dengan pemikiran Pasolong (2018) yang menekankan bahwa administrasi publik harus ditopang oleh mekanisme kerja yang jelas dan terstandar agar pelayanan publik dapat berlangsung secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, ketiadaan SOP menyebabkan pelayanan informasi publik berpotensi berjalan tidak seragam, tergantung interpretasi petugas, dan pada akhirnya melemahkan legitimasi kecamatan sebagai badan publik.

Di sisi lain, hambatan struktural juga terlihat dari keterbatasan sumber daya manusia yang ditugaskan dalam PPID Pembantu. Petugas pelaksana informasi masih mengalami beban kerja yang sangat tinggi akibat fenomena double job, di mana aparaturnya juga ditunjuk sebagai staf struktural pada Seksi Pelayanan Publik. Kondisi ini membuat fokus kerja aparaturnya terpecah antara menyelesaikan tugas administratif rutin dengan kewajiban mengelola informasi publik, termasuk menyusun, mengarsipkan, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik (DIP). Dalam teori implementasi kebijakan, keterbatasan sumber daya merupakan salah satu faktor determinan yang menyebabkan kebijakan tidak berjalan optimal. Purwanto dan Sulistyastuti (2015) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya pelaksana, baik dari aspek jumlah, kompetensi, maupun dukungan kelembagaan. Apabila beban kerja tidak proporsional, maka implementasi kebijakan cenderung berjalan lambat dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Lebih jauh, fenomena double job menunjukkan bahwa struktur organisasi kecamatan belum mampu mengalokasikan fungsi pelayanan informasi publik sebagai unit kerja yang strategis dan mandiri. Padahal, keterbukaan informasi publik merupakan mandat kebijakan yang membutuhkan pengelolaan profesional dan berkelanjutan, bukan sekadar tugas tambahan. Hal ini relevan dengan pandangan Keban (2014) yang menjelaskan bahwa organisasi publik yang efektif harus memiliki pembagian kerja yang jelas, struktur kewenangan yang tegas, serta sistem koordinasi yang mampu mengarahkan aparaturnya pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, lambatnya pengelolaan data informasi publik di Kecamatan Sumedang Utara bukan semata disebabkan oleh individu pelaksana, melainkan merupakan persoalan kelembagaan yang bersifat struktural. Kondisi ini berdampak pada rendahnya responsivitas pelayanan informasi publik, terutama ketika masyarakat membutuhkan data secara cepat dalam konteks pengawasan kebijakan maupun kepentingan administratif lainnya.

Selain menimbulkan ketidakpastian prosedural, ketiadaan SOP juga berdampak pada lemahnya pengendalian internal dan evaluasi pelayanan informasi publik. Tanpa SOP yang baku, kecamatan tidak memiliki instrumen standar untuk mengukur kualitas pelayanan, mengawasi proses kerja petugas, maupun memastikan apakah pelayanan telah sesuai dengan batas waktu dan ketentuan yang diatur dalam UU KIP. Akibatnya, potensi terjadinya kesalahan administratif atau keterlambatan pelayanan sulit dipertanggungjawabkan secara objektif karena tidak ada acuan kerja yang jelas. Dalam konteks administrasi publik, sistem pelayanan yang tidak memiliki prosedur formal cenderung menghasilkan pelayanan yang tidak konsisten dan rentan terhadap praktik birokrasi tertutup. Hal ini sejalan dengan pandangan Thoha (2016) yang menjelaskan bahwa birokrasi modern menuntut adanya sistem kerja yang rasional, terukur, dan berbasis aturan agar pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan akuntabel.

Di samping itu, beban kerja ganda yang dialami aparaturnya PPID Pembantu juga berdampak pada rendahnya kualitas manajemen informasi dan dokumentasi. Pengelolaan informasi publik pada dasarnya membutuhkan ketelitian, keteraturan arsip, serta pemutakhiran data secara berkala agar informasi yang disediakan selalu valid dan relevan. Namun, dengan beban kerja administratif rutin yang tinggi, aktivitas pengelolaan informasi menjadi prioritas sekunder sehingga pembaruan DIP, klasifikasi dokumen, serta penataan arsip seringkali tertunda. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya manajemen organisasi dalam mengelola sumber daya manusia dan pembagian kerja. Silalahi dan Kartika (2021) menegaskan bahwa manajemen yang baik harus mampu mengatur pembagian tugas secara efektif agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai tujuan organisasi. Apabila beban kerja tidak dibagi secara proporsional, maka kinerja organisasi akan menurun dan pelayanan publik menjadi tidak optimal.

Lebih lanjut, hambatan struktural ini juga menunjukkan adanya problem koordinasi internal antar unit kerja di kecamatan, khususnya dalam memastikan bahwa keterbukaan informasi publik dipahami sebagai tanggung jawab organisasi secara kolektif. Implementasi kebijakan seharusnya tidak bergantung pada individu tertentu, melainkan memerlukan dukungan lintas bagian seperti pelayanan umum, tata usaha, dan perencanaan agar sistem dokumentasi dapat berjalan terintegrasi. Namun, dalam praktiknya, keterbukaan informasi masih dianggap sebagai tugas tambahan PPID Pembantu semata, sehingga tidak terjadi sinergi antar bagian dalam menyediakan data dan dokumen. Hal ini sesuai dengan pandangan Indradi (2016) yang menekankan bahwa administrasi publik harus dibangun melalui koordinasi antar unit organisasi agar setiap fungsi pelayanan dapat berjalan secara terpadu. Oleh karena itu, hambatan struktural di Kecamatan Sumedang Utara tidak hanya berkaitan dengan ketiadaan SOP dan keterbatasan personel, tetapi juga mencerminkan lemahnya integrasi kelembagaan dalam membangun sistem pelayanan informasi publik yang profesional.

Komunikasi Antar-Unit dan Upaya Strategis Pemerintahan

Dari aspek komunikasi, koordinasi vertikal antara PPID Pembantu Kecamatan dengan PPID Utama di tingkat Kabupaten Sumedang menunjukkan intensitas yang cukup baik melalui pertemuan rutin dan bimbingan teknis. Namun, secara horizontal, koordinasi data antar-seksi di internal kantor kecamatan masih sering mengalami kendala (silokrasi data), di mana aliran data dari setiap seksi tidak otomatis terpusat di PPID Pembantu. Untuk mengatasi hal tersebut, pimpinan kecamatan mulai mendorong kebijakan disposisi yang lebih tegas agar setiap unit kerja aktif memberikan pemutakhiran data secara berkala. Upaya sinkronisasi juga dilakukan dengan memanfaatkan kanal digital seperti media sosial resmi kecamatan untuk mendistribusikan informasi yang bersifat terbuka dan berkala. Strategi ke depan yang sangat mendesak adalah segera memformalkan SOP pelayanan informasi dalam bentuk surat keputusan agar terdapat standarisasi pelayanan yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Secara teoritis, komunikasi dalam implementasi kebijakan merupakan elemen kunci karena menentukan sejauh mana kebijakan dapat dipahami dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh pelaksana. Dalam konteks ini, komunikasi vertikal yang sudah berjalan cukup baik menjadi modal awal dalam memperkuat penguatan kebijakan keterbukaan informasi publik. Namun, hambatan komunikasi horizontal memperlihatkan bahwa proses implementasi belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem kerja organisasi kecamatan. Anggara (2018) menegaskan bahwa kebijakan publik akan sulit mencapai tujuan apabila tidak didukung oleh komunikasi yang efektif antar aktor pelaksana, karena miskomunikasi akan melahirkan perbedaan interpretasi serta ketidaksinkronan tindakan dalam pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, silokrasi data yang terjadi di internal kecamatan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum didukung oleh pola komunikasi organisasi yang menyatu dan terstruktur.

Lebih lanjut, kendala koordinasi horizontal ini juga mencerminkan lemahnya sistem administrasi internal dalam pengelolaan informasi sebagai sumber daya organisasi. Setiap seksi cenderung menyimpan data sesuai kepentingan unit masing-masing, sehingga PPID Pembantu mengalami kesulitan untuk menghimpun informasi publik secara cepat dan akurat. Padahal, keterbukaan informasi publik mensyaratkan adanya sistem dokumentasi terintegrasi yang memungkinkan arus data mengalir secara lancar dan dapat diperbaharui secara periodik. Indradi (2016) menyatakan bahwa administrasi publik modern membutuhkan mekanisme koordinasi yang jelas agar fungsi-fungsi organisasi dapat berjalan secara terpadu dalam mencapai tujuan pelayanan publik. Oleh karena itu, tanpa integrasi antar-seksi, pelayanan informasi publik akan terus bergantung pada pendekatan manual yang tidak efisien dan berpotensi menimbulkan keterlambatan pelayanan.

Dalam upaya memperbaiki situasi tersebut, kebijakan disposisi pimpinan kecamatan untuk mempertegas kewajiban unit kerja dalam pemutakhiran data dapat dipandang sebagai langkah strategis yang relevan dalam memperkuat implementasi kebijakan. Dalam perspektif implementasi kebijakan, dukungan pimpinan memiliki peran sentral karena menentukan komitmen aparatur dan kedisiplinan organisasi dalam menjalankan mandat kebijakan. Agustino (2017) menekankan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga memerlukan dukungan kepemimpinan dan komitmen birokrasi agar kebijakan tidak berhenti sebagai dokumen formal. Dengan demikian, disposisi pimpinan kecamatan menjadi faktor penting untuk mengurangi fragmentasi data serta memperkuat budaya kerja yang mendukung transparansi.

Selain itu, pemanfaatan kanal digital seperti media sosial resmi kecamatan menunjukkan adanya upaya adaptasi birokrasi terhadap perkembangan teknologi informasi dalam pelayanan publik. Media sosial dapat menjadi alat komunikasi yang efektif untuk menyampaikan informasi terbuka secara cepat, murah, dan menjangkau masyarakat luas. Namun, strategi ini tetap harus disertai dengan sistem administrasi dokumentasi yang tertib agar informasi yang dipublikasikan tidak bersifat sporadis, melainkan terencana dan tersipikan. Akadun (2019) menjelaskan bahwa teknologi informasi dalam administrasi publik harus dipahami sebagai instrumen penguatan tata kelola, bukan sekadar media publikasi, sehingga penggunaannya harus terintegrasi dengan sistem kerja organisasi. Oleh karena itu, kanal digital seharusnya menjadi bagian dari strategi sistem informasi publik yang terstruktur melalui penyediaan basis data, klasifikasi dokumen, dan pembaruan DIP secara rutin.

Dengan demikian, komunikasi antar-unit di Kecamatan Sumedang Utara menunjukkan dua kondisi yang saling bertolak belakang, yaitu koordinasi vertikal yang cukup berjalan, namun koordinasi horizontal yang masih lemah akibat silokrasi data. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada hubungan kecamatan dengan kabupaten, tetapi lebih pada integrasi internal organisasi kecamatan itu sendiri. Oleh sebab itu, langkah strategis yang paling mendesak adalah memformalkan SOP pelayanan informasi publik melalui surat keputusan agar terdapat standar pelayanan yang baku dan mengikat seluruh unit kerja. Nugroho (2019) menegaskan bahwa kebijakan publik hanya akan efektif apabila dilengkapi instrumen implementasi yang jelas, termasuk aturan teknis dan prosedur operasional yang memastikan kebijakan dapat dijalankan secara konsisten. Dengan adanya SOP, pelayanan informasi publik dapat berjalan lebih profesional, terukur, dan mampu memperkuat prinsip transparansi sebagai fondasi good governance di tingkat kecamatan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kecamatan Sumedang Utara, dapat disimpulkan bahwa secara administratif pemerintah kecamatan telah menunjukkan itikad baik dengan pembentukan struktur PPID Pembantu melalui Keputusan Camat Nomor 34 Tahun 2025. Namun, dalam tataran operasional, implementasi ini masih dikategorikan belum optimal karena terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara mandat regulasi dengan realitas pelayanan di lapangan. Faktor penghambat utama yang ditemukan adalah ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi yang baku, yang menyebabkan alur permohonan informasi menjadi tidak terstandarisasi dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat. Selain itu, keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang harus menjalankan fungsi ganda (*double job*) mengakibatkan pengelolaan data informasi publik tidak menjadi prioritas utama, sehingga pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) seringkali mengalami keterlambatan.

Sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian ini, disarankan agar pihak Kecamatan Sumedang Utara segera merumuskan dan menetapkan SOP pelayanan informasi publik yang tertulis dan dapat diakses oleh masyarakat luas sebagai panduan teknis yang jelas. Penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis khusus di bidang manajemen informasi digital juga sangat mendesak untuk dilakukan guna meningkatkan kompetensi aparatur. Selain itu, diperlukan adanya alokasi anggaran dan penyediaan sarana prasarana yang lebih representatif, seperti pojok informasi atau loket khusus PPID, agar pelayanan informasi dapat terpisah dari pelayanan administrasi rutin lainnya. Dengan adanya perbaikan prosedur dan penguatan dukungan sumber daya, diharapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas di Kecamatan Sumedang Utara dapat terwujud secara maksimal sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik..

REFERENCE

- Afrizal. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agustino, L. (2017). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akadun. (2019). *Teknologi Informasi Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S. (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Indradi, S. (2016). *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Malang: Setara Press.
- Keban, Y. T. (2014). *Memahami Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Masalah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2016). *Qualitative Data Analysis*. Arizona State University: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mufiz, Ali. (2016). *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Nugroho, R. (2019). *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H. (2018). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Silalahi, U. (2007). *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Silalahi, U., & Kartika, R. (2021). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, M. (2016). *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.

TATA KELOLA DATA KELEMBAGAAN DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN SUMEDANG

Ahmad Hamdan Fatahuddin¹, Fanisya Dwi Eriaanti², Imam Yusup Hidayat³,
Nida Nindias⁴, Ruruh Rizky Hendianto⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Sebelas April
Email *3: imamyh21@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintahan data institusional desa memainkan peran penting dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan desa. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan data institusional desa masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya integrasi data antar sektor, sistem informasi yang terbatas, dan ketidakmerataan kapasitas sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemerintahan data institusional desa di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kerangka analitis penelitian ini didasarkan pada lima dimensi tata kelola data, yaitu prinsip data, kualitas data, metadada, akses data, dan siklus hidup data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola data institusional desa di Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang dapat dianggap cukup efektif. Hal ini ditunjukkan oleh adanya kebijakan dan pedoman formal, kualitas data yang relatif baik, serta prosedur yang telah ditetapkan untuk akses dan pengelolaan data. Namun, beberapa tantangan masih ada, termasuk ketidaksesuaian data antar sektor, pengelolaan metadada yang kurang optimal, integrasi sistem yang terbatas, dan ketergantungan pada pengolahan data secara manual. Oleh karena itu, memperkuat integrasi sistem, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperkuat koordinasi dan pengawasan diperlukan untuk meningkatkan tata kelola data institusional di tingkat desa.

Kata Kunci: Governance, Good Governance, Tata Kelola Kelembagaan.

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami kemajuan yang sangat pesat, ditandai dengan meningkatnya pemanfaatan perangkat lunak, sistem basis data, jaringan internet, serta teknologi pendukung lainnya dalam berbagai sektor organisasi. Transformasi digital pemerintahan juga mendorong pentingnya penguatan sistem pengelolaan data kelembagaan yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Pemerintah pusat telah menetapkan framework melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) yang menekankan standar data, metadada baku, interoperabilitas, dan mekanisme berbagi pakai data. Dalam konteks administrasi publik modern, penguatan tata kelola data tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan pemerintah untuk menciptakan sistem manajemen pemerintahan yang efektif dan berbasis informasi yang dapat dipertanggungjawabkan (Akadun, 2019; Anggara, 2018).

Perkembangan tersebut tidak hanya dimanfaatkan oleh sektor bisnis dan industri, tetapi juga telah merambah ke sektor pemerintahan, khususnya dalam mendukung pengelolaan administrasi, perencanaan program, dan pengambilan keputusan organisasi. Teknologi informasi diyakini mampu mengubah proses kerja yang sebelumnya bersifat manual, terpisah, dan kurang efisien menjadi lebih terstruktur, cepat, dan akurat melalui sistem informasi yang terintegrasi. Perubahan ini sejalan dengan pandangan Griffin (2012) yang menekankan bahwa efektivitas organisasi modern sangat bergantung pada kemampuan manajemen mengelola sumber daya dan informasi secara sistematis. Dalam organisasi publik, pengelolaan informasi yang efektif bukan hanya menjadi kebutuhan teknis, tetapi juga bagian dari proses manajerial dalam menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana prinsip klasik administrasi yang dikemukakan oleh Fayol (2012).

Seiring dengan perkembangan tersebut, pengelolaan data menjadi kebutuhan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Data tidak lagi dipahami sekadar sebagai arsip administratif, melainkan sebagai aset organisasi yang memiliki nilai strategis bagi perangkat daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2023 tentang landasan hukum pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) di Sumedang yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah harus didukung oleh sistem informasi yang menjamin ketersediaan data dan informasi yang akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif administrasi publik, keberadaan data sebagai aset kelembagaan merupakan instrumen penting untuk memastikan kebijakan

publik berjalan berbasis fakta (evidence-based policy) dan tidak semata didorong oleh intuisi atau kepentingan sektoral (Keban, 2017; Pasolong, 2017).

Dalam fokus pemerintahan daerah, tata kelola data menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah. Perangkat daerah dituntut untuk mampu menyediakan data yang konsisten, mudah diakses secara internal, serta dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan program dan kebijakan. Oleh karena itu, pengembangan sistem dan mekanisme tata kelola data tidak hanya bertujuan untuk mendukung aspek administratif, tetapi juga sebagai instrumen penguatan fungsi manajerial dan pengambilan keputusan pimpinan. Hal ini sesuai dengan pandangan Henry (2017) yang menekankan bahwa administrasi publik pada dasarnya merupakan proses manajemen pemerintahan yang harus berjalan secara rasional melalui pemanfaatan informasi, struktur organisasi, dan sistem pengambilan keputusan yang jelas. Dalam praktik organisasi, sistem data yang baik juga merupakan bagian dari upaya membangun koordinasi antarunit agar fungsi pelayanan publik dapat berjalan efisien dan terukur (Nigro & Nigro, 2018).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas strategis dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan fasilitasi, termasuk dalam pengelolaan data kelembagaan sebagai bagian dari fungsi internal dinas. Tugas tersebut diperkuat melalui Peraturan Bupati Sumedang Nomor 183 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Struktural Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang menempatkan pengelolaan data sebagai salah satu unsur pendukung pelaksanaan tugas dinas. Selain itu, dalam Rencana Kerja (Renja) Perubahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2025, peningkatan kualitas tata kelola data juga menjadi salah satu agenda prioritas dalam mendukung penguatan kinerja organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola data bukan hanya aspek administratif, tetapi menjadi bagian dari manajemen strategik organisasi yang menentukan kemampuan dinas dalam mencapai tujuan pembangunan desa secara terarah (Agustini, 2013; Amirullah, 2015).

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan aparatur di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang, menunjukkan bahwa tata kelola data kelembagaan secara internal masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah belum terintegrasinya pengelolaan data kelembagaan antarbidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang. Setiap bidang masih mengelola data sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya masing-masing, sehingga belum terdapat satu basis data terpadu yang dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai data kelembagaan yang dimiliki oleh dinas. Dalam teori organisasi publik, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk fragmentasi birokrasi yang sering muncul ketika sistem koordinasi internal tidak didukung oleh mekanisme integrasi informasi yang kuat (Shafritz, Russell, & Borick, 2016).

Selain itu, sistem pendukung pengelolaan data kelembagaan yang digunakan di internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang belum sepenuhnya berbasis sistem informasi yang modern dan real-time. Proses pengumpulan dan pelaporan data masih banyak dilakukan secara manual atau menggunakan format yang berbeda antarbidang. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan data, keterlambatan pembaruan, serta kesulitan dalam proses konsolidasi data di tingkat dinas. Dalam perspektif administrasi perkantoran modern, sistem manual dan tidak terstandar akan menimbulkan pemborosan waktu, keterlambatan pelayanan, serta lemahnya kontrol administrasi (Gie, 2022). Bahkan dalam konteks manajemen operasi, ketidakteraturan sistem input-output data dapat menciptakan inefisiensi organisasi yang menghambat produktivitas kelembagaan (Assauri, 2012).

Permasalahan lainnya berkaitan dengan aspek sumber daya manusia. Kapasitas aparatur dalam pengelolaan data, baik dalam memahami standar pendataan, penggunaan teknologi informasi, maupun penerapan prosedur operasional pengelolaan data, belum merata di setiap bidang. Perbedaan kemampuan tersebut berdampak pada kualitas dan konsistensi data kelembagaan yang dihasilkan. Di sisi lain, koordinasi internal antarbidang dalam pengelolaan data dinilai belum optimal, sehingga masih terjadi fragmentasi informasi dan tumpang tindih pengelolaan data. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, kualitas SDM merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan organisasi dalam mengadopsi inovasi sistem kerja, termasuk penguatan digitalisasi (Hasibuan, 2012; Ardana, 2012). Oleh karena itu, pengelolaan SDM menjadi bagian strategis yang menentukan daya adaptasi organisasi publik terhadap perubahan sistem informasi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola data kelembagaan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang masih memerlukan perbaikan, baik dari aspek kelembagaan, sistem informasi, maupun sumber daya manusia. Tata kelola data yang belum terstruktur secara optimal berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, khususnya dalam menyediakan data yang akurat dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program. Dalam konteks reformasi pelayanan publik, tata kelola data harus dipahami sebagai bagian dari reformasi manajemen pelayanan yang bertujuan menciptakan layanan yang lebih transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Safroni, 2012). Lebih jauh, Denhardt & Denhardt (2015) menekankan bahwa pelayanan publik

modern harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai pusat, sehingga kualitas data kelembagaan menjadi prasyarat untuk memastikan program pembangunan desa benar-benar sesuai kebutuhan warga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama dalam tata kelola data kelembagaan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang, antara lain, yaitu belum terintegrasinya data kelembagaan antarbidang, belum tersedianya sistem informasi pengelolaan data kelembagaan yang modern dan terpusat, serta belum meratanya kapasitas aparatur dalam pengelolaan data. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mendalam untuk menganalisis bagaimana tata kelola data kelembagaan dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Dalam perspektif studi administrasi publik, penelitian semacam ini penting karena tata kelola data merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang menyatukan unsur manajemen, hukum, politik, serta akuntabilitas publik (Rosenbloom, 2015; Silalahi, 2020). Selain itu, penguatan tata kelola data juga merupakan bagian dari filsafat administrasi modern yang menempatkan organisasi publik sebagai instrumen negara dalam mewujudkan pelayanan dan pembangunan yang terukur (Siagian, 2020; Syaifiie dkk., 2017).

2. METODE

Dalam penelitian, landasan teori dimanfaatkan sebagai panduan agar penelitian sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Landasan teori juga dimanfaatkan untuk memberikan gambaran secara umum tentang latar belakang penelitian dan dijadikan bahan pembahasan hasil penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian tersebut diambil dari teori menuju data dan berakhir padapenerimaan atau penolakan terhadap suatu teori. Adapun penelitian kualitatif, peneliti mengacu pada teori yang ada sebagai bahan penjelasan, kebalikan dari kuantitatif, pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif atau metode naturalistik, penelitian yang dilakukan pada kondisi alamiah. Teknik yang digunakan dalam mengambil sampel adalah dengan menggunakan purposive sampling. Menurut Sugiyono (2017) Purposive sampling adalah “Teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah para pelaksana yang dianggap memiliki otoritas, informasi, serta paling tahu apa yang kita harapkan, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi situasi yang sedang diteliti. Sehingga dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah kepala bidang kelembagaan LKD dan LAD dan pihak yang bersangkutan tabel berikut ini:

Tabel 1. Subjek Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Bidang Kelembagaan LKD dan LAD	1
2	Anggota Bidang Keuangan Asset	1
3	Sekretaris Desa (Sekdes)	1
4	Kader Posyandu	1
Jumlah		4

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang

Berdasarkan tabel diatas, pegawai yang dijadikan informan penelitian dikarenakan berdasarkan pertimbangan peneliti, bahwa sampel informan peneliti yang bersangkutan tersebut dianggap mampu, berkompeten dan bertanggungjawab terhadap Tata Kelola Data Kelembagaan Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang. Untuk itu penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dijelaskan oleh Sugiyono (2017) yang meliputi berbagai metode yang sesuai dengan kebutuhan penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan menganalisis beragam literatur baik itu buku-buku ilmiah, dokumen, dan bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan etika birokrasi dalam pelayanan publik.
- b. Studi lapangan, yaitu teknik yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian, diantaranya melalui teknik berikut:
 - 1) Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada bagian bidang kelembagaan LKD dan LAD sebagai objek penelitian untuk mencatat segala kegiatan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dimana peneliti tidak ikut terlibat dalam proses kerja.
 - 2) Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara meminta kepada informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, mendalam serta terarah sesuai dengan pedoman wawancara.
 - 3) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang mendukung permasalahan di lapangan.

- 4) Triangulasi, yaitu teknik pengolahan data yang bersifat menghubungkan dari berbagai teknik pengumpulan data serta sumber data yang telah ada. Bila peneliti mengumpulkan pengumpulan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu dengan mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan teknik yang sama.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini difokuskan pada teori Data Governance menurut Menurut Khatri & Brown (2010: 149) mengemukakan bahwa untuk mengukur suatu tata kelola data yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan dimensi-dimensi sebagai berikut:

1. *Data Principles* (Prinsip Data)
2. *Data Quality* (Kualitas Data)
3. Metadata
4. *Data Access* (Akses Data)
5. *Data Life Cycle* (Siklus Hidup Data)

Pendekatan ini relevan digunakan karena organisasi publik saat ini dituntut tidak hanya mampu mengumpulkan data, tetapi juga mengelola, mengendalikan, dan menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan manajerial secara terstruktur. Dalam perspektif administrasi publik, tata kelola data merupakan bagian dari tata kelola organisasi yang berkaitan langsung dengan efektivitas birokrasi dan kinerja kelembagaan (Banga, 2018; Maulana, 2022).

Selain itu, tata kelola data juga merupakan unsur penting dalam reformasi birokrasi modern yang menuntut birokrasi untuk bergerak dari pola kerja administratif-konvensional menuju pola kerja berbasis sistem informasi dan akuntabilitas publik. Shafritz, Russell, & Borick (2016) menjelaskan bahwa administrasi publik modern menuntut penggunaan teknologi dan sistem informasi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan. Oleh karena itu, penerapan data governance dalam lingkungan DPMD Kabupaten Sumedang dapat dipahami sebagai bagian dari proses pembaruan administrasi pemerintahan daerah yang lebih adaptif terhadap tuntutan era digital (Henry, 2017; Keban, 2017).

Dimensi *Data Principles* (Prinsip Data)

Menunjukkan bahwa Keberadaan Kebijakan/Standar Formal dan Kepatuhan Pegawai terhadap Pedoman di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang sudah memiliki pedoman dan regulasi yang jelas, serta didukung mekanisme pengumpulan dan validasi data. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena adanya kendala seperti keterlambatan pengumpulan data, perubahan kebijakan, dan belum meratanya pemahaman pelaksana di lapangan. Pegawai juga pada dasarnya telah mengikuti regulasi dan prinsip yang ditetapkan, termasuk melalui pembinaan dan sosialisasi rutin. Namun ditemukan bahwa konsistensi pelaksana belum merata, terutama pada proses validasi akhir tahun dan pemanfaatan sistem digital. Masih terdapat pegawai yang belum disiplin atau belum menguasai sistem secara optimal, sehingga diperlukan pengawasan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas secara berkelanjutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi saja belum menjamin efektivitas pelaksanaannya. Fenomena ini sesuai dengan pendapat Khatri & Brown (2010) yang mengemukakan bahwa: "Prinsip data menetapkan sejauh mana data merupakan aset perusahaan, dan dengan demikian kebijakan, standar, dan pedoman spesifik apa yang sesuai." Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbedaan data antarbidang menunjukkan bahwa konsistensi data belum terpenuhi sepenuhnya, sehingga diperlukan penyesuaian format data, peningkatan pendataan lapangan, dan pemanfaatan sistem digital yang lebih terintegrasi.

Dalam perspektif administrasi publik, keberadaan prinsip data dapat dipahami sebagai bagian dari upaya birokrasi dalam membangun aturan main yang mengikat seluruh unit kerja agar bekerja dalam satu standar yang sama. Akadun (2019) menegaskan bahwa administrasi publik bukan sekadar aktivitas teknis, tetapi sistem yang mengatur perilaku organisasi pemerintahan melalui regulasi dan prosedur. Hal ini diperkuat oleh Anggara (2018) yang menjelaskan bahwa kebijakan internal dan SOP birokrasi merupakan instrumen penting untuk menciptakan kepastian kerja dan mencegah tumpang tindih kewenangan. Dengan demikian, kendala ketidakkonsistenan aparatur dalam menjalankan prinsip data menunjukkan bahwa aspek implementasi kebijakan internal masih belum berjalan efektif secara merata.

Dari sudut pandang manajemen organisasi, prinsip data seharusnya menjadi bagian dari fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Griffin (2012) menekankan bahwa organisasi yang efektif harus memiliki standar operasional yang dijalankan secara disiplin agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien. Hal ini juga sejalan dengan pemikiran Fayol (2012) yang menempatkan prinsip disiplin dan koordinasi sebagai unsur utama dalam manajemen organisasi. Oleh karena itu, fenomena keterlambatan pengumpulan

data serta lemahnya pemahaman sistem digital mencerminkan perlunya penguatan fungsi pengawasan dan pembinaan internal agar prinsip data tidak hanya menjadi dokumen normatif, tetapi benar-benar menjadi budaya kerja birokrasi.

Dimensi Data Quality (Kualitas Data)

Menunjukkan bahwa Akurasi dan Kelengkapan Data, serta Konsistensi Data di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang masih bergantung pada ketepatan pelaporan dari desa, sehingga masih ditemukan perbedaan data akibat perubahan kondisi lapangan serta keterbatasan pelaksana. Untuk mengatasinya, dinas melakukan validasi berjenjang, pemadanan data lintas dinas, dan koordinasi dengan kecamatan serta hal ini mencerminkan bahwa proses akurasi data sudah berjalan, namun belum sepenuhnya stabil dan konsisten. Pengolahan data juga telah mengikuti tupoksi masing-masing bidang, namun perbedaan antarbidang masih terjadi dan dianggap wajar. Upaya penyelarasan dilakukan melalui koordinasi rutin dan penggunaan dashboard dinas. Kendala lainnya adalah kelengkapan data yang masih kurang, terutama terkait keterbatasan pendataan lapangan dan ketidakhadiran sasaran, sehingga dinas perlu melakukan pendataan ulang dan koordinasi berkelanjutan. Fenomena ini menunjukkan bahwa kualitas data belum sepenuhnya memenuhi standar ideal. Hal ini dapat dikaitkan dengan konsep Khatri & Brown (2010) yang mengemukakan bahwa: "Kualitas data mengacu pada kemampuannya untuk memenuhi persyaratan penggunaannya." Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun definisi data telah seragam, keterbatasan dokumentasi metadata dan pemahaman pelaksana menyebabkan pemanfaatannya belum maksimal.

Kualitas data dalam organisasi publik tidak hanya menyangkut ketepatan angka, tetapi juga menyangkut keandalan data sebagai dasar legitimasi kebijakan publik. Rosenbloom (2015) menegaskan bahwa administrasi publik harus mampu mengintegrasikan aspek manajemen, hukum, dan politik, sehingga data yang dihasilkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara publik. Dalam konteks pelayanan publik, Safroni (2012) menjelaskan bahwa kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh kualitas sistem pendukung administrasi, termasuk kualitas data yang menjadi dasar perencanaan dan evaluasi program. Oleh karena itu, kondisi data yang belum stabil dan sering berubah menunjukkan bahwa sistem kontrol kualitas data perlu diperkuat, baik melalui prosedur validasi maupun pembinaan pendataan di tingkat desa.

Dari perspektif manajemen sumber daya manusia, kualitas data juga sangat ditentukan oleh kapasitas aparatur yang mengelola dan memverifikasi data. Hasibuan (2012) menekankan bahwa produktivitas organisasi sangat dipengaruhi oleh kompetensi, motivasi, dan disiplin aparatur. Hal yang sama juga ditegaskan Ardana (2012) bahwa kualitas kinerja SDM ditentukan oleh kemampuan teknis serta kesesuaian penempatan pegawai sesuai kebutuhan organisasi. Dengan demikian, apabila aparatur desa atau operator bidang belum memiliki kemampuan pendataan yang seragam, maka kualitas data tidak akan mencapai standar yang konsisten. Hal ini menunjukkan pentingnya pelatihan berkelanjutan dan penguatan sistem pembinaan teknis bagi seluruh pelaksana pendataan.

Dimensi Metadata

Menunjukkan bahwa kejelasan Definisi Data dan Ketersediaan Metadata di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa penggunaan istilah dan definisi data sudah seragam dan mengikuti regulasi, serta dipakai sesuai SOP setelah melalui proses validasi. Namun demikian, pengelolaan metadata belum terdokumentasi secara optimal. Pemahaman metadata, terutama pada kader desa, juga dinilai masih terbatas sehingga memerlukan penguatan kemampuan teknis. Selain itu, pengelolaan dan pembaruan data telah berpedoman pada Renstra dan regulasi lainnya, tetapi belum didukung metadata khusus yang terdokumentasi. Pemanfaatan metadata dalam proses pembaruan dinilai belum optimal karena keterbatasan pemahaman perangkat desa mengenai aspek teknis metadata. Hal ini menekankan pentingnya dokumentasi yang jelas agar data dapat dimanfaatkan secara benar, seperti konsep metadata menurut Khatri & Brown (2010) yaitu "Metadata didefinisikan sebagai data tentang data yang menjelaskan isi data dan menyediakan mekanisme deskripsi data secara ringkas dan konsisten sehingga membantu dalam menafsirkan makna atau semantik data." Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum tersedianya metadata khusus menghambat proses pembaruan dan interpretasi data.

Dalam konteks pengelolaan data modern, metadata merupakan instrumen penting dalam sistem basis data karena memastikan data dapat dibaca, dipahami, serta digunakan lintas unit kerja. Wicaksono (2024) menegaskan bahwa metadata dalam sistem basis data berfungsi sebagai penjelas struktur data, format, relasi antarvariabel, dan mekanisme pembaruan sehingga data dapat digunakan secara konsisten. Hal ini sejalan dengan pandangan Assauri (2012) dalam manajemen operasi yang menyatakan bahwa informasi yang tidak terdokumentasi secara sistematis akan menimbulkan kesalahan proses kerja dan meningkatkan risiko ketidakefisienan. Oleh karena itu, lemahnya dokumentasi metadata di DPMD dapat dipahami sebagai hambatan struktural yang berpotensi menurunkan kualitas koordinasi data antarbidang.

Dari perspektif administrasi perkantoran modern, dokumentasi metadata juga berkaitan dengan aspek pengarsipan, penataan dokumen, serta kemudahan temu kembali informasi. Gie (2022) menekankan bahwa administrasi perkantoran modern harus berbasis sistem dokumentasi yang rapi dan terstruktur agar organisasi mampu menyediakan informasi secara cepat dan tepat. Dalam konteks administrasi publik, Silalahi (2020) menambahkan bahwa data dan dokumen organisasi publik harus disusun secara sistematis karena menjadi bagian dari pertanggungjawaban birokrasi. Dengan demikian, lemahnya pengelolaan metadata bukan hanya masalah teknis, melainkan juga berdampak pada kemampuan organisasi untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.

Dimensi *Data Access* (Akses Data)

Menunjukkan bahwa Kejelasan Hak Akses dan Keamanan Data di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa hak akses telah diatur melalui SOP dan dibatasi berdasarkan kewenangan masing-masing bidang. Dinas Kominfo berperan sebagai koordinator dalam pengaturan akses digital. Namun mekanisme akses belum sepenuhnya terpusat sehingga masih memunculkan potensi perbedaan pola penyimpanan dan akses antarbidang. Keamanan data juga dinilai cukup baik dan telah dibatasi melalui SOP. Namun penerapannya masih sederhana, sehingga perlu penguatan keamanan digital, terutama terkait perlindungan data kelembagaan dan arsip yang masih dikelola secara manual di beberapa bidang. Dalam hal ini, kejelasan hak akses harus dibarengi mekanisme terpusat agar data dapat digunakan secara efektif, seperti yang dikemukakan oleh Khatri & Brown (2010), yaitu: "Akses data didasarkan pada kemampuan penerima manfaat data untuk menetapkan nilai pada berbagai kategori data." Berdasarkan pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa kejelasan hak akses yang belum diiringi integrasi sistem menyebabkan potensi ketidaksinkronan data. Maka dari itu, diperlukan penguatan sistem penyimpanan terpusat agar akses data lebih efektif.

Dalam perspektif administrasi publik modern, akses data bukan hanya persoalan teknis penggunaan sistem, tetapi juga berkaitan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Keban (2017) menegaskan bahwa administrasi publik harus mampu membangun sistem yang mendukung efisiensi dan efektivitas kerja birokrasi, termasuk dalam penyediaan akses informasi internal yang jelas dan terkoordinasi. Hal ini juga sejalan dengan Banga (2018) yang menekankan bahwa akses informasi yang baik akan mendukung koordinasi antarunit organisasi sehingga mengurangi konflik kewenangan dan meningkatkan konsistensi kerja kelembagaan. Oleh karena itu, pola akses data yang belum sepenuhnya terpusat di DPMD menunjukkan bahwa integrasi sistem masih perlu diperkuat agar tidak terjadi fragmentasi akses informasi antarbidang.

Selain itu, akses data juga harus memperhatikan aspek keamanan dan perlindungan informasi organisasi. Dalam konteks data governance, Khatri & Brown (2010) menekankan bahwa akses data harus berbasis nilai dan kewenangan agar data tidak disalahgunakan. Dalam administrasi publik, Nigro & Nigro (2018) menjelaskan bahwa birokrasi modern harus membangun mekanisme kontrol internal sebagai bagian dari penguatan integritas organisasi. Oleh karena itu, penyimpanan data secara manual yang masih terjadi di beberapa bidang dapat menimbulkan risiko kehilangan data atau kebocoran informasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem keamanan data perlu diperkuat melalui kebijakan pengendalian akses digital yang lebih modern, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam manajemen data berbasis teknologi.

Dimensi *Data life Cycle* (Siklus Hidup Data)

Menunjukkan bahwa Kejelasan Hak Akses dan Keamanan Data di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa proses pengumpulan dan pembaruan data bersumber dari desa dengan memanfaatkan data tahun sebelumnya. Data divalidasi berjenjang (desa → kecamatan → dinas) dan disimpan secara manual maupun digital. Namun masih terdapat kendala berupa perbedaan format, keterbatasan sarana, waktu, serta kemampuan pelaksana. Pengarsipan juga telah memiliki prosedur, tetapi data belum sepenuhnya terpusat dan masih banyak dikelola manual. Dampaknya adalah keterlambatan pembaruan dan kesulitan pencarian arsip, sehingga dinas membutuhkan sistem arsip digital yang lebih terintegrasi. Pengaturan setiap tahap tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa data tetap akurat, konsisten, dan mudah ditelusuri. Hal ini sejalan dengan pandangan Khatri & Brown (2010), yaitu: "Siklus hidup data mengacu pada tahapan yang dilalui data sejak dibuat, digunakan, disimpan, hingga akhirnya diarsipkan atau dihapus." Berdasarkan teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelarasan format dan penguatan kapasitas sumber daya manusia perlu dilakukan untuk memastikan prosedur data berjalan konsisten.

Dalam konteks manajemen organisasi, siklus hidup data dapat dianalogikan sebagai siklus produksi informasi yang membutuhkan standar proses kerja yang jelas. Assauri (2012) menegaskan bahwa dalam manajemen operasi, suatu sistem hanya akan efektif jika alur prosesnya berjalan konsisten dari input hingga output. Jika terjadi perbedaan format dan keterlambatan pembaruan, maka output informasi yang dihasilkan

akan tidak optimal. Hal ini juga sejalan dengan pemikiran Amirullah (2015) bahwa fungsi manajemen tidak akan berjalan baik apabila sistem pengelolaan sumber daya organisasi, termasuk data, tidak dikelola secara sistematis. Oleh karena itu, siklus hidup data di DPMD memerlukan integrasi sistem agar setiap tahapan pengumpulan hingga pengarsipan berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan hambatan administratif.

Dari perspektif administrasi publik, siklus hidup data juga berkaitan dengan aspek akuntabilitas kelembagaan. Shafritz, Russell, & Borick (2016) menekankan bahwa organisasi publik harus mampu mendokumentasikan seluruh proses kerja sebagai bentuk pertanggungjawaban birokrasi. Dalam konteks manajemen pendidikan, Suhardan (2011) menjelaskan bahwa sistem dokumentasi yang tidak tertata akan menghambat evaluasi program dan perencanaan lanjutan. Dengan demikian, pengarsipan data yang masih manual dan belum terpusat di DPMD menunjukkan bahwa sistem kelembagaan masih perlu penguatan melalui digitalisasi arsip serta standarisasi format data. Hal ini juga penting untuk mendukung prinsip pelayanan publik modern yang menuntut birokrasi bekerja cepat, tepat, dan berbasis bukti (Denhardt & Denhardt, 2015; Pasolong, 2017).

4. KESIMPULAN

Tata kelola data kelembagaan desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini ditunjukkan melalui keberadaan kebijakan dan pedoman formal, mekanisme validasi data secara berjenjang, serta pengaturan akses data sesuai dengan kewenangan masing-masing bidang. Penerapan lima dimensi *data governance*, yaitu prinsip data, kualitas data, metadata, akses data, dan siklus hidup data, pada umumnya telah mendukung pengelolaan data kelembagaan meskipun belum sepenuhnya optimal.

Penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala yang masih memengaruhi efektivitas tata kelola data kelembagaan, antara lain belum terintegrasinya data antarbidang, pengelolaan metadata yang belum terdokumentasi secara sistematis, keterbatasan sistem informasi terpusat, serta ketergantungan pada proses manual dan kapasitas sumber daya manusia yang belum merata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi sistem, peningkatan kompetensi aparatur, serta optimalisasi koordinasi dan pengawasan internal guna mewujudkan tata kelola data kelembagaan desa yang lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

REFERENCES

- Akadun. (2019). *Administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustini, F. (2013). *Manajemen strategik*. Medan: USU Press.
- Amirullah. (2015). *Pengantar manajemen*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Anggara, S. (2018). *Administrasi publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ardana, I. K. (2012). *Manajemen sumber daya manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Assauri, S. (2012). *Manajemen produksi dan operasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Banga, W. (2018). *Administrasi publik: Konsep dan teori*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2015). *The new public service: Serving, not steering*. New York: Routledge.
- Fayol, H. (2012). *General and industrial management (Terjemahan)*. Jakarta: Gramedia.
- Gie, T. L. (2022). *Administrasi perkantoran modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Griffin, R. W. (2012). *Management*. Boston: Cengage Learning.
- Hasibuan, M. S. P. (2012). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Henry, N. (2017). *Public administration and public affairs*. New York: Routledge.
- Keban, Y. T. (2017). *Enam dimensi strategis administrasi publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Khatri, V., & Brown, C. V. (2010). Designing data governance. *MIS Quarterly*, 34(1), 148-170.
- Kotler, P. (2012). *Manajemen pemasaran*. Jakarta: Erlangga.
- Maulana, A. (2022). *Pengantar administrasi publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Nigro, F. A., & Nigro, L. G. (2018). *Modern public administration*. New York: Harper & Row.

- Pasolong, H. (2017). *Teori administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rosenbloom, D. H. (2015). *Public administration: Understanding management, politics, and law*. New York: McGraw-Hill.
- Safroni, L. (2012). *Manajemen dan reformasi pelayanan publik*. Jakarta: Aditya Media.
- Shafritz, J. M., Russell, E. W., & Borick, C. (2016). *Introducing public administration*. New York: Routledge.
- Siagian, S. P. (2020). *Filsafat administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, U. (2020). *Studi administrasi publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Siswanto. (2007). *Pengantar manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suhardan, D. (2011). *Manajemen pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Syafie, I. K., dkk. (2017). *Ilmu administrasi publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wicaksono, A. (2024). *Manajemen data dan sistem basis data*. Yogyakarta: Andi Offset.

IMPLEMENTASI PROGRAM MANAJEMEN AGRIBISNIS TEMBAKAU DALAM MENINGKATKAN KUALITAS BAHAN BAKU DI UPT AGRIBISNIS TEMBAKAU KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN SUMEDANG

Dadan Setia Nugraha¹, Difla Salsabila², Elena Nurdiana Rahmat³, Ikhsan Laksamana⁴,
M. Syahrindra Oktaviandhi⁵, Nadilah Pauziah⁶, Riska Putri Cahyani⁷

Universitas Sebelas April

Email *1: dadan_setia@unsap.ac.id

ABSTRAK

This study aims to examine how the implementation of the Tobacco Agribusiness Management Program contributes to improving the quality of tobacco raw materials at the Tobacco Agribusiness Technical Unit (UPT) in Tanjungsari District, Sumedang Regency. The program is implemented as part of the utilization of Tobacco Excise Revenue Sharing Funds (DBHCHT) in accordance with the Regulation of the Minister of Finance Number 72 of 2024. This research employs a qualitative method. Informants were selected using purposive sampling techniques and included the Head of the Tobacco Agribusiness UPT, agricultural extension officers, and assisted tobacco farmers. Data collection techniques consisted of observation, in-depth interviews, and documentation. Data validity was tested through credibility, transferability, dependability, and confirmability. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing and verification. The results indicate that the implementation of the Tobacco Agribusiness Management Program has been carried out in accordance with applicable policies through farm management training activities, technical assistance in cultivation and post-harvest handling, and the strengthening of farmer group institutions. The program has provided benefits by increasing farmers' understanding of more planned and structured farm business management. However, the implementation of the program in improving the quality of tobacco raw materials has not yet been fully optimal. This condition is caused by limitations in human resources, constraints in DBHCHT budget allocation, and the lack of optimal intensity in post-training assistance and monitoring. Therefore, it is necessary to strengthen assistance and monitoring mechanisms, prioritize program planning, and enhance the role of farmer groups so that the implementation of the Tobacco Agribusiness Management Program can be more effective, sustainable, and capable of improving the quality of tobacco raw materials in Sumedang Regency.

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks pembangunan nasional, pemerintah memiliki peran strategis sebagai perumus dan pengendali kebijakan publik agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara efektif. Kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang berdampak langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan sangat ditentukan oleh proses implementasinya, yaitu tahap ketika kebijakan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh pelaksana di lapangan untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan masyarakat.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang hingga kini tetap memiliki peran fundamental dalam perekonomian nasional, khususnya bagi masyarakat perdesaan. Di tengah pergeseran struktur ekonomi ke arah industri dan jasa, pertanian termasuk komoditas tembakau masih menjadi sumber penghidupan utama bagi jutaan petani dan tenaga kerja dalam rantai agribisnis. Tembakau memiliki posisi unik dalam perekonomian Indonesia karena menjadi penyumbang terbesar penerimaan negara dari sektor cukai, meskipun dikategorikan sebagai sin tax atau pajak atas barang yang berdampak negatif bagi kesehatan.

Besarnya kontribusi tembakau terhadap penerimaan negara dapat dilihat pada realisasi penerimaan cukai tahun 2024, di mana cukai hasil tembakau mendominasi total penerimaan cukai nasional.

Tabel 1. Jumlah Penerimaan Cukai Negara 2024

No	Jenis Penerimaan Cukai	Jumlah Realisasi
1	Hasil Tembakau	184,34
2	Ethil Alkohol	0,13
3	MMEA	8,13
4	Denda Administrasi Cukai	0,12
5	Cukai lainnya	0,02
6	Plastik	0,00
7	MBDK	0,00
Total		246,08

Sumber: APBN Kita 2024

Sebagian penerimaan cukai hasil tembakau tersebut dialokasikan kembali kepada daerah melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. DBHCHT ditetapkan sebesar 3% dari total penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri dan diperuntukkan bagi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, terutama daerah penghasil tembakau. Ketentuan lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 menegaskan bahwa penggunaan DBHCHT diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan kualitas bahan baku tembakau dan penguatan kapasitas petani.

Kabupaten Sumedang merupakan salah satu daerah penghasil tembakau di Provinsi Jawa Barat yang menerima alokasi DBHCHT. Pada tahun anggaran 2025, Kabupaten Sumedang menerima DBHCHT sebesar sekitar Rp34,22 miliar, dengan alokasi untuk Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp3.250.838.095 atau sekitar 9,5% dari total DBHCHT kabupaten. Kabupaten ini memiliki potensi tembakau unggulan, khususnya varietas tembakau Mole yang dikenal memiliki aroma dan tekstur khas serta diminati oleh industri.

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan DBHCHT dan meningkatkan kualitas bahan baku tembakau, Pemerintah Kabupaten Sumedang membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Agribisnis Tembakau. Salah satu program strategis yang dilaksanakan adalah Program Manajemen Agribisnis (Managris), yang bertujuan meningkatkan kapasitas petani tidak hanya dari aspek teknis budidaya, tetapi juga dari sisi manajerial usaha tani. Program ini menekankan kemampuan petani dalam perencanaan usaha, pengelolaan biaya, pencatatan administrasi, analisis kelayakan usaha, serta strategi pemasaran, sehingga petani diposisikan sebagai pelaku agribisnis yang profesional dan berorientasi keberlanjutan.

Berdasarkan hasil observasi awal di lapangan, ditemukan beberapa indikasi permasalahan dalam implementasi program manajemen agribisnis di Kabupaten Sumedang, sebagai berikut:

1. Keterbatasan jumlah penyuluh dan pegawai UPT Agribisnis Tembakau menjadi salah satu factor utama yang menghambat efektivitas pendampingan teknis kepada petani. Jumlah tenaga penyuluh yang relative sedikit tidak sebanding dengan luas wilayah binaan serta banyaknya kelompok tani yang harus dilayani, sehingga proses monitoring, pembinaan, dan supervise tidak dapat dilakukan secara intensif maupun berkelanjutan. Kondisi ini juga berdampak pada rendahnya intensitas pendampingan setelah petani mengikuti pelatihan Manajemen Agribisnis (Managris), di mana tidak ada pemantauan yang memadai terkait perubahan praktik budidaya di lapangan maupun penerapan materi pelatihan. Akibatnya, pelaksanaan budidaya kembali sepenuhnya diserahkan kepada petani tanpa evaluasi lanjutan, sehingga potensi peningkatan kualitas bahan baku tembakau melalui program pelatihan tidak dapat tercapai secara optimal.

Tabel 2. Jumlah Pegawai

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala UPT Agribisnis Tembakau	1
2.	Staf administrasi umum	1
3.	Analalis informasi pasar hasil tembakau	1
Total		3

2. Ketergantungan yang tinggi pada stake holder lain, seperti instansi terkait dan pelaku usaha, yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan program tidak dapat dilaksanakan sesuai perencanaan awal. Kondisi ini menuntut adanya penyesuaian jadwal dan anggaran serta koordinasi yang intensif antar pihak, sehingga berdampak pada efektivitas pelaksanaan dan pelaporan kegiatan program.
3. Rendahnya tingkat kepatuhan dan responsivitas menjadi penghambat efektivitas pelaksanaan program Managris. Pelaksanaan program Managris di lapangan terganggu oleh rendahnya kepatuhan petani terhadap standard budidaya yang telah ditetapkan serta minimnya respons cepat dari pelaksana program ketika muncul keluhan atau kebutuhan baru. Petani sering kembali pada cara-cara tradisional karena tidak ada pemantauan berkelanjutan, sementara penyuluh tidak dapat merespons secara cepat akibat keterbatasan tenaga dan mekanisme birokratis yang memperlambat tindak lanjut. Ketika pelaksana tidak responsif dan petani tidak sepenuhnya patuh, alur implementasi menjadi terputus di tengah jalan. Kondisi ini menyebabkan materi pelatihan tidak benar-benar diterapkan, dan tujuan program untuk meningkatkan kualitas budidaya tembakau menjadi sulit tercapai.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti memandang perlu dilakukan kajian ilmiah mengenai bagaimana program manajemen agribisnis tembakau diimplementasikan oleh UPT Agribisnis Tembakau serta sejauh mana program tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas bahan baku tembakau di Kabupaten Sumedang. Oleh sebab itu, peneliti mengangkat judul “Implementasi Program Manajemen Agribisnis Tembakau Dalam Meningkatkan Kualitas Bahan Baku di UPT Agribisnis Tembakau Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang.”

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang juga dikenal sebagai metode naturalistik karena prosesnya berlangsung dalam situasi yang benar-benar alami (*natural setting*). Creswell (Murdiyanto, 2020) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai “suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.”

Teknik yang digunakan dalam menentukan subjek penelitian yaitu dengan purposive sampling. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang UPT Agribisnis Tembakau, Analis Pasar UPT Agribisnis Tembakau, Ketua Kelompok Tani Malaka 2, dan Ketua Kelompok Mekar Saluyu.

Tabel 3. Subjek Penelitian

No	Unsur	Jumlah (orang)
1	Kepala Bidang UPT Agribisnis Tembakau Tanjungsari	1
3	Analis Pasar UPT Agribisnis Tembakau Tanjungsari	1
4	Ketua Kelompok Tani Malaka 2	1
5	Ketua Kelompok Mekar Saluyu	1
Jumlah		4

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

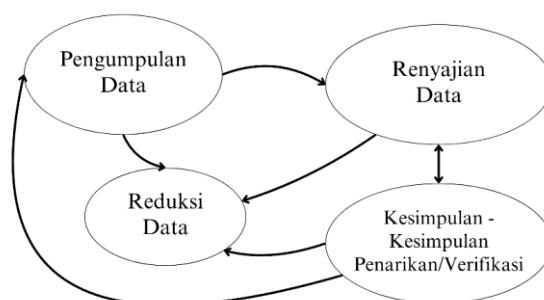
- a. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi yang bersumber dari berbagai literatur tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian terdahulu, dan dokumen akademik lainnya yang berkaitan dengan variabel dalam penelitian ini.
- b. Studi lapangan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu UPT Agribisnis Tembakau, dengan meliputi beberapa metode:
 1. Observasi atau Pengamatan
 2. Wawancara
 3. Dokumen
 4. Triangulasi

Agar data penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu diadakan uji keabsahan data, sebagai berikut:

1. Uji *Kreadibility*
2. Uji *Transferability*
3. Uji *Dependability*
4. Uji *Konfirmability*

Data hasil wawancara dan observasi diolah dengan Teknik analisis sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)
2. *Data Display* (Penyajian data)
3. *Conclusion Drawing/Verification* (Menarik kesimpulan)



Gambar 3. 1
Teknik Analisa Data

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi program merupakan tahapan krusial dalam siklus kebijakan publik karena pada tahap inilah berbagai rencana dan tujuan kebijakan diwujudkan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Hal ini sejalan dengan pandangan (Herman, 2016) yang menyatakan bahwa “Implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui.”

Keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi sangat bergantung pada bagaimana program tersebut dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan serta diterima dan dijalankan oleh kelompok sasaran. Oleh karena itu, implementasi menjadi indikator penting untuk menilai tercapai atau tidaknya tujuan program yang telah ditetapkan.

Dalam konteks Implementasi Program Manajemen Agribisnis Tembakau di UPT Agribisnis Tembakau Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dipahami sebagai serangkaian aktivitas untuk menerjemahkan kebijakan peningkatan kualitas bahan baku tembakau ke dalam tindakan konkret. Implementasi program ini meliputi perencanaan kegiatan, pelaksanaan pelatihan manajemen agribisnis, pendampingan petani, pengelolaan sumber daya, serta monitoring dan evaluasi hasil program.

Implementasi Program Manajemen Agribisnis Tembakau yang didukung Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dikaji secara mendalam melalui penggunaan kerangka analisis implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle, dengan menitikberatkan pada dimensi *content of policy* dan *context of implementation* yaitu sebagai berikut:

1. Content atau isi kebijakan, terdiri dari :
 - 1) *Interest affected* (Kepentingan yang Terpengaruh)
 - 2) *Type of benefits* (Tipe Manfaat)
 - 3) *Extent of change envisioned* (Perubahan yang akan Diwujudkan)
 - 4) *Site of decision making* (Kedudukan Pembuat Kebijakan)
 - 5) *Program implementers* (Para Pelaksana Program)
 - 6) *Resources committed* (Sumber Daya yang Dikerahkan)
2. Context atau lingkungan kebijakan, terdiri dari :
 - 1) *Power, interests, and strategies of actor involved* (Kekuatan, Kepentingan, dan Strategi Para Aktor yang Terlibat)
 - 2) *Institution and regime characteristics* (Karakteristik Lembaga dan Penguasa)
 - 3) *Compliance and responsiveness* (Kepatuhan dan Daya Tanggap Pelaksana)

Content (Isi Kebijakan)

1. Kepentingan yang Terpengaruh (*Interests Affected*)

Implementasi Program Manajemen Agribisnis Tembakau melibatkan kepentingan antara pelaksana program dan kelompok tani sebagai sasaran kebijakan. menunjukkan program ini melibatkan kepentingan UPT Agribisnis Tembakau sebagai pelaksana program dan kelompok tani sebagai sasaran kebijakan. Kelompok tani berkepentingan terhadap peningkatan kualitas dan nilai jual tembakau, sedangkan UPT berkepentingan terhadap keberhasilan program serta optimalisasi pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan kelompok tani untuk meningkatkan kualitas tembakau pada dasarnya sejalan dengan kepentingan UPT Agribisnis Tembakau dalam mencapai target program, meskipun keterbatasan implementasi membuat hasil yang dicapai belum optimal. Temuan ini sejalan dengan pandangan Grindle yang menyatakan bahwa keberhasilan atau

kegagalan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang terkandung dalam kebijakan tersebut (Ariyanti et al., 2024)

2. Jenis Manfaat yang Dihasilkan (*Type of Benefits*)

Manfaat yang dihasilkan dari program ini lebih bersifat peningkatan pengetahuan dan kapasitas petani dalam manajemen agribisnis tembakau. Namun, manfaat tersebut belum sepenuhnya dirasakan dalam bentuk perubahan praktik secara nyata di lapangan. Menurut Grindle, manfaat kebijakan yang bersifat tidak langsung memerlukan proses implementasi yang berkelanjutan agar dapat menghasilkan dampak nyata. Hal ini menjelaskan mengapa manfaat program belum sepenuhnya terwujud dalam perubahan praktik budidaya dan pascapanen secara luas.

3. Derajat Perubahan yang Diharapkan (*Extent of Change Envisioned*)

Program ini mengharapkan terjadinya perubahan dalam kualitas bahan baku tembakau dan pola pengelolaan usaha tani. Dalam kerangka Grindle, semakin besar perubahan yang diharapkan, semakin besar pula tantangan implementasi yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tersebut masih berlangsung secara bertahap karena keterbatasan sumber daya dan pendampingan.

4. Letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*)

Pengambilan keputusan dalam implementasi program berada pada UPT Agribisnis Tembakau dengan mengacu pada kebijakan penggunaan DBHCHT. Keputusan teknis pelaksanaan kegiatan juga melibatkan koordinasi dengan dinas terkait dan penyuluh lapangan. Dalam perspektif Grindle, pengambilan keputusan yang relatif terpusat dapat memengaruhi fleksibilitas implementasi di tingkat lapangan. Kondisi ini membatasi kemampuan pelaksana untuk menyesuaikan program secara cepat terhadap kebutuhan spesifik kelompok tani. Namun demikian, koordinasi antaraktor yang dilakukan menunjukkan adanya upaya kolaboratif. Hal ini sejalan dengan pendapat Sari dan Yalia (2019) yang menyatakan bahwa sinergi merupakan bentuk kolaborasi antaraktor yang saling melengkapi dan mampu menghasilkan capaian yang lebih besar dibandingkan jika masing-masing pihak bekerja secara terpisah.

5. Pelaksana Program (*Program Implementers*)

Pelaksana program memiliki kompetensi yang memadai, namun keterbatasan jumlah pelaksana menyebabkan perangkapan tugas dan berkurangnya intensitas pendampingan. Menurut Grindle, efektivitas implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kecukupan pelaksana dalam menjalankan peran mereka secara konsisten. Hal ini juga diperkuat dengan (V.Fimidia et al., 2024) dalam hasil penelitiannya yang menunjukan keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran, serta koordinasi yang lemah antar lembaga merupakan hambatan utama dalam proses implementasi.

6. Sumber Daya yang Digunakan (*Resources Committed*)

Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran DBHCHT menjadi kendala utama dalam implementasi Program Manajemen Agribisnis Tembakau. Dalam teori Grindle, ketersediaan sumber daya merupakan prasyarat penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Keterbatasan sumber daya tersebut membatasi jangkauan program serta efektivitas pendampingan kepada kelompok tani. Sejalan dengan hal tersebut, Edward III menyatakan bahwa implementasi kebijakan cenderung menjadi tidak efektif meskipun perintah implementasi telah disampaikan secara jelas dan konsisten, apabila pelaksana tidak didukung oleh sumber daya yang memadai (Subekti et al., 2017).

Context (Lingkungan Kebijakan)

1. Kekuatan, Kepentingan, dan Aktor yang Terlibat (*Power, Interests, and Strategies of Actors Involved*)

Implementasi program melibatkan berbagai aktor, seperti UPT Agribisnis Tembakau, penyuluh lapangan, kelompok tani, dan pemangku kepentingan terkait. Dalam perspektif Grindle, perbedaan kekuasaan, kepentingan, dan strategi antaraktor memengaruhi dinamika implementasi kebijakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa UPT memiliki kewenangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sementara kelompok tani berperan sebagai penerima manfaat. Strategi pelaksanaan lebih bersifat *top-down* dengan pendekatan pembinaan, yang dalam praktiknya belum sepenuhnya mendorong partisipasi aktif seluruh anggota kelompok tani.

2. Karakteristik Institusi dan Rezim (*Institutional and Regime Characteristics*)

Secara institusional, UPT Agribisnis Tembakau memiliki struktur organisasi dan tugas pokok yang jelas. Namun, dalam kerangka Grindle, karakteristik institusi juga berkaitan dengan kapasitas organisasi dalam menghadapi kompleksitas implementasi. Keterbatasan personel dan luasnya wilayah binaan menunjukkan bahwa kapasitas institusi masih perlu diperkuat.

3. Kepatuhan dan Daya Tanggap Pelaksana (*Compliance and Responsiveness*)

Pelaksana program menunjukkan kepatuhan terhadap pedoman pelaksanaan program serta respons terhadap permasalahan di lapangan. Dalam teori Grindle, kepatuhan dan daya tanggap merupakan indikator

penting efektivitas implementasi. Namun, keterbatasan sumber daya menyebabkan respons pelaksana belum sepenuhnya mampu mengatasi seluruh kendala yang muncul.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Manajemen Agribisnis Tembakau (Managris) di UPT Agribisnis Tembakau Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024. Hal ini tercermin dari kesesuaian jenis kegiatan, mekanisme pendampingan, serta sasaran program yang diarahkan pada peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan manajemen usaha tani, pendampingan teknis budidaya dan pascapanen, serta penguatan kelembagaan kelompok tani. Program ini disusun berdasarkan kebutuhan kelompok tani dan dinilai mampu memberikan manfaat berupa peningkatan pemahaman petani dalam perencanaan dan pengelolaan usaha tani tembakau, meskipun peningkatan kualitas bahan baku secara nyata belum dirasakan secara optimal dan merata oleh seluruh kelompok tani binaan.

Namun demikian, implementasi Program Managris belum sepenuhnya mencapai hasil yang diharapkan. Belum optimalnya pelaksanaan program dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran DBHCHT, rendahnya intensitas pendampingan di lapangan, serta koordinasi dan komunikasi yang belum sepenuhnya merata antara pelaksana program dan kelompok tani. Kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya penerapan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh petani dalam praktik budidaya dan pengelolaan pascapanen tembakau.

Sebagai respons terhadap berbagai hambatan tersebut, UPT Agribisnis Tembakau Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang telah melakukan sejumlah upaya perbaikan, antara lain melalui penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, penyesuaian perencanaan kegiatan dengan ketersediaan anggaran, peningkatan sosialisasi dan pembinaan kepada kelompok tani, serta penguatan peran kelompok tani sebagai sarana pembelajaran dan pengawasan internal. Upaya-upaya ini menunjukkan adanya komitmen kelembagaan dalam menjaga keberlanjutan program serta meningkatkan efektivitas implementasi Program Managris dalam mendorong peningkatan kualitas bahan baku tembakau secara lebih merata dan berkelanjutan di Kabupaten Sumedang.

REFERENSI

- Addawiyah, Febriani, L., & Fadillah, N. (2025). Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik dalam Mewujudkan Pelayanan Publik yang Responsif: Tinjauan Teoritis dan Empiris. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(1), 6–8.
- Ahmadi, A., Saleh, A., & Priyatna, W. B. (2025). *Komunikasi Organisasi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam Program Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa*. 22(02), 106–107.
- Andini, D., Widodo, J., & Radjikan. (2023). *Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Digital Pada Aplikasi Klampid New Generation Dinas Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya*. 3(2), 6.
- Asmariva, H. (2015). Implementasi Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas Senapelan Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. *Jom FISIP*, 2, 6–7.
- Dylanesia, W. (2023). *THE POWER OF TEAMWORK BAGAIMANA MENENTUKAN PERAN YANG EFEKTIF UNTUK MENCAPAI TUJUAN* (G. Irawan (ed.)). CAHAYA HARAPAN.
- Entjaurau, J. A., Sumampow, I., & Undap, G. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Melaksanakan Protokol Kesehatan Covid-19 di Kecamatan Pineleng. *Jurnal Governance*, 1(2), 8.
- Fahrudi, A. (2005). *Pengaruh Pendelegasian Wewenang oleh Camat Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai di Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran*. 16.
- Firdaus, R. (2020). *IMPLEMENTASI PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI DESA BRINGIN JAYA KECAMATAN BAEBUNTA SELATAN KABUPATEN LUWU UTARA*. 3(2), 5.
- Handani, M. S., & Frinaldi, A. (2020). *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan Sistem Zonasi Pada SMP Negeri di Kota Padang*. 2(3), 6–13.
- Haris, A., & Kusmanto, H. (2016). *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal) Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai Inspection Function of Inspectorate of Serding Bedagai Regency*. 6(1), 79.
- Herman. (2016). *Model Implementasi Program Efektif dan Efisien*. Badan Penerbit UNM.

- Husin, H. (2023). *Etika Kebijakan Publik*. CV. Diva Pustaka.
- Iskandar, A. (2016). Upaya Hukum Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Kecamatan Tanjungkarang Pusat). *Jurnal Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum*, 11(1), 8.
- Kartono. (2013). *Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Pelayanan Publik (Studi Implementasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Di Kantor Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Arut Selat*.
- Madjid, U. (2021). *Pengantar Ilmu Administrasi* (S. PSL (ed.)). PT. Pustaka Interest Media Amani.
- Maharani, W. M., & Sukardi. (2016). Jurnal Ilmu Administrasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 1/02, 140.
- Marnis & Priyono. (2008). Manajemen Sumber Daya Manusia. In T. Chandra (Ed.), *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Zifatama. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Marwiyah, S. (2022). *Kebijakan Publik*.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai Contoh Proposal*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. Albina (ed.)). CV. Harfa Creative.
- Nursinar, Nurdin, F., Megawati, & Astaman, P. (2025). *Implementasi Program Penyuluhan Pertanian dan Dampaknya Terhadap Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Batu Belerang Implementation of the Agricultural Extension Program and Its Impact on the Empowerment of Farmer Groups in Batu Belerang Village*. 13(1), 55.
- Rahmadanita, A., Santoso, E. B., & Wasistiono, S. (2019). Implementasi Kebijakan Smart Government Dalam Rangka Mewujudkan Smart City Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 44(2), 89–102. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v44i2.279>
- Rahmayanti, D., & Salomo, R. V. (2020). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN TUBERKULOSIS DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS SATU CIPINANG*. 4(2), 3. <https://doi.org/10.35722/PUBBIS.V4I2.275>
- Ratitya, S. P., Prabawati, N. P. anik, & Wirantari I, D. A. P. (2024). *Implementasi Aplikasi Program Tulungagung Layak Huni (PROTAL) dalam Mendukung Penanganan Kawasan Kumuh di Kabupaten Tulungagung*. 2(4), 2.
- Rodiyah, I., Sukmana, H., & Mursyidah, L. (2022). Buku ajar Pengantar Ilmu Administrasi Publik. In T. Multazam & M. D. K. Wardana (Eds.), *Umsida Press*. UMSIDA Press.
- Sampoh, V. D., Ruru, J. M., & Palar, N. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondou Utara*.
- Sari, D., & Yalia, M. (2019). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI UNTUK PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DI KOTA CIREBON. *Jurnal Pikom*, 20(1), 26.
- Septyaputri, M. (2015). *Studi Tentang Dampak Keberhasilan Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Kpegawaian Daerah Sidoarjo (SIMPEGDA) Pada Kepuasan Karir Guru Sekolah Dasar*.
- Setiawan, D. A., & Anisykurlillah, R. (2024). *IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DALAM MEMFASILITASI KERUMAHTANGGAAN BIRO UMUM Sekertariat Derah Provinsi Jawa Timur*. 4(1), 58.
- Sidiq, U., & Choiri, Miftachul, M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (A. Mujahidin (ed.)). Nata Karya.
- Subekti, M., Fapjanudin, M., & Rokhman, A. (2017). *Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektivitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tambak*. 3(2), 3.
- Subianto. (2020). *Kebijakan Publik*. Brilliant.
- Sugiyono. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF* (S. Y. Suryandi (ed.); Keenam). CV Alfabeta.
- Syarief, S. A. N. (2025). Administrasi Sekolah , Unsur-unsur Administrasi dan Bidang potensi yang ada dalam memberdayakan sumber daya manusia yang dimiliki melalui. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(3), 3. <https://journal.aripafi.or.id/index.php/jmpai/article/download/1129/1488>
- V.Finidia, I., Zubaidah, S., Fuji, L. D., Uswatun, H. A., Huspita, S. F., Sinar, F. E., Basron, Aprin, Putra, D. B., & Dwi, S. A. (2024). *TANTANGAN DAN HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN TIM RENSTRA DI KESBANGPOL KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR*. 7(September), 99.

EFEKTIVITAS PROGRAM MAGANG KE JEPANG SEBAGAI INOVASI PENGEMBANGAN *HUMAN CAPITAL LOCAL* DI KABUPATEN SUMEDANG

Ratu Vidyadari Syawaliah Azzahra*¹, Redsyaprilia Digita Putri², Salsabila Khoerunnisa³, M. Rizki⁴, Ricky Firmansyah⁵

Universitas Sebelas April

Email *¹: ratuvidyadari@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji efektivitas Program Magang Jepang sebagai inovasi dalam pengembangan sumber daya manusia lokal di Kabupaten Sumedang. Analisis ini berfokus pada empat dimensi efektivitas program: ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pejabat Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang, lembaga pelatihan, dan peserta Program Magang Jepang, yang dipilih menggunakan sampling purposif. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, didukung oleh triangulasi sumber dan teknik. Temuan menunjukkan bahwa Program Magang Jepang secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah berkontribusi dalam meningkatkan kompetensi teknis, disiplin kerja, dan sikap profesional peserta. Namun, efektivitas program ini belum sepenuhnya optimal akibat penyebaran informasi program yang tidak merata, tingkat kesiapan peserta yang bervariasi, dan ketidakhadiran sistem pemantauan dan bantuan pasca-magang yang terstruktur. Studi ini menyimpulkan bahwa memperkuat penyebaran informasi program, mempertajam penargetan peserta, dan mengembangkan mekanisme pemantauan terintegrasi merupakan hal yang esensial untuk meningkatkan efektivitas Program Magang Jepang dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia lokal yang berkelanjutan di Kabupaten Sumedang.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Efektivitas Kebijakan Publik, Efektivitas Program, Program Magang ke Jepang.

1. PENDAHULUAN

Pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) merupakan salah satu agenda strategis dalam pembangunan nasional dan daerah. Kualitas *human capital* berperan penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi, memperluas kesempatan kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan daerah, peningkatan kualitas tenaga kerja menjadi prasyarat utama agar masyarakat mampu beradaptasi dengan dinamika pasar kerja yang semakin kompetitif, baik di tingkat nasional maupun global.

Permasalahan ketenagakerjaan masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Sumedang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Sumedang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan angka yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional dan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercermin dalam data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024).

Tabel 1. Tingkat Pengangguran Pengangguran (TPT) 2020-2025

No	Tahun	TPT Nasional (%)	TPT Jawa Barat (%)	TPT Kabupaten Sumedang (%)
1.	2020	7,07	10,46	9,89
2.	2021	6,49	9,82	8,45
3.	2022	5,86	8,31	7,65
4.	2023	5,32	7,89	6,94
5.	2024	5,10	7,20	-
6.	2025	4,85	6,77	-

Sumber: Badan Pusat Statistik. (2020–2025). Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) dan Statistik Ketenagakerjaan Indonesia, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Sumedang. Jakarta: BPS.

Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja, baik dari segi jumlah maupun kualitas kompetensi (BPS, 2024). Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan ketenagakerjaan yang inovatif dan berorientasi pada peningkatan kualitas tenaga kerja lokal.

Sebagai bentuk intervensi kebijakan, Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengembangkan Program Magang ke Jepang. Program ini merupakan salah satu inovasi kebijakan ketenagakerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan nonteknis tenaga kerja lokal melalui pengalaman kerja internasional. Jepang dipilih sebagai negara tujuan magang karena memiliki standar kerja yang tinggi, budaya kerja yang disiplin, serta kebutuhan tenaga kerja yang berkelanjutan di berbagai sektor industri.

Program Magang ke Jepang tidak hanya ditujukan untuk memberikan kesempatan kerja sementara, tetapi juga diharapkan mampu membentuk karakter, etos kerja, dan keterampilan peserta sebagai modal penting dalam pengembangan *human capital local*. Melalui program ini, peserta diharapkan memperoleh transfer pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai profesionalisme yang dapat dimanfaatkan baik selama bekerja di luar negeri maupun setelah kembali ke daerah asal. Dengan demikian, program magang diposisikan sebagai instrumen strategis dalam mendukung pengurangan pengangguran dan peningkatan kualitas tenaga kerja daerah.

Meskipun Program Magang ke Jepang telah dilaksanakan secara berkelanjutan, efektivitas pelaksanaannya masih perlu dikaji secara komprehensif. Beberapa permasalahan seperti pemerataan akses informasi, kesiapan peserta, serta keberlanjutan manfaat program pasca magang menjadi isu yang perlu mendapat perhatian. Tanpa evaluasi yang sistematis, sulit untuk memastikan sejauh mana program ini benar-benar mencapai tujuan pengembangan *human capital local* dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan ketenagakerjaan daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Magang ke Jepang sebagai inovasi pengembangan human capital local di Kabupaten Sumedang. Analisis dilakukan dengan menggunakan dimensi efektivitas program yang meliputi ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian kebijakan publik di bidang ketenagakerjaan serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program magang internasional.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan Program Magang ke Jepang sebagai inovasi pengembangan human capital local di Kabupaten Sumedang. Informan penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling yang meliputi aparatur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang, lembaga pelatihan kerja, serta peserta Program Magang ke Jepang.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik. Analisis efektivitas program mengacu pada konsep efektivitas program menurut Budiani yang meliputi ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Program Magang ke Jepang sebagai inovasi pengembangan *human capital* lokal di Kabupaten Sumedang menunjukkan capaian yang cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal pada seluruh dimensi yang digunakan sebagai alat ukur. Penilaian efektivitas program dalam penelitian ini mengacu pada empat dimensi utama, yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program, yang masing-masing memperlihatkan tingkat pencapaian yang berbeda sesuai dengan kondisi implementasi di lapangan. Dalam kerangka administrasi publik, efektivitas program tidak dapat dipahami hanya sebagai tercapainya kegiatan, melainkan sebagai keberhasilan pemerintah menjalankan fungsi pelayanan dan pembangunan melalui instrumen kebijakan yang responsif dan terukur (Akadun, 2011; Henry, 2019; Pasolong, 2019). Perspektif ini juga sejalan dengan manajemen pembangunan daerah yang menekankan keterpaduan antara perencanaan program, pelaksanaan, serta capaian kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Annas, 2014).

Dimensi Ketepatan Sasaran Program

Dimensi ketepatan sasaran program menunjukkan bahwa Program Magang ke Jepang pada dasarnya telah menasar kelompok yang sesuai, yaitu pencari kerja usia produktif yang memenuhi persyaratan administrasi dan kemampuan dasar. Peserta yang mengikuti program umumnya berasal dari lulusan SMA/SMK yang memang menjadi sasaran utama kebijakan peningkatan kompetensi tenaga kerja daerah. Namun demikian, efektivitas pada dimensi ini belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan peserta yang belum siap secara mental dan motivasional dalam mengikuti seluruh tahapan program. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa meskipun sasaran program telah ditentukan dengan jelas, kualitas kesiapan peserta masih memerlukan penguatan agar ketepatan sasaran tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif. Hal ini sejalan dengan pandangan Budiani (2007) yang menyatakan bahwa ketepatan sasaran tidak hanya diukur dari kesesuaian kelompok penerima, tetapi juga dari kesiapan dan kemampuan sasaran dalam menerima manfaat program.

Dalam perspektif *human capital*, peserta bukan hanya “penerima program”, tetapi “investasi kompetensi” yang hasilnya sangat dipengaruhi oleh kualitas kesiapan individu dan proses pembinaan. Becker (1993) menegaskan bahwa investasi pada pendidikan dan pelatihan akan menghasilkan produktivitas apabila individu memiliki kesiapan untuk menyerap dan mengembangkan keterampilan. Artinya, ketepatan sasaran pada program magang seharusnya memasukkan komponen *readiness* (kesiapan mental, daya tahan, dan komitmen) sebagai bagian dari kriteria seleksi dan pembinaan awal. Dalam kerangka manajemen SDM, kesiapan ini dapat dikuatkan melalui pengelolaan motivasi, disiplin, dan pengembangan sikap kerja sebelum peserta memasuki tahapan program yang lebih menuntut (Hasibuan, 2018; Marwansyah, 2016).

Selain kesiapan personal, ketepatan sasaran juga berkaitan dengan *kompetensi* yang dibutuhkan oleh pasar kerja tujuan dan kemampuan peserta untuk memenuhi standar tersebut. Spencer & Spencer (1993) menekankan bahwa kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik pribadi yang memengaruhi kinerja unggul; sementara Palan (2007) menegaskan bahwa manajemen kompetensi harus dirancang sesuai kebutuhan jabatan/pekerjaan. Jika masih ditemukan peserta yang tidak siap secara motivasional dan adaptif, hal ini dapat dipahami sebagai kesenjangan kompetensi perilaku (*behavioral competency*) yang perlu diintervensi melalui pelatihan dan pembinaan. Pendekatan ini juga sejalan dengan teori perilaku organisasi yang menekankan bahwa sikap, komitmen, dan ketahanan kerja individu sangat menentukan keberhasilan dalam proses kerja yang menuntut adaptasi tinggi (Robbins, 2014; Gibson, Ivancevich, & Donnelly, 2005).

Dimensi Sosialisasi Program

Pada dimensi sosialisasi program, efektivitas program dapat dikategorikan cukup. Penyampaian informasi mengenai Program Magang ke Jepang telah dilakukan melalui kerja sama antara Disnakertrans dan LPK, serta melalui berbagai media sosialisasi. Stabilitasnya jumlah peserta dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa informasi program telah sampai kepada sebagian masyarakat. Akan tetapi, sosialisasi yang dilakukan masih bersifat umum dan belum sepenuhnya menjelaskan secara rinci alur program, tantangan yang akan dihadapi, serta komitmen jangka panjang yang diperlukan peserta. Akibatnya, pemahaman masyarakat terhadap program belum sepenuhnya merata dan masih diwarnai oleh persepsi keliru serta keraguan terhadap magang ke luar negeri.

Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi tidak hanya ditentukan oleh frekuensi penyampaian informasi, tetapi juga oleh kedalaman dan kejelasan pesan yang disampaikan kepada masyarakat sasaran. Dalam perspektif komunikasi, efektivitas pesan ditentukan oleh kejelasan informasi, ketepatan saluran, dan kesesuaian bahasa dengan karakteristik khalayak (Effendy, 2008). Karena itu, sosialisasi yang masih umum berpotensi menimbulkan *noise* komunikasi: peserta menerima informasi tetapi tidak memahami konsekuensi program, standar kesiapan, dan risiko adaptasi. Dari sudut administrasi publik, ketidakmerataan pemahaman publik juga mengindikasikan perlunya strategi komunikasi kebijakan yang lebih terencana agar kebijakan dapat dipahami sebagai peluang peningkatan kompetensi, bukan sekadar wacana program (Hayat, 2018; Islamy, 2014).

Dimensi Tujuan Program

Dimensi tujuan program menunjukkan bahwa secara umum hasil pelaksanaan Program Magang ke Jepang telah sejalan dengan tujuan yang ditetapkan, yaitu meningkatkan kompetensi, etos kerja, dan daya saing tenaga kerja lokal. Peserta yang mengikuti program menunjukkan perubahan positif dalam keterampilan teknis, kemampuan bahasa, serta sikap kerja yang lebih disiplin. Namun demikian, dampak program terhadap penyerapan tenaga kerja lokal secara berkelanjutan masih belum optimal. Selain itu, motivasi dan konsistensi peserta selama proses persiapan hingga pelaksanaan magang cenderung berfluktuasi, dipengaruhi oleh lamanya proses, perbedaan kemampuan individu, serta tekanan mental dan fisik.

Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian tujuan program masih sangat bergantung pada kesiapan internal peserta, sehingga diperlukan upaya pendukung yang lebih sistematis untuk menjaga motivasi dan konsistensi peserta. Dalam analisis kebijakan publik, pencapaian tujuan perlu diukur bukan hanya dari output (jumlah peserta berangkat), tetapi juga outcome (peningkatan kompetensi yang berkelanjutan, peningkatan employability, dan kontribusi pada penurunan pengangguran) (Dunn, 2003; Nugroho, 2004; Wahab, 2008). Dari sisi kinerja sektor publik, program yang efektif perlu memiliki indikator keberhasilan yang jelas dan mekanisme penguatan hasil agar capaian kompetensi tidak berhenti pada individu, tetapi menular menjadi peningkatan kapasitas daerah (Martani & Lubis, 2017; Makmur, 2011).

Dalam perspektif kebijakan publik, keberhasilan tujuan program harus diukur berdasarkan kesesuaian antara target yang dirumuskan dengan hasil nyata yang dapat dirasakan oleh sasaran program dan pemerintah daerah. Islamy (2014) menjelaskan bahwa tujuan kebijakan publik harus dirumuskan secara jelas agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan serta dasar evaluasi efektivitas program. Sejalan dengan itu, Hayat (2018) menekankan bahwa tujuan program publik bukan hanya berupa pernyataan normatif, tetapi harus dapat diterjemahkan ke dalam indikator pencapaian yang konkret. Berdasarkan temuan penelitian, tujuan Program

Magang ke Jepang telah menghasilkan perubahan positif pada peserta, namun belum sepenuhnya terkonversi menjadi dampak struktural bagi daerah seperti penurunan pengangguran dan peningkatan daya saing tenaga kerja lokal. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan tujuan program masih dominan pada level individu, belum optimal pada level pembangunan daerah.

Selain itu, dalam perspektif pengembangan *human capital*, tujuan program harus diarahkan pada peningkatan kapasitas peserta yang dapat memberikan nilai tambah jangka panjang bagi produktivitas tenaga kerja. Becker (1993) menegaskan bahwa investasi pada sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengalaman kerja akan meningkatkan produktivitas individu, tetapi efektivitasnya ditentukan oleh keberlanjutan hasil dan kemampuan adaptasi peserta. Dalam konteks ini, fluktuasi motivasi dan ketahanan peserta selama proses magang menjadi faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan program. Siagian (2000) menyatakan bahwa pencapaian tujuan organisasi atau program sangat dipengaruhi oleh motivasi dan komitmen individu yang menjalankan kegiatan tersebut. Oleh karena itu, penguatan tujuan program perlu dilengkapi dengan strategi pembinaan psikologis, pelatihan karakter kerja, serta pendampingan intensif agar tujuan peningkatan etos kerja dan daya saing peserta dapat lebih stabil dan berkelanjutan.

Dimensi Pemantauan Program

Sementara itu, dimensi pemantauan program memperlihatkan bahwa proses monitoring dan evaluasi telah dilakukan melalui sistem database dan pengelolaan internal antara Disnakertrans dan LPK. Pengukuran hasil perkembangan peserta secara administratif dinilai cukup akurat, sehingga perkembangan peserta dapat dipantau secara umum. Namun, keterlibatan peserta dalam proses monitoring masih terbatas, dan sistem pelaporan perkembangan belum sepenuhnya transparan serta mudah diakses oleh peserta. Kondisi ini berdampak pada rendahnya pemahaman peserta terhadap perkembangan dan evaluasi diri mereka secara menyeluruh.

Dari perspektif monitoring-evaluasi kebijakan, sistem monev yang efektif harus menyediakan umpan balik yang bisa dipahami pelaksana dan sasaran, sehingga perbaikan program dapat dilakukan secara adaptif (Herlina & Rasyid, 2016; Dunn, 2003). Ketika pelaporan belum mudah diakses dan partisipasi peserta terbatas, maka fungsi monev cenderung menjadi formalitas administratif, bukan instrumen pembelajaran kebijakan. Karena itu, penguatan monev dapat diarahkan pada sistem pelaporan berbasis digital yang lebih terbuka dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan, sesuai prinsip kebijakan publik yang memerlukan evaluasi sebagai dasar koreksi implementasi (Sunggono, 1994; Islamy, 2014). Secara teknis, penguatan ini dapat didukung melalui penerapan sistem informasi manajemen yang mampu mengintegrasikan data peserta, progres pembinaan, dan hasil evaluasi secara real-time (Sutabri, 2016).

Pemantauan program pada dasarnya merupakan fungsi penting dalam siklus kebijakan publik karena menjadi alat kontrol untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai rencana dan mencapai target yang ditetapkan. Dunn (2003) menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi kebijakan berfungsi sebagai instrumen umpan balik (feedback) yang dapat digunakan untuk memperbaiki pelaksanaan program secara berkelanjutan. Sejalan dengan itu, Herlina & Rasyid (2016) menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi yang baik harus dilakukan secara sistematis, terukur, serta mampu memberikan informasi yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi pemerintah. Berdasarkan temuan penelitian, monitoring Program Magang ke Jepang telah dilakukan melalui database internal, namun belum sepenuhnya mampu memberikan transparansi dan keterlibatan peserta, sehingga proses evaluasi cenderung bersifat administratif dan belum menjadi sarana pembelajaran program yang partisipatif.

Dari sudut pandang sistem informasi manajemen, pemantauan program membutuhkan dukungan teknologi yang mampu mengintegrasikan data peserta, proses pembinaan, serta capaian program dalam satu sistem yang mudah diakses dan dipahami. Sutabri (2016) menyatakan bahwa sistem informasi manajemen berfungsi sebagai alat untuk menyediakan informasi yang akurat dan cepat bagi pengambilan keputusan organisasi. Dengan demikian, pemantauan yang masih terbatas aksesnya dapat menghambat fungsi evaluasi sebagai kontrol kinerja. Dalam konteks kinerja sektor publik, Martani & Lubis (2017) menekankan bahwa manajemen kinerja publik harus disertai indikator yang jelas serta pelaporan yang transparan agar akuntabilitas program dapat terjaga. Oleh karena itu, penguatan pemantauan program perlu diarahkan pada sistem pelaporan berbasis digital yang terbuka, terstruktur, serta melibatkan peserta sebagai bagian dari evaluasi diri, sehingga efektivitas monitoring tidak hanya menjadi kewajiban birokrasi tetapi juga menjadi mekanisme peningkatan kualitas program secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Program Magang ke Jepang sebagai inovasi pengembangan *human capital local* di Kabupaten Sumedang tergolong cukup efektif. Program ini telah mampu meningkatkan kompetensi teknis, kedisiplinan, serta sikap profesional peserta sebagai bentuk penguatan kualitas sumber daya manusia usia produktif. Dengan demikian, program magang internasional memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan ketenagakerjaan daerah.

Namun, efektivitas program belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat keterbatasan dalam pemerataan sosialisasi, ketepatan penajaman sasaran program, serta lemahnya sistem pemantauan dan pendampingan pasca magang. Kondisi tersebut berdampak pada belum maksimalnya pemanfaatan hasil program untuk mendukung penurunan pengangguran dan pengembangan tenaga kerja lokal secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, peningkatan efektivitas Program Magang ke Jepang perlu diarahkan pada penguatan strategi sosialisasi yang lebih inklusif, penajaman sasaran berbasis kebutuhan wilayah, serta pengembangan sistem monitoring dan integrasi alumni ke pasar kerja lokal. Upaya tersebut diharapkan dapat menjadikan Program Magang ke Jepang sebagai instrumen kebijakan yang lebih berkelanjutan dalam pengembangan *human capital local* di Kabupaten Sumedang.

REFERENSI

- Akadun. (2011). *Administrasi publik: Teori dan praktik*. Bandung: Alfabeta.
- Annas, A. (2014). *Manajemen pembangunan daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Anwar, M., & Pikri, M. (2022). Efektivitas program pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 15–30.
- Becker, Gary Stanley. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education*(3rd ed.). Chicago: The University of Chicago Press.
- Budiani, N. W. (2007). Efektivitas program penanggulangan kemiskinan. *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 2(1), 49–60.
- Dunn, William N. (2003). *Public policy analysis: An introduction* (3rd ed.). New Jersey: Prentice Hall.
- Effendy, Onong Uchjana. (2008). *Ilmu komunikasi: Teori dan praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Gibson, James L., Ivancevich, John M., & Donnelly, James H. (2005). *Organizations: Behavior, structure, processes*. New York: McGraw-Hill.
- Guntur, Setiawan. (2013). *Manajemen operasional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Handyaningrat, Soewarno. (1980). *Pengantar studi ilmu administrasi dan manajemen*. Jakarta: Gunung Agung.
- Hasibuan, Malayu S. P. (2018). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hayat. (2018). *Kebijakan publik*. Malang: Intrans Publishing.
- Henry, Nicholas. (2019). *Public administration and public affairs*. New York: Routledge.
- Herlina, S., & Rasyid, M. (2016). Monitoring dan evaluasi kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 7(2), 35–48.
- Islamy, M. Irfan. (2014). *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kacaribu, R. (2020). *Pengantar administrasi*. Medan: USU Press.
- Khaidir, M., & Ulfa, N. (2019). Efektivitas pelaksanaan program UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 4(2), 398–410.
- Makmur. (2011). *Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.
- Marwansyah. (2016). *Manajemen sumber daya manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Martani, D., & Lubis, A. (2017). *Manajemen kinerja sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Miles, Matthew B., & Huberman, A. Michael. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, Lexy J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Nugroho, Riant. (2004). *Kebijakan publik: Formulasi, implementasi, dan evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. (2019). *Teori administrasi publik*. Bandung: Alfabeta.
- Palan, R. (2007). *Competency management*. New Delhi: McGraw-Hill.
- Rahman. (2017). *Administrasi negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Robbins, Stephen P. (2014). *Organizational behavior*. New Jersey: Pearson Education.
- Sedarmayanti. (2011). *Sumber daya manusia dan produktivitas kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Sedarmayanti. (2016). *Manajemen sumber daya manusia*. Bandung: Refika Aditama.
- Siagian, Sondang P. (2000). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, Ulber. (2020). *Studi administrasi publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Spencer, Lyle M., & Spencer, Signe M. (1993). *Competence at work: Models for superior performance*. New York: John Wiley & Sons.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. (1994). *Hukum dan kebijakan publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutabri, Tata. (2016). *Sistem informasi manajemen*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Wahab, Solichin Abdul. (2008). *Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

EFEKTIVITAS LAYANAN PUBLIK JAMINAN PELAYANAN ANAK BARU LAHIR DENGAN EMPAT DOKUMEN (JAMPE HARUPAT): UPAYA PEMENUHAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMEDANG

Irma Hermayanty^{*1}, Ainul Mardiah², Aleyda Humaira³, Salsa Nabila⁴, M. Bentar Royyas Fadhilah⁵, Taufik⁶
Universitas Sebelas April
Email ^{*1}: irma_hermayanty@unsap.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Layanan Publik Jaminan Layanan Anak Baru Lahir dengan Empat Dokumen (Jampe Harupat) sebagai upaya untuk memenuhi administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari petugas pengelola aplikasi dan petugas pelayanan di Divisi Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan program Jampe Harupat. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan studi lapangan, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validitas data dijamin melalui uji kredibilitas, transferabilitas, keandalan, dan konfirmabilitas. Teknik analisis data meliputi pengurangan data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Jampe Harupat secara umum telah dilaksanakan secara efektif dalam mendukung percepatan pencapaian administrasi kependudukan untuk bayi baru lahir. Namun, beberapa hambatan masih ada, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas dan infrastruktur pendukung, serta tingkat sosialisasi program kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, perbaikan fasilitas dan infrastruktur, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi sosialisasi program diperlukan untuk meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas Program Jampe Harupat.

Kata Kunci: Manajemen Pelayanan Publik, Efektivitas Pelayanan Publik, Jampeharupat.

1. PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam rangka memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Dalam konteks administrasi kependudukan, pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat menjadi sangat penting karena dokumen kependudukan merupakan dasar bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai layanan publik lainnya. Salah satu bentuk pelayanan administrasi kependudukan yang memiliki urgensi tinggi adalah pelayanan pencatatan kelahiran dan penerbitan dokumen kependudukan bagi anak baru lahir. Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) mengembangkan inovasi pelayanan publik berupa Program Jaminan Pelayanan Anak Baru Lahir dengan Empat Dokumen (Jampe Harupat). Program ini dirancang untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan mengintegrasikan penerbitan empat dokumen kependudukan sekaligus, yaitu akta kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas anak, dan nomor induk kependudukan, dalam satu proses pelayanan. Inovasi ini diharapkan mampu mempercepat pemenuhan hak identitas anak serta meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya Program Jampe Harupat masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, baik yang bersumber dari internal organisasi maupun eksternal. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kendala sarana dan prasarana pendukung, gangguan sistem aplikasi, serta belum optimalnya sosialisasi program kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi tingkat efektivitas pelaksanaan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu kajian untuk menilai sejauh mana efektivitas Program Jampe Harupat sebagai inovasi pelayanan publik dalam upaya pemenuhan administrasi kependudukan. Oleh karena itu, penelitian ini dilaksanakan dalam rangka Praktek Penelitian Administrasi (PPA) guna menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Jampe Harupat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai efektivitas pelaksanaan Program Layanan Publik Jaminan Pelayanan Anak Baru Lahir dengan Empat Dokumen (Jampe Harupat) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.

Subjek penelitian ditentukan secara purposive, yaitu informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan program Jampe Harupat. Informan dalam penelitian ini terdiri atas operator aplikasi dan petugas pelayanan pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Sumedang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah buku, jurnal, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan administrasi publik, pelayanan publik, serta program Jampe Harupat. Studi lapangan dilakukan melalui observasi langsung terhadap proses pelayanan, wawancara terstruktur dengan informan, serta dokumentasi terhadap data dan arsip pendukung pelaksanaan program.

Keabsahan data diuji melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas guna memastikan validitas dan reliabilitas data penelitian. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan triangulasi data, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas Program Jampe Harupat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Program Layanan Publik Jaminan Pelayanan Anak Baru Lahir Dengan Empat Dokumen (Jampe Harupat): Upaya Pemenuhan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang secara keseluruhan dilaksanakan cukup baik. Hal tersebut dapat terlihat dalam dimensi sumber daya, sarana dan prasarana, tercapainya sasaran, ketepatan waktu, kejelasan tujuan dan rencana, dan konsistensi serta integritas.

Pemanfaatan Sumber Daya, Sarana, dan Prasarana

Penggunaan sumber daya dalam dimensi pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana menunjukkan hasil yang cukup baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan, dimensi ini digunakan untuk mengukur efektivitas program melalui pemenuhan sumber daya, sarana, dan prasarana yang digunakan untuk pelaksanaan program Jampe Harupat. Hal ini dikarenakan SDM petugas dinilai sudah memadai dan ahli, meskipun optimalisasi akses aplikasi masih perlu dimaksimalkan. Efisiensi pemakaian sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program Jampe Harupat menunjukkan hasil yang baik. Hal ini karena pemanfaatan sarana prasarana pada layanan Jampe Harupat dinilai efisien secara keseluruhan. Kecukupan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program Jampe Harupat menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal ini karena sarana dan prasarana dinilai belum memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh petugas Jampe Harupat. Penggunaan sumber daya yang sesuai dengan rencana dalam pelaksanaan Efektivitas Program Layanan Publik Jaminan Pelayanan Anak Baru Lahir Dengan Empat Dokumen (Jampe Harupat): Upaya Pemenuhan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dapat dinilai baik. Keberhasilan indikator penggunaan sumber daya yang telah dicapai harus terus ditingkatkan guna peningkatan keberhasilan di masa depan. Hal ini diperkuat oleh pendapat Arum (2007) yang mendefinisikan pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana sebagai: Proses komprehensif yang mencakup sembilan komponen utama yaitu jenis, prinsip, fungsi, perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung tujuan organisasi, khususnya di sektor pendidikan dan administrasi publik.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa dimensi pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam Efektivitas Layanan Anak Baru Lahir Empat Dokumen: Upaya Pemenuhan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dinilai belum cukup baik.

Tercapainya Sasaran

Dimensi tercapainya sasaran menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan output yang diharapkan, dimensi ini digunakan untuk mengukur efektivitas program Jampe Harupat dari segi ketercapaian sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Hal ini dibuktikan oleh program Jampe Harupat secara keseluruhan selaras dengan tujuan strategis pemenuhan pelayanan bayi baru lahir dan kemudahan akta kelahiran di Sumedang, dengan pencapaian sasaran serta output yang optimal dan tingkat kepuasan masyarakat yang baik dari akses serta kecepatan layanan. Hal diperkuat oleh pendapat Hasibuan (2000), tercapainya sasaran didefinisikan sebagai: Keberhasilan instansi dalam memenuhi tujuan yang telah direncanakan secara tepat sasaran dan efisien, di mana "tepat sasaran" menunjukkan kesesuaian hasil akhir dengan target yang ditetapkan, sementara "efisien" menggarisbawahi penggunaan sumber daya minimal untuk output maksimal tanpa pemborosan.

Berdasarkan pendapat ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa dimensi ketercapaian sasaran dalam Efektivitas Layanan Anak Baru Lahir Empat Dokumen: Upaya Pemenuhan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dinilai cukup baik.

Ketepatan Waktu

Dimensi ketepatan waktu menunjukkan hasil yang cukup baik sesuai dengan rencana yang ditetapkan yaitu, percepatan dan kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi bayi yang baru lahir. Dimensi ini menjadi alat ukur keberhasilan program. Hal ini dibuktikan, program Jampe Harupat berhasil dilaksanakan sesuai ketentuan dan tujuan yang ditetapkan, dengan aplikasi yang efektif mempermudah pengurusan dokumen kependudukan bayi baru lahir dibandingkan mekanisme konvensional atau datang langsung ke Mal Pelayanan Publik di Sumedang. Hal ini diperkuat oleh pendapat Sutrisno (2007: 125-126) yang menjelaskan ketepatan waktu sebagai berikut: Ketepatan waktu merupakan hal dasar yang menentukan keberhasilan suatu kegiatan program, sekaligus berpotensi menimbulkan kegagalan jika tidak dikelola dengan baik. Ketepatan ini dinilai dari penggunaan waktu yang sesuai jadwal, sehingga mendukung pencapaian tujuan program secara efektif.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa dimensi ketepatan waktu dalam Efektivitas Layanan Anak Baru Lahir Empat Dokumen: Upaya Pemenuhan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dinilai cukup baik.

Kejelasan Tujuan dan Rencana

Dimensi kejelasan tujuan dan rencana menunjukkan hasil yang cukup baik, karena dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang harus disempurnakan. Hal ini dapat dibuktikan dari indikator yang ada di dimensi kejelasan tujuan dan rencana, yakni pelaksanaan program Jampe Harupat di Disdukcapil Sumedang menunjukkan struktur organisasi yang solid dengan 15 staf bidang pelayanan pencatatan sipil termasuk 4 operator yang kompeten dalam menangani masalah, pembagian tugas jelas, pengawasan kepala bidang, serta SOP lengkap yang konsisten dipatuhi melalui panduan aplikasi. Namun, tantangan implementasi lapangan tetap menjadi hambatan utama, seperti bidang yang jarang ulang upload berkas kekurangan, dan sosialisasi minim terhadap stakeholder. Secara keseluruhan, kekuatan internal program kuat, tetapi memerlukan perbaikan koordinasi eksternal untuk capai efektivitas optimal. Hal ini diperkuat oleh pendapat Robbins dan Coulter kejelasan tujuan mencegah interpretasi subyektif yang merusak efektivitas, seperti contoh "peningkatan signifikan pemasukan" yang menjadi ambigu di tingkat operasional. Tujuan yang dirancang baik dicirikan oleh kriteria SMART: spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa dimensi kejelasan tujuan dan rencana dalam Efektivitas Layanan Anak Baru Lahir Empat Dokumen: Upaya Pemenuhan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dinilai belum cukup baik.

Konsistensi dan Integritas

Dimensi konsistensi dan integritas menunjukkan hasil yang baik, sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan pelaksanaan program yang telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan proses pelayanan yang konsisten dan terstandar. Hal ini diperkuat oleh pendapat Stephen Covey dalam "The 7 Habits of Highly Effective People" menekankan integritas sebagai keselarasan antara apa yang dikatakan dan dilakukan, menciptakan kredibilitas pemimpin. Integritas tidak hanya berkaitan dengan kejujuran, tetapi juga konsistensi dalam sikap, keputusan, dan tindakan.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa dimensi konsistensi dan integritas dalam Efektivitas Layanan Anak Baru Lahir Empat Dokumen: Upaya Pemenuhan Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dinilai baik

Hasil penelitian dari analisis lima dimensi utama efektivitas program Jampe Harupat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, secara keseluruhan program ini dinilai cukup baik dalam mendukung pemenuhan administrasi kependudukan bagi bayi baru lahir dengan empat dokumen. Sesuai dengan 5 (lima) dimensi efektivitas program menurut Siagian (2001) yaitu: Pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana, tercapainya sasaran, ketepatan waktu, kejelasan tujuan dan rencana, konsistensi dan integritas.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa efektivitas program Jampe Harupat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang sudah menunjukkan keberhasilan pada tiga (3) dimensi, yaitu ketercapainya sasaran, ketepatan waktu, konsistensi dan integritas. Namun, masih terdapat tantangan pada dua (2) dimensi, yaitu dimensi pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana serta dimensi kejelasan tujuan dan rencana, sehingga perlu penguatan untuk mencapai efektivitas program yang sepenuhnya optimal. Tercapainya sasaran dan ketepatan waktu dinilai baik, dengan program selaras tujuan strategis pemenuhan layanan bayi baru lahir, kepuasan masyarakat dinilai optimal, serta aplikasi mempercepat proses pembuatan dokumen dibanding mekanisme konvensional, didukung oleh teori yang dikemukakan Hasibuan (2000) dan Sutrisno (2007). Kejelasan tujuan dan rencana cukup baik berkat struktur organisasi solid, SOP lengkap, dan pengawasan, walau koordinasi eksternal seperti partisipasi bidang lemah

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Program Layanan Publik Jaminan Pelayanan Anak Baru Lahir dengan Empat Dokumen (Jampe Harupat) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang secara umum telah berjalan cukup efektif dalam mendukung pemenuhan administrasi kependudukan anak baru lahir. Program ini mampu memberikan kemudahan, percepatan, dan kepastian pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, efektivitas program masih menghadapi beberapa hambatan, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana dan prasarana, stabilitas sistem aplikasi, maupun tingkat sosialisasi program. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur pendukung, serta optimalisasi sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan terkait agar pelaksanaan Program Jampe Harupat dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

REFERENCES

- Akadun. (2007). *Administrasi Perusahaan Negara*. Alfabeta.
- Anggara, S. (2016). *Ilmu Administrasi Negara* (2 (ed.)).
- Arum, S. (2007). *Pengelolaan Sarana Prasarana*. Penerbit Akademik.
- Caiden, G. E. (1982). *The Dynamics of Public Administration*. Holt, Rinehart and Winston.
- Covey, S. R. (1989). *The 7 Habits of Highly Effective People*. Free Press.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2007). *The New Public Service: Serving, Not Steering*. M.E. Sharpe.
- Dimock, M. E., & Dimock, G. O. (1992). *Public Administration*. Holt Rinehart & Winston.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2010). *Manajemen Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Gie, T. L. (1998). *Administrasi Perkantoran Modern*. Pustaka Budaya.
- Hardiyansyah. (2018). *Manajemen Pelayanan dan Pengembangan Organisasi Publik*. Gava Media.
- Hasibuan, M. S. P. (2000). *Manajemen dan Motivasi*. Bumi Aksara.
- Henry, N. (1995). *Public Administration and Public Affairs* (6 (ed.)). Prentice Hall.
- Hughes, O. E. (1994). *Public Management and Administration* (2 (ed.)). Palgrave Macmillan.
- Makmur, S. (2015). *Manajemen Operasional Program Pemerintah*. Penerbit Lokal.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, H. (2013). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Ratminto, & Winarsih, A. S. (2016). *Manajemen Pelayanan*. Pustaka Pelajar.
- Robbins, S. P. (2014). *Manajemen* (E. Indonesia (ed.)). Salemba Empat.
- Siagian, S. P. (2001). *Manajemen dan Kepemimpinan dalam Organisasi* (Revisi (ed.)). Rineka Cipta.
- Siagian, S. P. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara.
- Silalahi, U. S. (2016). *Studi tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori dan Dimensi*. Sinar Baru Algensindo.
- Sinambela, L. P. (2014). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Bumi Aksara.
- Singadilaga, M. (2002). *Proses Perumusan Kebijakan Publik* (p. 7). Penerbit Lokal Indonesia.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sutrisno, E. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit Lokal.

Syafi'i, M. (2006). *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*. Pustaka Setia.

Thoha, M., & Rodiyah. (2021). *Pengantar Ilmu Administrasi Publik* (p. 12). UMSIDA Press.

MANAJEMEN LOGISTIK KEDARURATAN BENCANA BANJIR DI BPBD KABUPATEN SUMEDANG

Keryn Elika Christine¹, Reza Purnama^{*2}, Daffa Juni Vayanda³, Muhamad Ramdan Firmansyah⁴

Universitas Sebelas April Sumedang, Indonesia

Email ^{*2}: zapur23@gmail.com

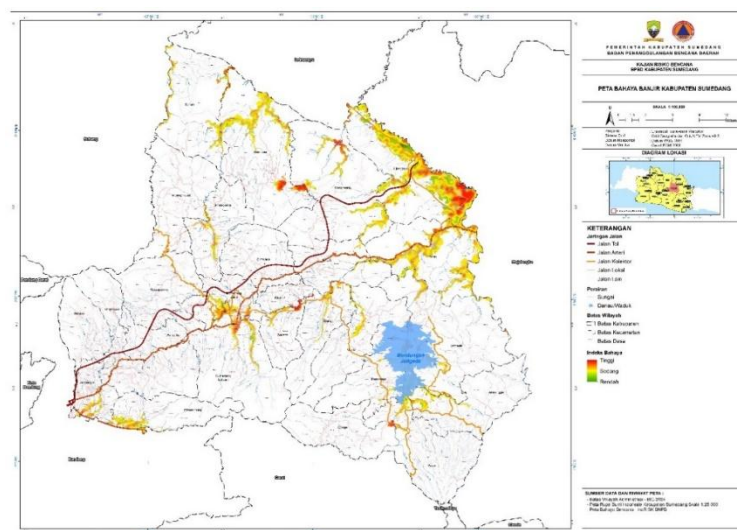
ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan logistik bencana banjir darurat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumedang. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan, dengan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis difokuskan pada lima dimensi pengelolaan logistik: perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan keamanan, serta pembuangan logistik. Temuan menunjukkan bahwa pengelolaan logistik telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku; namun, beberapa tantangan masih ada, termasuk ketidakakuratan data inventaris, fleksibilitas pengadaan selama darurat, ketidakkonsistenan dalam catatan pemanfaatan logistik, dan praktik pemeliharaan yang tidak sistematis. Oleh karena itu, penguatan sistem pengelolaan logistik yang terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan bencana banjir di tingkat lokal.

Keywords: Manajemen Bencana, Logistik Kedaruratan Bencana, Bencana Banjir

1. PENDAHULUAN

Bencana banjir merupakan salah satu jenis bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia dan berdampak langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat. Kabupaten Sumedang termasuk wilayah yang memiliki tingkat kerawanan banjir cukup tinggi, sehingga menuntut kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam melakukan penanganan kedaruratan secara cepat dan tepat. Tingkat kerawanan tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis, curah hujan, serta karakteristik wilayah yang berpotensi mengalami genangan dan luapan air pada musim hujan. Gambaran wilayah rawan bencana banjir di Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai konteks lokasi penelitian.



Gambar 1. Peta Bahaya Banjir Kabupaten Sumedang

Sumber: Peta bahaya bencana banjir inaRISK BNPD

Manajemen logistik kedaruratan bencana memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan penanggulangan bencana banjir. Pengelolaan logistik tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan barang bantuan, tetapi juga mencakup proses perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan logistik. Pengelolaan logistik yang tidak terencana dengan baik berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidaksesuaian jenis bantuan, keterlambatan distribusi, serta rendahnya akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik, yang pada akhirnya dapat menghambat pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak bencana.

Penanggulangan bencana di Indonesia telah diatur secara jelas dalam kerangka hukum nasional. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengatur bahwa penanggulangan bencana dilaksanakan melalui tahapan prabencana, tanggap darurat, dan pascabencana. Pada fase tanggap darurat, Pasal 48 menegaskan bahwa salah satu bentuk penanggulangan yang harus dilakukan adalah pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak, yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, dan air bersih.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan dan penyaluran bantuan logistik melalui mekanisme pendanaan siap pakai (*on-call budget*).

Secara operasional, ketentuan mengenai manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana diatur lebih rinci dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.

Selanjutnya terdapat standar minimal peralatan penanggulangan bencana yang tersedia apabila terjadi bencana banjir sudah diatur dan tercantum pada PERKA BNPB Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana khususnya terdapat bencana banjir. Namun jika dilihat pada table berikut, bahwa BPBD Kabupaten Sumedang memenuhi standarisasi peralatan yang telah ditentukan.

Tabel 1. Kondisi dan Jumlah Logistik yang tersedia di BPBD

No	Nama	Volume	Kondisi
1.	Alat Selam	3	Baik
2.	Alat Komunikasi	34	Baik
3.	Beco	1	Baik
4.	Chainsaw	4	Baik
5.	Hygiene Kit	40-50	Baik
6.	Motor Trail	1	Baik
7.	Mobil Operasional	1	Baik
8.	Mobil Tangki Air	1	Baik
9.	Mobil Rescue	1	Baik
10.	Mobil Dapur Umum	1	Baik
11.	Tenda Peleton	2	Baik
12.	Tenda Regu	8	Baik
13.	Tenda Keluarga	3	Baik
14.	Tenda Komando	5	Baik
15.	Pelampung	86	Baik
16.	dayung	16	Baik
17.	helm	61	Baik
18.	Kasur Lipat	180	Baik
19.	Perahu Karet Bermesin	3	Baik
20.	Perahu Karet	1	Kurang Baik
21.	Matras	100	Baik
22.	Mesin Robin	2	Baik
23.	Mesin Domfeng	2	Baik
24.	Mesin Perahu	5	Baik
25.	Sembako	>100	Baik

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji manajemen logistik kedaruratan bencana banjir di BPBD Kabupaten Sumedang dengan menitikberatkan pada praktik pengelolaan logistik dalam konteks organisasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pengelolaan logistik bencana serta menjadi bahan masukan dalam upaya penguatan tata kelola penanggulangan bencana di tingkat daerah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik manajemen logistik kedaruratan bencana banjir di BPBD Kabupaten Sumedang. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses pengelolaan logistik, pengalaman aktor, serta dinamika implementasi manajemen logistik dalam konteks organisasi penanggulangan bencana.

Suryono (Nasution, 2023) yang menjelaskan bahwa Metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami dan menggali fenomena sosial secara mendalam, khususnya aspek-aspek yang berkaitan dengan makna, karakteristik, dan dinamika sosial yang tidak dapat diukur atau dijelaskan secara numerik melalui metode kuantitatif.

Lokasi penelitian ditetapkan di BPBD Kabupaten Sumedang, dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan banjir dan secara aktif melakukan pengelolaan logistik kedaruratan bencana. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi terkait praktik pengelolaan logistik, sementara observasi dan dokumentasi digunakan untuk memperkuat dan memverifikasi data hasil wawancara.

Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa teknik purposive sampling merupakan metode penentuan informan penelitian yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, informan dipilih secara sengaja karena memiliki keterlibatan langsung dan pemahaman yang relevan dalam bidang kedaruratan dan logistik di BPBD Kabupaten Sumedang, sehingga mampu memberikan data dan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian mengenai manajemen logistik.

Informan penelitian ditentukan secara purposive, yaitu dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap pengelolaan logistik kedaruratan bencana banjir di BPBD Kabupaten Sumedang. Untuk memberikan gambaran umum mengenai informan penelitian, disajikan ringkasan informan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah (orang)
1	Kepala Bidang	1
2	Kepala Gudang	1
3	Staf Bidang Kedaruratan dan Logistik	1
JUMLAH		3

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi fakta-fakta atau informasi mengenai Manajemen Logistik Kedaruratan Bencana Banjir di BPBD Kabupaten Sumedang di kantor BPBD kabupaten Sumedang. Menurut Moleong (2007) pada buku Metode Penelitian Kualitatif, data dapat dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, dari dokumen atau secara gabungan daripadanya.

Pada saat analisis data, dapat kembali lagi ke lapangan untuk mencari tambahan data yang dianggap perlu dan mengolahnya kembali. Suyanto dan Sutinah (2006), mengatakan pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara mengklasifikasikan atau mengkategorikan data berdasarkan beberapa tema sesuai fokus penelitiannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap perencanaan, BPBD Kabupaten Sumedang melakukan perencanaan kebutuhan logistik berdasarkan analisis risiko bencana, pengalaman kejadian banjir sebelumnya, serta pemetaan wilayah rawan banjir. Perencanaan dilakukan dengan mengidentifikasi jenis dan jumlah logistik yang dibutuhkan. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan masih menghadapi keterbatasan, terutama terkait ketepatan data inventaris dan dinamika kebutuhan lapangan yang dapat berubah secara cepat saat bencana terjadi, sehingga rencana kebutuhan logistik belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Meski begitu, BPBD telah melakukan perencanaan dengan menerapkan prinsip transparansi terhadap internal untuk kebutuhan logistik.

Dalam aspek pengadaan, BPBD melaksanakan pengadaan logistik berdasarkan skala prioritas dan ketersediaan anggaran, baik yang bersumber dari APBD maupun bantuan dari pihak lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadaan telah mengikuti prosedur yang berlaku, namun masih terdapat kendala berupa

keterbatasan transparansi dan fleksibilitas pengadaan, terutama ketika kebutuhan logistik meningkat secara mendadak akibat kondisi darurat yang berkembang cepat. Selanjutnya, terkait penggunaan dan pemanfaatan, logistik yang dimiliki BPBD digunakan untuk mendukung kegiatan tanggap darurat bencana banjir, seperti evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, dan operasional posko. Pemanfaatan logistik dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan di lapangan agar penggunaannya lebih efektif dan tidak berlebihan. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan penggunaan logistik belum sepenuhnya konsisten, sehingga berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi aktual pemanfaatan logistik di lapangan.

Pada aspek pengamanan dan pemeliharaan, BPBD melakukan penyimpanan logistik di gudang serta melakukan pengecekan kondisi logistik secara berkala untuk memastikan kelayakan pakai. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeliharaan belum dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan, terutama karena keterbatasan sarana penyimpanan, perencanaan pemeliharaan yang belum terjadwal secara sistematis, serta pendataan kondisi logistik yang belum sepenuhnya terbaru. Sementara itu, Proses penghapusan dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan ketentuan administrasi dan standar pelayanan kebencanaan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan logistik bertujuan untuk menjaga kualitas logistik yang tersisa agar tetap layak dan aman digunakan, meskipun proses penghapusan memerlukan waktu yang relatif panjang karena harus melalui prosedur administrasi dan pertimbangan teknis yang cukup ketat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan logistik kedaruratan bencana banjir di BPBD Kabupaten Sumedang masih menghadapi keterbatasan, khususnya terkait ketepatan data inventaris dan dinamika kebutuhan lapangan yang berubah secara cepat saat bencana terjadi. Kondisi ini menyebabkan rencana kebutuhan logistik belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan. Kendala tersebut dapat dianalisis sebagai konsekuensi dari karakteristik bencana yang bersifat tidak pasti dan dinamis, sehingga sulit diprediksi secara presisi dalam tahap perencanaan awal. Selain itu, belum optimalnya pembaruan data inventaris secara berkala turut memengaruhi kualitas perencanaan logistik yang disusun.

Apabila direlevansikan dengan teori, Mahmudi (2010) menegaskan bahwa perencanaan merupakan proses penetapan tujuan dan langkah strategis sebelum kegiatan dilaksanakan agar sumber daya dapat digunakan secara efektif dan efisien. Newman (1973) juga menyatakan bahwa perencanaan adalah keputusan awal yang menjadi pedoman tindakan organisasi. Dalam konteks BPBD Kabupaten Sumedang, perencanaan yang belum sepenuhnya akurat menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan awal masih perlu diperkuat dengan data inventaris yang mutakhir serta mekanisme perencanaan yang lebih adaptif. Meski demikian, penerapan prinsip transparansi internal dalam perencanaan logistik menunjukkan adanya upaya positif organisasi untuk menjaga akuntabilitas, yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar perencanaan logistik semakin responsif terhadap kebutuhan lapangan.

Pada dimensi pengadaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Sumedang telah melaksanakan pengadaan logistik sesuai dengan prosedur yang berlaku dan berdasarkan skala prioritas serta ketersediaan anggaran. Namun demikian, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan transparansi dan fleksibilitas pengadaan, terutama ketika terjadi peningkatan kebutuhan logistik secara mendadak akibat situasi darurat yang berkembang cepat. Kondisi ini dapat dipahami sebagai dampak dari sistem pengadaan sektor publik yang cenderung administratif dan memerlukan tahapan formal, sehingga kurang responsif terhadap situasi kedaruratan.

Jika dikaitkan dengan teori, Lysons dan Farrington (2020) menyatakan bahwa pengadaan merupakan proses manajerial strategis untuk memastikan kebutuhan organisasi terpenuhi melalui pengelolaan sumber daya eksternal. Van Wee (2010) juga menekankan bahwa pengadaan harus menjamin ketersediaan pasokan secara tepat waktu dan menguntungkan bagi organisasi. Dalam konteks BPBD Kabupaten Sumedang, kendala fleksibilitas pengadaan menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan kondisi darurat dengan mekanisme pengadaan yang ada. Oleh karena itu, pengadaan logistik perlu didukung oleh sistem yang lebih adaptif dan transparan agar mampu menjamin ketersediaan logistik secara cepat tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas publik.

Begitu pun dengan penggunaan dan pemanfaatan, Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dan pemanfaatan logistik di BPBD Kabupaten Sumedang telah disesuaikan dengan kebutuhan lapangan dalam mendukung kegiatan tanggap darurat, seperti evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Secara umum, pemanfaatan logistik telah diarahkan agar tidak berlebihan dan tepat sasaran. Namun, kendala yang masih terjadi adalah pencatatan penggunaan logistik yang belum konsisten, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan antara data administrasi dan kondisi aktual di lapangan.

Kondisi tersebut dapat dianalisis sebagai akibat dari tingginya intensitas kegiatan operasional saat tanggap darurat, yang sering kali membuat pencatatan administrasi menjadi kurang optimal. Jika direlevansikan dengan teori, Coyle et al. (2017) menyatakan bahwa pemanfaatan logistik harus mampu menciptakan nilai guna melalui penyediaan barang pada waktu dan tempat yang tepat. Bowersox et al. (2020) juga menekankan pentingnya koordinasi informasi dalam penggunaan logistik. Oleh karena itu, inkonsistensi

penelitian menunjukkan bahwa aspek koordinasi informasi dalam pemanfaatan logistik masih perlu diperkuat agar efektivitas penggunaan logistik dapat diukur dan dipertanggungjawabkan secara akurat.

Selanjutnya, pada dimensi pemeliharaan dan pengamanan, hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Sumedang telah melakukan penyimpanan logistik di gudang serta pengecekan kondisi secara berkala. Namun, pemeliharaan belum dilaksanakan secara optimal dan berkelanjutan karena keterbatasan sarana penyimpanan, belum adanya jadwal pemeliharaan yang sistematis, serta pendataan kondisi logistik yang belum sepenuhnya diperbarui. Kendala ini menunjukkan bahwa pemeliharaan masih bersifat reaktif dan belum terencana secara menyeluruh.

Jika dikaitkan dengan teori, Duffuaa dan Raouf (2015) menyatakan bahwa pemeliharaan merupakan upaya untuk mempertahankan atau mengembalikan kondisi aset agar tetap berfungsi sesuai standar. Sementara itu, Szymonik dan Stanislawski (2023) menegaskan bahwa pengamanan adalah bentuk pengendalian risiko untuk melindungi aset dari berbagai ancaman. Dalam konteks ini, belum optimalnya pemeliharaan dan pengamanan menunjukkan bahwa pengelolaan risiko terhadap logistik belum sepenuhnya terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pemeliharaan yang lebih sistematis agar kualitas dan kesiapan logistik dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Lalu, pada penghapusan yang dilakukan di BPBD Kabupaten Sumedang dari hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penghapusan logistik di BPBD Kabupaten Sumedang telah dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan ketentuan administrasi dan standar pelayanan kebencanaan. Penghapusan bertujuan menjaga kualitas logistik yang tersisa agar tetap layak dan aman digunakan. Namun demikian, proses penghapusan memerlukan waktu yang relatif panjang karena harus melalui prosedur administrasi dan pertimbangan teknis yang ketat.

Kondisi ini sejalan dengan teori Soleh dan Rochmansjah (2010) yang menyatakan bahwa penghapusan aset merupakan proses administratif dan legal untuk mengeluarkan aset dari daftar inventaris secara sah. Hastings (2010) juga menempatkan penghapusan sebagai tahap akhir dalam siklus manajemen aset. Dengan demikian, meskipun proses penghapusan memerlukan waktu, praktik yang dilakukan BPBD Kabupaten Sumedang dapat dinilai sudah sesuai dengan prinsip tata kelola aset publik. Ke depan, kualitas pengelolaan penghapusan ini perlu dipertahankan agar tidak menimbulkan beban administrasi maupun risiko akuntabilitas.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa manajemen logistik kedaruratan bencana banjir di BPBD Kabupaten Sumedang pada dasarnya telah dilaksanakan pada seluruh dimensi pengelolaan logistik, namun belum sepenuhnya optimal. Pada dimensi perencanaan, BPBD telah melakukan perencanaan kebutuhan logistik dan menerapkan transparansi internal, tetapi masih terkendala oleh ketepatan data inventaris dan perubahan kebutuhan lapangan yang cepat. Dimensi pengadaan telah berjalan sesuai prosedur dan skala prioritas, namun fleksibilitas dan transparansi pengadaan masih terbatas dalam menghadapi kondisi darurat. Penggunaan dan pemanfaatan logistik relatif telah mendukung kegiatan tanggap darurat, meskipun pencatatan penggunaan belum konsisten. Pada dimensi pemeliharaan dan pengamanan, kegiatan penyimpanan dan pengecekan logistik telah dilakukan, tetapi belum terjadwal secara sistematis dan berkelanjutan. Sementara itu, penghapusan logistik telah dilaksanakan sesuai ketentuan administrasi meskipun memerlukan waktu yang cukup panjang. Secara keseluruhan, manajemen logistik di BPBD Kabupaten Sumedang dapat dinilai cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan terutama pada aspek akurasi perencanaan, fleksibilitas pengadaan, ketertiban administrasi, serta sistem pemeliharaan logistik agar penanganan bencana banjir dapat berjalan lebih efektif.

REFERENCES

- Closs, D. J. (2002). *Logistical Management*. New York: McGraw-Hill.
- Farrington, L. &. (2020). *Procurement and Supply Chain Management*. London: Pearson Education
- Hastings, N. A. (2010). *Physical Asset Management*. London: Springer.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2010:152). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Newman, W. H. (1973). *Administrative Action*. New Jersey: Prentice Hall.
- Raouf, S. O. (2015). *Planning and Control of Maintenance Systems*. London: Springer.

-
- Rochmansjah, C. S. (2010). *Pengelolaan Barang Milik Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Sugiyono, J. P. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutinah, S. (2006). *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Stanislawski, S. &. (2023). *Security Management*. London: Routledge
- Terry, G. R. (1977). *Principles of management (7th ed.)*. Homewood, IL: Richard D. Irwin.
- Weele, V. (2010). *Purchasing and Supply Chain Management*. London: Cengage Learning.

INOVASI DIGITAL DALAM REFORMASI BIROKRASI DAERAH: ANALISIS IMPLEMENTASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS APLIKASI DAN WEBSITE SEBAGAI PENGUATAN GOOD GOVERNANCE

Nur Hasan^{*1}, Dini Nadila², Heru Kleitanto³, Shinta Dzauharoh⁴, Arini Permatasari⁵, Fitra Nurhakim⁶

¹Kantor Regional IX BKN Jayapura

²Universitas Pasundan

³PLN Wilayah Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo

⁴Universitas Wanita Internasional

^{5,6}Universitas Nurtanio

Email ^{*1}: nurhasan1472@gmail.com

ABSTRAK

Reformasi birokrasi daerah menuntut adanya peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan modern, inovasi digital melalui pemanfaatan aplikasi dan website menjadi strategi penting dalam transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan pola implementasi inovasi digital dalam reformasi birokrasi daerah melalui pelayanan publik berbasis aplikasi dan website, mengkaji kontribusinya terhadap penguatan prinsip *good governance*, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan pendekatan deskriptif-kualitatif melalui analisis terhadap 20 artikel ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa inovasi digital pelayanan publik di daerah umumnya diwujudkan melalui layanan administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, serta pengaduan masyarakat berbasis aplikasi dan website. Digitalisasi pelayanan terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi prosedur layanan, memperkuat akuntabilitas melalui jejak digital, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, serta memperluas ruang partisipasi masyarakat. Namun demikian, implementasi inovasi digital belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada hambatan berupa rendahnya literasi digital masyarakat, lemahnya sosialisasi, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta kesiapan sumber daya manusia aparatur yang belum merata. Dengan demikian, inovasi digital dalam pelayanan publik berpotensi memperkuat *good governance* apabila didukung oleh komitmen pemerintah daerah, integrasi sistem layanan, peningkatan kapasitas aparatur, serta edukasi literasi digital masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Inovasi digital, reformasi birokrasi, pelayanan publik, aplikasi dan website, *good governance*.

1. PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi daerah merupakan agenda strategis yang terus dikembangkan pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Pada era pemerintahan modern, birokrasi tidak lagi cukup berjalan dengan pola kerja konvensional yang bersifat administratif, hierarkis, serta berorientasi pada prosedur, tetapi dituntut mampu menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik menjadi indikator paling nyata dari keberhasilan reformasi birokrasi karena menjadi titik temu langsung antara pemerintah dan warga negara. Dalam konteks ini, inovasi digital hadir sebagai instrumen penting yang mendorong perubahan sistem birokrasi dari model pelayanan tradisional menuju model pelayanan berbasis teknologi informasi yang lebih adaptif. Hal ini sejalan dengan kajian La Ode Muhammad Ichwan Sjachrawy dkk. (2025) yang menegaskan bahwa inovasi pelayanan publik berperan strategis sebagai penggerak transformasi birokrasi karena mampu menggeser orientasi birokrasi dari kekuasaan menuju orientasi pelayanan, sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan transformasi digital melalui pemanfaatan aplikasi dan website dalam penyelenggaraan layanan publik. Digitalisasi pelayanan publik dinilai sebagai langkah strategis dalam menjawab tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan yang lebih mudah diakses, cepat, praktis, dan terjangkau. Kajian Ditasman dan Amrullah (2024) menegaskan bahwa digitalisasi melalui e-government merupakan bentuk reformasi pelayanan publik yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan serta memperkuat transparansi dan tanggung jawab administrasi publik. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya dipahami sebagai modernisasi teknologi, tetapi juga sebagai bagian dari pembaruan sistem tata kelola pemerintahan menuju pelayanan yang lebih berkualitas.

Inovasi digital dalam reformasi birokrasi daerah tidak hanya berbentuk penerapan e-government secara umum, tetapi juga berkembang menjadi berbagai inovasi spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, seperti pelayanan kependudukan, pelayanan perizinan, serta sistem pengaduan masyarakat berbasis digital. Penelitian Denok Kurniasih (2023) menunjukkan bahwa inovasi pelayanan kependudukan berbasis website di Kabupaten Banyumas memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik melalui efisiensi pelayanan, peningkatan kepercayaan masyarakat (*trust*), keandalan layanan (*reliability*), serta

dukungan warga (citizen support). Temuan ini menegaskan bahwa inovasi digital dapat memperkuat kinerja pelayanan publik secara lebih terukur dan sistematis.

Selain itu, inovasi digital juga berkembang dalam bentuk aplikasi layanan pengaduan masyarakat dan penyerap aspirasi publik. Program CETTAR berbasis digital di Jawa Timur merupakan salah satu contoh inovasi pelayanan publik yang dirancang untuk menyerap aspirasi serta pengaduan masyarakat secara online. Muhammad Mughni Labib (2022) menjelaskan bahwa inovasi tersebut telah berjalan cukup baik, namun masih menghadapi kendala berupa kurangnya sosialisasi serta implementasi yang belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi digital tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga memerlukan strategi komunikasi publik yang efektif agar layanan digital dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat.

Namun demikian, implementasi inovasi digital dalam reformasi birokrasi daerah belum sepenuhnya berjalan optimal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa meskipun banyak aplikasi dan website pelayanan publik telah dikembangkan, masih terdapat kendala yang menghambat efektivitasnya, seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital masyarakat, resistensi aparatur terhadap perubahan, serta lemahnya sosialisasi penggunaan layanan digital. Hal ini diperkuat oleh penelitian Sylvia Maulani dan Tomi Setiawan (2024) mengenai penerapan aplikasi SIPEKA di Provinsi Banten yang menunjukkan bahwa inovasi pelayanan perizinan digital belum optimal karena masyarakat masih mengalami ketidakpahaman dalam menggunakan aplikasi, pelayanan masih memakan waktu lama, serta masih terdapat kendala teknis dan kurangnya sosialisasi.

Dalam perspektif good governance, inovasi digital memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi masyarakat. Pemerintahan yang baik tidak hanya menuntut adanya sistem administrasi yang tertib, tetapi juga menuntut adanya keterbukaan informasi serta mekanisme pelayanan yang mudah diakses oleh publik. Digitalisasi pelayanan publik dapat memperkuat good governance karena mampu menciptakan keterbukaan prosedur, mempercepat proses layanan, serta menyediakan ruang partisipasi masyarakat melalui sistem pengaduan maupun interaksi digital. Namun, apabila inovasi digital tidak disertai kesiapan sumber daya manusia aparatur dan masyarakat, maka digitalisasi justru berpotensi menciptakan kesenjangan pelayanan, terutama bagi kelompok masyarakat yang belum memiliki akses teknologi maupun kemampuan literasi digital yang memadai.

Berdasarkan kondisi tersebut, inovasi digital dalam reformasi birokrasi daerah menjadi fenomena penting yang perlu dikaji secara lebih mendalam, terutama dalam konteks implementasi pelayanan publik berbasis aplikasi dan website sebagai penguatan good governance. Berbagai penelitian terdahulu telah mengungkap bahwa inovasi digital mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, tetapi masih terdapat gap dalam pemahaman mengenai pola implementasi inovasi digital di tingkat daerah, kontribusinya terhadap penguatan prinsip good governance, serta faktor-faktor yang menentukan keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, artikel ini penting untuk menyusun pemahaman konseptual melalui kajian literatur mengenai bagaimana inovasi digital dijalankan dalam reformasi birokrasi daerah.

Dengan demikian, artikel ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana bentuk dan pola implementasi inovasi digital dalam reformasi birokrasi daerah melalui pelayanan publik berbasis aplikasi dan website, bagaimana kontribusi inovasi digital terhadap penguatan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi masyarakat, serta faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam implementasi inovasi digital pelayanan publik. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis pola implementasi inovasi digital dalam reformasi birokrasi daerah melalui pelayanan publik berbasis aplikasi dan website, mengkaji kontribusinya terhadap penguatan good governance, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan hambatan yang memengaruhi keberhasilan inovasi digital pelayanan publik berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (literature review) dengan model Penelitian ini menggunakan metode *literature review* dengan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menganalisis inovasi digital dalam reformasi birokrasi daerah melalui implementasi pelayanan publik berbasis aplikasi dan website sebagai penguatan *good governance*. Metode ini dipilih karena relevan untuk menyintesis, membandingkan, serta menginterpretasikan berbagai temuan penelitian terdahulu secara komprehensif guna menghasilkan gambaran konseptual mengenai perkembangan inovasi pelayanan publik digital di pemerintah daerah.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, prosiding, dan publikasi akademik yang membahas inovasi pelayanan publik berbasis digital, e-government, transformasi birokrasi, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Literatur yang dianalisis merupakan 20 artikel ilmiah yang telah dipilih berdasarkan relevansi tema dan kesesuaian dengan fokus penelitian. Adapun kriteria

inklusi dalam pemilihan literatur meliputi: (1) artikel membahas inovasi digital pelayanan publik melalui aplikasi atau website pada instansi pemerintah pusat maupun daerah, (2) artikel mengkaji reformasi birokrasi atau dampak digitalisasi terhadap kualitas pelayanan publik, (3) artikel memuat pembahasan mengenai dimensi tata kelola pemerintahan seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat, dan (4) artikel dapat diakses secara penuh untuk mendukung analisis mendalam. Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi literatur yang tidak relevan dengan konteks pelayanan publik pemerintahan atau hanya membahas digitalisasi dalam sektor privat tanpa keterkaitan dengan reformasi birokrasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, membaca, dan mengklasifikasikan informasi penting dari setiap artikel. Tahapan analisis data dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu: pertama, melakukan inventarisasi literatur dan memahami substansi artikel secara menyeluruh. Kedua, melakukan reduksi data dengan menyeleksi bagian-bagian penting seperti tujuan penelitian, metode, hasil temuan, serta kesimpulan dari masing-masing artikel. Ketiga, melakukan kategorisasi tema berdasarkan variabel utama yang relevan, seperti bentuk inovasi digital pelayanan publik, dampak inovasi digital terhadap efektivitas pelayanan, kontribusi inovasi terhadap prinsip *good governance*, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi inovasi digital. Keempat, dilakukan sintesis temuan dengan membandingkan pola-pola hasil penelitian terdahulu untuk menghasilkan kesimpulan konseptual yang lebih terintegrasi. Kelima, dilakukan interpretasi kritis untuk merumuskan implikasi inovasi digital dalam reformasi birokrasi daerah serta relevansinya dalam penguatan praktik *good governance*.

Dengan demikian, metode *literature review* dalam penelitian ini digunakan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi inovasi digital pelayanan publik berbasis aplikasi dan website di pemerintah daerah, sekaligus mengidentifikasi kecenderungan, tantangan, serta peluang pengembangan digitalisasi pelayanan publik dalam kerangka reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Inovasi Digital dalam Reformasi Birokrasi Daerah Melalui Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi dan Website

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa implementasi inovasi digital dalam reformasi birokrasi daerah berkembang secara signifikan melalui penggunaan aplikasi dan website sebagai instrumen utama pelayanan publik. Inovasi digital tersebut tidak hanya berfungsi sebagai modernisasi layanan, tetapi juga sebagai strategi transformasi birokrasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat. Bentuk implementasi inovasi digital umumnya dilakukan melalui pengembangan sistem pelayanan berbasis e-government yang mencakup layanan administrasi kependudukan, perizinan, kesehatan, serta sistem pengaduan publik.

Salah satu bentuk implementasi inovasi digital pelayanan publik dapat dilihat dari pengembangan aplikasi pelayanan kependudukan berbasis website yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas melalui website gratiskabeh.banyumaskab.go.id. Inovasi tersebut menunjukkan perubahan mendasar dalam sistem pelayanan publik, dari pelayanan konvensional menjadi pelayanan berbasis online yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan melalui perangkat digital, khususnya smartphone. Denok Kurniasih (2023) menjelaskan bahwa inovasi ini memperlihatkan pola implementasi yang relatif efektif, ditandai dengan peningkatan efisiensi layanan serta kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

Selain itu, inovasi pelayanan publik berbasis aplikasi juga dapat dilihat dalam penerapan program CETTAR di Provinsi Jawa Timur. Program ini dikembangkan sebagai inovasi digital untuk menampung aspirasi dan pengaduan masyarakat melalui platform website dan aplikasi. Muhammad Mughni Labib (2022) menjelaskan bahwa program CETTAR merupakan inovasi layanan publik berbasis digital yang dirancang untuk mempercepat interaksi antara pemerintah dan masyarakat, terutama dalam pelayanan publik yang responsif dan terbuka. Implementasi inovasi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai memanfaatkan teknologi sebagai sarana reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Implementasi inovasi digital juga ditemukan pada berbagai daerah lain yang menerapkan sistem layanan berbasis website dalam perizinan, salah satunya melalui inovasi Jakevo di Kelurahan Cempaka Putih Barat Jakarta Pusat. Jakevo berfungsi sebagai platform pelayanan online yang menyediakan akses perizinan dan non-perizinan secara digital. Wahyuningsih dan Indra Prabhata (2024) menegaskan bahwa keberadaan layanan berbasis website seperti Jakevo memperlihatkan arah perubahan birokrasi yang mulai mengadopsi sistem pelayanan berbasis teknologi sebagai bentuk adaptasi reformasi birokrasi.

Berdasarkan kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pola implementasi inovasi digital dalam reformasi birokrasi daerah umumnya diarahkan pada: (1) penyediaan layanan publik berbasis online melalui

aplikasi atau website, (2) peralihan mekanisme pelayanan dari tatap muka menuju pelayanan digital, serta (3) peningkatan aksesibilitas layanan publik melalui sistem yang lebih fleksibel. Namun, inovasi digital ini pada dasarnya masih berada pada tahap yang beragam, mulai dari tahap pengembangan awal, tahap implementasi terbatas, hingga tahap integrasi antar sistem layanan publik.

Kontribusi Inovasi Digital dalam Pelayanan Publik terhadap Penguatan Good Governance

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa inovasi digital dalam pelayanan publik memiliki kontribusi yang kuat terhadap penguatan prinsip-prinsip good governance, terutama pada aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat. Inovasi pelayanan publik berbasis aplikasi dan website mampu mendorong pemerintah daerah untuk lebih terbuka dalam menyediakan informasi, mempercepat proses pelayanan, serta menciptakan mekanisme pelayanan yang dapat dipantau secara digital.

Dalam konteks transparansi, digitalisasi pelayanan publik memungkinkan masyarakat memperoleh informasi prosedur pelayanan secara lebih jelas dan terbuka. Sistem berbasis website atau aplikasi menyediakan akses terhadap persyaratan layanan, alur pelayanan, waktu penyelesaian, hingga status proses pelayanan. Hal ini sejalan dengan kajian Ditasman dan Amrullah (2024) yang menjelaskan bahwa e-government merupakan strategi reformasi pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan efektivitas pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi digital, serta memperkuat transparansi dan tanggung jawab administrasi publik.

Pada aspek akuntabilitas, inovasi digital memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk membangun sistem dokumentasi pelayanan yang lebih tertib dan mudah dilacak. Pelayanan berbasis aplikasi menciptakan jejak digital yang dapat digunakan untuk pengawasan internal maupun eksternal, sehingga mengurangi peluang penyimpangan prosedur serta meningkatkan akuntabilitas aparatur. Hal ini juga diperkuat oleh kajian mengenai transformasi birokrasi melalui inovasi pelayanan publik yang menegaskan bahwa inovasi digital dapat menjadi penguat akuntabilitas dan efektivitas pemerintahan. La Ode Muhammad Ichwan Sjachrawy dkk. (2025) menyatakan bahwa inovasi pelayanan publik bukan hanya pembaruan teknis, tetapi juga mendorong perubahan kultur birokrasi menuju orientasi pelayanan yang lebih terbuka dan akuntabel.

Dalam aspek efektivitas dan efisiensi, inovasi digital pelayanan publik terbukti mampu mempercepat proses pelayanan, memotong jalur birokrasi, dan mengurangi biaya administrasi. Penelitian Denok Kurniasih (2023) menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital di Kabupaten Banyumas memiliki kualitas inovasi yang baik karena mampu meningkatkan efisiensi serta memperkuat kepercayaan masyarakat. Efisiensi ini terlihat dari kemudahan akses masyarakat yang dapat melakukan pelayanan tanpa harus datang langsung ke kantor layanan.

Sementara itu, dari aspek partisipasi masyarakat, inovasi digital membuka ruang partisipasi publik melalui sistem pengaduan online dan layanan aspirasi publik. Program CETTAR di Jawa Timur merupakan salah satu contoh inovasi yang memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui kanal pengaduan berbasis digital. Program ini memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan serta aspirasi secara lebih mudah, sehingga pemerintah dapat meningkatkan responsivitasnya dalam pelayanan publik. Namun demikian, penelitian Labib (2022) juga menunjukkan bahwa partisipasi publik melalui inovasi digital masih menghadapi hambatan berupa kurangnya sosialisasi, sehingga pemanfaatan layanan digital belum maksimal.

Dengan demikian, inovasi digital dalam pelayanan publik dapat dipahami sebagai bentuk strategi penguatan good governance karena mampu meningkatkan transparansi informasi layanan, memperkuat akuntabilitas aparatur, meningkatkan efisiensi proses pelayanan, serta mendorong partisipasi masyarakat melalui kanal digital. Akan tetapi, efektivitas kontribusi inovasi digital terhadap good governance sangat dipengaruhi oleh kesiapan sistem birokrasi, infrastruktur teknologi, serta kapasitas masyarakat sebagai pengguna layanan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Inovasi Digital dalam Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi dan Website

Berdasarkan hasil kajian literatur, terdapat sejumlah faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi implementasi inovasi digital dalam pelayanan publik berbasis aplikasi dan website di pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa inovasi digital bukan hanya persoalan ketersediaan teknologi, melainkan juga berkaitan dengan kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur, kebijakan, serta tingkat penerimaan masyarakat.

Faktor pendukung utama implementasi inovasi digital adalah komitmen pemerintah daerah dalam melakukan reformasi birokrasi melalui digitalisasi pelayanan publik. Komitmen tersebut terlihat dari berbagai daerah yang mulai mengembangkan sistem pelayanan online sebagai bentuk modernisasi birokrasi. Selain itu, dukungan regulasi nasional seperti SPBE dan kebijakan digital government juga memperkuat pelaksanaan inovasi digital di daerah. Dukungan infrastruktur teknologi dan jaringan internet juga menjadi faktor pendukung penting karena pelayanan berbasis aplikasi sangat bergantung pada stabilitas sistem digital.

Namun, faktor penghambat masih menjadi tantangan utama dalam implementasi inovasi digital pelayanan publik. Salah satu hambatan yang dominan adalah rendahnya literasi digital masyarakat serta kurangnya pemahaman terhadap alur pelayanan berbasis aplikasi. Hal ini terlihat dalam penelitian Sylvia Maulani dan Tomi Setiawan (2024) mengenai aplikasi SIPEKA di Provinsi Banten, yang menyatakan bahwa inovasi perizinan digital belum berjalan optimal karena masyarakat masih mengalami ketidakpahaman terhadap proses aplikasi, kurangnya literasi digital, serta lemahnya sosialisasi penggunaan layanan.

Hambatan lainnya adalah kurangnya sosialisasi dan komunikasi publik terkait penggunaan aplikasi pelayanan. Program CETTAR di Jawa Timur, misalnya, meskipun telah berjalan cukup baik, namun masih menghadapi kendala berupa kurangnya sosialisasi sehingga implementasinya belum maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi digital sangat dipengaruhi oleh strategi komunikasi publik agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan secara optimal.

Selain itu, kesenjangan infrastruktur digital antar wilayah juga menjadi hambatan yang berpengaruh. Tidak semua daerah memiliki kualitas jaringan internet yang sama, sehingga inovasi digital cenderung lebih optimal di wilayah perkotaan dibandingkan daerah terpencil. Tantangan lainnya adalah resistensi aparatur birokrasi terhadap perubahan, terutama karena digitalisasi menuntut perubahan pola kerja, budaya organisasi, dan kemampuan teknis aparatur. Kajian La Ode Muhammad Ichwan Sjachrawy dkk. (2025) menekankan bahwa inovasi pelayanan publik memang mendorong transformasi birokrasi, tetapi masih menghadapi hambatan berupa kapasitas SDM aparatur yang rendah, ketimpangan infrastruktur digital, serta regulasi yang belum fleksibel.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan inovasi digital dalam pelayanan publik membutuhkan kesiapan sistem secara menyeluruh. Faktor pendukung seperti komitmen pemerintah, dukungan regulasi, serta ketersediaan infrastruktur harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital masyarakat, pelatihan aparatur, dan sosialisasi layanan yang masif. Jika tidak, inovasi digital hanya akan menjadi simbol modernisasi birokrasi tanpa menghasilkan dampak nyata terhadap kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan hasil kajian literatur, transformasi pelayanan publik berbasis digitalisasi melalui e-government menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi modern yang bertujuan meningkatkan efektivitas layanan, transparansi tata kelola, serta kepuasan masyarakat. Digitalisasi pelayanan publik tidak hanya memindahkan proses manual ke sistem elektronik, tetapi juga membentuk pola hubungan baru antara pemerintah dan masyarakat yang lebih cepat, terbuka, dan efisien. Penerapan e-government dipahami sebagai strategi untuk memperkuat kinerja pemerintahan dalam memberikan layanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Taufiqurokhman et al., 2023).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian *literature review* mengenai inovasi digital dalam reformasi birokrasi daerah, dapat disimpulkan bahwa implementasi pelayanan publik berbasis aplikasi dan website telah menjadi salah satu strategi penting dalam transformasi birokrasi menuju sistem pemerintahan yang lebih modern, efektif, dan responsif. Inovasi digital pada berbagai sektor pelayanan, seperti administrasi kependudukan, perizinan, hingga layanan pengaduan masyarakat, menunjukkan adanya perubahan pola pelayanan dari sistem konvensional menuju pelayanan berbasis teknologi informasi yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Digitalisasi pelayanan publik juga terbukti memberikan kontribusi terhadap penguatan prinsip-prinsip *good governance*, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta partisipasi masyarakat. Melalui sistem aplikasi dan website, pemerintah daerah dapat meningkatkan keterbukaan informasi layanan, mempercepat proses pelayanan, mengurangi potensi maladministrasi, serta menyediakan ruang interaksi publik yang lebih luas melalui kanal digital.

Namun demikian, hasil kajian juga menunjukkan bahwa implementasi inovasi digital pelayanan publik belum sepenuhnya berjalan optimal. Hambatan yang masih dominan meliputi rendahnya literasi digital masyarakat, kurangnya sosialisasi penggunaan layanan digital, keterbatasan infrastruktur teknologi di sejumlah wilayah, serta kesiapan sumber daya manusia aparatur yang belum merata. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa inovasi pelayanan digital belum memberikan dampak maksimal dan cenderung bersifat parsial atau belum terintegrasi antar instansi. Oleh karena itu, agar inovasi digital benar-benar mampu memperkuat reformasi birokrasi daerah dan mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, pemerintah daerah perlu melakukan langkah-langkah penguatan secara berkelanjutan. Pemerintah perlu meningkatkan pemerataan infrastruktur teknologi informasi, memperkuat kompetensi aparatur melalui pelatihan teknis secara periodik, serta melakukan sosialisasi dan edukasi literasi digital kepada masyarakat secara masif. Selain itu, pengembangan inovasi digital juga perlu diarahkan pada integrasi sistem pelayanan lintas instansi agar pelayanan publik lebih efisien dan tidak terfragmentasi. Terakhir, inovasi pelayanan publik berbasis aplikasi dan website harus disertai dengan sistem monitoring dan evaluasi yang terukur, sehingga implementasi inovasi

tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat praktik *good governance* di daerah.

REFERENCE

- Afdila. (2022). Digitalisasi administrasi publik sebagai salah satu perwujudan reformasi birokrasi. *JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(2), 27–32.
- Apriliani, D., Rahman, B., & Ibrahim. (2021). Digitalisasi pelayanan publik (inovasi pelayanan publik berbasis android di Kabupaten Bangka). *Sosains: Jurnal Sosial dan Sains*, 1(4), 260–269.
- Atthahara, H. (2018). Inovasi pelayanan publik berbasis e-government: Studi kasus aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1), 66–76.
- Hasanah, D. I., Novariza, E., Radiansyah, R. R., & Riaji, I. A. R. (2025). Transformasi pelayanan publik berbasis inovasi digital (studi kasus deskriptif Pemerintah Kota Semarang). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 434–444.
- Ichwan Sjachrawy, L. O. M., Thasman, Satyadharma, M., Susanti, N., & Hado. (2025). Transformasi birokrasi melalui inovasi pelayanan publik: Kajian literatur tentang reformasi dan akuntabilitas pemerintahan. *Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal*, 5(1), 37–52.
- Khan, A. (2021). Optimalisasi pelayanan publik bagi pemimpin di era digitalisasi di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 9–14.
- Kurniasih, D. (2023). Inovasi pelayanan publik melalui teknologi digitalisasi di Kabupaten Banyumas. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(4), 491–500.
- Kusmiyati, R., Ginting, R., & Thariq, M. (2023). Digitalisasi birokrasi dalam meningkatkan pelayanan publik (peluang dan tantangannya). *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial*, 7(1), 33–46.
- Labib, M. M. (2022). Inovasi layanan publik melalui program CETTAR berbasis digital dalam mewujudkan tatanan pemerintahan Jawa Timur yang baik. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 95–103.
- Maulani, S., & Setiawan, T. (2024). Inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Sistem Pelayanan Izin Terbuka Elektronik (SIPEKA) di DPMPPTSP Provinsi Banten. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(1), 10–25.
- Megawati, Ahmad, B., & Rusdi, M. (2024). Tipologi inovasi dalam layanan publik: Implementasi dan tantangan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Sinjai. *Pamarenda: Public Administration and Government Journal*, 4(2), 332–346.
- Restuana Bakti Saputri, A., & Wicaksono, F. (2025). Digitalisasi pelayanan publik melalui inovasi CAKAR (Cari Administrasi Bagi Penduduk Kuantar): Studi kasus di Kapanewon Kalasan. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 5(2), 81–90.
- Setiawan, I., & Budhi Arti, N. D. (2024). Hubungan inovasi pemerintahan terhadap restrukturisasi pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(2), 234–248.
- Taufiqurokhman, Pathony, T., Damanik, F. H. S., Nurhakim, A., & Judijanto, L. (2023). Transformasi e-government: Mengevaluasi dampak digitalisasi terhadap pelayanan publik. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 1796–1804.
- Wahyuningsih, & Prabhata, I. (2024). Pengaruh digitalisasi dan inovasi pelayanan website Jakevo terhadap kepuasan masyarakat di Kelurahan Cempaka Putih Barat Kota Jakarta Pusat. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 11(2), 244–252.

156 Hasan, Nadila, Kleitanto, Dzauharoh, Permatasari, Nurhakim
*Inovasi Digital dalam Reformasi Birokrasi Daerah: Analisis Implementasi Pelayanan Publik Berbasis
Aplikasi dan Website sebagai Penguatan Good Governance*

Yumame, J. (2024). Inovasi pelayanan publik berbasis digitalisasi: Studi kasus efektivitas penggunaan aplikasi E-Waniambey di Kota Jayapura. *Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA)*, 1(2), 187–202.

Yunaningsih, A., Indah, D., & Septiawan, F. E. (2021). Upaya meningkatkan kualitas layanan publik melalui digitalisasi. *Jurnal ALTASIA*, 3(1), 9–16.

TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK BERBASIS DIGITALISASI MELALUI E-GOVERNMENT: STRATEGI PENINGKATAN EFEKTIVITAS, TRANSPARANSI, DAN KEPUASAN MASYARAKAT DI ERA SOCIETY 5.0

Soni Sultana*¹, Wahyu², Agnia Nurul Huda³, Sahrul Gunawan⁴, Nina Fitriana Sutadi⁵,

¹Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya

²Kantor Regional III BKN Bandung

³Universitas Mandiri Subang

⁴Universitas Pasundan

⁵DPRD Kota Bandung

Email *1: soni_sultana_5757@yahoo.co.id

ABSTRAK

Transformasi pelayanan publik berbasis digitalisasi melalui e-government menjadi agenda strategis dalam reformasi birokrasi untuk menjawab tuntutan masyarakat yang menghendaki pelayanan cepat, transparan, akuntabel, serta mudah diakses. Di era Society 5.0, pemerintah dituntut tidak hanya mengadopsi teknologi digital, tetapi juga mampu mengintegrasikan inovasi pelayanan publik dengan kebutuhan warga secara adaptif dan inklusif. Artikel ini bertujuan menganalisis strategi transformasi pelayanan publik melalui penerapan e-government dalam meningkatkan efektivitas pelayanan, transparansi tata kelola, serta kepuasan masyarakat. Metode penelitian menggunakan pendekatan studi literatur dengan menelaah berbagai hasil penelitian terkait digitalisasi birokrasi, inovasi pelayanan publik, serta implementasi aplikasi layanan berbasis digital di tingkat pemerintah daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik melalui e-government mampu meningkatkan efisiensi proses administrasi, mempercepat alur layanan, memperluas akses masyarakat, serta memperkuat transparansi melalui sistem informasi berbasis teknologi. Selain itu, inovasi digital seperti aplikasi layanan kependudukan, perizinan online, dan pelayanan terpadu terbukti mendorong peningkatan kepuasan masyarakat karena meminimalkan prosedur birokrasi yang berbelit. Namun demikian, transformasi digital masih menghadapi kendala berupa keterbatasan literasi digital aparatur dan masyarakat, ketimpangan infrastruktur teknologi, serta rendahnya sosialisasi sistem layanan digital. Dengan demikian, strategi peningkatan efektivitas dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik berbasis e-government perlu didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur digital yang merata, serta kebijakan inovasi yang responsif terhadap dinamika masyarakat di era Society 5.0.

Kata Kunci: Transformasi Pelayanan Publik, Digitalisasi, E-Government, Efektivitas, Transparansi, Kepuasan Masyarakat, Society 5.0.

1. PENDAHULUAN

Transformasi pelayanan publik berbasis digitalisasi merupakan salah satu agenda strategis dalam reformasi birokrasi di Indonesia. Digitalisasi tidak hanya dimaknai sebagai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga sebagai proses perubahan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik menjadi ukuran yang paling nyata dalam menilai kinerja pemerintah, sehingga kualitas pelayanan yang lambat, prosedural, dan tidak transparan akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Dalam konteks tersebut, penerapan e-government menjadi langkah penting untuk mengatasi keterbatasan pelayanan konvensional serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik (Taufiqurokhman et al., 2023; Hasanah et al., 2025).

Berbagai literatur menunjukkan bahwa e-government merupakan strategi pemerintah dalam mengintegrasikan sistem pelayanan berbasis teknologi digital untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik. Penerapan e-government memungkinkan pemerintah menyederhanakan prosedur, mempercepat alur administrasi, serta meningkatkan ketepatan layanan melalui sistem yang terdokumentasi secara elektronik. Hal ini sejalan dengan kajian Kurniasih (2023) yang menyebutkan bahwa inovasi pelayanan publik berbasis digital dapat meningkatkan kualitas layanan melalui dimensi efisiensi, trust, reliability, serta dukungan warga (citizen support). Selain itu, studi Apriliani et al. (2021) menegaskan bahwa pelayanan publik berbasis aplikasi digital memberikan implikasi positif terhadap prosedur pelayanan, percepatan waktu penyelesaian, dan pengurangan biaya layanan. Dengan demikian, inovasi pelayanan publik berbasis digitalisasi berkontribusi langsung terhadap peningkatan efektivitas pelayanan publik di tingkat pemerintah daerah (Kurniasih, 2023; Apriliani et al., 2021).

Selain aspek efektivitas, transformasi pelayanan publik berbasis digitalisasi juga berkaitan erat dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Sistem layanan berbasis digital memungkinkan proses pelayanan dapat dipantau secara terbuka, meminimalkan interaksi tatap muka yang berpotensi menimbulkan maladministrasi, serta menyediakan rekam jejak pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Labib (2022) menegaskan bahwa inovasi pelayanan publik berbasis digital melalui program CETTAR di Jawa Timur merupakan bentuk upaya pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan pengaduan dan

aspirasi publik. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa digitalisasi pelayanan publik mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang amanah, meskipun masih menghadapi hambatan sosialisasi dan implementasi yang belum sepenuhnya optimal (Labib, 2022).

Transformasi pelayanan publik melalui e-government juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi dalam mewujudkan good governance. Hasanah et al. (2025) menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik dapat berlangsung melalui tahapan persiapan, pematangan, pemantapan, hingga pemanfaatan yang terintegrasi dalam pola Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), dan Government to Citizen (G2C). Hal ini memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan hanya penerapan teknologi semata, tetapi juga perubahan sistem pemerintahan agar lebih adaptif dan terintegrasi (Hasanah et al., 2025).

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-government masih menghadapi tantangan yang signifikan. Maulani dan Setiawan (2024) mengungkapkan bahwa inovasi pelayanan publik melalui aplikasi SIPEKA di DPMPSTSP Provinsi Banten belum berjalan optimal karena kendala berupa rendahnya literasi digital pelaku usaha, kurangnya sosialisasi, serta ketidakpahaman masyarakat terhadap prosedur penggunaan aplikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dan penerimaan masyarakat terhadap sistem digital (Maulani & Setiawan, 2024).

Selain itu, Wahyuningsih dan Prabhata (2024) menegaskan bahwa keberhasilan inovasi pelayanan berbasis website tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh karakteristik demografi masyarakat yang beragam, tingkat penerimaan pengguna, serta pengalaman masyarakat dalam menggunakan layanan digital. Penelitian tersebut membuktikan bahwa digitalisasi dan inovasi pelayanan secara signifikan memengaruhi kepuasan masyarakat, sehingga peningkatan kualitas layanan digital harus mempertimbangkan aspek sosial dan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap teknologi (Wahyuningsih & Prabhata, 2024).

Di sisi lain, kajian Ichwan Sjachrawy et al. (2025) menegaskan bahwa inovasi pelayanan publik berperan strategis dalam mendorong transformasi birokrasi dari orientasi kekuasaan menuju orientasi pelayanan. Digitalisasi tidak hanya menghasilkan perubahan teknis berupa penyederhanaan prosedur, tetapi juga memicu perubahan kultural aparatur menuju pola pikir yang lebih adaptif, kolaboratif, dan terbuka terhadap perubahan. Namun, kajian tersebut juga menunjukkan adanya hambatan utama berupa keterbatasan kapasitas SDM aparatur, ketimpangan infrastruktur digital, serta regulasi yang belum fleksibel sehingga inovasi belum berjalan secara berkelanjutan (Ichwan Sjachrawy et al., 2025).

Dalam konteks yang lebih luas, Setiawan dan Budhi Arti (2024) menjelaskan bahwa inovasi pemerintahan melalui pengembangan e-government dan kebijakan digitalisasi pelayanan publik memiliki hubungan erat dengan restrukturisasi kelembagaan. Digitalisasi mendorong pemerintah melakukan penyesuaian struktur organisasi, penguatan unit pengelola teknologi, serta peningkatan kapasitas aparatur agar dapat memenuhi tuntutan pelayanan publik modern. Akan tetapi, tantangan utama yang masih dihadapi adalah ketimpangan akses teknologi antara wilayah maju dan tertinggal, terutama di kawasan Indonesia bagian timur, serta kesenjangan kompetensi SDM dalam penguasaan teknologi digital (Setiawan & Budhi Arti, 2024).

Dengan berkembangnya Society 5.0, transformasi pelayanan publik berbasis digitalisasi semakin relevan karena masyarakat menuntut pelayanan yang lebih human-centered, terintegrasi, serta mampu memberikan pengalaman layanan yang cepat dan mudah. Dalam konteks ini, penerapan e-government harus dipahami sebagai strategi transformasi birokrasi yang tidak hanya menekankan aspek teknologi, tetapi juga penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan, serta peningkatan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. Oleh karena itu, transformasi pelayanan publik berbasis digitalisasi perlu didukung oleh strategi yang mencakup penguatan kapasitas aparatur, pembangunan infrastruktur teknologi yang merata, sosialisasi sistem digital secara intensif, serta kebijakan inovasi yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat (Taufiqurokhman et al., 2023; Maulani & Setiawan, 2024; Ichwan Sjachrawy et al., 2025).

Berdasarkan hasil studi literatur tersebut, masih terdapat kebutuhan untuk menganalisis secara lebih mendalam mengenai strategi transformasi pelayanan publik berbasis digitalisasi melalui e-government dalam meningkatkan efektivitas pelayanan, memperkuat transparansi, serta meningkatkan kepuasan masyarakat di era Society 5.0. Selain itu, penting pula untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi e-government sebagai bagian dari reformasi pelayanan publik. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana strategi transformasi pelayanan publik berbasis digitalisasi melalui e-government dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik; (2) bagaimana e-government berkontribusi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik; (3) bagaimana dampak transformasi pelayanan publik berbasis digitalisasi terhadap kepuasan masyarakat; serta (4) faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung maupun penghambat implementasi e-government dalam transformasi pelayanan publik di era Society 5.0.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*literature review*) dengan model *narrative review* yang disusun secara sistematis melalui tahapan *Systematic Literature Review (SLR)*. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai transformasi pelayanan publik berbasis digitalisasi melalui *e-government* serta strategi peningkatan efektivitas, transparansi, dan kepuasan masyarakat di era *Society 5.0*. Metode *literature review* relevan digunakan karena penelitian ini berfokus pada analisis konseptual dan sintesis hasil penelitian terdahulu, sehingga dapat mengidentifikasi pola implementasi, tantangan, dan rekomendasi penguatan kebijakan *e-government* berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang tersedia (Ditasman & Amrullah, 2024).

Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, prosiding, serta dokumen akademik yang berkaitan dengan digitalisasi pelayanan publik, inovasi pelayanan publik, reformasi birokrasi, *e-government*, serta kepuasan masyarakat. Literatur yang digunakan dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri sumber-sumber ilmiah yang relevan. Proses pencarian literatur dilakukan menggunakan kata kunci seperti “digitalisasi pelayanan publik”, “*e-government*”, “inovasi pelayanan publik”, “transformasi birokrasi”, “*good governance*”, dan “kepuasan masyarakat”. Untuk menjaga relevansi terhadap konteks perkembangan teknologi pemerintahan terkini, literatur yang diprioritaskan adalah publikasi dalam rentang tahun 2018 hingga 2025 yang membahas implementasi *e-government* dan inovasi pelayanan publik di berbagai daerah (Atthahara, 2018; Hasanah et al., 2025).

Proses kajian literatur dilakukan melalui tahapan sistematis yang mencakup identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan inklusi literatur. Pada tahap identifikasi, peneliti mengumpulkan berbagai artikel yang sesuai dengan tema penelitian. Selanjutnya dilakukan penyaringan dengan menyeleksi literatur berdasarkan kesesuaian judul dan abstrak dengan fokus penelitian. Literatur yang lolos tahap ini kemudian diuji kelayakannya melalui pembacaan isi secara menyeluruh untuk memastikan bahwa artikel memuat pembahasan mengenai efektivitas pelayanan publik digital, transparansi birokrasi, inovasi pelayanan publik, maupun kepuasan masyarakat. Literatur yang memenuhi kriteria tersebut kemudian dimasukkan sebagai bahan utama analisis (Ditasman & Amrullah, 2024).

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan menelaah substansi literatur secara mendalam untuk menemukan tema-tema utama, mengelompokkan hasil temuan, serta menyusun sintesis konseptual. Fokus analisis diarahkan pada strategi transformasi pelayanan publik berbasis digitalisasi melalui *e-government*, kontribusinya terhadap efektivitas dan transparansi, serta dampaknya terhadap kepuasan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis faktor pendukung dan penghambat implementasi *e-government*, seperti literasi digital aparaturnya dan masyarakat, ketersediaan infrastruktur, serta intensitas sosialisasi layanan digital. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan pemetaan komprehensif mengenai implementasi *e-government* di Indonesia sekaligus menawarkan rekomendasi strategis untuk memperkuat pelayanan publik digital di era *Society 5.0* (Kurniasih, 2023; Maulani & Setiawan, 2024; Ichwan Sjachrawy et al., 2025).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Transformasi Pelayanan Publik Berbasis Digitalisasi melalui E-Government dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik

Hasil studi literatur menunjukkan bahwa strategi transformasi pelayanan publik melalui *e-government* dilakukan melalui pengembangan inovasi layanan berbasis digital yang mampu mempercepat proses administrasi, menyederhanakan prosedur pelayanan, serta meningkatkan efisiensi birokrasi. Digitalisasi pelayanan publik memberikan kemudahan akses bagi masyarakat karena layanan dapat dilakukan tanpa harus hadir langsung ke kantor pemerintahan. Hal ini terbukti dari kajian Apriliani et al. (2021) yang menemukan bahwa inovasi pelayanan publik berbasis aplikasi android di Kabupaten Bangka memberikan dampak positif pada prosedur pelayanan, percepatan waktu penyelesaian, dan efisiensi biaya layanan. Dengan demikian, pelayanan publik berbasis digital mampu meningkatkan efektivitas pelayanan karena mengurangi beban administratif dan mempercepat layanan pemerintah kepada masyarakat.

Selain itu, Kurniasih (2023) menegaskan bahwa inovasi pelayanan publik berbasis digital di Kabupaten Banyumas melalui layanan online administrasi kependudukan telah mengubah sistem pelayanan dari manual menjadi sistem yang lebih efektif. Efektivitas tersebut ditunjukkan melalui dimensi efisiensi pelayanan, dimensi keandalan (*reliability*), dimensi kepercayaan (*trust*), serta dimensi dukungan warga (*citizen support*). Layanan digital dinilai mampu mempercepat pemrosesan administrasi kependudukan sekaligus meningkatkan kualitas layanan pemerintah daerah. Dengan demikian, strategi transformasi pelayanan publik melalui *e-government* menuntut perubahan sistem kerja birokrasi agar mampu mengadopsi teknologi sebagai instrumen pelayanan yang efektif.

Dalam konteks implementasi yang lebih luas, Hasanah et al. (2025) menjelaskan bahwa transformasi pelayanan publik berbasis inovasi digital dapat dilakukan melalui tahapan persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas e-government tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aplikasi, tetapi juga oleh kesiapan sistem pelayanan yang terintegrasi, evaluasi berkala, dan interoperabilitas antar sistem pelayanan. Dengan demikian, strategi e-government dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik harus dibangun secara bertahap dan berkelanjutan.

Kontribusi E-Government dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa e-government berkontribusi besar dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik. Pelayanan berbasis digital memungkinkan proses pelayanan lebih terbuka, terdokumentasi, serta dapat dipantau oleh masyarakat secara langsung melalui sistem elektronik. Hal ini memberikan peluang bagi pemerintah untuk membangun kepercayaan publik karena pelayanan dapat dilakukan secara lebih jelas, cepat, dan terukur. Ditasman dan Amrullah (2024) menyatakan bahwa pemanfaatan e-governance menciptakan efisiensi serta meningkatkan transparansi dalam pekerjaan pejabat publik karena seluruh aktivitas pelayanan terdokumentasi dalam sistem digital. Dengan demikian, digitalisasi dapat meminimalkan peluang penyimpangan prosedur dan maladministrasi.

Selain itu, Taufiqurokhman et al. (2023) menegaskan bahwa transformasi e-government membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah tidak lagi menjadi aktor tunggal yang mengendalikan informasi, tetapi menjadi penyedia layanan yang harus terbuka dan responsif terhadap kebutuhan publik. Sistem digital memungkinkan masyarakat mengakses informasi layanan, prosedur, serta status pelayanan secara lebih transparan. Dengan demikian, e-government berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memperkuat transparansi dan memperbaiki kualitas tata kelola pelayanan publik.

Setiawan dan Budhi Arti (2024) juga menjelaskan bahwa inovasi pemerintahan melalui e-government, e-budgeting, serta program smart city mampu memperbaiki transparansi dan efisiensi pelayanan publik. Digitalisasi mendorong restrukturisasi kelembagaan agar sistem kerja pemerintah lebih terbuka dan dapat diawasi. Namun demikian, efektivitas transparansi melalui digitalisasi tetap membutuhkan dukungan regulasi dan penguatan sistem kelembagaan agar akuntabilitas pelayanan dapat berjalan secara konsisten.

Dampak Transformasi Pelayanan Publik Berbasis Digitalisasi terhadap Kepuasan Masyarakat

Berdasarkan hasil kajian literatur, transformasi pelayanan publik berbasis digitalisasi memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat meningkat karena layanan digital memberikan kemudahan akses, mempercepat penyelesaian administrasi, serta mengurangi biaya dan waktu yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Wahyuningsih dan Prabhata (2024) membuktikan bahwa digitalisasi dan inovasi pelayanan berbasis website Jakevo berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan masyarakat. Digitalisasi terbukti meningkatkan kepuasan masyarakat karena layanan menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan dibandingkan pelayanan konvensional. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik berbasis e-government berbanding lurus dengan tingkat kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan.

Kurniasih (2023) juga menunjukkan bahwa layanan digital berbasis website di Banyumas memberikan dampak positif terhadap masyarakat karena meningkatkan kepercayaan dan dukungan warga. Sistem pelayanan online dinilai mampu mengurangi hambatan birokrasi yang berbelit, sehingga masyarakat lebih puas dalam mengakses layanan administrasi kependudukan. Dengan demikian, kepuasan masyarakat menjadi outcome penting dari transformasi pelayanan publik berbasis digitalisasi karena layanan semakin efektif, cepat, dan mudah diakses.

Di sisi lain, kepuasan masyarakat dalam pelayanan digital juga dipengaruhi oleh kesiapan masyarakat dalam memahami sistem layanan berbasis teknologi. Wahyuningsih dan Prabhata (2024) menegaskan bahwa karakteristik demografi masyarakat yang beragam menyebabkan perbedaan tingkat adaptasi terhadap pelayanan digital. Hal ini berarti bahwa kepuasan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh tingkat literasi digital masyarakat dan kualitas sosialisasi pemerintah terhadap inovasi pelayanan berbasis digital.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Transformasi Pelayanan Publik Berbasis Digitalisasi melalui E-Government

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa implementasi e-government dalam transformasi pelayanan publik dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung utama adalah komitmen pemerintah dalam melakukan inovasi pelayanan publik, ketersediaan sistem teknologi yang memadai, serta penguatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan layanan digital. Hasanah et al. (2025) menegaskan bahwa keberhasilan transformasi pelayanan publik di Kota Semarang dipengaruhi oleh adanya

tahapan implementasi yang sistematis serta evaluasi berkelanjutan yang memperkuat integrasi sistem layanan digital. Dengan demikian, dukungan kelembagaan dan strategi implementasi bertahap menjadi faktor penting dalam keberhasilan digitalisasi pelayanan publik.

Namun demikian, faktor penghambat implementasi e-government masih cukup dominan, terutama terkait keterbatasan literasi digital, kurangnya sosialisasi layanan digital, serta ketimpangan infrastruktur teknologi. Maulani dan Setiawan (2024) mengungkapkan bahwa implementasi aplikasi SIPEKA di Provinsi Banten belum optimal karena masyarakat masih kurang memahami alur aplikasi, literasi digital pelaku usaha masih rendah, serta sosialisasi pemerintah belum berjalan maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi yang baik tidak akan efektif apabila masyarakat tidak siap menggunakan sistem digital yang disediakan.

Selain itu, Labib (2022) juga menemukan bahwa program CETTAR berbasis digital di Jawa Timur masih menghadapi hambatan berupa kurangnya sosialisasi dan implementasi yang belum sepenuhnya maksimal. Hambatan ini menegaskan bahwa keberhasilan e-government sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi publik pemerintah dalam membangun pemahaman masyarakat terhadap layanan digital.

Faktor penghambat lainnya adalah ketimpangan akses teknologi antar wilayah. Setiawan dan Budhi Arti (2024) menjelaskan bahwa masih terdapat kesenjangan akses teknologi antara daerah maju dan daerah tertinggal, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Hal ini menyebabkan penerapan e-government belum merata sehingga transformasi pelayanan publik digital masih berjalan timpang. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur digital serta penguatan kapasitas SDM aparatur menjadi prasyarat utama untuk memastikan keberhasilan transformasi pelayanan publik berbasis digitalisasi di seluruh wilayah.

4. KESIMPULAN

Transformasi pelayanan publik berbasis digitalisasi melalui e-government merupakan strategi penting dalam reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik di era Society 5.0. Digitalisasi terbukti mampu mempercepat proses pelayanan, menyederhanakan prosedur birokrasi, memperluas akses masyarakat terhadap layanan pemerintah, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui sistem pelayanan yang terdokumentasi secara elektronik. Selain itu, pelayanan publik berbasis digital memberikan dampak positif terhadap kepuasan masyarakat karena layanan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. Namun demikian, implementasi e-government masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya literasi digital, kurangnya sosialisasi, serta ketimpangan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat integrasi sistem layanan antarinstansi, meningkatkan kualitas aplikasi atau website agar lebih ramah pengguna, memperluas keterbukaan informasi publik, serta menyediakan mekanisme pengaduan digital yang efektif. Selain itu, peningkatan literasi digital bagi aparatur dan masyarakat melalui pelatihan berkelanjutan serta pemerataan infrastruktur digital harus menjadi prioritas, disertai evaluasi rutin agar sistem pelayanan publik digital dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.

REFERENCE

- Afdila. (2022). Digitalisasi administrasi publik sebagai salah satu perwujudan reformasi birokrasi. *JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(2), 27–32.
- Apriliani, D., Rahman, B., & Ibrahim. (2021). Digitalisasi pelayanan publik (inovasi pelayanan publik berbasis android di Kabupaten Bangka). *Sosains: Jurnal Sosial dan Sains*, 1(4), 260–269.
- Atthahara, H. (2018). Inovasi pelayanan publik berbasis e-government: Studi kasus aplikasi Ogan Lopian Dinas Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(1), 66–76.
- Hasanah, D. I., Novariza, E., Radiansyah, R. R., & Riaji, I. A. R. (2025). Transformasi pelayanan publik berbasis inovasi digital (studi kasus deskriptif Pemerintah Kota Semarang). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 434–444.
- Ichwan Sjachrawy, L. O. M., Thasman, Satyadharma, M., Susanti, N., & Hado. (2025). Transformasi birokrasi melalui inovasi pelayanan publik: Kajian literatur tentang reformasi dan akuntabilitas pemerintahan. *Parabela: Jurnal Ilmu Pemerintahan & Politik Lokal*, 5(1), 37–52.
- Khan, A. (2021). Optimalisasi pelayanan publik bagi pemimpin di era digitalisasi di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 9–14.

- Kurniasih, D. (2023). Inovasi pelayanan publik melalui teknologi digitalisasi di Kabupaten Banyumas. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(4), 491–500.
- Kusmiyati, R., Ginting, R., & Thariq, M. (2023). Digitalisasi birokrasi dalam meningkatkan pelayanan publik (peluang dan tantangannya). *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi dan Sosial*, 7(1), 33–46.
- Labib, M. M. (2022). Inovasi layanan publik melalui program CETTAR berbasis digital dalam mewujudkan tatanan pemerintahan Jawa Timur yang baik. *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 95–103.
- Maulani, S., & Setiawan, T. (2024). Inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Sistem Pelayanan Izin Terbuka Elektronik (SIPEKA) di DPMPTSP Provinsi Banten. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(1), 10–25.
- Megawati, Ahmad, B., & Rusdi, M. (2024). Tipologi inovasi dalam layanan publik: Implementasi dan tantangan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Sinjai. *Pamarenda: Public Administration and Government Journal*, 4(2), 332–346.
- Restuana Bakti Saputri, A., & Wicaksono, F. (2025). Digitalisasi pelayanan publik melalui inovasi CAKAR (Cari Administrasi Bagi Penduduk Kuantar): Studi kasus di Kapanewon Kalasan. *Journal of Governance and Policy Innovation*, 5(2), 81–90.
- Setiawan, I., & Budhi Arti, N. D. (2024). Hubungan inovasi pemerintahan terhadap restrukturisasi pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 14(2), 234–248.
- Taufiqurokhman, Pathony, T., Damanik, F. H. S., Nurhakim, A., & Judijanto, L. (2023). Transformasi e-government: Mengevaluasi dampak digitalisasi terhadap pelayanan publik. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 1796–1804.
- Wahyuningsih, & Prabhata, I. (2024). Pengaruh digitalisasi dan inovasi pelayanan website Jakevo terhadap kepuasan masyarakat di Kelurahan Cempaka Putih Barat Kota Jakarta Pusat. *Jurnal Reformasi Administrasi*, 11(2), 244–252.
- Yumame, J. (2024). Inovasi pelayanan publik berbasis digitalisasi: Studi kasus efektivitas penggunaan aplikasi E-Waniambey di Kota Jayapura. *Journal of Governance and Public Administration (JoGaPA)*, 1(2), 187–202.
- Yunaningsih, A., Indah, D., & Septiawan, F. E. (2021). Upaya meningkatkan kualitas layanan publik melalui digitalisasi. *Jurnal ALTASIA*, 3(1), 9–16.

SEMINAR NASIONAL FISIP UNSAP

**"MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH
BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL"**